



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021- 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pasaman Barat Npmor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan :

- a. penjabaran dari Visi, Misi dan Program yang memuat Tujuan, Sasara, Startegi, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, RTRW, dan RPJMN Tahun 2020-2024; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam melaksanakan program

pembangunan.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I: Pendahuluan;
 - b. BAB II: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III: Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V: Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI: Stratregi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX: Penutup.
- (2) Penjabaran dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian daanevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat

dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2021



Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARATTAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2 / 56 / 2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. PENJELASAN UMUM

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun periode masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 memuat isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan indikator kinerja daerah yang akan dicapai. Pelaksanaan pembangunan daerah pada periode RPJMD tahun 2021-2026 tersebut diharapkan mampu membawa dan mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021-2026. Demikian juga bagi penyelenggara pemerintahan daerah maka RPJMD tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD dan Renstra PD.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasannya, maka RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun secara menyeluruh dan terpadu, berkeadilan, responsif, partisipatif, aspiratif, efisien, efektif, terukur, dapat dilaksanakan, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dilakukan melalui serangkaian penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan rancangan akhir dan penetapan, yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan

pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 2 Tahun 2021
 Tanggal : 25 Agustus 2021
 Tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah Tahun 2021-2026

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar dokumen	I-5
1.3.1 Amanat RPJMN Tahun 2020-2024	I-6
1.3.2 Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	I-7
1.3.3 Amanat RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025	I-10
1.3.4 Amanat RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-15
1.5. Sistematika Penulisan	I-16
 BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.2. Demografi	II-39
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-44
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-44
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-57
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-62
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-63
2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-63
2.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-84
2.3.3. Urusan Pilihan	II-105
2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan	II-112
2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-115

2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-121
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah	II-121
2.5.	Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	II-128
BAB 3	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016-2021	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-2
3.1.2.	Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah	III-16
3.1.3.	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	III-18
3.2.	Kebijakan Keuangan RPJMD Tahun 2021-2026	III-20
3.2.1.	Belanja Aparatur	III-20
3.2.2.	Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas	III-22
3.3.	Neraca Daerah	III-25
3.4.	Kerangka Pendanaan	III-30
BAB 4	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV-1
4.1.1.	Kesejahteraan Masyarakat	IV-1
4.1.2.	Kesejahteraan Sosial.....	IV-5
4.1.3.	Permasalahan Pembangunan Menurut RPJPD	IV-6
4.1.4.	Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan	IV-6
4.1.4.1	Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-7
4.1.4.2	Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemerintah Wajib Tetapi Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	IV-12
4.1.4.3	Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pilihan	IV-28
4.1.4.4	Permasalahan Pembangunan pada Urusan Penunjang	IV-31
4.1.5.	Daya Saing Daerah	IV-33
4.1.6.	Pembangunan Berkelanjutan	IV-33
4.2.	Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat	IV-34
BAB 5	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	V-1
5.1.	Visi	V-1
5.2.	Misi	V-3
5.3.	Tujuan dan Sasaran	V-9
5.4.	Sinkronisasi Visi-Misi RPJMD dengan Visi-Misi RPJPD, RPJMD Propinsi, dan RPJMN	V-15
BAB 6	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
6.2.	Program Unggulan Pasaman Barat	VI-27

6.3.	Program Pembangunan Daerah	VI-41
BAB 7	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT	
	DAERAH	VII-1
7.1.	Kerangka Pendanaan	VII-1
BAB 8	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
8.1.	Indikator Kinerja Utama	VIII-1
8.2.	Indikator Kinerja Daerah	VIII-3
BAB 9	PENUTUP	IX-1
9.1.	Pedoman Transisi	IX-1
9.2.	Kaidah Pelaksanaan	IX-2
Lampiran 1	Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten Pasaman Barat,	
	Provinsi, Nasional	X-1
Lampiran 2	Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Provinsi	
	dan Kabupaten/Kota Terhadap Program Prioritas Nasional	X-2

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Data Wilayah Administratif Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-2
2.2 Daftar Jorong Tertinggal, Berkembang, dan Perlakuan Khusus di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-4
2.3 Nama Gunung Per-Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat	II-5
2.4 Kondisi Topografi Kabupaten Pasaman Barat	II-6
2.5 Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pasaman Barat	II-7
2.6 Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut (DPL) Per Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat	II-8
2.7 Perbandingan DAS di Kabupaten Pasaman Barat	II-10
2.8 Sungai di Kabupaten Pasaman Barat	II-11
2.9 Debit Maksimal dan Rata-Rata Aliran Air Sungai di Kabupaten Pasaman Barat ...	II-14
2.10 Debit Sungai Utama di Kabupaten Pasaman Barat	II-15
2.11 Kondisi Jenis Tanah Umum Kabupaten Pasaman Barat.....	II-17
2.12 Luas Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018	II-18
2.13 Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015-2020 (Ha)	II-19
2.14 Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 (ha).....	II-21
2.15 Banyaknya Bencana Alam Menurut Kejadian di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-22
2.16 Risiko Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016	II-23
2.17 Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Pasaman Barat	II-25
2.18 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-40
2.19 Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-41
2.20 Jumlah Penduduk Menurut Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-42
2.21 Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-44
2.22 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-46
2.23 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)	II-49
2.24 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2020 (Persen)	II-52

2.25.	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-53
2.26.	<i>Analisa Location Quotien (LQ)</i> Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-54
2.27.	Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-60
2.28.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020.....	II-60
2.29.	Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-62
2.30.	Cakupan Kepemilikan JKN Kabupaten Pasaman Barat (%) Tahun 2016-2020	II-66
2.31.	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2021 Kabupaten Pasaman Barat	II-67
2.32.	APM, APK dan APS Menurut Kelompok Usia Sekolah (persen) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-69
2.33.	Angka Partisipasi Kasar PAUD (persen) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-70
2.34.	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 10.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-72
2.35.	Angka Kematian Ibu per 10.000 kelahiran hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-73
2.36.	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-74
2.37.	Angka Kematian Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-76
2.37.	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2019	II-76
2.38.	Angka Kematian Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-77
2.39.	Indikator Intervensi Gizi Spesifik Terkait Stunting di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020	II-78
2.40.	Indikator Intervensi Gizi Sensitif dan OPD Penanggung Jawab di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020	II-80
2.41.	Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit per 1000 penduduk Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020	II-80
2.42.	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kendisi Baik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-81
2.43.	Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kendisi Baik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-82

2.44.	Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-83
2.45.	Kinerja Pemenuhan SPM Air Minum Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-84
2.46.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-84
2.47.	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-87
2.48.	Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-88
2.49.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-89
2.50.	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-89
2.51.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-91
2.52.	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (Rp. juta) Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-92
2.53.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 1000 penduduk perempuan) Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-93
2.54.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPR Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-94
2.55.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-94
2.56.	Indikator Urusan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	II-95
2.57.	Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-96
2.58.	Persentase Sampah Yang Tertangani Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II- 97
2.59.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasaman Barat . Tahun 2016-2020	II-98
2.60.	Perkembangan Kepemilikan KTP Elektronik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-99
2.61.	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-100
2.62.	Perkembangan Kepemilikan Akta Kematian di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-100
2.63.	Perkembangan Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-101
2.64.	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-102

2.65.	Status Nagari di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020	II-103
2.66.	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 ...	II-103
2.67.	Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-105
2.68.	Persentase Koperasi aktif Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-106
2.69.	Capaian Pembangunan Bidang Kepemudaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-108
2.70.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 .	II-110
2.71.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-112
2.72.	Indikator Urusan Perikanan Tahun 2016-2020	II-113
2.73.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-115
2.74.	Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-116
2.75.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-117
2.76.	Indikator Urusan Keuangan dan Aset Tahun 2016-2020	II-121
2.77.	Persentase Realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-125
2.78.	Indikator Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2015-2020	II-126
2.79.	Indikator Urusan Pengawasan Tahun 2015-2020	II-126
2.80.	Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-127
2.81.	Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 ...	II-129
2.82.	Capaian Standar Pelayanan Minimum pada Sub-Urusan Kebencanaan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020	II-131
2.83.	Capaian SPM Bidang Perumahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-132
2.84.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Kabupaten Pasaman Barat 2018-2020	II-133
2.85.	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020.....	II-135
2.86.	Contoh Jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat	II-136
2.87.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-137

2.88.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-139
2.89.	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-141
2.90.	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-145
2.91.	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan	II-145
2.92.	Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional (SS) di Kabupaten Pasaman Barat	II-148
3.1.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-2
3.2.	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-6
3.3.	Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (%)	III-8
3.4.	Efektifitas Pengelolaan Pendapatan dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-9
3.5.	Realisasi Belanja Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-13
3.6.	Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-15
3.7.	Perbandingan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 - 2019	III-17
3.8.	Realisasi Pembiayaan Daerah APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016 - 2019	III-19
3.9.	Realisasi Belanja Aparatur Tahun 2017 - 2020	III-21
3.10.	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Tahun 2016-2019	III-24
3.11.	Perkembangan Neraca Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2019 (Rp juta)	III-26
3.12.	Rasio Keuangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2019 (%)	III-30
3.13.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2025	III-32
4.1.	Perkembangan Prevalensi <i>Stunting</i> (%) dan Jumlah Anak Pendek dan Sangat Pendek Menurut e-PPGBM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020	IV-3
4.2.	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020	IV-8
4.3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	IV-12

4.4.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	IV-14
4.5.	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	IV-16
4.6.	Capaian Bidang Persandian Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	IV-26
4.7.	Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	IV-38
4.8.	Strukturisasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat	IV-40
5.1.	Penjabaran Kata Kunci Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	V-4
5.2.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat	V-11
5.3.	Persandingan Visi Misi dan Prioritas pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan RPJMN	V-16
6.1.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-1
6.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-4
6.3.	Wilayah Perbatasan di Kabupaten Pasaman Barat	VI-26
6.4.	Langkah Strategis Peningkatan Kepesertaan JKN di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-28
6.5.	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021	VI-28
6.6.	Langkah Strategis Pelaksanaan Program PASBAR MENGAJI di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-32
6.7.	Langkah Strategis Pelaksanaan Pelaksanaan Sub Program Food Estate di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-36
6.8.	Langkah Strategis Program 10.000 <i>Milenial Entrepreneur</i> dan <i>Women Entrepreneur</i> di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-38
6.9.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat	VI-42
6.10.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Pasaman Barat	VI-43
6.11.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat	VI-44
6.12.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Pasaman Barat	VI-45
6.13.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Pasaman Barat	VI-46

6.14.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendorong Inovasi Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pasaman Barat Program	VI-47
6.15.	Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengurangi Rata-Rata Waktu Pelayanan Bagi Masyarakat (di Kabupaten Pasaman Barat)	VI-47
6.16.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Aktivitas Keagamaan di Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	VI-48
6.17.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengintegrasikan Nilai Adat dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	VI-49
6.18.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Menjamin Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	V-50
6.19.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mencegah dan Mengakhiri Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan, Anak, Lansia, dan Penyandang Disabilitas dimana pun di Kabupaten Pasaman Barat	VI-51
6.20.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pemberdayaan dan Ketahanan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	VI-52
6.21.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Memastikan Tidak Ada Anak Usia Sekolah Yang Tidak Bersekolah Di Kabupaten Pasaman Barat	VI-54
6.22.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Di Kabupaten Pasaman Barat	VI-54
6.23.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	VI-55
6.24.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Memastikan Setiap Penduduk Mendapatkan Akses yang Sama Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat	VI-55
6.25.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat	VI-56
6.26.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Perbaikan Status Gizi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat	VI-57
6.27.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Pasaman Barat	VI-58
6.28.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Mengurangi Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Barat	VI-59
6.29.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat	VI-61
6.30.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Menyediakan Sistem Perlindungan Bagi Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat	VI-61
6.31.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperluas Lapangan Kerja, dengan Cara Mendorong Penanaman Modal dan Promosi Peluang Investasi	

	Sesuai Komoditi Unggulan di Kabupaten Pasaman Barat	VI-62
6.32.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Pangan	VI-63
6.33.	Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat	VI-63
6.34.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Hilirisasi Komoditas Unggulan Lokal di Kabupaten Pasaman Barat	VI-65
6.35.	Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Sektor Strategis	VI-66
6.36.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VI-68
7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	VII-1
7.2.	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VII-2
8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat	VIII-2
8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1. Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
2.1. Peta Orientasi Kabupaten Pasaman Barat	II-2
2.2. Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat	II-3
2.3. Peta Topografi Kabupaten Pasaman Barat.....	II-6
2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pasaman Barat	II-7
2.5. Peta Geologi Kabupaten Pasaman Barat	II-9
2.6. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasaman Barat	II-11
2.7. Peta Isohyet Curah Hujan Kabupaten Pasaman Barat	II-16
2.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat	II-20
2.9. Peta Bahaya Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasaman Barat	II-23
2.10. Peta Kerawanan Bencana Tsunami Kabupaten Pasaman Barat	II-26
2.11. Peta Rawan Bencana Gunung Api Kabupaten Pasaman Barat	II-27
2.12. Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat	II-28
2.13. Peta Bahaya Tsunami di Kabupaten Pasaman Barat	II-29
2.14. Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasaman Barat	II-30
2.15. Peta Bahaya Bencana Kekeringan Kabupaten Pasaman Barat	II-31
2.16. Peta Bahaya Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Pasaman Barat....	II-32
2.17. Peta Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Kabupaten Pasaman Barat	II-33
2.18. Peta Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kabupaten Pasaman Barat	II-34

DAFTAR GRAFIK

	Hal
2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur pada Tahun 2019	II-43
2.2a. Pertumbuhan PDRB (persen) Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020	II-51
2.2b. Posisi Relatif Pertumbuhan PDRB (Persen) Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II-51
2.3a. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020.....	II-56
2.3b. Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-56
2.4a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Score)	II-57
2.4b. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020	II-57
2.5a. Perkembangan IPG Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2020	II-58
2.5b. Posisi Relatif IPG Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II-58
2.6a. Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-58
2.6b. Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-58
2.7a. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-59
2.7b. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-59
2.8a. Perkembangan IDG Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2019	II-61
2.8b. Posisi Relatif IDG Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II-61
2.9. Posisi Relatif Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat Tahun 2020	II-63
2.10. Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-64
2.11. Posisi Relatif Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (tahun) Kabupaten Pasaman Barat	II-64
2.12. Perkembangan LPP (%) Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-65
2.13a. Perkembangan Angka Melek Huruf (%) Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-70

2.13b.	Perbandingan AMH Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-70
2.14.	Posisi Relatif Angka Melek Huruf (persen) Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020	II-71
2.15.	Posisi Relatif Prevalensi <i>Stunting</i> Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dan Tahun 2018	II-79
2.16.	Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 .	II-85
2.17a.	Perkembangan Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-107
2.17b.	Perkembangan Rasio Usaha Mikro di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-107
2.18.	Perkembangan Nilai Realisasi Investasi (Rp Milyar) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-109
2.19.	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-110
2.20a.	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-111
2.20b.	Jumlah Klub Olah Raga Aktif Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-111
2.21a.	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-113
2.21b.	Perkembangan Pertambahan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-113
2.21.	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-114
2.22.	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-116
2.23.	Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-119
2.24.	Perkembangan Jumlah SIUP yang dikeluarkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-121
2.25.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-12
2.26.	Perkembangan Jumlah IKM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-123
2.27a.	Perkembangan Kontribusi PDRB dari sektor Industri Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-123
2.27b.	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-123

2.28.	Perkembangan Persentase OPD dengan Nilai Dokumen Perencanaan Minimal Baik Di Kabupaten Pasaman Barat	II-125
2.29.	Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-130
2.30.	Cakupan Pemenuhan SPM Air Minum Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-134
2.31.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-138
2.32.	Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-140
2.31a.	Perkembangan Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan Minimal D1/ Sederajat menurut jenis kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-147
2.31b.	Perkembangan Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan Minimal D1/ Sederajat di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021	II-147
2.33.	Capaian Indikator TPB/SDGs di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-148
2.34.	Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020	II-150
3.1.	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	II-3
3.2.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020	III-22



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Risnawanto, SE dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Oleh sebab itu, RPJMD Pasaman Barat ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2021. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Nomor 640/16/SJ Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, periodisasi RPJMD bagi daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, RPJMD Pasaman Barat disusun untuk periode 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Penyusunan RPJMD dengan pendekatan teknokratik telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD memberikan arahan kebijakan pembangunan bagi seluruh pemangku kepentingan tentang kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah yang dimulai pada tahun 2021. Pendekatan partisipatif penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kemudian dibahas bersama DPRD yang menggunakan pendekatan politis.

Saat ini pembangunan nasional memasuki arah pembangunan jangka panjang ke-IV yang tertuang ke dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang melalui penekanan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia



berkualitas serta peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Pasaman Barat menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat (terakhir) dalam pencapaian sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025. Namun pada tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, sehingga krisis ekonomi dan krisis sosial mengancam dunia secara global termasuk Indonesia secara umum dan Kabupaten Pasaman Barat secara khusus. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 harus memperhitungkan penanganan dan pencegahan Covid-19.

Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan nasional maupun pembangunan provinsi, dengan tetap mengedepankan pada kekhasan dan sasaran pembangunan daerah sesuai permasalahan dan isu strategis Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu sesuai dengan RPJPD, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan terus meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 ini telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penyusunan RPJMD Teknokratik, Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimana analisis hasil-hasil pembangunan dan permasalahan serta isu strategis daerah terlebih dahulu dievaluasi dan dianalisis, dan kemudian disempurnakan menjadi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hal ini juga tercantum dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD, ini sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Pasaman Barat disusun bersamaan dengan penyusunan RPJMD Pasaman Barat 2021 - 2026. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD, menjelaskan bahwa pengkajian pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah, capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang relevan serta



pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha serta akademisi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan RPMJD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan Penganggaran;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



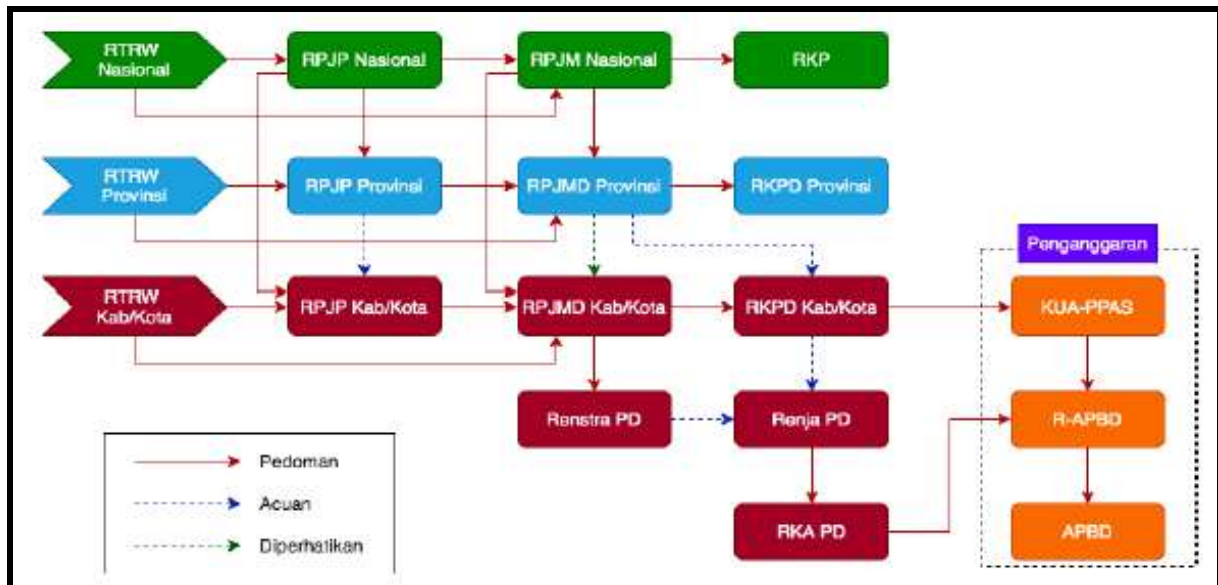
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan/atau jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

1.3. Hubungan Antar dokumen

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, berpedoman kepada RPJPD, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan RPJMN. Pengintegrasian setiap dokumen perencanaan harus memiliki keselarasan dalam pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi dasar perumusan dokumen perencanaan terstruktur seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Sesuai dengan Gambar 1.1 bahwa penyusunannya RPJMD harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat memperhatikan dan memuat kebijakan rencana dan program yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasaman Barat.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), target pencapaian TPB/SDGs dan perencanaan pembangunan Propinsi Sumatera Barat serta integrasi KLHS Kabupaten Pasaman Barat ke dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat.



Gambar 1.1

Diagram Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Selanjutnya, RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam RKPD Kabupaten Pasaman Barat. Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Renja PD.

1.3.1 Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.



Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0%;
2. Tingkat inflasi sebesar 2,7%;
3. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

1.3.2 Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah “**Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**” dengan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil Dan Berdaya Saing

Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu dan berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, serta mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia kreatif, inovatif dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Kualitas pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkreaitivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama juga bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia terampil yang memiliki kemampuan menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, dan membuat sesuatu lebih bernilai guna. Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tentu membutuhkan kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang



baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat khususnya Pasaman Barat akan meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terkendalinya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan lima tahun daerah memastikan bahwa pemerintah memetakan kemampuan daerah dan menyusun strategi pelaksanaan pembangunan untuk pemenuhan seluruh hak dasar masyarakat.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga propinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus pembangunan di sektor pertanian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Pemanfaatan aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha disektor ini cenderung masih rendah, sementara produk perkembangan teknologi yang sangat banyak tersedia. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan membutuhkan upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara lokal.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan industri kecil di Pulau Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat.



5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor esensial dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat. Sektor ini diharapkan menjadi industri dan menjadi salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata, sehingga pariwisata yang nyaman dan berkesan dapat terwujud. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini Provinsi Sumatera Barat akan melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata. Untuk itu kita harus memperkuat pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)*, dengan melakukan pembenahan destinasi wisata kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas destinasi wisata sekaligus meningkatkan pembinaan masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi). Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan green energy agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur ini akan bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, sehingga dapat diantisipasi risikonya melalui usaha Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Oleh karena itu, pembangunan Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/kabupaten serta desa/nagari tangguh bencana sangat penting sekali.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk



mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

1.3.3 Amanat RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025

Strategi dan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2021-2026 merupakan pelaksanaan RPJMD keempat/periode terakhir dalam RPJP Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025. Visi pembangunan daerah jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah **“Pasaman Barat yang Maju, Bermartabat dan Sejahtera”**. Garis besar fokus pembangunan RPJPD pada periode ke-4 (Tahun 2021-2025) adalah pembangunan hukum dan pemerintah, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan tata ruang dan wilayah, dan pembangunan sarana dan prasarana.

1. Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

Pembangunan hukum dan pemerintahan dalam pelaksanaan RPJM ke-4 difokuskan untuk mewujudkan dan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Arah pembangunan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pada aspek peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan peran aktif seluruh elemen pembangunan dan memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Berikut rincian fokus pembangunan hukum dan pemerintahan dalam pelaksanaan RPJM ke-4:

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS melalui pola remunerasi yang berbasis sistem kinerja baik individual maupun instansi;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah melalui mekanisme yang sah; dan
- c. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin kuat, demokratis, dinamis dan bertanggung jawab.

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan serta pembangunan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan kualitas manusia yang lebih produktif dan berdaya saing.

3. Pembangunan Perekonomian

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi aspek penting dalam membangun perekonomian masyarakat Pasaman Barat yang kokoh dan kompetitif. Pada RPJMD 2021-2026 pembangunan sektor ekonomi dititikberatkan pada peningkatan dan pengembangan sistem ekonomi berbasis industri pertanian yang didukung dengan teknologi pertanian yang maju. Pembangunan industri pertanian diupayakan untuk



meningkatkan produksi sektor unggulan pertanian dan perkebunan serta menghasilkan produk olahan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk-produk unggulan pertanian dan perkebunan. Diharapkan hasil olahan pertanian dan perkebunan dapat diterima di pasar nasional, regional, dan global.

4. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Wilayah

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah bidang jalan, perumahan, telekomunikasi dilakukan dengan menciptakan pembangunan wilayah sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah serta mengedepankan prinsip ramah lingkungan. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan penataan ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah. Pembangunan wilayah pada RPJMD 2021-2026 masih terfokus pada kawasan ibukota, daerah tertinggal, dan daerah sentra pengembangan ekonomi masyarakat serta pembangunan kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi wilayah serta kota-kota penting di Sumatera Barat dan wilayah sekitarnya. Pembangunan sektor pariwisata diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana rekreasi dan pariwisata.

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pertama, pembangunan sarana dan prasarana energi disusun sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan energi dan kelistrikan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa, kegiatan sosial ekonomi lainnya melalui pengintegrasian antara pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan pemanfaatan energi matahari (*solar energy*). Pengintegrasian pembangunan sistem prasarana energi dengan sistem jaringan jalan akan meningkatkan produktifitas aktivitas disepanjang jalur jalan provinsi, pengembangan wilayah, kawasan permukiman, kawasan industri, perdagangan dan jasa.

Kedua, pembangunan sistem prasarana pengelolaan lingkungan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan peningkatan kualitas pemenuhan kebutuhan sanitasi melalui pengembangan sistem pengelolaan lingkungan, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta sistem pengelolaan limbah cair dan limbah udara. Berdasarkan kriteria sistem pengolahan sampah/pembuangan akhir sampah maka direkomendasikan minimal menggunakan sistem *sanitary landfill* atau sistem komposting. Mekanisme pengelolaan sampah dengan metode ini dianggap dapat menjaga kondisi sanitasi lingkungan. Lokasi yang direkomendasikan untuk pengembangan TPA adalah, pertama Kecamatan Gunung Tuleh, disekitar Rantau Panjang, kedua di Kecamatan Pasaman disekitar Nagari Aia Gadang. Sementara untuk lokasi TPS diarahkan di setiap kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

1.3.4 Amanat RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031

Amanat penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat 2011-2031 dirumuskan berdasarkan visi misi pembangunan wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan. Bila mengacu pada tujuan penataan ruang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penataan ruang adalah:



1. **Aman:** masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. **Nyaman:** memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
3. **Produktif:** proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing;
4. **Berkelanjutan:** kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang.

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW satu kali dalam lima tahun. Peninjauan kembali RTRW mempertimbangkan dinamika pembangunan yang terdiri atas perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi penataan ruang wilayah nasional atau provinsi dan perubahan kebijakan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah kabupaten, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi acuan dan terkait dengan RTRW, dinamika pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, perubahan arah pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan perkembangan paradigma pemikiran, teknologi, dan penemuan sumber daya alam.

Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019 merupakan proses penyusunan kembali (revisi) RTRW sesuai dengan rekomendasi hasil Peninjauan Kembali (PK) RTRW yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Perda RTRW mempunyai jangka waktu dua puluh tahun, pelaksanaan PK dan revisi RTRW diselenggarakan pada lima tahun pertama pelaksanaan RTRW. Pelaksanaan RTRW masih memiliki masa selama lima belas tahun, sehingga substansi RTRW sebelumnya masih relevan digunakan dalam revisi RTRW selama masih sesuai dengan dinamika pembangunan. Oleh sebab itu, proses revisi RTRW harus melakukan kajian kembali terhadap tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW tahun 2012. Langkah ini sangat dibutuhkan untuk melihat kesesuaian antar materi dalam Perda RTRW sendiri dan kesesuaian potensi, masalah, serta isu strategis berdasarkan hasil revisi RTRW di tahun 2019.

Pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KaBPN) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat mempedomani tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan yaitu "Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2029 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan" dan memperhatikan aspek teknis perencanaan dan keterkaitan dengan perencanaan ditingkat pusat,



provinsi dan kabupaten serta memperhatikan pengolaan isu strategis daerah. Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat bertujuan untuk :

"Mewujudkan ruang wilayah kabupaten aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang mandiri dan berdaya saing dengan memperhatikan pelestarian kawasan berfungsi lindung yang lestari."

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten terdiri atas:

1. Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah kabupaten sebagai pusat perkebunan dan perikanan;
2. Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antar sistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi;
3. Pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budi daya;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan permukiman.
5. Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang lestari;
6. Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana;
7. Pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
8. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan rumusan dan penjelasan tujuan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan fungsi, dasar dan kriteria perumusan tujuan, maka kebijakan dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- (1) Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah kabupaten sebagai pusat perkebunan dan perikanan meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat kegiatan lokal yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
 - b. Mengembangkan pusat pelayanan kawasan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan jasa yang melayani skala kecamatan; dan/atau
 - c. Mengembangkan pusat pelayanan lingkungan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan jasa yang melayani skala antar desa.
- (2) Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antar sistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi meliputi:
 - a. Mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan/ dermaga dan/atau bandar udara;
 - b. Mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pusat perkotaan di Pantai Barat Pulau Sumatera;
 - c. Mengembangkan jaringan angkutan penyeberangan untuk meningkatkan pelayanan antar pulau; dan/atau



- d. Mengembangkan pelabuhan dan bandar udara untuk melayani perdagangan ekspor dan/atau antar pulau.
- (3) Pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budi daya meliputi:
 - a. Mendorong pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan industri;
 - b. Mengembangkan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi guna melayani pusat permukiman; dan/atau
 - d. Mengembangkan prasarana sumber daya air dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya air, daya dukung lingkungan, dan kondisi geohidrologi wilayah.
- (4) Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan permukiman meliputi:
 - a. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - b. Mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik setempat dan terpusat; dan/atau
 - c. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- (5) Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang lestari meliputi:
 - a. Mengendalikan secara ketat alih fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi;
 - b. Mencegah, mengendalikan, dan/ atau memulihkan kawasan hutan lindung dari deforestasi;
 - c. Mengembangkan kawasan perlindungan setempat;
 - d. Mengembangkan kawasan konservasi;
 - e. Mengembangkan kawasan cagar alam geologi;
 - f. Mengembangkan kawasan cagar budaya; dan/atau
 - g. Mengembangkan kawasan ekosistem mangrove.
- (6) Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. Mengembangkan jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, dan penanda peringatan bencana; dan/atau
 - c. Memberdayakan masyarakat agar sadar terhadap risiko bencana.
- (7) Pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
 - a. Mengembangkan kawasan tanaman pangan untuk mendukung kemandirian pangan bagi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat;
 - b. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Mengendalikan alih fungsi lahan tanaman pangan berupa sawah menjadi non sawah;
 - d. Mengembangkan kawasan hortikultura dan kawasan



- e. Mengembangkan kawasan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan;
 - f. Mengembangkan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sesuai potensi lestarinya;
 - g. Mengembangkan kawasan hutan produksi dengan prinsip berkelanjutan;
 - h. Mengendalikan kegiatan pertambangan dengan memperhatikan ekosistem sekitarnya;
 - i. Mengembangkan kawasan pariwisata yang berwawasan lingkungan; dan/atau
 - j. Mengembangkan kawasan strategis kabupaten.
- (8) Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- a. Mengembangkan industri pengolahan hulu maupun hilir hasil kegiatan perkebunan dan perikanan;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hasil tanaman pangan dan perkebunan yang ramah lingkungan dan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah industri;
 - c. Mengembangkan kawasan peruntukan industri terpadu hasil perikanan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi; dan/atau
 - d. Mengembangkan kawasan industri kecil dan menengah hasil tanaman pangan, peternakan, dan kehutanan.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk mendeskripsikan gambaran umum kondisi, capaian dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat serta visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang terarah dan terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD serta penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah tetangga.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:



BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.3.1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024
 - 1.3.2. Amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
 - 1.3.3. Amanat RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025
 - 1.3.4. Amanat RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
 - 2.1.2. Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
 - 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - 2.3.3. Urusan Pilihan
 - 2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan
 - 2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
 - 2.2.4.2. Iklim Investasi
 - 2.2.4.3. Sumber Daya Manusia
- 2.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021
 - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Keuangan RPJMD Tahun 2016 - 2021
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan APBD
 - 3.1.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

- 1.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 1.1.1. Kesejahteraan Masyarakat
 - 1.1.2. Kesejahteraan Sosial
 - 1.1.3. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan



1.1.3.1. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.1.3.2. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pemerintah Wajib Tetapi Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.1.3.3. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pilihan

1.1.3.4. Permasalahan Pembangunan pada Urusan Penunjang

1.1.4. Daya Saing Daerah

1.1.5. Pembangunan Berkelanjutan

1.2. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

5.4 Sinkronisasi Visi-Misi RPJMD dengan Visi-Misi RPJPD, RPJMD Propinsi, dan RPJMD

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

6.2. Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB IX Penutup

Lampiran 1: Penyelarasan Indikator Makro RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Lampiran 2: Penyelarasan Program Prioritas RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Keempat aspek tersebut merupakan bentuk nyata dari kinerja pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Berikut gambaran umum Kabupaten Pasaman Barat dilihat dari keempat aspek tersebut.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi bertujuan untuk memberikan gambaran dan hasil analisis dari aspek geografi mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Pasaman Barat.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah di Propinsi Sumatera Barat yang dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km² atau 9,19 persen dari luas keseluruhan wilayah Propinsi Sumatera Barat serta memiliki luas lautan seluas 800,47 km² dengan panjang garis pantai 152 km. Luas ini merupakan peringkat ke-4 terluas setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Pasaman.

Secara administratif pada awal berdirinya Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 terdiri atas 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Pasaman, Kinali dan Talamau. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah Nomor 17, 18, 20 Tahun 2003 terjadi penambahan 4 kecamatan baru, yaitu Kecamatan Koto Balingka, Sungai Aur, Sasak Ranah Pasisie dan Luhak Nan Duo, sehingga jumlah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat menjadi 11 kecamatan, 19 nagari dan 212 jorong. Kecamatan terluas di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Pasaman dengan mencapai 508,93 km² (13,09%), sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan luas hanya 123,71 km² (3,18%).

Batas-batas administrasi Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tigo Nagari dan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman;
- Sebelah Barat Kecamatan Samudera Hindia.



Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031

Tabel 2.1
Data Wilayah Administratif Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Ibukota	Nagari	Jorong	Luas	
					Wilayah (km ²)	%
1	Sungai Beremas	Aia Bangih	1	15	440,48	11,33
2	Ranah Batahan	Silapiang	2	30	354,88	9,13
3	Koto Balingka	Parik	1	26	340,78	8,77
4	Sungai Aua	Koto Dalam	1	22	420,16	10,81
5	Lembah Melintang	Ujung Gadiang	1	16	263,77	6,78
6	Gunung Tuleh	Simpang Tigo Alin	2	20	453,97	11,68
7	Talamau	Talu	3	20	324,24	8,34
8	Pasaman	Simpang Ampek	3	23	508,93	13,09
9	Luhak Nan Duo	Simpang Tigo	2	14	174,21	4,48
10	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	1	11	123,71	3,18
11	Kinali	Kinali	2	19	482,64	12,41
	Luas Darat				3.887,77	100,00
	Luas Laut				805,13	
	Jumlah		19	216	4.692,90	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020



2. Letak dan Kondisi Geografis

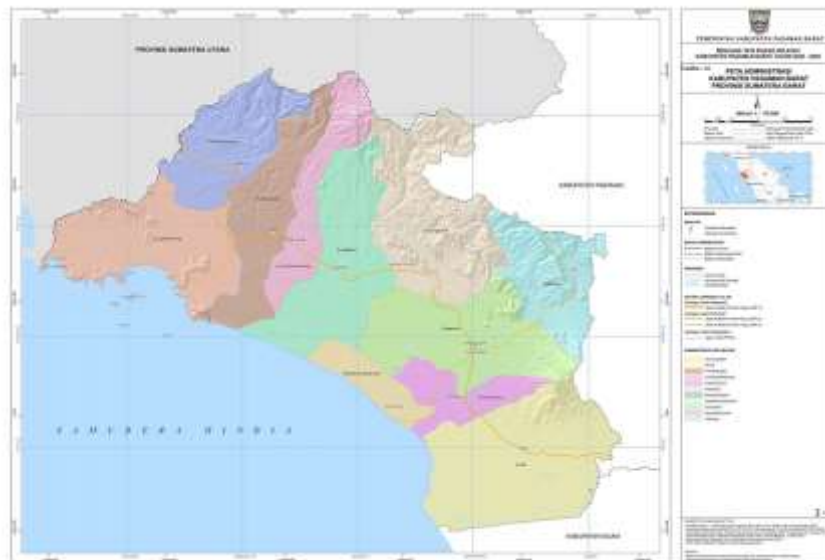
a) Posisi Astronomis

Secara geografis wilayah Kabupaten Pasaman Barat dengan ibukota Simpang Empat merupakan daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa, terbentang mulai posisi 000 01' 34"–000 28' 43" Lintang Selatan sampai 990 46' 39"–1000 32' 50" Bujur Timur. Letak daerah sangat strategis karena dilalui jalan Lintas Barat Sumatera.

Bagian Barat kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0–8 %), bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal (> 45%) dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal (> 45%) berada pada jajaran Bukit Barisan.

b) Posisi Geografis

Ketinggian daerah Kabupaten Pasaman Barat bervariasi 0 - 2.913 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pasaman Barat di lewati sejumlah aliran sungai yaitu sebanyak 147 aliran sungai. Selain itu Kabupaten Pasaman Barat juga mempunyai 13 Gunung.



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

c) Kondisi Kawasan

1) Pedalaman dan Terpencil

Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan keluar dari status daerah tertinggal pada Tahun 2019 melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Terentaskan Tahun



2015-2019. Meski demikian, di dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat sendiri, masih terdapat beberapa jorong yang memiliki akses sangat terbatas.

Hingga tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki beberapa jorong tertinggal dan berkembang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/367/BUP-PASBAR/2020 Tentang Penetapan Jorong Tertinggal, Berkembang, dan Perlakuan Khusus di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, jorong tertinggal, berkembang, dan perlakuan khusus di Kabupaten Pasaman Barat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Daftar Jorong Tertinggal, Berkembang, dan Perlakuan Khusus di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nagari	Jorong
A. JORONG TERTINGGAL			
1	Talamau	Sinuruik	1. Tombang
2	Koto Balingka	Parik	2. Aek Garingging 3. Rura Patontang 4. Trans Aek Nabirong
3	Ranah Batahan	Batahan	5. Tanjung Larangan
4	Sungai Beremas	Air Bangis	6. Ranah Panantian
5	Kinali	Kinali	7. Limpato
B. JORONG BERKEMBANG			
1	Sungai Aur	Sungai Aur	1. Sarasah Talang
2	Ranah Batahan	Batahan	2. Silayang Julu 3. Taming Tengah 4. Taming Julu 5. Sigantang
3	Sungai Beremas	Air Bangis	6. Pigogah Patibubur
C. JORONG DENGAN PERLAKUAN KHUSUS			
1	Kinali	Kinali	1. Jorong Katiagan
2	Sungai Aur	Sungai Aua	2. Jorong Sikilang
3	Sasak	Sasak	3. Jorong Maligi

Sumber: Bappeda (2020)

Evaluasi, penetapan, dan penentuan kategori Jorong Tertinggal, Jorong Berkembang, dan Jorong dengan Perlakuan Khusus di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan setiap tahun, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Evaluasi Pembangunan Jorong Tertinggal Tahun 2016-2020.

2) Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Sebagai daerah yang berada di kawasan pantai Barat Sumatera, Kabupaten Pasaman Barat memiliki 5 Kecamatan yang berada di daerah pesisir, yakni:

- Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali;
- Nagari Kinali, Kecamatan Kinali;
- Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
- Nagari Sei. Aur, Kecamatan Sungai Aur;



- e) Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka;
- f) Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.

3) Pegunungan

Secara umum topografi Kabupaten Pasaman Barat adalah datar dan sedikit bergelombang, dan tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Sungai Beremas dengan gunung tertinggi Gunung Ranggasan 659 meter di atas permukaan laut, Ranah Batahan dengan gunung sigantang yang tingginya mencapai 1.573 meter di atas permukaan laut, Lembah Melintang dengan puncak tertinggi pada Gunung Kelabu yang tingginya 2.179 meter di atas permukaan laut dan Pasaman dengan Gunung Talamau yang tingginya 2.913 meter di atas permukaan laut. Gunung Talamau ini merupakan gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat dan juga se-Propinsi Sumatera Barat dan bukan merupakan tipe gunung api yang aktif.

Tabel 2.3 Nama Gunung Per-Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Nama Gunung	Tinggi (m di atas permukaan laut)
1	Sungai Beremas	1. Sicancang	198
		2. Marando	230
		3. Jawi-Jawi	250
		4. Terusan	175
		5. Galanggang	20
		6. Lantuer	425
		7. Ranggasan	659
		8. Leco	84
2	Ranah Batahan	1. Sigantang	1 573
3	Lembah Melintang	1. Kelabu	2 179
		2. Malintang	1 983
4	Pasaman	1. Pasaman	2 190
		2. Talamau	2 913

Sumber : BPS Kabupaten Sumatera Barat (2020)

4) Wilayah Kepulauan

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 12 pulau kecil yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas. Dari 12 pulau tersebut, hanya satu pulau berpenduduk, yakni Pulau Panjang.



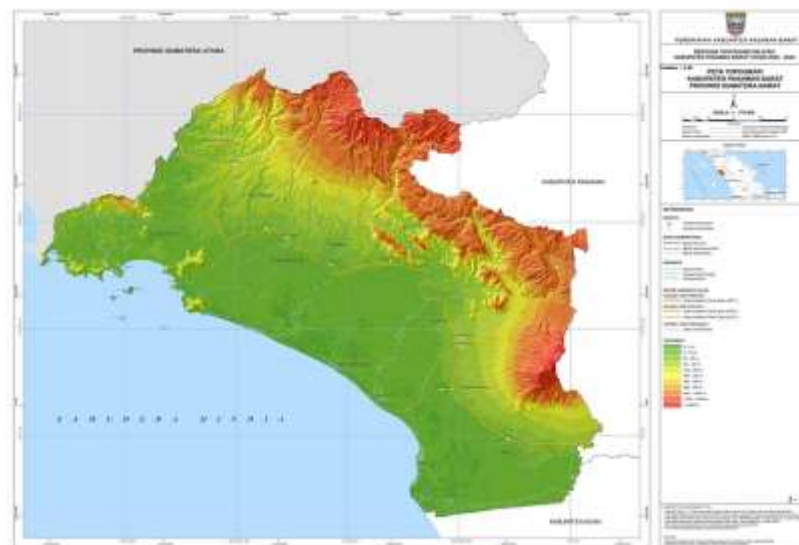
3. Topografi

Secara umum topografi Kabupaten Pasaman Barat adalah dataran rendah sekitar 51,14%. Topografi perbukitan rendah sekitar 17,34%, perbukitan sekitar 13,67%, dan perbukitan tinggi sekitar 12,41%, serta pegunungan sekitar 5,45%. Secara jelas, topografi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Kondisi Topografi Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Dataran Rendah	Perbukitan Rendah	Perbukitan	Perbukitan Tinggi	Pegunungan
		0-50 m	50-200 m	200-500 m	500-1.000 m	1.000-2.000 m
1	Sungai Beremas	37.490,39	5.402,10	1.455,55	35,44	0,00
2	Ranah Batahan	9.793,84	12.024,87	6.548,69	2.778,58	0,00
3	Koto Balingka	15.301,94	7.527,59	5.595,11	2.547,18	608,87
4	Sungai Aua	27.647,62	7.246,51	5.687,58	2.776,53	447,57
5	Lembah Melintang	8.167,97	3.079,67	2.710,18	2.800,05	6.006,90
6	Gunung Tuleh	7.655,07	8.119,30	9.377,40	16.391,24	7.626,96
7	Talamau	0,00	393,50	9.466,07	15.155,48	2.238,49
8	Pasaman	23.617,26	10.318,79	5.816,67	2.422,95	2.038,15
9	Luhak Nan Duo	10.384,63	2.820,84	1.319,47	394,02	156,32
10	Sasak Ranah Pasisie	11.792,12	0,00	0,00		0,00
11	Kinali	43.503,68	9.289,29	4.247,80	2.103,29	1.682,49
Jumlah		195.354,52	66.222,46	52.224,53	47.404,75	20.805,75
Persentase		51,14%	17,34%	13,67%	12,41%	5,45%

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 (BIG, 2016)



Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



a) Kemiringan Lahan

Kemiringan lereng tertinggi berada pada kelas 2-6% sekitar 45,84%, diikuti kelas 25-55% sekitar 22,61%. Dari hal tersebut, wilayah Kabupaten Pasaman Barat umumnya berupa daratan datar sekitar 71% lebih, sisanya merupakan perbukitan dan pegunungan. Secara jelas, kemiringan lereng disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	< 2 %	2 - 6 %	6 - 13 %	13 - 25 %	25 - 55 %	> 55 %
1	Sungai Beremas	3.854,85	27.778,32	5.037,55	1.205,44	6.428,89	78,43
2	Ranah Batahan	125,36	11.836,74	7.649,91	3.390,41	7.973,00	170,55
3	Koto Balingka	3.731,90	15.577,07	5.977,43	1.542,02	4.741,23	11,05
4	Sungai Aua	7.169,35	24.819,06	8.410,91	1.349,58	1.930,55	126,34
5	Lembah Melintang	1.823,71	8.460,16	3.265,84	837,71	7.933,94	443,42
6	Gunung Tuleh	935,20	7.756,24	3.517,73	2.626,93	30.484,62	3.849,25
7	Talamau	124,61	3.110,32	4.240,36	3.273,18	15.767,71	737,36
8	Pasaman	8.336,74	24.501,62	3.076,41	997,08	6.556,69	745,29
9	Luhak Nan Duo	5.034,61	7.837,45	1.415,33	273,27	459,43	55,19
10	Sasak Ranah Pasisie	7.767,68	4.024,43				
11	Kinali	12.042,72	39.407,18	3.723,78	828,42	4.093,32	731,13
Jumlah		50.946,72	175.108,58	46.315,27	16.324,05	86.369,37	6.948,03
Persentase		13,34%	45,84%	12,12%	4,27%	22,61%	1,82%

Sumber: Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 (BIG, 2016)

Kemiringan lahan di Kabupaten Pasaman Barat digambarkan pada peta berikut ini:



Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



b) Ketinggian Lahan

Ketinggian lahan Kabupaten Pasaman Barat bervariasi mulai dari 0 meter di atas permukaan laut hingga 2.019 meter di atas permukaan laut, yang terletak di Gunung Talamau, Kecamatan Talamau, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut (DPL) Per Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Sungai Beremas	0 - 502
2	Ranah Batahan	23 - 753
3	Koto Balingka	0 - 811
4	Sungai Aur	0 - 1 983
5	Lembah Melintang	15 - 725
6	Gunung Tuleh	26 - 1 875
7	Talamau	225 - 2 019
8	Pasaman	15 - 2913
9	Luhak Nan Duo	0 - 1 250
10	Sasak Ranah Pasisie	0 - 15
11	Kinali	0 - 1 332
Pasaman Barat		0 - 2 913

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2030

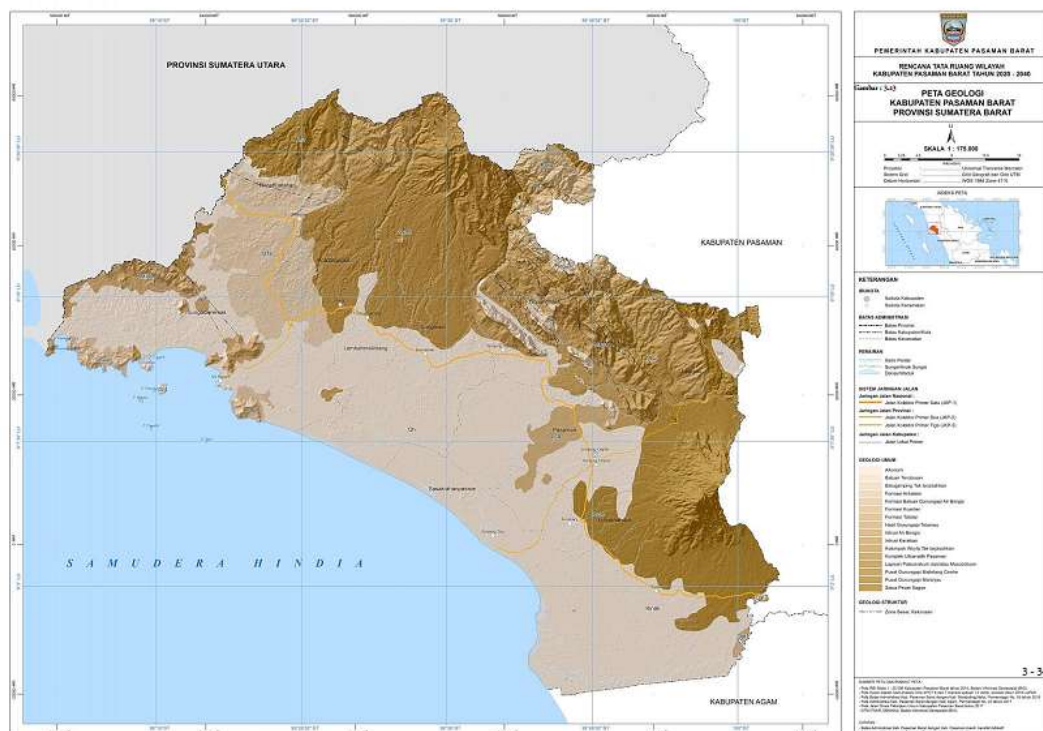
4. Geologi

Secara geologi, Kabupaten Pasaman Barat dan sekitarnya mempunyai batuan dan struktur geologi berumur tua (sekitar 290 juta tahun) dikombinasi dengan produk vulkanik Gunung Talamau dan Gunung Pasaman. Berdasarkan data Badan Geologi, daerah ini terdiri atas dua belas satuan batuan. Batuan tertua berumur Pra-Tersier tersusun oleh Satuan Batu Gamping Kristalin (Pgk) dan Satuan Meta-Andesit (Pma). Batuan Tersier tersusun oleh Satuan Intrusi Granodiorit Satuan Lava Andesit (Tl), dan Lava Dasit. Batuan Kuartar tersusun oleh Satuan Aliran Piroklastik (Qap), Lava Andesit (Ql), Lava Andesit Bukit Tombang Pinang (Qlt), Endapan Danau (Qed), dan Aluvium (Qal).

Struktur geologi Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur patahan/sesar dengan arah umum Barat Laut-Tenggara yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Secara umum, batuan yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat telah mengalami deformasi yang kuat. Produk tektonik di daerah ini terdiri atas struktur lipatan, kekar, dan sesar. Pembentukan kedua jenis struktur geologi tersebut tidak terlepas dari pengaruh aktivitas tumbukan lempeng yang menyerang antara Lempeng Eurasia yang berada di Utara dengan Lempeng India-Australia. Akibat tumbukan lempeng ini terbentuk jalur subduksi yang sekarang posisinya berada di lepas Pantai Barat Sumatera, sedangkan di daratan

Pulau Sumatera terbentuk wilayah tinggian yang menyebabkan batuan tua tersingkap di permukaan. Pola struktur lipatan dan umumnya berarah Barat Laut-Tenggara yang terbentuk sejak Pra-Tersier hingga Kuartar. Jenis dan kedudukan struktur geologi ini selanjutnya mempengaruhi pola sebaran batuan di permukaan.

Wilayah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian dari jalur patahan utama tersebut. Kriteria-kriteria yang dapat diamati hanya berupa bidang cermin sesar, pelurusan-pelurusan sungai, serta perubahan batuan yang sangat menyolok. Patahan-patahan lainnya terdapat dibagian Barat, mulai dari Kajai ke arah Barat Laut yang memisahkan batuan yang berumur Paleozoikum dengan batuan berumur mesozoikum, dan arah sesar tersebut relatif sama dengan Patahan Semangko.



Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

5. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai

Pada sistem pengelolaan sumber daya air yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, dikenal sistem Wilayah Sungai (WS). Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas dua WS. Pertama, WS Lintas Provinsi Batang Natal-Batang Batahan yang mencakup wilayah Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kedua, WS Lintas Kabupaten/Kota Masang-Pasaman yang mencakup wilayah lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Namun, menurut walidata yang sudah ditetapkan, pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS)



merupakan urusan kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menurut Perpu penetapan DAS dari KLHK, terdapat 9 DAS di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. DAS Batahan merupakan DAS lintas provinsi, sedangkan DAS lainnya merupakan DAS lintas kabupaten/kota. Secara jelas, perbandingan DAS dari dua kementerian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Perbandingan DAS di Kabupaten Pasaman Barat

No.	DAS Versi KLHK (walidata DAS)	DAS Versi Kementerian PUPR
		WS Batang Natal-Batang Batahan
1.	DAS Batahan	DAS Batahan
2.	DAS Batang Tamak	DAS Sukerejo
		DAS Tamak
		Sebagian DAS Sibunian
3.	DAS Sibunian	DAS Sibunian
		WS Masang-Pasaman
4.	DAS Sikarbu	DAS Bangis
5.	DAS Sikilang	DAS Sikilang
		DAS Maligi
		Sebagian DAS Bangis
6.	DAS Pasaman	DAS Pasaman
		Sebagian DAS Ampu
7.	DAS Ampu	DAS Ampu
8.	DAS Kinali	DAS Simpang
		Sebagian DAS Palembayan
9.	DAS Masang Kiri	DAS Palembayan
		DAS Kinali

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



Gambar 2.6 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

2) Sungai Danau dan Rawa

Air permukaan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas sungai dan danau. Sungai berjumlah 100 sungai lebih yang mengalir di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Sungai yang melintas di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang berpola dendritik. Umumnya sungai-sungai tersebut ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini yang mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang rawan terhadap banjir/genangan.

Menurut data BPS, seluruh kecamatan mempunyai sungai. Kecamatan yang paling banyak dialiri oleh sungai adalah Kecamatan Sungai Beremas, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Secara jelas, sungai di setiap kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Sungai di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Sungai	
1	Sungai Beremas	1) Batang Pardantiangan	2) Anak Air Bunga Tanjung I
		3) Batang Bamban	4) Anak Air Bunga Tanjung II
		5) Batang Tomak	6) Anak Air Pematang Gunung
		7) Sungai Pinang	8) Air Sepi
		9) Batang Pakau	10) Air Suak
		11) Air Ganggang	12) Pincuran Mingkudu
		13) Air Runding	14) Titian Biduk



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No.	Kecamatan	Sungai	
		15) Anak Air Kamang Gadang	16) Air Sibunian
		17) Batang Sopan	18) Anak Air Kampung Padang
		19) Anak Air Tandikek	20) Anak Air Pati Bubur
		21) Air Geringging	22) Batang Tamiang Ampalu
		23) Air Balam	24) Batang Ampalu
		25) Air Salak	26) Anak Air Simpang Kanan
		27) Air Tangguli	28) Anak Air Kemuning
		29) Air Banjar Alang	30) Danau Jernih
		31) Air Kampung Alai	32) Danau Jernih
		33) Air Kampung Pinang	34) Batang Air Simpang Betung
		35) Air Tengah	36) Batang Penggambira
2	Ranah Batahan	1) Batang Paraman Mudik	2) Air Talang
		3) Batang Batahan	4) Batang Simpang Tolang
		5) Batang Air Paraman Sawah	6) Air Doli-Dolin
		7) Batang Siduampan	8) Batang Lapin Kuning
		9) Air Simpang Tarap	10) Air Lembut
		11) Air Simpang Tolang	12) Air Pigogah
		13) Air Pasak	14) Sungai Sariak
		15) Batang Silaping	16) Anak Air Sigantang Mudiak
		17) Air Batu	18) Aek Napal
		19) Batang Muara Gobing	20) Batang Tamiang
		21) Batang Partandangan	
3	Koto Balingka	1) Batang Air Balam	2) Air Parumpangan
		3) Batang Sikabau	4) Air Kagulungan
		5) Batang Siduampan	6) Air Talang
		7) Batang Lapu	8) Air Danau Karuah
		9) Batang Sopan	10) Air Sasak
		11) Batang Muara Labung	12) Air Pining Rayan



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No.	Kecamatan	Sungai	
4	Sungai Aua	1) Batang Sikilang	2) Batang Sijanih
		3) Batang Air Haji	4) Batang Simpang
		5) Batang Tomang	6) Batang Balerang Gadang
		7) Batang Cubadak	8) Air Putih
		9) Batang Kasiak Putih	10) Batang Kamuning
		11) Batang Garingging	12) Batang Marokek
		13) Batang Sopan Bawah	14) Batang Malancar
		15) Batang Maligi	16) Batang Paraman
		17) Batang Sontang	18) Batang Simpang Beringing
		19) Batang Tinggiran	20) Batang Bangai
5	Lembah Melintang	1) Batang Bayang	2) Batang Maligi
		3) Batang Tengah	4) Batang Air Haji
		5) Batang Sikabau	6) Batang Sontang
		7) Sungai Danau	
6	Gunung Tuleh	1) Batang Alin	2) Batang Saligawan
		3) Batang Kabau Alin	4) Batang Timbalak
7	Talamau	1) Batang Pasaman	2) Batang Talao
		3) Batang Tinggam	4) Batang Paraman
		5) Batang Kularian	6) Batang Sopan
8	Pasaman	1) Sungai Abuk Tunggang	2) Batang Lipatan
		3) Sungai Abuk	4) Batang Toman
		5) Batang Karunie	6) Batang Ampu
		7) Batang Tonggar	8) Sungai Sarik
		9) Batang Biluan	10) Batang Tipo
9	Luhak Nan Duo	1) Batang Kapar	2) Batang Tamang
		3) Sungai Talang	4) Sungai Sariak
		5) Batang Sialang	6) Air Dingin
		7) Batang Jambak	8) Air Mandau
		9) Batang Bayur	10) Batang Ampu Kecil
		11) Batang Munigo	12) Batang Ampu Gadang
10	Sasak Ranah Pasisie	1) Batang Pasaman	2) Batang Kapar
11	Kinalio	1) Batang Pinagar	2) Batang Mandiangi



No.	Kecamatan	Sungai	
		3) Sungai Paku	4) Batang Silambau
		5) Batang Kinali	6) Batang Partupangan
		7) Batang Bunut	8) Air Rawu
		9) Batang Patimah	10) Batang Masang

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2019 (BPS)

Kabupaten Pasaman Barat memiliki satu buah danau dan beberapa telaga yang berada disekitar kaki Gunung Pasaman. Danau tersebut belum dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

3) Debit

Menurut PSDA Dalam Angka 2017, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, debit maksimal aliran sungai utama tertinggi dalam beberapa tahun terdapat di Sungai Batang Kenaikan sekitar 28,36 mm/tahun, sedangkan yang terkecil di Batang Batahan sekitar 2,85 mm/tahun. Adapun debit rata-rata aliran sungai utama tertinggi di Batang Kenaikan, sedangkan terendah di Batang Masang Hulu. Secara jelas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Menurut dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017, debit air sungai tertinggi di Batang Batahan sekitar 7.519 liter/detik. Sementara itu, debit terkecil di sungai Batang Bunut sekitar 198 liter/detik. Hasil pengamatan lapangan, warna air sungai umumnya, berwarna coklat akibat keruh. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sedimentasi akibat erosi tanah yang terjadi di dataran. Secara jelas, debit sungai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9 Debit Maksimal dan Rata-Rata Aliran Air Sungai di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun	Debit Maksimal Aliran Air Sungai (mm/th)					
	BT Batahan	BT Ampu	BT Fatimah	BT Hulu Masang	BT Kenaikan	BT Masang
2004	-	1,18	1,00	-	1,95	1,51
2005	-		1,26	-	2,47	2,31
2006	-	2,25	1,29	-	2,07	1,99
2007	-	1,18	0,88	-	1,95	1,79
2008	-	1,23	1,47	-	2,47	1,94
2009	-	0,87	0,80	-	2,31	1,96
2010	-	1,18	1,30	-	2,71	-
2011	-	1,40	3,55	-	3,36	2,00
2012	-	1,06	1,66	-	2,23	-
2013	-	-	-	-	-	-



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2014	-	1,17	1,65	1,00	2,14	1,60
2015	1,23	1,09	1,98	1,15	2,20	1,46
2016	1,62	1,23	2,75	1,92	2,50	1,89
Jumlah	2,85	13,84	19,59	4,07	28,36	18,45
Tahun	Debit Rata-rata Aliran Air Sungai (mm/th)					
2004	-	0,33	0,56	-	1,37	0,71
2005	-	-	0,67	-	1,24	1,08
2006	-	0,34	0,60	-	1,24	1,13
2007	-	0,33	0,33	-	1,37	1,07
2008	-	0,68	0,58	-	1,24	1,18
2009	-	0,65	0,27	-	1,44	1,28
2010	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-
2014	-	0,76	0,71	0,36	1,31	0,62
2015	-	-	-	-	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	3,09	3,72	0,36	9,21	7,07

Sumber: PSDA Dalam Angka 2017, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.10 Debit Sungai Utama di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Debit (l/detik)
1	Ranah Batahan	Batang Batahan	7.519
		Air Talang	1.639
2	Koto Balingka	Air Danau Karuah	564
3	Gunung Tuleh	Batang Kenaikan	3.590
4	Talamau	Batang Talao	1.024
5	Pasaman	Batang Ampu	2.438
6	Kinali	Batang Pinagar	2.694
		Batang Mandiangin	728
		Sungai Paku	629
		Batang Kinali	1.361
		Batang Partupangan	315
		Batang Bunut	198



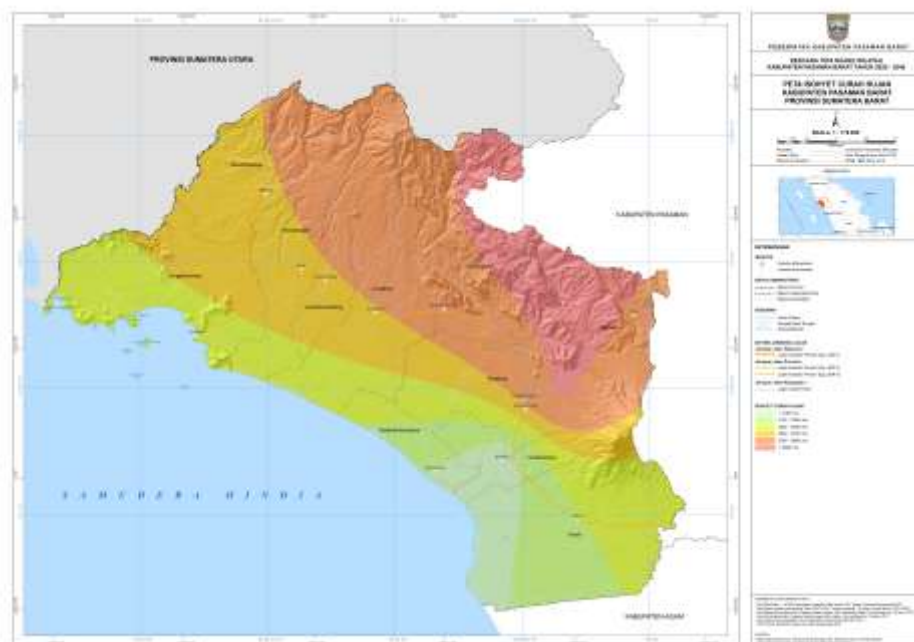
No.	Kecamatan	Nama Sungai	Debit (l/detik)
		Batang Tambau	499

Sumber: RISPAM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

6. Klimatologi

Kabupaten Pasaman Barat secara geografis berada di kawasan pesisir Pantai Barat Sumatera dan dilintasi garis Kathulistiwa, sehingga menyebabkan suhu udara selalu panas dan lembab. Sirkulasi musim *Mansoon* dan konvergensi *Inter Tropis* sangat mempengaruhi iklim daerah ini. Suhu udara Kabupaten Pasaman Barat berkisar 20°C-26°C dengan kelembaban udara sekitar 88%, kecepatan angin di wilayah darat minimal 4 km/jam dan maksimal 20 km/jam.

Data dan informasi klimatologi Kabupaten Pasaman Barat diperoleh dari Rencana Pengelolaan DAS Pasaman Terpadu Provinsi Sumbar tahun 2013, Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dalam Angka 2017, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, dan peta curah hujan dari portal Kebijakan Satu Peta.



Gambar 2.7 Peta Isohyet Curah Hujan Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

7. Jenis Tanah

Jenis tanah skala 1:250.000 terdiri atas Aluvial, Andosol, Glei Humus, Kambisol, Latosol, Organosol, Podsolik, dan Regosol. Jenis tanah terluas adalah Kambisol sekitar 41,33%, dengan penyebaran di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Kinali. Andosol mempunyai luas sekitar 26,4% dengan penyebaran di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Sungai Beremas.



Tabel 2.11 Kondisi Jenis Tanah Umum Kabupaten Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Aluvial	Andosol	Glei humus	Kambisol	Latosol	Organoso I	Podsolik	Regosol
1	Sungai Beremas	5.165	-	14.007	10.926	2.811	-	10.734	741
2	Ranah Batahan	-	844	1.668	20.001	722	-	7.911	-
3	Koto Balingka	3.241	471	243	17.082	1.427	-	4.931	4.186
4	Sungai Aua	7.720	8.027	-	20.746	-	-	-	7.312
5	Lembah Melintang	5.133	8.270	-	8.785	372	-	204	1
6	Gunung Tuleh	372	4.203	234	44.260	101	-	-	-
7	Talamau	1.210	5.904	188	19.952	-	-	-	-
8	Pasaman	1.766	25.359	-	14.410	-	-	-	2.679
9	Luhak Nan Duo	-	12.485	-	726	-	-	-	1.864
10	Sasak Ranah Pasisie	39	194	-	980	-	-	-	10.579
11	Kinali	-	35.109	7.763	-	-	15.593	-	2.362
Jumlah		24.646	100.867	24.102	157.867	5.432	15.593	23.780	29.724
Persentase		6,45%	26,40%	6,31%	41,33%	1,42%	4,08%	6,23%	7,78%

Sumber: Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementan, 2010

Berdasarkan penyebaran jenis tanah yang dominan, dikaitkan dengan kemiringan lereng, sebagian besar tanahnya rentan terhadap erosi, terutama pada kawasan yang curam. Bila kawasan ini terbuka maka lahan-lahan pertanian dan perkebunan akan mudah mengalami erosi, karena wilayah ini mempunyai nilai erosivitas yang tinggi, apalagi dalam budaya masyarakat dalam pemanfaatan lahan sering mengabaikan teknik-teknik konservasi tanah dan air.

Menurut peta Satuan Penggunaan Tanah (SPT) skala 1:50.000 dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementan, terdapat 60 (enam puluh) jenis SPT di Kabupaten Pasaman Barat. Dari SPT tersebut, dapat diketahui sifat fisik dan sifat kimia tanah. Dari sifat fisik tanah dapat diketahui, bahwa Kabupaten Pasaman Barat mempunyai jenis tanah dengan drainase terhambat yang cukup dominan. Hal ini berarti, wilayah dengan drainase terhambat mempunyai tanah yang sulit mengalirkan air, sehingga akan menyebabkan genangan atau banjir.

8. Penggunaan Lahan

Karakteristik penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas kawasan hutan yang sebagian besar adalah hutan lindung, kawasan transisi yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan sebagian masih berupa semak/alang-alang, dan kawasan perkotaan yang didominasi oleh permukiman, sarana sosioekonomibudaya, dan prasarana perkotaan. +nderungan perkembangan fisik yang mengikuti pola jaringan jalan-jalan utama (*ribbondevelopment*) yang



menunjukkan terjadinya perkembangan lompat katak dan merupakan ciri *urban sprawl*. Secara umum, karakteristik penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat digambarkan sebagai berikut:

- Penggunaan lahan di kawasan Pusat Kota Kabupaten tidak mengalami perubahan yang berarti, namun terlihat semakin tinggi intensitasnya.
- Kecenderungan perkembangan fisik yang mengikuti pola jaringan jalan- jalan utama (*ribbon-type development*) berkembang menjadi semakin menebal dan padat sehingga membentuk koridor pembangunan.
- Perkembangan fisik di sepanjang pantai akan dapat dikendalikan dengan pembangunan jalan sepanjang pantai.
- Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang mendorong perkembangan fisik di kawasan tersebut, terutama di sepanjang jalan-jalan utama

Dari data BPS, penggunaan lahan utama adalah perkebunan sekitar 40% dari luas kabupaten, diikuti oleh hutan, tambak, kolam sekitar 30%, lahan bukan untuk pertanian sekitar 12%. Dari hal tersebut, terlihat bahwa wilayah Kabupaten Pasaman Barat didominasi kegiatan perkebunan dan kehutanan. Kegiatan perkebunan berkembang di dataran rendah, sedangkan kawasan hutan berkembang di perbukitan dan pegunungan. Secara jelas, luas penggunaan lahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Luas Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018

No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Lahan Sawah	11.628	2,99
A	Irigasi	7.663	1,97
B	Tadah Hujan	3.965	1,02
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	328.736	84,56
A	Tegal/Kebun	17.501	4,50
B	Ladang/huma	11.196	2,88
C	Perkebunan	155.833	40,08
D	Ditanami pohon/hutan rakyat	19.261	4,95
E	Padang penggembalaan/padang rumput	881	0,23
F	Sementara tidak diusahakan	6.901	1,78
G	Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	117.163	30,14
3	Lahan Bukan Pertanian	48.413	12,45
JUMLAH		388.777	100,00

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2019 (BPS)



a. Kawasan Budidaya

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh lahan pertanian bukan sawah yang mencapai 327.698 ha atau 84,29 persen luas lahan selanjutnya lahan bukan pertanian yang mencapai 49.451 ha atau 12,72 persen luas lahan dan sisanya sebesar 11,628 atau 2,99 persen merupakan lahan sawah, baik irigasi maupun tadah hujan. Tabel 2.12. memperlihatkan sebaran penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Data penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memperlihatkan bahwa areal lahan sawah tidak berubah, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan. Penambahan areal sawah dilakukan melalui program perluasan areal sawah, namun di lapangan juga terjadi pengalihfungsian lahan sawah ke lahan bukan sawah. Lahan pertanian bukan sawah mengalami fluktuasi yang beragam, hal ini disebabkan oleh budidaya pertanian dan perkebunan yang terpengaruh akibat kondisi musim dan cuaca. Penurunan luas lahan sawah terus terjadi hingga Tahun 2020, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Ha)

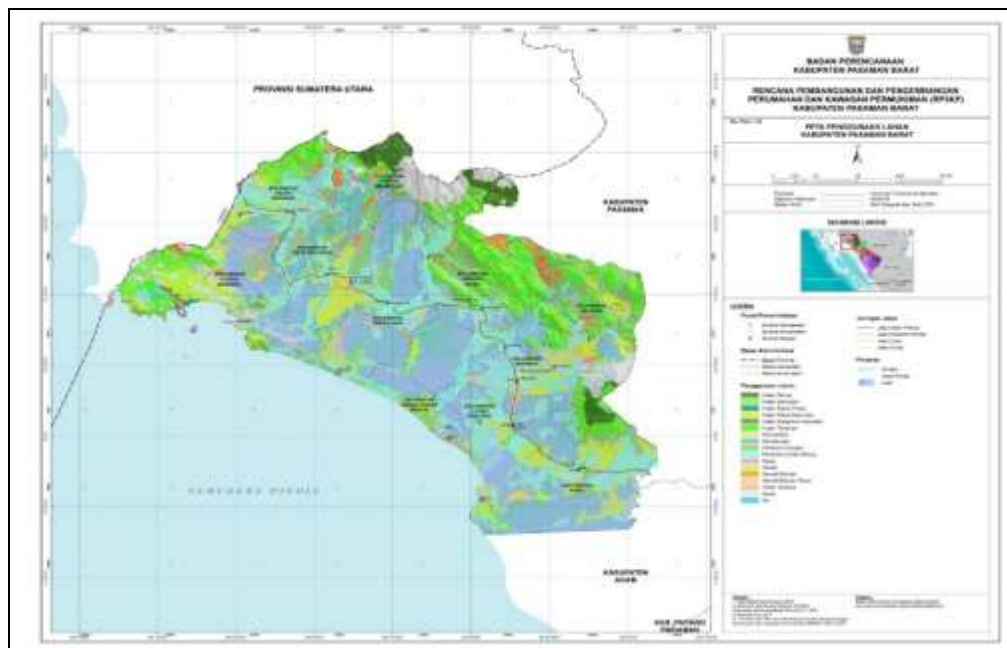
No	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Sawah	13.105	13.105	11.628	11.628	9.157
	a. Irigasi	9.093	9.275	7.663	8.409	7.246
	b. Tadah hujan	4.102	3.815	3.965	3.219	1.911
	c. Rawa pasang surut	-	15	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-
2	Lahan Pertanian Bukan Sawah	314.510	330.623	328.736	327.698	322.633
	a. Tegal/ kebun	24.986	26.029	17.501	18.502	14.203
	b. Ladang/ huma	14.937	15.309	11.196	12.042	11.374
	c. Perkebunan	163.600	145.303	155.833	156.605	156.266
	d. Ditanam pohon/ padang rumput (hutan rakyat)	27.863	18.919	19.261	17.861	18.385
	e. Padang pengembalaan/ padang rumput	655	638	881	631	595
	f. Sementara tidak diusahakan	2.449	1.480	6.901	2.299	2.740
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dll)	80.020	122.945	117.163	119.758	119.070



No	Penggunaan Lahan	2016	2017	2018	2019	2020
3	Lahan Bukan Pertanian	61.162	45.049	48.413	49.451	56.987

Sumber : Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2021

Selanjutnya, penggunaan lahan untuk perkebunan merupakan jenis penggunaan lahan pertanian bukan sawah terbesar di Kabupaten Pasaman Barat. Penggunaan lahan untuk kegiatan perkebunan mengalami peningkatan yang cukup pesat selama 5 (lima) tahun terakhir. Beberapa komoditi perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat antara lain, kelapa sawit, karet, kakao, kopi, aren, dan nilam. Berikut diperlihatkan peta penggunaan lahan Kabupaten Pasaman Barat pada gambar berikut



Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang ada di Kabupaten Pasaman Barat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kawasan hutan lindung;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- 3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka



margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- 5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- 6) Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- 7) Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Menurut Lampiran II Permen ATR/KaBPN 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menjelaskan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

1. kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
2. kawasan lindung gambut; dan
3. kawasan resapan air.

Hutan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, dan hutan produksi. Dari 3 jenis hutan tersebut yang terluas adalah areal hutan lindung yaitu 71.760,05 hektar, diikuti hutan produksi. Secara jelas, kawasan hutan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Kawasan Hutan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 (ha)

No.	Kecamatan	Hutan Lindung	Konservasi	Hutan Produksi			Jumlah
				Terbatas	Tetap	Dapat Dikonversi	
1	Sungai Beremas	3.974,07	-	-	16.463,07	-	20.437,14
2	Ranah Batahan	7.750,41	-	-	-	-	7.750,41
3	Koto Balingka	527,79	-	-	-	-	527,79
4	Sungai Aua	1.160,73	-	-	-	200,85	1.361,58
5	Lembah Melintang	7.223,88	-	-	-	-	7.223,88
6	Gunung Tuleh	27.354,54	-	849,71	713,18	-	28.917,43
7	Talamau	11.344,74	-	1.754,11	579,07	-	13.677,92
8	Pasaman	5.332,24	-	2.046,19	-	2.256,51	9.634,94
9	Luhak Nan Duo	698,75	-	124,32	-	42,18	865,25



10	Sasak Ranah Pasisie	875,78	-	-	-	718,03	1.593,81
11	Kinali	5.517,12	59,46	175,94	480,03	3.769,36	10.001,91
JUMLAH		71.760,05	59,46	4.950,27	18.235,35	6.986,93	101.992,06

Sumber: Kab. Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2019 (BPS)

4. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai potensi kerawanan bencana akibat bentukan fisik wilayahnya. Berdasarkan data BPS, kejadian bencana di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas banjir, tanah longsor, kebakaran, topan, dan lainnya. Kejadian bencana banjir paling tinggi pada rentang tahun tersebut, diikuti oleh kebakaran, dan tanah longsor. Secara jelas, kejadian bencana di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Banyaknya Bencana Alam Menurut Kejadian di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana Alam	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	22	22	21	13	25
2	Tsunami	0	0	0	0	0
3	Longsor	4	7	7	5	2
4	Kebakaran Hutan	21	9	8	29	22
5	Gempa Tektonik	0	0	20	0	0
6	Gempa Vulkanik	0	0	0	0	0
7	Abrasi	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	14	2	6	0	21
9	Gunung Meletus	0	0	0	0	0
10	Jalan Terban/ Amblas	0	0	0	0	0
11	Lain-lain	2	6	7	18	7

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat (2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kejadian bencana di Kabupaten Pasaman Barat sepanjang Tahun 2016 hingga Tahun 2020 didominasi oleh banjir dan kebakaran hutan, dengan jumlah kejadian berfluktuasi dari tahun ke tahun. Untuk Kejadian Banjir, tahun 2020 menunjukkan jumlah kejadian tertinggi, yakni 25 kasus, meningkat secara signifikan dari 13 kasus pada Tahun 2019. Di posisi kedua, terdapat kasus kebakaran hutan. Pada Tahun 2020, jumlah kejadian kebakaran hutan di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 25 kasus, turun dari 29 kejadian di tahun 2019. Kejadian kebakaran hutan di tahun 2019 merupakan angka tertinggi selama periode 2016-2021.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031 bahwa potensi cekungan air tanah (hidrogeologi) yang terpantau berupa air tanah bebas 445 juta m³/tahun dan air tanah tertekan 65 juta m³/tahun. Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini yang mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang rawan terhadap banjir/genangan.



Gambar 2.9 Peta Bahaya Bencana Banjir Bandang Kabupaten Pasaman Barat
Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

Sementara itu, bencana kebakaran yang sering terjadi disebabkan oleh hubungan arus pendek. Lokasi atau titik bencana longsor tiap tahunnya terjadi di kecamatan yang sama, yakni di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, seperti Simpang Empat. Demikian juga dengan kejadian bencana angin puting beliung.

Pada tahun 2019, BNPB menerbitkan Katalog Desa/Kelurahan Rawan bencana untuk kelas kerawanan tinggi dan sedang. Dari dokumen tersebut, Kabupaten Pasaman mempunyai kerawanan tinggi terhadap bencana longsor dan tsunami, serta kerawanan sedang terhadap bencana banjir dan kekeringan. Secara jelas, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Risiko Bencana Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kecamatan	Nagari	Sumber
1	Longsor	Tinggi	Sungai Beremas	Aia Bangih	Katalog Desa/Kelurahan Rawan Longsor (kelas kerawanan tinggi dan sedang),
			Ranah Batahan	Batahan	
			Koto Balingka	Parik	
			Sungai Aua	Sungai Aua	



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kecamatan	Nagari	Sumber
			Lembah Malintang	Ujuang Gadiang	BNPB 2019
			Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	
				Rabi Jongor	
			Talamau	Kajai	
				Talu	
				Sinuruik	
			Pasaman	Aua Kuniang	
				Aia Gadang	
2	Tsunami	Tinggi	Luhak Nan Duo	Koto Baru	Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami (kelas kerawanan tinggi dan sedang), BNPB, 2019
			Kinali	Kinali	
			Sungai Beremas	Aia Bangih	
			Koto Balingka	Parik	
3	Banjir	Sedang	Ranah Bantahan	Desa Baru	Katalog Desa/Kelurahan Rawan Banjir (kelas kerawanan tinggi dan sedang), BNPB, 2019
				Batahan	
			Koto Balingka	Parik	
			Sungai Aua	Sungai Aua	
			Lembah Malintang	Ujuang Gadiang	
			Talamau	Kajai	
				Talu	
				Sinuruik	
			Pasaman	Lingkuang Aua	
				Aua Kuniang	
				Aia Gadang	
			Luhak Nan Duo	Koto Baru	
				Kapa	
			Sasak Ranah Pasisie	Sasak	
			Kinali	Kinali	
4	Kekeringan	Sedang	Sungai Aua	Sungai Aua	Katalog Desa/Kelurahan Rawan Kekeringan (kelas kerawanan tinggi dan sedang), BNPB, 2019
			Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	
			Pasaman	Aia Gadang	
			Luhak Nan Duo	Koto Baru	
				Kapa	



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No.	Jenis Bencana	Kelas Bahaya	Kecamatan	Nagari	Sumber
			Kinali	Katiagan	
				Kinali	

Sumber: BNPB (2019)

Sementara itu, dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Pasaman Barat 2014-2018 menunjukkan bahwa risiko bencana di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

1. Bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal teknologi memiliki tingkat bahaya sedang, tingkat kerentanan tinggi, dan tingkat kapasitas rendah, dengan tingkat risiko bencana tinggi;
2. Bencana gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ekstrim, dan tsunami memiliki tingkat bahaya tinggi, tingkat kerentanan yang tinggi, dan tingkat kapasitas rendah, dengan tingkat risiko bencana tinggi;
3. Bencana epidemi dan wabah penyakit, dan konflik sosial memiliki tingkat bahaya sedang, tingkat kerentanan tinggi, dan tingkat kapasitas yang rendah, dengan tingkat risiko bencana sedang.

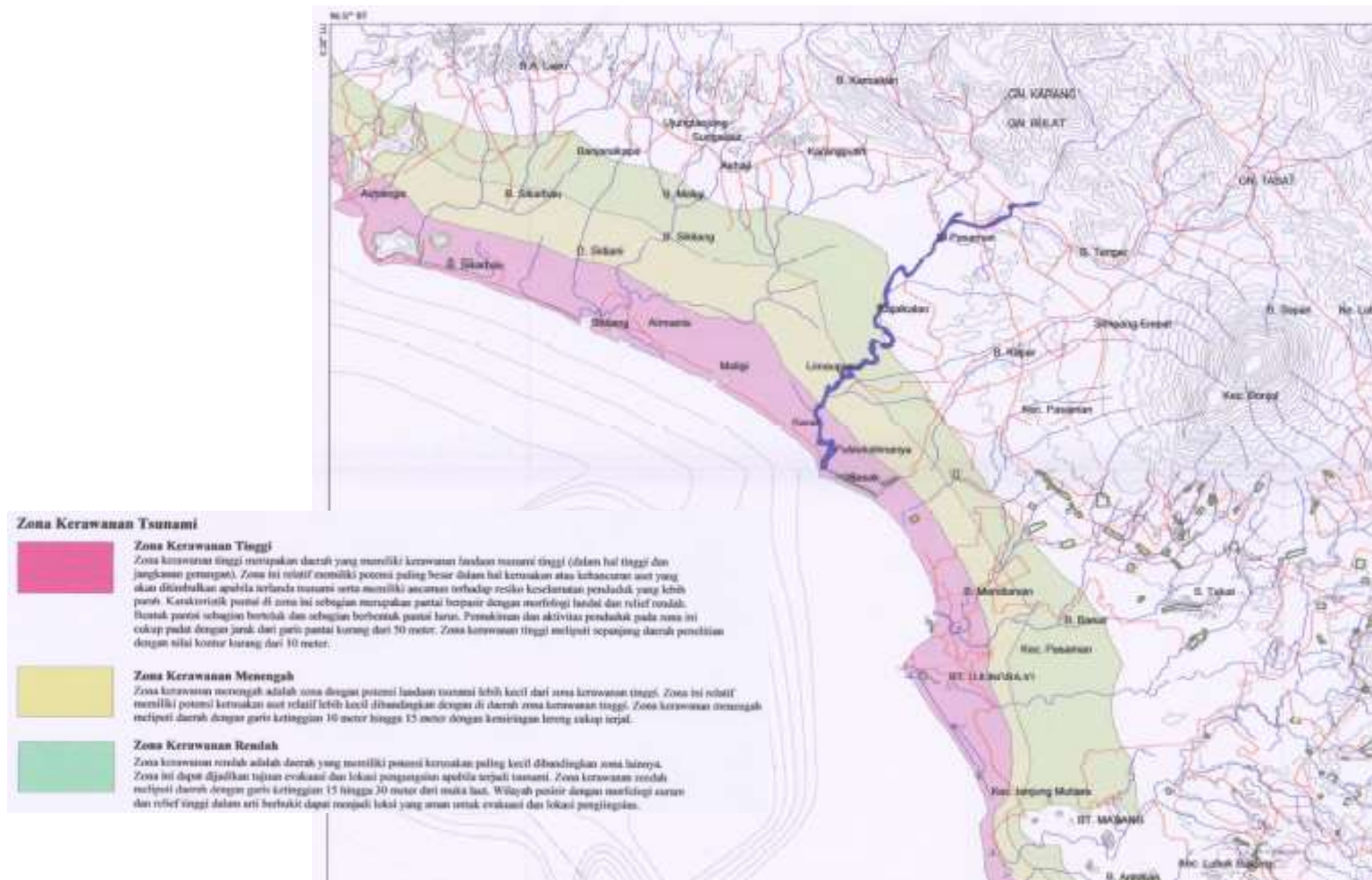
Tabel 2.17 Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Jenis Bahaya	Bahaya/ Ancaman		Kerentanan		Kapasitas Pemda		Risiko	
		Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas	Indeks	Kelas
1	Banjir	0,642	Sedang	0,770	Tinggi	0,247	Rendah	0,717	Tinggi
2	Gelombang ekstrim dan abrasi	0,819	Tinggi	0,680	Tinggi	0,213	Rendah	0,758	Tinggi
3	Gempa bumi	0,547	Sedang	0,823	Tinggi	0,231	Rendah	0,702	Tinggi
4	Cuaca ekstrim	0,865	Tinggi	0,824	Tinggi	0,213	Rendah	0,822	Tinggi
5	Tanah longsor	0,573	Sedang	0,717	Tinggi	0,245	Rendah	0,672	Tinggi
6	Kekeringan	0,643	Sedang	0,928	Tinggi	0,192	Rendah	0,783	Tinggi
7	Kebakaran hutan dan lahan	0,578	Sedang	0,837	Tinggi	0,192	Rendah	0,728	Tinggi
8	Tsunami	0,926	Tinggi	0,749	Tinggi	0,227	Rendah	0,806	Tinggi
9	Gagal teknologi	0,565	Sedang	0,825	Tinggi	0,193	Rendah	0,702	Tinggi
10	Epidemi dan wabah penyakit	0,333	Rendah	0,786	Tinggi	0,197	Rendah	0,594	Sedang
11	Konflik sosial	0,359	Sedang	0,826	Tinggi	0,193	Rendah	0,614	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Pasaman Barat 2014-2018



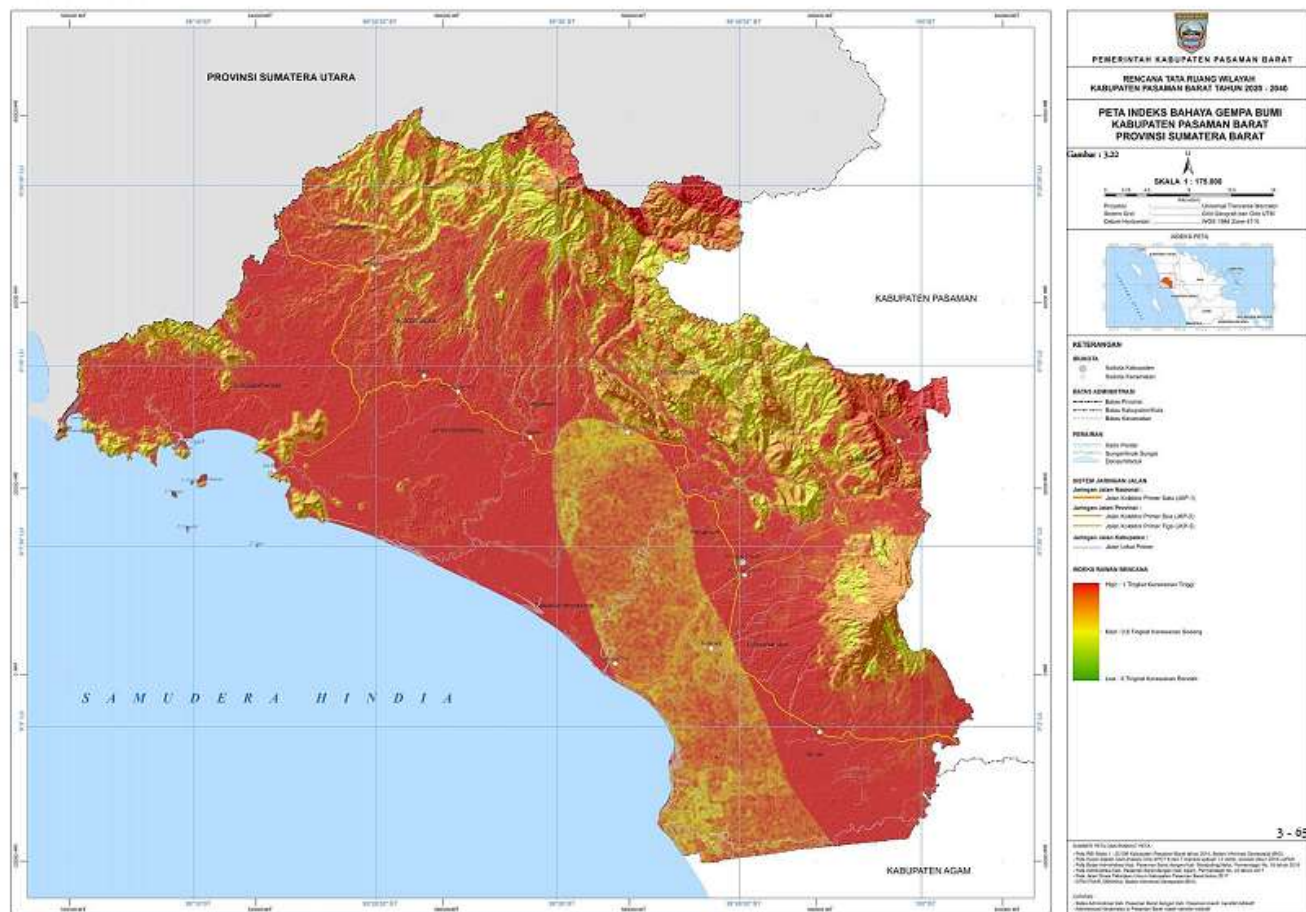
BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah



Gambar 2.10 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Kabupaten Pasaman Barat



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

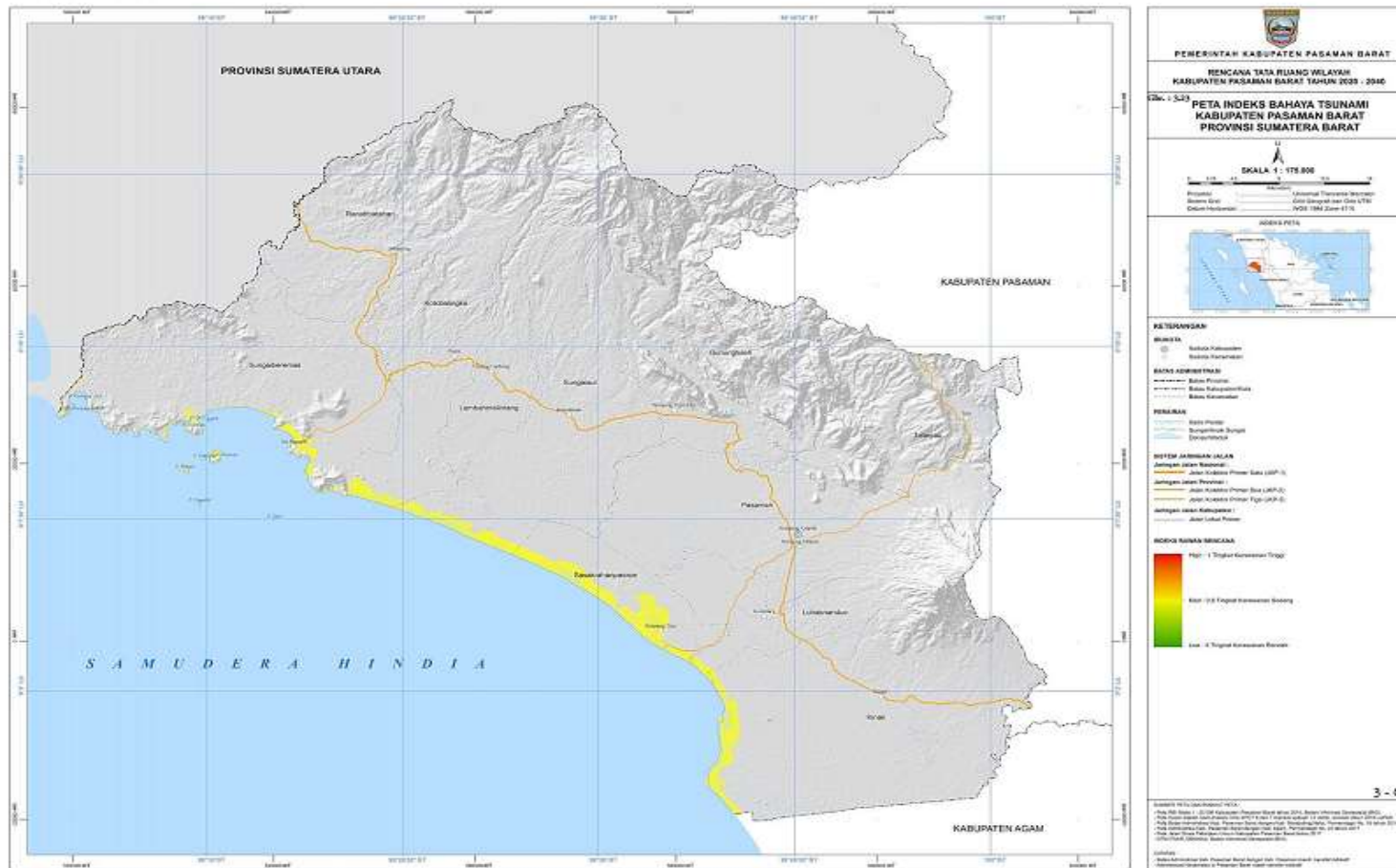


Gambar 2.12 Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

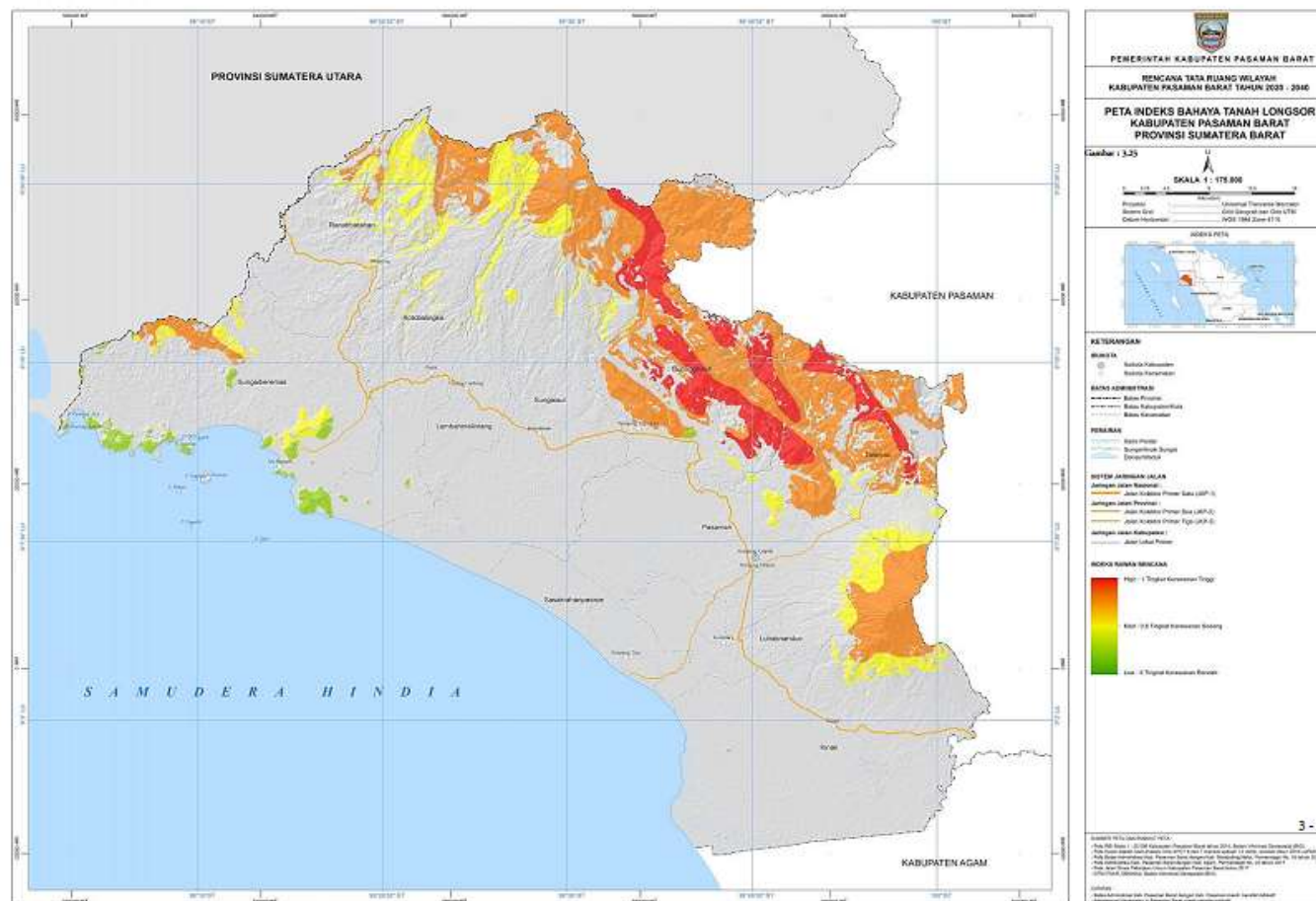


Gambar 2.13 Peta Bahaya Tsunami di Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

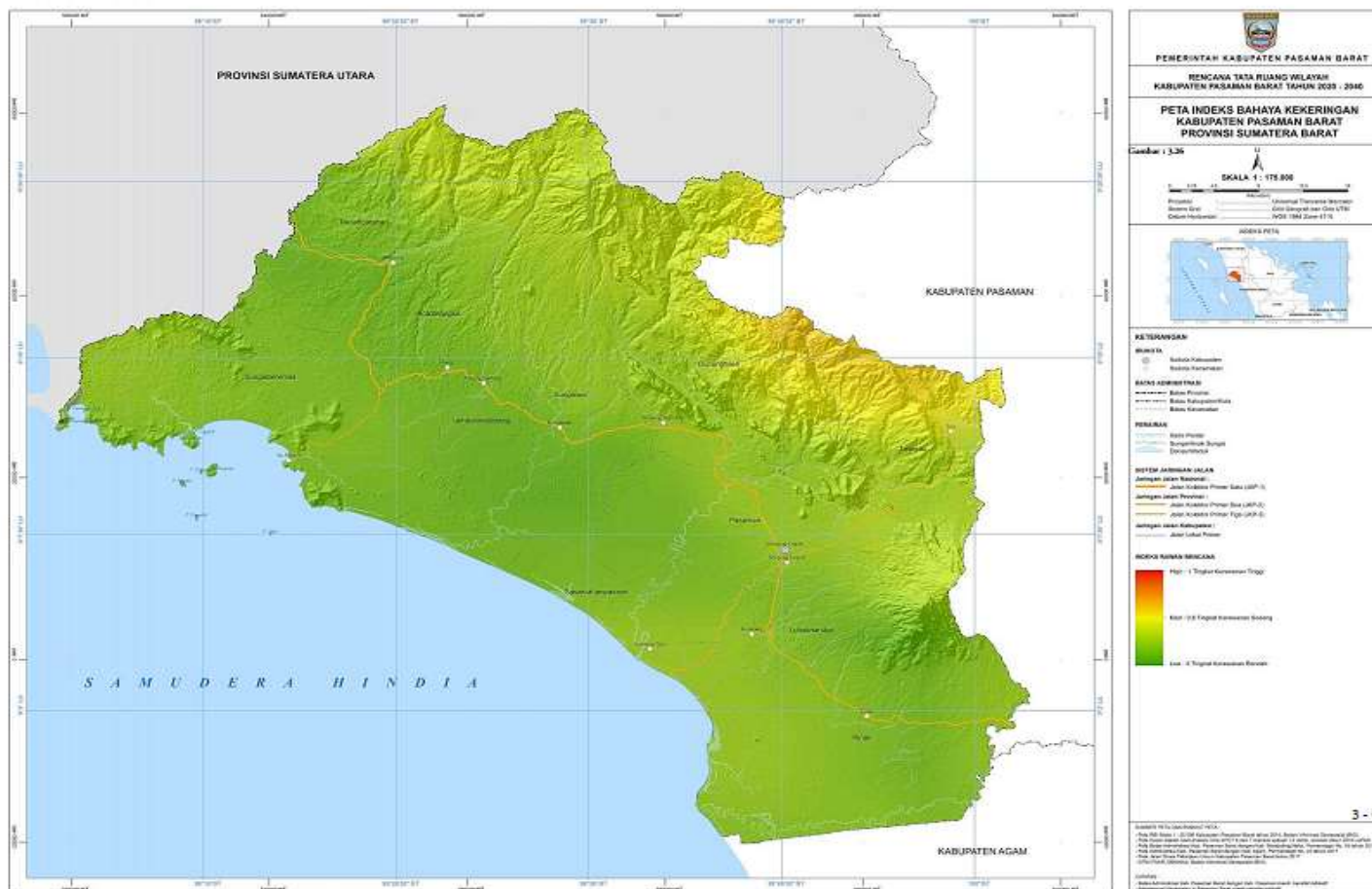


Gambar 2.14 Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

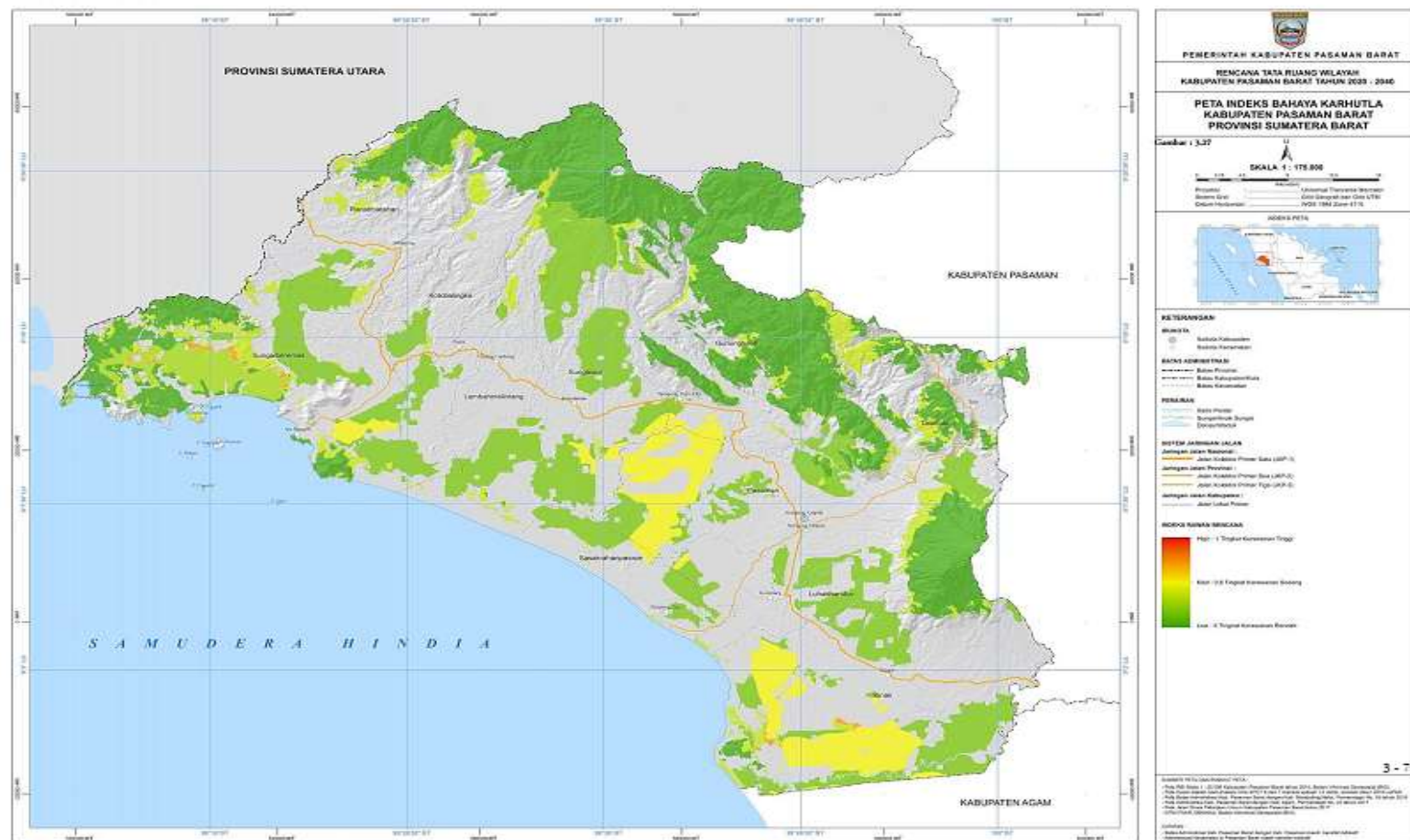


Gambar 2.15 Peta Bahaya Bencana Kekeringan Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040

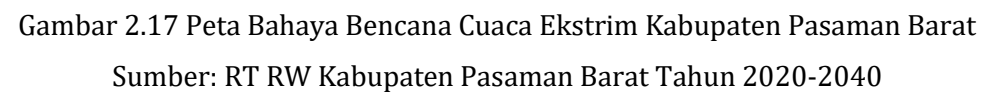
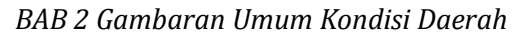


BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah



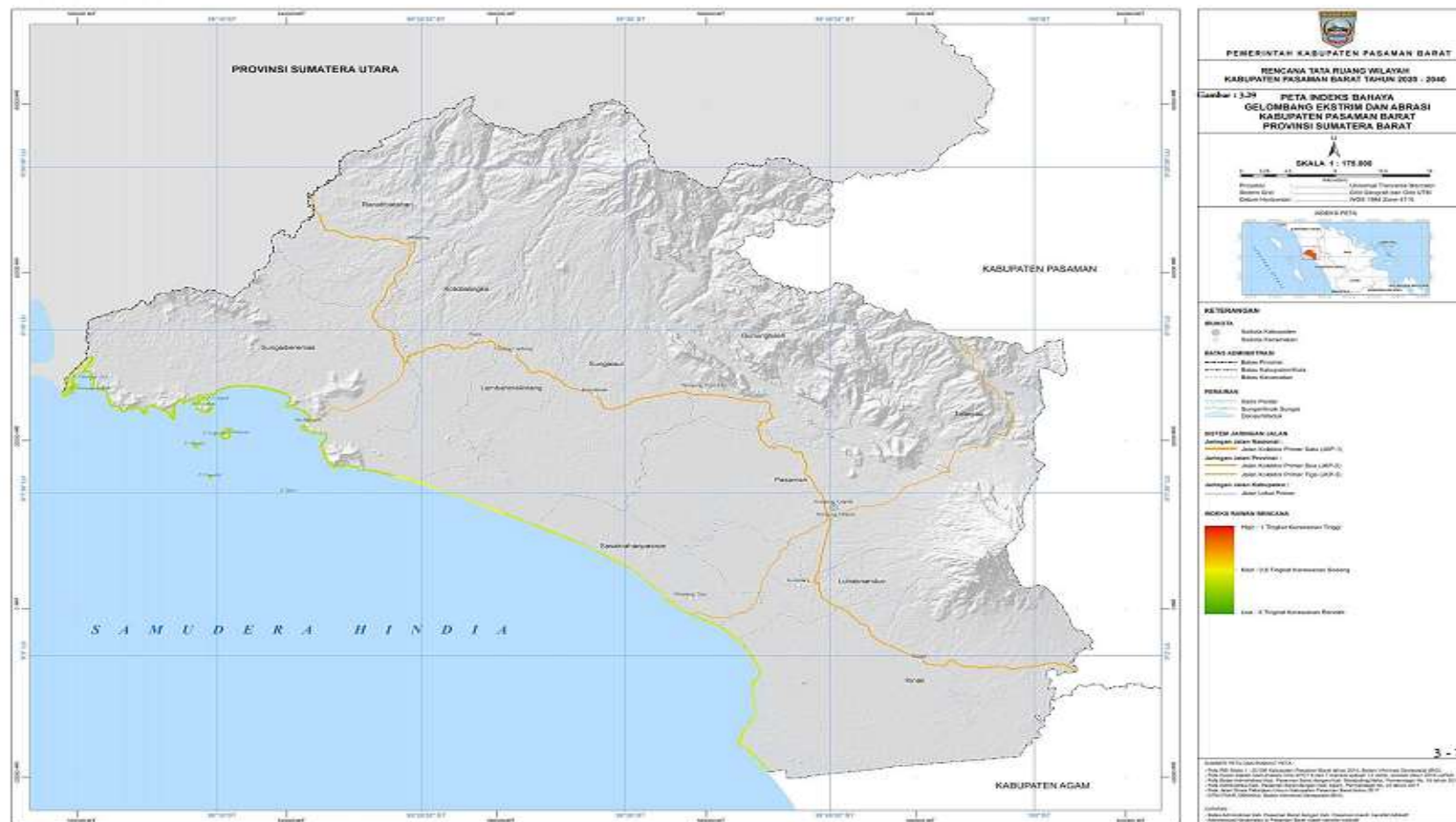
Gambar 2.16 Peta Bahaya Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan Kabupaten Pasaman Barat

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040





BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah



Gambar 2.18 Peta Bahaya Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Pasaman Barat
 Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040



4. Potensi Pengembangan Wilayah

Secara geografis, Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi pengembangan yang sangat besar. Wilayahnya yang luas termasuk wilayah pesisir, wilayah daratan, dan pegunungan.

1. Pengembangan Wilayah Pesisir

Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas:

- a) Ekosistem mangrove didominasi oleh jenis *Rhizophora Apiculata*, *Rhizophora Mucronata*, *Tekmizera Cemosia*, *Cumnitzera Cetlorea*, *Bruguera Paruclora*, *Nypa Fructican*, *Xycocarpus Granatum*, *Soneratia Alba*, *Avicenia Marina*, *Avicenia Alba* Dan *Bruguera Gimnorhiza*. Tingkat kerusakan hutan mangrove mencapai lebih dari 30%. Hutan mangrove tersebar di Katiagan, Mandiangin, Muara Bingung, Muara Tanjung, Sasak, Seberang Muaro Sasak, Muaro Sasak, Maligi, Sikilang, Sikabau, Air Bangis, Pulau Panjang, Pulau Unggas, Pulau Harimau, Pulau Tamiang, dan Pulau Pigago.
- b) Jenis terumbu karang merupakan karang tepi (*fringing reef*) yang terdapat disekeliling batas pulau. Distribusi terumbu karang yang masih baik ditemukan disekitar perairan Pulau Teluk Air Bangis. Potensi terumbu karang terdapat di Pulau Panjang, Pulau Telur, Pulau Pigogo, Pulau Tamiang, Gosong Bidai, Gosong Bidai Satu, Gosong Bidai Dua, Gosong Telur, dan Gosong Sikilang.
- c) Potensi padang lamun relatif sedikit, hanya dibeberapa kawasan terutama di pulau-pulau kecil dan di Teluk Tapang. Jenisnya didominasi oleh *Hallodule sp*, *Halophylla sp*, *Enhalus sp*, *Cymmodocea sp*, *Thalassia sp*, dan tipe vegetasi campuran dengan tegakan lamun yang disusun oleh dua atau lebih jenis lamun yang tumbuh bersamaan pada satu substrat. Potensi padang lamun di Teluk Tapang, Pulau Panjang, Pulau Unggas, Pulau Harimau, Pulau Tamiang, Pulau Pigogo, dan Mandiangin.
- d) Estuaria pesisir terdapat di sepanjang Pantai Katiagan, Muara Bingung, Sasak, Maligi, Sikilang, Sikabau, dan Air Bangis. Pada umumnya estuaria memiliki tipe estuari daratan pesisir dan estuari laguna.

Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Pasaman Barat dapat berupa:

- a) Perikanan laut dengan penangkapan ikan dengan jenis ikan petek, ikan mayung, ikan merah bambang, ikan kerapu, ikan cucut, ikan pari, ikan bawah, ikan alu-alu, ikan layang, ikan selar, ikan kuwe, ikan teri, ikan tembang, ikan lemuru, ikan gedek/parang, ikan kembung, ikan tenggiri, ikan tuna, ikan layur, ikan cakalang, ikan tongkol, udang windu, udang putih, udang dogol, cumi-cumi. Komoditas unggulan untuk dikembangkan terdiri atas ikan tuna, cakalang, tenggiri, teri, dan udang.
- b) Budi daya ikan air tawar, telah dimulai oleh pembudidaya ikan secara turun temurun. Wilayah yang digunakan untuk usaha budidaya ikan air tawar berupa



kolam, sawah, dan perairan umum. Penggunaan sawah untuk usaha budidaya ikan banyak terdapat di Kecamatan Talamau, dengan tumpang sari palawija ikan, penggunaan perairan umum untuk keramba terdapat di Kecamatan Ranah Batahan, dan usaha lubuk larangan terdapat diseluruh kecamatan. Jenis komoditi yang banyak diusahakan adalah ikan mas, nila, dan ikan garing.

- c) Budidaya ikan air payau sudah mulai di Air Bangis pada tahun 1987 melalui tambak semi intensif seluas 0,5 ha dengan komoditi udang windu. Hasil usaha budidaya ini cukup baik, namun karena sulitnya mendapatkan benur, kurangnya keterampilan, dan keyakinan masyarakat, maka usaha tersebut tidak berlanjut sebagaimana yang diharapkan. Namun, kegiatan budidaya air payau mulai dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat pesisir.
- d) Budidaya ikan laut pertama kali dilakukan pada tahun 1987 di sekitar Pulau Panjang dengan komoditi rumput laut. Usaha ini diprakarsai oleh Area Development Project (ADP) yang ada di Pasaman Barat. Secara teknis hasil usaha ini cukup baik, namun karena pada saat itu komoditi rumput laut masih langka dan masyarakat belum juga mengkonsumsi rumput laut sebagai bahan makanan dan minuman, serta skala usaha yang dilakukan masih relatif kecil, maka untuk memasarkan hasil produksi ditemui kendala, karena jumlah produksi yang dihasilkan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar.
- e) Usaha budidaya kerapu dengan keramba jaring apung di sekitar Air Bangis. Keramba jaring apung yang dikembangkan ber jumlah 3 (tiga) unit.
- f) Wisata bahari di pantai dan pulau-pulau kecil. Pesisir berpotensi sebagai destinasi wisata terdiri atas Muaro Bingung, Sasak, Sikilang, dan Air Bangis. Pulau berpotensi sebagai destinasi wisata terdiri atas Pulau Tamiang, Pulau Pigago, Pulau Taluo, dan pulau kecil lainnya.

Dari lima kecamatan pesisir, sebagian besar penduduk yang tinggal di wilayah pesisir bermata pencaharian sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut. Kegiatan penangkapan ikan di laut telah dilakukan nelayan secara turun temurun. Namun, karena berbagai keterbatasan di bidang perekonomian, pendidikan, dan faktor sosial budaya serta sulitnya sarana transportasi darat sangat berdampak buruk terhadap perekonomian dan status sosial masyarakat pesisir tersebut.

2. Pengembangan Kawasan Pertanian

Pertanian merupakan sektor ekonomi unggulan dan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi pengembangan pada sub-bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

a) Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh kesamaan tipologi agroekosistem untuk mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan



tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan data BPS, komoditas padi sawah mempunyai luas tanam, luas tanam, produksi, dan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan padi ladang. Produksi padi sawah dan padi ladang tertinggi terdapat di Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Talamau, Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Kinali, dan Kecamatan Gunung Tuleh.

b) Hortikultura

Komoditas hortikultura Kabupaten Pasaman Barat bermacam-macam. Produksi sayuran terdiri atas cabe, ketimun, terong, kacang panjang, bayam, buncis, kangkung, dan cabe rawit. Potensi pengembangan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Talamau, Luhak Nan Duo, Gunung Tuleh, Koto Balingka, Lembah Melintang, dan Ranah Batahan.

c) Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas perkebunan tanaman tahunan dan perkebunan tanaman musiman. Komoditas unggulan terdiri atas 1) kelapa sawit, 2) kakao, 3) karet, 4) nilam, 5) aren, 6) kelapa, dan 7) kopi. Wilayah potensial untuk pengembangan perkebunan terdapat di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pasaman Barat, terutama Sungai Aur, Kinali, Pasaman, dan Luhak Nan Duo.

d) Peternakan

Peternakan di Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Populasi ternak terbesar di Kabupaten Pasaman Barat adalah sapi potong, kambing, kerbau dan unggas, terutama ayam petelur dan ayam pedaging. Daerah pengembangan peternakan adalah Kecamatan Kinali, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Pasaman.

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai komoditi andalan dan unggulan di Propinsi Sumatera Barat dalam penetapannya diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti juga dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.46/204/DTPHP/III/2021 Tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, maka sentra-sentranya meliputi :

a) Kawasan Tanaman pangan

- Padi meliputi Kec. Talamau, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang dan Kec. Ranah Batahan
- Kawasan jagung meliputi Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang
- Kawasan ubi jalar meliputi Kec. Talamau

b) Kawasan Holtikultura

- Kawasan jeruk meliputi Kec. Pasaman dan Kec. Lembah Melintang



- Kawasan sayur lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo
 - Kawasan aneka cabai meliputi Kecamatan Talamau
 - Kawasan buah lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo (alpukat)
 - Kawasan manggis meliputi Kec. Talamau, Kec. Gunung Tuleh dan Kec. Pasaman
- c) Kawasan Peternakan
- Kawasan peternakan sapi potong meliputi Kec. Kinali, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Pasaman dan Kec. Sasak Ranah Pasisie
 - Kawasan Peternakan Kerbau meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali dan Kec. Talamau
 - Kawasan Peternakan Kambing meliputi Kec. Sasak Ranah Pasisie, Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Sungai Beremas, Kec. Pasaman
 - Kawasan Peternakan Unggas meliputi Kec. Kinali, Kec. Talamau, Kec. Pasaman, Kec. Ranah Batahan, Kec. Lembah Melintang, Kec. Sungai Aur, Kec. Koto Balingka dan Kec. Luhak Nan Duo.
- d) Kawasan Perkebunan
- Kawasan Kopi, di Kecamatan Gn. Tuleh, Talamau, Kinali
 - Kawasan Kakao, di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kinali, Talamau
 - Kawasan Kelapa Sawit, di Kec. Luhak Nan Duo, Pasaman, Kinali, Sasak Ranah Pasisie, Sei. Aur, Lembah Melintang, Koto Balingka, Ranah Batahan, Sei. Beremas, Talamau
 - Kawasan Karet, Kec. Sei. Aur, Gunung Tuleh, Talamau, Ranah Batahan
 - Tanaman Perkebunan Lainnya, (Nilam) di Kecamatan Kinali dan Talamau
3. Kawasan Permukiman
- Kawasan permukiman padat berada di wilayah perkotaan, khususnya Kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo, Kinali, dan Lembah Melintang. Kawasan permukiman lebih banyak terkonsentrasi di Ibukota Kecamatan maupun pusat pemerintahan nagari. Kawasan pesisir pantai wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar juga telah dimanfaatkan untuk kawasan permukiman beserta fasilitasnya mencapai 60% dari panjang pantai yang ada. Permukiman di sepanjang pantai dapat dikelompokkan menjadi dua (2), yaitu: permukiman yang padat terdapat di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dan Kecamatan Kinali; dan permukiman yang kurang padat berada pada Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Lembah Malintang.
4. Kawasan Industri dan Pariwisata
- Kegiatan industri pengolahan sudah berkembang di Kabupaten pasaman Barat. Jumlah industri yang ada sekitar 1.388 unit, dengan jumlah tenaga kerja sekitar 4.069 jiwa, dan nilai produksi sekitar Rp. 228.226.029.000. Jumlah industri terbanyak terdapat di Kecamatan Pasaman 292 unit, Kecamatan Talamau 236 unit, dan Kecamatan Luhak Nan Duo 178 unit
- Menurut data BPS Kabupaten Pasaman Barat, objek wisata terdiri atas wisata alam, sejarah, dan agrowisata. Wisata alam meliputi wisata bahari, panorama, cagar alam, danau, dan sumber air panas. Wisata bahari dan cagar alam mempunyai jumlah tertinggi, masing-masing 19 lokasi dan 27 lokasi. Wisata



sejarah tertinggi adalah sejarah 3 lokasi. Agrowisata hanya 2 lokasi. Wisata bahari terbanyak di Kecamatan Sungai Beremas, cagar alam terbanyak di Kecamatan Pasaman.

Industri wisata yang telah berkembang terdiri atas hotel, penginapan, agen perjalanan, toko cinderamata, rumah makan dan restoran. Jumlah hotel tertinggi terdapat di Kecamatan Pasaman. Penginapan, agen perjalanan, dan toko cinderamata baru terdapat di Kecamatan Pasaman. Rumah makan dan restoran tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Pasaman.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 178);

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 dan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Pasaman Barat termasuk pada Destinasi Pariwisata Propinsi (DPP) Bukittinggi dan sekitarnya, yang mencakup wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dan Kota Payakumbuh dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Taman Bumi (Geopark), yang meliputi Kawasan Geowisata dan Budaya Pantai Sasak – Talamau dan sekitarnya.

Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat (RPIP) Tahun 2018-2038, Kabupaten Pasaman Barat menjadi lokasi pengembangan industri:

- 1) Industri pengolahan hasil laut dan perikanan
 - a. Pembekuan ikan dan hasil laut lain (laut)
 - b. Pengalengan ikan dan hasil laut lainnya (Laut)
 - c. Pengemasan Ikan (tawar)
 - d. Pengeringan Ikan (tawar)
- 2) Industri pengolahan kakao
- 3) Industri Pengolahan makanan (jagung)
- 4) Industri Pengolahan Minyak Atsiri
- 5) Industri Maritim (kapal tangkap, kapal penumpang, komponen kapal)
- 6) Industri alsintan, (Alat mesin pertanian, alat pengupas, alat penyuling, alat pengering, alat dan mesin rumah tangga)



2.1.2 Demografi

1. Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk memengaruhi perkembangan sosial yang berimplikasi terhadap pembangunan baik dari segi perencanaan maupun evaluasi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat tercatat 426.391 jiwa. Pada tahun 2017 naik menjadi 429.904 dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 0,83 persen. Pada tahun 2018 tumbuh 0,40 persen sehingga jumlah penduduk pada tahun 2018 menjadi 431.575 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Pasaman Barat 433.761 jiwa atau tumbuh 0,51 persen. Terakhir pada Tahun 2020, jumlah penduduk Pasaman Barat naik menjadi 435.059 jiwa, atau tumbuh 0,30%.

Tabel 2.18 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per kecamatan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	Sungai Beremas	14.088	13.355	27.443
2	Ranah Batahan	13.833	13.685	27.518
3	Koto Balingka	15.453	15.362	30.815
4	Sungai Aur	18.255	17.656	35.911
5	Lembah Melintang	25.203	24.997	50.200
6	Gunung Tuleh	12.690	12.311	25.001
7	Talamau	15.771	14.908	30.679
8	Pasaman	38.454	37.775	76.229
9	Luhak Nan Duo	22.678	22.015	44.693
10	Sasak Ranah Pasisie	7.768	7.509	15.277
11	Kinali	36.425	34.868	71.293
Jumlah		220.618	214.441	435.059

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat (2021)

Pada tahun 2020, Kecamatan Pasaman sebagai ibukota kabupaten merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020. Jumlah penduduk Kecamatan Pasaman mencapai 76.229 jiwa. Sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu 15.277 jiwa. Tabel di atas memperlihatkan jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut jenis kelamin per kecamatan tahun 2020.

Salah satu permasalahan kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat adalah penyebaran yang tidak merata, hal ini akan berdampak terhadap perencanaan pola pembangunan yang akan dilaksanakan. Secara umum, ketidakmerataan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keadaan geografis, letak pusat pemerintahan dan perekonomian, pusat pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, serta fasilitas umum lainnya yang merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk sehingga menyebabkan penduduk terkonsentrasi pada suatu wilayah.

Pada Tahun 2020, kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 111,90 jiwa/km². Artinya, terdapat 111 hingga 112 jiwa pada setiap km² di Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Luhak an Duo memiliki



jumlah penduduk 44.693 jiwa dengan luas wilayah hanya 174,21 km², sehingga kecamatan ini merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 256,55 jiwa per km², melebihi kepadatan penduduk Kecamatan Pasaman sebagai ibukota kabupaten yang hanya 149,78 jiwa per km². Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman Barat per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.12

Tabel 2.19 Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk	Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Sungai Beremas	27.443	6,31	440,48	62,30
2	Ranah Batahan	27.518	6,33	354,88	77,54
3	Koto Balingka	30.815	7,08	340,78	90,42
4	Sungai Aur	35.911	8,25	420,16	85,47
5	Lembah Melintang	50.200	11,54	263,77	190,32
6	Gunung Tuleh	25.001	5,75	453,97	55,07
7	Talamau	30.679	7,05	324,24	94,62
8	Pasaman	76.229	17,52	508,93	149,78
9	Luhak Nan Duo	44.693	10,27	174,21	256,55
10	Sasak Ranah Pasisie	15.277	3,51	123,71	123,49
11	Kinali	71.293	16,39	482,61	147,72
Pasaman Barat		435.059	100	3.887,77	111,90

Sumber: RT RW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Pasaman Barat (Data Diolah)

Penduduk Pasaman Barat bertumbuh dengan laju rata-rata dari tahun 2016-2020 sebesar 2,03%. Jika dilihat per wilayah, terlihat bahwa Nagari Muaro Kiawai di Kecamatan Gunung Tuleh menunjukkan pertumbuhan penduduk paling tinggi dalam kurun waktu 2016-2020, yakni 6,29%, diikuti oleh Nagari Aia Bangih di Kecamatan Sungai Beremas, yang tumbuh sebesar 6,26% pada periode yang sama. Sementara itu, ada beberapa nagari yang menunjukkan pertumbuhan penduduk minus (negatif) selama periode 2016-2020. Pengurangan terbesar terjadi di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sei. Aur, yang tumbuh -3,80% diikuti Nagari Koto Baru yang tumbuh -3,04%.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut nagari kecamatan dan nagari selama periode 2016-2020 dapat digambarkan pada Tabel 2.20.



Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Menurut Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
			2016	2017	2018	2019	2020	%
1	Sungai Beremas	Aia Bangih	25.826	26.395	27.348	27.491	27.443	6,26
2	Lembah Melintang	Ujung Gading	48.431	48.704	49.800	49.959	50.200	3,65
3	Pasaman	Lingkuang Aua	39.110	39.599	40.302	40.797	40.925	4,64
		Aua Kuniang	20.876	21.177	21.698	21.825	21.885	4,83
		Aia Gadang	12.942	13.089	13.214	13.348	13.419	3,69
4	Talamau	Kajai	13.329	13.571	13.477	13.357	13.407	0,59
		Talu	9.121	9.169	9.233	9.241	9.251	1,43
		Sinuruik	8.084	7.997	8.118	8.001	8.021	-0,78
5	Kinalli	Kinali	66.326	67.126	66.808	67.378	67.580	1,89
		Katiagan	3.665	3.734	3.779	3.743	3.713	1,31
6	Gunung Tuleh	Muaro Kiawai	10.307	10.467	10.455	10.793	10.955	6,29
		Jonggor	13.834	13.826	13.969	14.012	14.046	1,53
7	Ranah Batahan	Batahan	18.719	18.778	19.139	19.443	19.467	4,00
		Desa Baru	7.717	7.721	7.787	7.982	8.051	4,33
8	Koto Balingka	Parit	29.806	29.971	30.163	30.716	30.815	3,39
9	Sungai Aur	Sungai Aua	37.329	37.488	35.444	35.830	35.911	-3,80
10	Luhak Nan Duo	Koto Baru	33.706	33.732	33.671	32.547	32.681	-3,04
		Kapa	11.600	11.648	11.844	11.962	12.012	3,55
11	Sasak Ranah Pasisia	Sasak	15.663	15.712	15.326	15.336	15.277	2,47
Jumlah			426.391	429.904	431.575	433.761	435.059	2,03

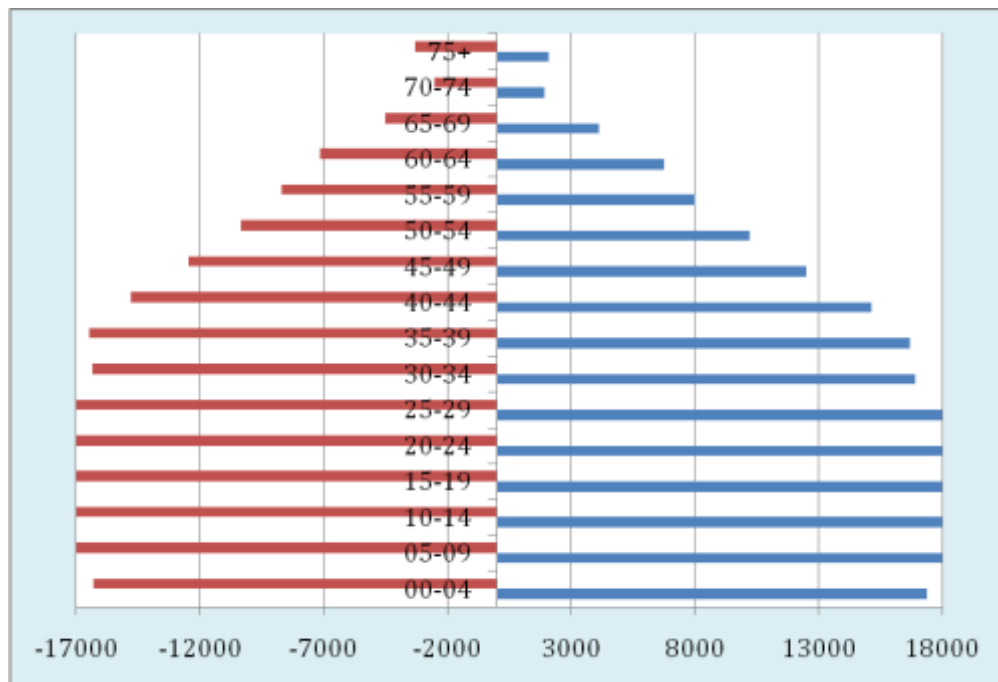
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat (Data Diolah)

2. Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur

Dari sisi komposisi penduduk, Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi perubahan yang cukup mencolok selama periode 2015-2019. Hal ini ditandai dengan bagian dasar (0-25 tahun) lebih lebar dari dibandingkan dengan usia diatasnya. Di pihak lain bagian atas yang menunjukkan usia lansia cenderung mengecil sejalan dengan meningkatnya umur. Bagian bawah, yaitu pada kelompok 0-5 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan usia 10-14 tahun serta pada waktu yang bersamaan usia



produktif cenderung mengecil. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 2.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kelompok Umur pada Tahun 2020 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Data Diolah)



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.21
Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Kelompok Umur	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Total (Jiwa)	Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Total (Jiwa)	Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Total (Jiwa)	Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Total (Jiwa)	Lk (Jiwa)	Pr (Jiwa)	Total (Jiwa)
1	00-04'	14.632	13.702	28.334	13.075	12.164	25.239	16.423	15.160	31.583	17.661	16.546	34.207	17.381	16.281	33.662
2	05-09'	23.494	21.645	45.139	23.366	21.619	44.985	23.195	21.564	44.759	23.172	21.479	44.651	23.244	21.614	44.858
3	10-14'	24.190	22.810	47.000	24.444	22.819	47.263	23.882	22.230	46.112	23.703	21.937	45.640	23.647	21.948	45.595
4	15-19	22.377	21.231	43.608	22.633	21.571	44.204	23.056	21.909	44.965	23.397	22.136	45.533	22.438	21.410	43.848
5	20-24	20.615	19.934	40.549	21.013	20.117	41.130	21.017	20.061	41.078	21.044	20.257	41.301	20.994	20.038	41.032
6	25-29	18.111	17.508	35.619	18.065	17.564	35.629	17.819	17.243	35.062	17.738	17.105	34.843	18.309	17.360	35.669
7	30-34	19.076	18.426	37.502	18.629	17.824	36.453	17.863	17.197	35.060	17.152	16.562	33.714	16.898	16.347	33.245
8	35-39	16.800	15.876	32.676	17.577	16.886	34.463	17.190	16.551	33.741	16.959	16.711	33.670	16.698	16.469	33.167
9	40-44	14.497	13.863	28.360	14.711	14.118	28.829	14.252	14.074	28.326	14.600	14.368	28.968	15.141	14.788	29.929
10	45-49	11.627	11.120	22.747	12.431	11.985	24.416	11.939	11.940	23.879	12.172	12.044	24.216	12.517	12.461	24.978
11	50-54	9.955	10.093	20.048	9.727	9.928	19.655	9.821	9.981	19.802	9.914	10.148	20.062	10.212	10.348	20.560
12	55-59	8.342	8.127	16.469	8.754	8.695	17.449	8.365	8.563	16.928	8.295	8.741	17.036	8.023	8.673	16.696
13	60-64	5.960	5.973	11.933	5.979	6.150	12.129	6.179	6.350	12.529	6.210	6.438	12.648	6.784	7.152	13.936
14	65-69	3.218	3.291	6.509	3.748	3.755	7.503	3.908	3.870	7.778	4.080	4.241	8.321	4.115	4.522	8.637
15	70-74	2.184	2.549	4.733	1.978	2.521	4.499	1.895	2.377	4.272	1.758	2.287	4.045	1.940	2.526	4.466
16	> 75	2.312	2.853	5.165	2.600	3.458	6.058	2.417	3.284	5.701	1.988	2.918	4.906	2.106	3.301	5.407
Jumlah		217.390	209.001	426.391	218.730	211.174	429.904	219.221	212.354	431.575	219.843	213.918	433.761	220.447	215.238	435.685

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari capaian indikator pembangunan yang mencerminkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan dana pembangunan yang merata di berbagai bidang terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta terpenuhinya kebutuhan fasilitas publik (infrastruktur).

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama yang menjadi ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; Kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Dengan ini, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas. Indikasi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dapat ditunjukkan dengan analisis beberapa indikator sebagai berikut.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang menjadi tolok ukur bagi kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Adapun indikator yang digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB memperlihatkan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang dilakukan di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Seperti terlihat pada tabel di atas, lapangan usaha yang menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Pasaman Barat adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yakni Rp. 6.074.214,69 (dalam juta rupiah) pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun 2019, yakni Rp. 6.304.976,82 (dalam Juta Rupiah), maupun Tahun 2018, yakni Rp. 6.250.714,772 (dalam Juta Rupiah). Di posisi kedua, terdapat Lapangan Usaha Industri Pengolahan, dengan PDRB sebesar Rp. 2.027.060,70 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2020. PDRB pada sektor pengolahan menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya sejak Tahun 2016, namun trend-nya sedikit meningkat, yakni dari Rp. 2.007.721,83 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2016.

Berikut adalah Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2016 – 2020 Atas Dasar Harga Berlaku:



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.22 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp.	%	Rp	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.610.552,01	43,85	5.936.125,81	43,33	6.250.714,772	42,80	6.304.976,82	40,97	6.074.214,69	39,84
B	Pertambangan dan Penggalian	220.061,99	1,72	232.745,82	1,70	256.462,06	1,76	281.098,27	1,83	276.433,43	1,81
C	Industri Pengolahan	2.007.721,83	15,69	2.113.752,41	15,43	2.162.680,44	14,81	2.013.626,55	13,08	2.027.060,70	13,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.066,56	0,02	3.222,18	0,02	3.431,84	0,02	3.955,00	0,03	3.756,92	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.410,60	0,01	1.507,47	0,01	1.615,54	0,01	1.770,30	0,01	1.818,62	0,01
F	Konstruksi	830.010,04	6,49	915.025,63	6,68	1.008.708,39	6,91	1.164.776,87	7,57	1.182.976,81	7,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.429.247,91	11,17	1.550.565,40	11,32	1.718.525,21	11,77	1.942.734,45	12,62	1.910.222,02	12,53
H	Transportasi dan Pergudangan	619.769,19	4,84	676.056,89	4,93	735.997,98	5,04	854.736,35	5,55	787.078,73	5,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	71.677,93	0,56	79.400,19	0,58	88.250,25	0,60	104.822,76	0,68	94.144,80	0,62
J	Informasi dan Komunikasi	540.226,52	1,60	610.650,45	4,46	682.699,97	4,68	789.605,76	5,13	852.730,11	5,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	257.119,16	2,01	265.669,83	1,94	273.738,45	1,87	294.793,01	1,92	302.198,86	1,98



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

L	Real Estate	186.028,82	1,45	197.157,78	1,44	212.000,32	1,45	240.259,00	1,56	243.363,79	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	7.457,60	0,06	7.963,89	0,06	8.501,67	0,06	9.490,74	0,06	9.294,70	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489.387,41	3,83	541.602,46	3,95	584.601,95	4,00	670.236,56	4,35	731.749,09	4,80
P	Jasa Pendidikan	305.786,58	2,39	332.119,89	2,42	356.393,54	2,44	416.743,00	2,71	439.720,10	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.465,11	1,06	148.272,37	1,08	161.430,73	1,11	184.357,16	1,20	204.578,29	1,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	79.260,72	0,62	87.857,88	0,64	97.425,10	0,67	112.760,00	0,73	104.273,00	0,68
PDRB		12.794.249,97	100	13.699.696,35	100	14.603.178,20	100	15.390.742,58	100	15.245.614,66	100

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Secara total, PDRB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 atas dasar harga berlaku menunjukkan trend kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari Rp. 12.794.249,97 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2016 menjadi Rp. 15.245.614,66 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2020. Namun sedikit terjadi penurunan dari Tahun 2019, yakni Rp. 15.390.742,58 (dalam juta rupiah).

Pada tabel di atas, terlihat bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 39,84% terhadap PDRB Kabupaten Pasaman Barat. Oleh sebab itu, daya ungkitnya terhadap perekonomian Kabupaten Pasaman Barat paling besar. Penurunan sedikit saja PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berdampak paling besar terhadap perekonomian. Di posisi kedua, lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Pasaman Barat adalah industri pengolahan, yakni 13,30%. Pada Tahun 2020, sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan sebesar -2,32%.

Berikut adalah PDRB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (persen) berdasarkan harga konstan:



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.23 PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		RP. juta	%	RP. juta	%	RP. juta	%	RP. juta	%	RP. juta	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.336.291,53	43,99	4.491.556,40	43,25	4.721.302,11	43,21	4.891.529,16	42,86	4.828.667,31	42,89
B	Pertambangan dan Penggalian	145.819,14	1,48	152.024,97	1,46	164.461,15	1,51	173.943,09	1,52	169.663,40	1,51
C	Industri Pengolahan	1.630.515,42	16,54	1.698.636,78	16,36	1.704.063,68	15,60	1.637.383,36	14,35	1.599.416,04	14,21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.089,79	0,02	2.162,09	0,02	2.237,54	0,02	2.282,78	0,02	2.142,38	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.176,39	0,01	1.242,94	0,01	1.291,51	0,01	1.362,73	0,01	1.395,82	0,01
F	Konstruksi	582.520,68	5,91	635.461,61	6,12	681.766,88	6,24	740.241,99	6,49	709.008,65	6,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.069.889,56	10,85	1.156.159,33	11,13	1.242.903,19	11,38	1.342.598,11	11,76	1.327.426,08	11,79
H	Transportasi dan Pergudangan	468.679,54	4,75	505.256,35	4,87	542.065,85	4,96	593.110,66	5,20	527.619,26	4,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	47.157,10	0,48	51.510,24	0,50	55.574,03	0,51	60.933,99	0,53	53.889,10	0,48
J	Informasi dan Komunikasi	546.957,71	5,55	608.303,55	5,86	665.407,37	6,09	744.059,33	6,52	803.901,72	7,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	178.424,74	1,81	182.368,59	1,76	184.330,38	1,69	190.316,25	1,67	191.669,89	1,70
L	Real Estate	134.933,22	1,37	141.344,83	1,36	148.231,00	1,36	159.287,66	1,40	159.336,40	1,42
M,N	Jasa Perusahaan	5.302,01	0,05	5.602,99	0,05	5.916,08	0,05	6.314,74	0,06	6.064,30	0,05



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

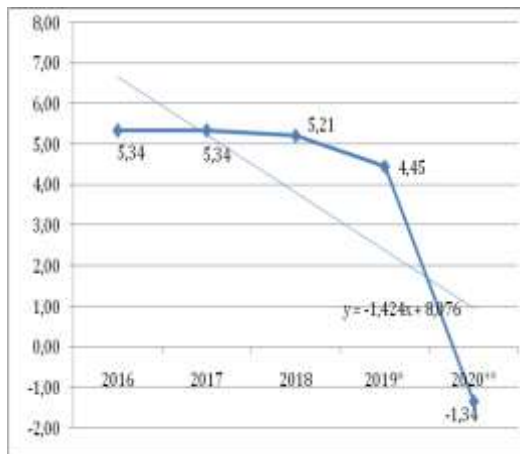
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	337.529,50	3,42	354.137,67	3,41	378.685,34	3,47	402.295,75	3,53	398.774,67	3,54
P	Jasa Pendidikan	210.323,77	2,13	225.053,29	2,17	239.616,97	2,19	262.164,00	2,30	273.962,20	2,43
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106.124,43	1,08	114.685,20	1,10	123.479,58	1,13	133.323,65	1,17	143.008,04	1,27
R,S,T,U	Jasa lainnya	53.884,94	0,55	58.884,70	0,57	64.292,96	0,59	70.686,00	0,62	63.507,00	0,56
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		9.857.619,49	100	10.384.391,53	100	10.925.625,62	100	11.411.833,24	100	11.259.452,26	100

Sumber: BPS Pasaman Barat

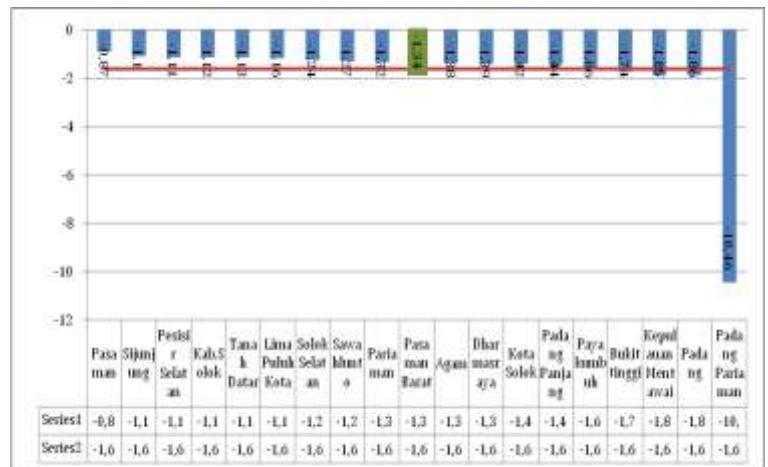


Seperti diketahui PDRB atas dasar harga berlaku menurut sektor digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian atau peranan setiap sektor dalam perekonomian sebuah daerah. Sektor yang menunjukkan peran terbesar menjadi basis perekonomian sebuah daerah. Oleh sebab itu, berdasarkan data di atas, sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Pasaman Barat. Namun, jika ingin menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, maka yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Sama halnya dengan PDRB berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan harga berlaku juga menunjukkan trend meningkat dalam 5 (lima) Tahun terakhir, yakni dari Rp. 9.857.619,49 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2016 menjadi Rp. 11.259.452,26 (dalam juta rupiah) pada Tahun 2020, meski sedikit mengalami penurunan dari Rp. 11.411.833,24 (dalam juta rupiah). Berikut adalah trend pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 berdasarkan harga konstan.



Grafik 2.2a Pertumbuhan PDRB (persen) Berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020 (Sumber: BPS)



Grafik 2.2b Posisi Relatif Pertumbuhan PDRB (Persen) Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Sumber: BPS)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2016, ekonomi Pasaman Barat tumbuh di angka 5,34% dan bertahan di angka yang sama hingga Tahun 2017. Pada Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat melambat menjadi 5,21%, dan terus melambat menjadi 4,45% pada Tahun 2019. Puncak penurunan terjadi pada Tahun 2020, ke angka -1,34. Penurunan hingga ke angka -1,34 di tahun 2020 dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang melanda dunia. Jika dilihat secara lebih dekat, penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dipengaruhi oleh sektor pertanian, sebagai penyumbang terbesar perekonomian Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat dari posisi relatifnya di Propinsi Sumatera Barat, kinerja perekonomian Kabupaten Pasaman Barat masih relatif lebih baik. Pada Tahun 2020, rata-rata pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat adalah -1,60%.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa lapangan usaha yang mengalami penurunan paling drastis adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, yakni -11,56%, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan,



sebesar -11,04%. Sementara itu, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi justru tumbuh 8,04%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 7,26%, dan Jasa Pendidikan tumbuh 4,50%. Pertumbuhan 3 (tiga) sektor ini masih terkait dengan pandemi Covid-19. Selama tahun 2020, sektor transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi yang cukup tinggi karena adanya himbauan untuk penerapan *social distancing*, sehingga terjadi penurunan arus orang secara signifikan.

Hal yang sama juga terjadi di sektor akomodasi dan makan/minum. Hotel-hotel yang ada di Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan tingkat hunian, karena aktivitas pariwisata ditutup dan mobilitas penduduk terhambat. Penurunan aktivitas wisata dan mobilitas penduduk juga berdampak pada penurunan di sub-sektor makan/minum (rumah makan).

Tabel 2.24

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	3,58	5,12	3,61	-1,29
B	Pertambangan dan Penggalan	6,02	4,26	8,18	5,77	-2,46
C	Industri Pengolahan	6,06	4,18	0,32	-3,91	-2,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,35	3,46	3,49	2,02	-6,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,52	5,66	3,91	5,51	2,43
F	Konstruksi	8,07	9,09	7,29	8,58	-4,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,28	8,06	7,50	8,02	-1,13
H	Transportasi dan Pergudangan	8,80	7,80	7,29	9,42	-11,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,66	9,23	7,89	9,64	-11,56
J	Informasi dan Komunikasi	9,43	11,22	9,39	11,82	8,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,77	2,21	1,08	3,25	0,71
L	Real Estate	5,44	4,75	4,87	7,46	0,03
M,N	Jasa Perusahaan	5,34	5,68	5,59	6,74	-3,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	4,92	6,93	6,23	-0,88



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

P	Jasa Pendidikan	8,93	7,00	6,47	9,41	4,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,12	8,07	7,67	7,97	7,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,55	9,28	9,18	9,94	-10,16
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,34	5,34	5,21	4,45	-1,34

Sumber: BPS Pasaman Barat

Pada tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga aktivitas belajar-mengajar di sekolah dipindahkan ke rumah, dan banyak pekerja perkantoran yang bekerja dari rumah. Akibatnya, pelaksanaan proses belajar mengajar dan komunikasi di perkantoran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial dan *video conferencing*. Demikian juga dengan jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa pendidikan, yang memang mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari pandemi covid-19.

Selanjutnya jika dilihat dari distribusi lapangan usaha dalam perekonomian, tampak bahwa perekonomian daerah Kabupaten pasaman Barat masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Meskipun sektor pertanian pada Tahun 2020 tumbuh -1,29%, namun dampaknya terhadap perekonomian Pasaman Barat sangat besar, karena sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Pasaman Barat. Jika dilihat lebih dekat lagi ke pertumbuhan masing-masing sub-sektor di sektor pertanian, maka dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020 (persen)

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-11	-12	-13	-13	-15
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	3,58	5,12	3,61	-1,29
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,51	3,35	4,82	3,3	-1,58
	a. Tanaman Pangan	-2,34	1,35	3,07	-1,09	0,02
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,42	3,28	-8,4	2,97	1,19
	c. Perkebunan Semusim	-4,53	-2,11	-2,62	2,66	3,09
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2,26	2,5	-1,62	3,96	4,03
	e. Perkebunan Tahunan	4,28	3,95	5,78	4,45	-2,41
	f. Peternakan	2,16	3,78	6,65	9,59	0,73
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,78	5,19	3,18	3,47	0,35
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,24	-0,12	4,9	3,48	-1,8
	3 Perikanan	7,29	7,35	7,58	6,05	1,14

Sumber: BPS Pasaman Barat (2021)

Sub-sektor Tanaman Hortikultura Tahunan dan lainnya menunjukkan laju pertumbuhan paling cepat pada Tahun 2020, yakni 4,03%, diikuti oleh sub-sektor perkebunan semusim, yang tumbuh 3,09%. Namun, ada beberapa sub-sektor yang



tumbuh negatif, yakni sub-sektor perkebunan tahunan, yang tumbuh -2,41%, dan kehutangan dan penebangan kayu, tumbuh -1.8. Jika dilihat dari nilai PDRB masing-masing sektor, maka sub-sektor perkebunan tahunan memberikan kontribusi paling besar, yakni 19,18% terhadap total PDRB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020. Oleh sebab itu, penurunan yang terjadi di sub-sektor perkebunan tahunan (-2,41%) pada Tahun 2020 memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sub-sektor yang juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Barat adalah sub-sektor tanaman pangan, yang menyumbang 9,36% terhadap PDRB Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun 2020, sub-sektor ini menyumbang PDRB sebesar Rp. 1.426.800,09 (dalam Juta Rupiah). Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotien (LQ) selama periode analisis 2016 – 2020, maka sektor lapangan usaha yang berpotensi menjadi kegiatan basis adalah sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan
2. Sektor Industri Pengolahan.

Tabel 2.26

Analisa Location Quotien (LQ) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Potensi Ekonomi Daerah
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,82	1,84	1,85	1,85	1,78	Berpotensi
B. Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,40	0,41	0,42	0,42	Tidak Berpotensi
C. Industri Pengolahan	1,55	1,59	1,63	1,56	1,54	Berpotensi
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,23	0,21	0,21	0,24	0,24	Tidak Berpotensi
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	Tidak Berpotensi
F. Konstruksi	0,70	0,72	0,72	0,75	0,76	Tidak Berpotensi
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,75	0,75	0,77	0,80	0,80	Tidak Berpotensi
H. Transportasi dan Pergudangan	0,39	0,39	0,40	0,44	0,49	Tidak Berpotensi
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,42	0,43	0,44	0,48	0,50	Tidak Berpotensi
J. Informasi dan Komunikasi	0,87	0,84	0,86	0,88	0,87	Tidak Berpotensi
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,63	0,63	0,62	0,66	0,65	Tidak Berpotensi
L. Real Estate	0,72	0,73	0,74	0,78	0,77	Tidak Berpotensi
M,N Jasa Perusahaan	0,13	0,14	0,13	0,14	0,14	Tidak Berpotensi
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,65	0,68	0,68	0,71	0,72	Tidak Berpotensi
P. Jasa Pendidikan	0,61	0,59	0,58	0,62	0,61	Tidak Berpotensi



<i>Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	0,84	0,81	0,80	0,84	0,83	Tidak Berpotensi
<i>R,S,T,U Jasa Lainnya</i>	0,35	0,35	0,35	0,37	0,36	Tidak Berpotensi

Pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi: 1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian, 2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan 3) Perikanan. Informasi mengenai hasil penghitungan nilai LQ sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 – 2020:

1. Pada tahun 2016, sektor pertanian memiliki nilai LQ 1,82 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 5.610.552.010,- selama satu tahun.
2. Pada tahun 2017, sektor pertanian memiliki nilai LQ 1,84 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 5.936.125.810,- selama satu tahun.
3. Pada tahun 2018, sektor pertanian memiliki nilai LQ 1,85 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 6.250.714.800,- selama satu tahun.
4. Pada tahun 2019, sektor pertanian memiliki nilai LQ 1,85 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 6.304.976.800,- selama satu tahun.
5. Pada tahun 2020, sektor pertanian memiliki nilai LQ 1,78 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 6.074.214.700,- selama satu tahun.

Informasi mengenai hasil penghitungan nilai LQ sektor Industri Pengolahan / *Manufacturing* di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 – 2020:

1. Pada tahun 2016, sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ 1,55 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 2.007.721.830,- selama satu tahun.
2. Pada tahun 2017, sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ 1,59 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 2.113.752.410,- selama satu tahun.
3. Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ 1,63 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 2.162.680.400,- selama satu tahun.
4. Pada tahun 2019, sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ 1,56 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 2.013.626.600,- selama satu tahun.
5. Pada tahun 2018, sektor industri pengolahan memiliki nilai LQ 1,54 > 1 dengan jumlah PDRB sebesar Rp. 2.027.060.700,- selama satu tahun.

2. Pemerataan Pembangunan

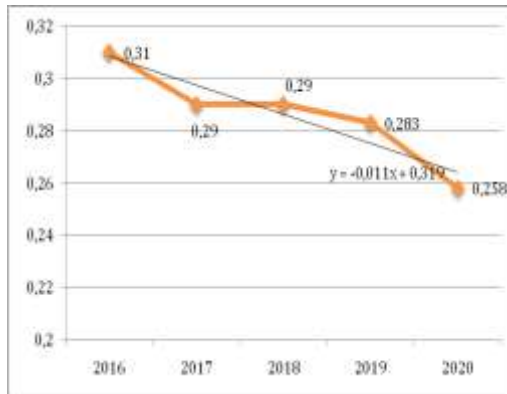
Idealnya hasil pembangunan harus memberikan kesejahteraan secara merata kepada masyarakat di suatu daerah atau Negara, akan tetapi faktanya kemampuan setiap individu dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi tidaklah sama, sehingga pemerataan pembangunan menjadi hal yang relative sulit untuk benar-benar dapat dicapai.

a. Indeks Gini

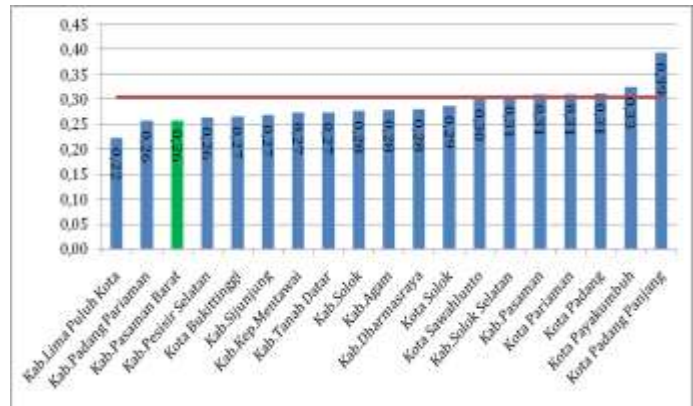
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat pemerataan hasil pembangunan adalah Indeks Gini, indikator ini mempunyai nilai koefisien antara nol dan satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi. Indeks gini juga dapat digunakan



untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan dalam suatu wilayah.



Grafik 2.3a. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020
(Sumber: BPS Pasaman Barat, 2021)



Grafik 2.3b Posisi Relatif Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat turun dari tahun ke tahun, dengan koefisien $y = -0,011x + 0,319$. Penurunan Indeks Gini merupakan hal baik, karena berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok pendapatan semakin kecil. Pada Tahun 2016, Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat adalah 0,31, kemudian turun menjadi 0,29 pada tahun 2017 dan 2018, dan kembali turun menjadi 0,283 pada Tahun 2019 dan 0,258 pada Tahun 2020.

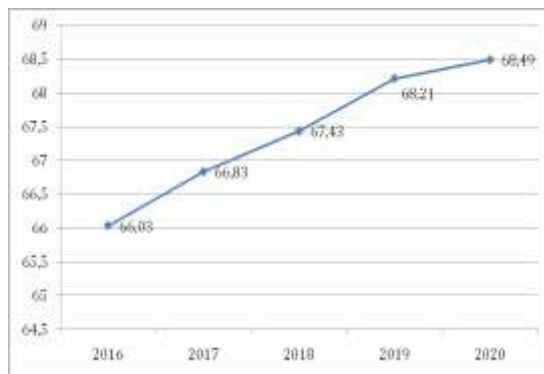
Jika dibandingkan dengan Indeks Gini Propinsi Sumatera Barat, maka Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Logikanya, semakin rendah Indeks Gini, semakin baik distribusi pendapatan antar-kelompok pendapatan. Pada Tahun 2020, Indeks Gini Propinsi Sumatera Barat tercatat sebesar 0,305 sedangkan Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat pada tahun yang sama adalah 0,258. Artinya, Indeks Gini Kabupaten Pasaman Barat berada di bawah rata-rata propinsi.

b. Indeks Pembangunan Manusia

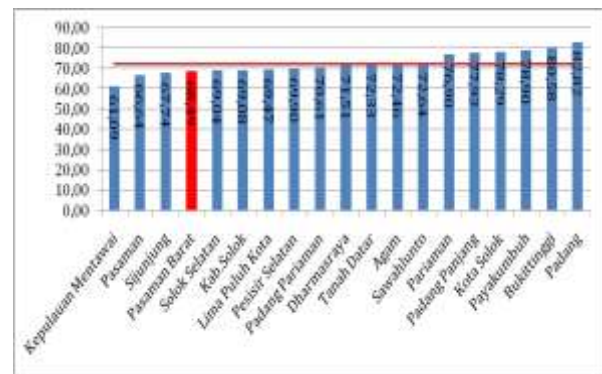
Mengutip dari publikasi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan. Berikut ini Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat yang dihitung dengan metode terbaru.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah



Grafik 2.4a. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Score),
Sumber: BPS Sumatera Barat, 2020



Grafik 2.4b. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 (Sumber: BPS)

Dari gambar di atas, tampak bahwa nilai IPM kabupaten Pasaman Barat sepanjang periode 2016-2020 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia telah memberikan hasil yang semakin baik. Pada Tahun 2016, IPM Pasaman Barat adalah 66,03, kemudian terus meningkat menjadi 66,83 pada Tahun 2017, 67,43 pada Tahun 2018, 68,21 pada Tahun 2019 dan terakhir 68,49 pada Tahun 2020.

Nilai IPM Kabupaten Pasaman Barat yang terus meningkat sepanjang periode 2016-2020, jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Sumatera Barat, ternyata masih berada pada ranking ke 16 dari 19 kota kabupaten. Untuk itu masih harus terus diupayakan peningkatan nilai IPM melalui upaya peningkatan nilai indikator pembentuknya yaitu angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

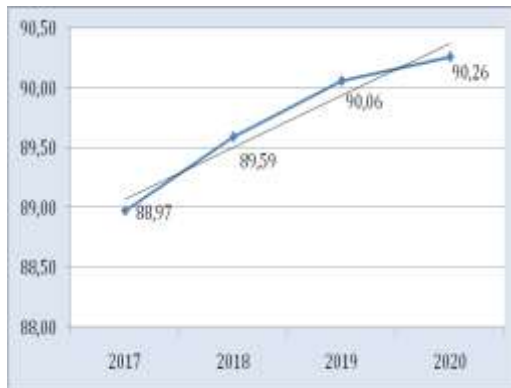
c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG yang ideal adalah 100%. Sebaliknya, semakin rendah IPG, artinya semakin tinggi ketimpangan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 adalah 90,26, meningkat dari 90,06 pada Tahun 2019. Selama 4 (empat) tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 88,97 pada tahun 2017 menjadi 90,26 pada Tahun 2021.

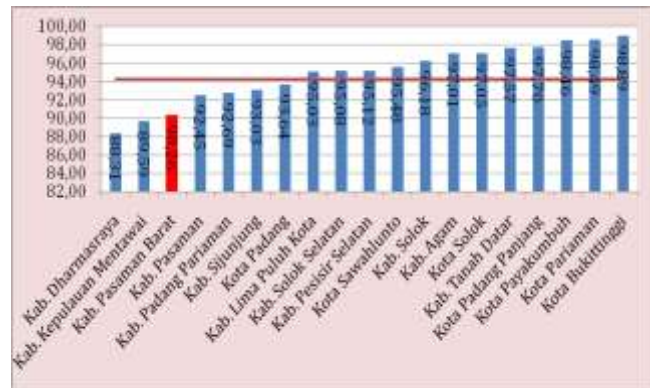
Meski terjadi peningkatan yang cukup signifikan, Indeks Pembangunan Gender Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2020, IPG Propinsi Sumatera Barat adalah 94,17, sementara IPG Kabupaten Pasaman Barat adalah 90,26. Seperti terlihat pada grafik berikut, IPG Kabupaten Pasaman Barat berada di posisi ke-3 terendah se-Kabupaten Pasaman Barat.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah



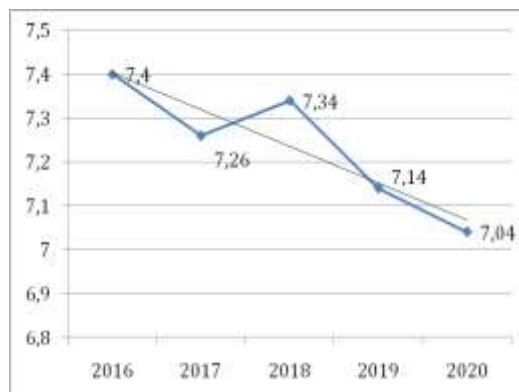
Grafik 2.5a Perkembangan IPG Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017-2020 (Sumber: BPS)



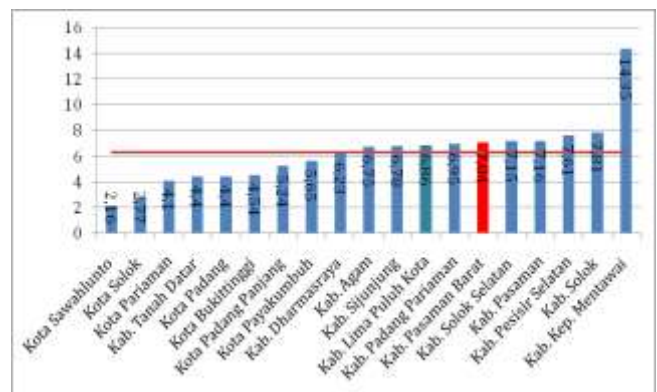
Grafik 2.5b Posisi Relatif IPG Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Sumber: BPS)

d. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2020 tercatat sebesar 7,04 persen. Selama 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend penurunan, meskipun terjadi fluktuasi. Angka terendah dicapai pada Tahun 2021 yakni 7,04 persen.



Grafik 2.6a Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Grafik 2.6b Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

Meski menunjukkan perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat masih berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat masih lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota lain di Propinsi Sumatera Barat. Grafik di atas menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi suatu masalah di Kabupaten Pasaman Barat. Meski terjadi perbaikan, angka kemiskinan Pasaman Barat masih berada di posisi ke-6 tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat. Artinya, pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Pasaman Barat.



e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat berfluktuasi, namun dengan trend peningkatan selama periode 2016-2020. Pada Tahun 2016, TPT Pasaman Barat adalah 3,79%, kemudian meningkat menjadi 3,99% pada Tahun 2017, dan kembali turun menjadi 3,37% pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019 terjadi kenaikan TPT menjadi 4,64% dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 4,69%.



Grafik 2.7a. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Sumber: BPS)



Grafik 2.7b. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 (Sumber: BPS)

Satu hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa TPT Kabupaten Pasaman Barat lebih baik dibanding rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2020, TPT Propinsi Sumatera Barat adalah 6,88%, sedangkan TPT Pasaman Barat pada tahun yang sama adalah 4,69%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengangguran terbuka di Kabupaten Pasaman Barat masih lebih baik dibanding rata-rata Propinsi Sumatera Barat.

Seperti disajikan pada Tabel 2.26 TPT Pasaman Barat juga menunjukkan kesenjangan antara pria dan wanita, di mana TPT wanita selalu lebih tinggi daripada TPT laki-laki. Artinya, penyediaan kesempatan kerja yang setara antara laki-laki dan perempuan merupakan prioritas dalam rangka menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.27
Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1.	Jumlah penganggur usia angkatan kerja	3.328	3.646	6.974	3.257	4.526	7.783	4.018	2.488	6.506	5.064	3.952	9.016	5.685	4.294	9.979
2.	Jumlah penduduk angkatan kerja	116.870	67.008	183.878	120.016	74.966	194.982	114.774	78.134	192.908	127.302	67.085	194.387	132.791	80.034	212.825
3.	Tingkat Pengangguran terbuka	2,85	5,44	3,79	2,71	6,04	3,99	3,50	3,18	3,37	3,98	5,89	4,64	4,28	5,37	4,69

Sumber: BPS Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Tabel 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2016			2017			2018			2019			2020		
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total
1.	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	116.870	67.008	183.878	120.016	74.966	194.982	114.774	78.134	192.908	127.302	67.085	194.387	132.791	80.034	212.825
2.	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)	136.346	134.695	271.041	143.184	140.921	284.105	145.219	143.800	289.019	149.674	147.567	297.241	159.454	155.978	315.432
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	85,72	49,75	67,84	83,82	53,20	68,63	79,04	54,34	66,75	85,05	45,46	65,40	83,28	51,31	67,47

Sumber: BPS Pasaman Barat Tahun 2016-2020



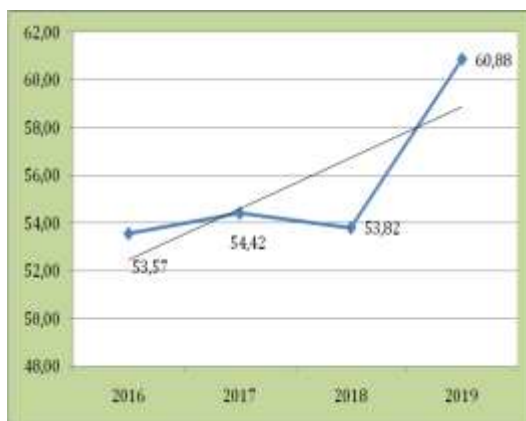
f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Seperti disajikan pada tabel 2.27, TPAK Kabupaten Pasaman Barat sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Namun secara keseluruhan, terlihat sedikit trend penurunan selama periode 2016-2020. Pada Tahun 2016, TPAK Kabupaten Pasaman Barat adalah 67,84%, kemudian meningkat menjadi 68,63% pada Tahun 2017 turun lagi menjadi 66,75% pada Tahun 2018, kembali turun menjadi 65,4% pada Tahun 2019, dan sedikit meningkat menjadi 67,47% pada Tahun 2020.

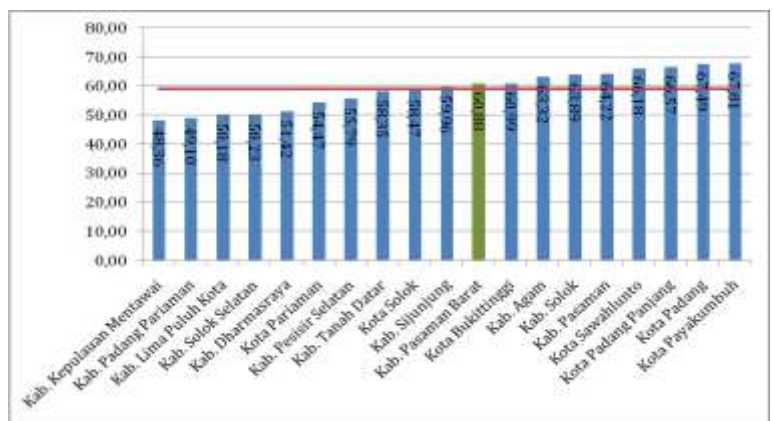
Hal yang menarik perhatian adalah rendahnya TPAK perempuan dibanding TPAK laki-laki. Jika dilihat secara lebih dekat, TPAK perempuan cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir, namun masih berfluktuasi dan selisihnya dengan TPAK laki-laki masih signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk bekerja di Kabupaten Pasaman Barat relatif terbatas dibanding pria.

g. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menggambarkan pemberdayaan kaum perempuan di bidang ekonomi, termasuk kesempatan kerja, serta peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik di aspek legislatif maupun eksekutif. Seperti terlihat pada grafik, IDG Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend kenaikan yang cukup baik dalam periode 2016-2019. Pada tahun 2016, IDG Kabupaten Pasaman Barat adalah 53,57 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 60,88.



Grafik 2.8a Perkembangan IDG Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2019 (Sumber: BPS)



Grafik 2.8b Posisi Relatif IDG Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Sumber: BPS)

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat, IDG Kabupaten Pasaman Barat berada di atas rata-rata propinsi. Pada Tahun 2019, IDG Propinsi Sumatera Barat adalah 59,09. IDG Kabupaten Pasaman Barat menempati posisi ke-9 di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan gender di Kabupaten Pasaman Barat sudah relatif baik, namun tentunya masih perlu ditingkatkan.



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial bertujuan untuk memberikan gambaran umum dan hasil analisis bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fokus ini memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sepanjang periode 2015-2019. Fokus Kesejahteraan Sosial difokuskan pada aspek pendidikan dan kesehatan.

Di antara komponen pembentuk IPM, komponen yang memberikan kontribusi pada peningkatan nilai IPM adalah daya beli, yang menunjukkan pertumbuhan paling tinggi, yakni rata-rata 1.95% per tahun pada periode 2016-2020. Di posisi kedua adalah Harapan Lama Sekolah, yang menunjukkan pertumbuhan rata-rata 1.86% pada periode yang sama. Sementara itu, pertumbuhan terendah ditunjukkan oleh Angka Harapan Hidup, yang tumbuh hanya 0.28% per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kesehatan perlu mendapatkan perhatian agar dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia di masa mendatang.

Tabel 2.29
Indeks Pembangunan Manusia Beserta Komponen Penyusunnya
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Unsur Pembentuk IPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-rata (%)
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19	1,12
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	13,06	13,22	13,4	13,61	1,86
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82	0,28
Paritas daya beli	Rp	8 393	8 704	8 979	9 180	9.047	1,95
IPM	Score	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49	1,11

Sumber: Kabupaten Pasaman Barat dalam angka 2020

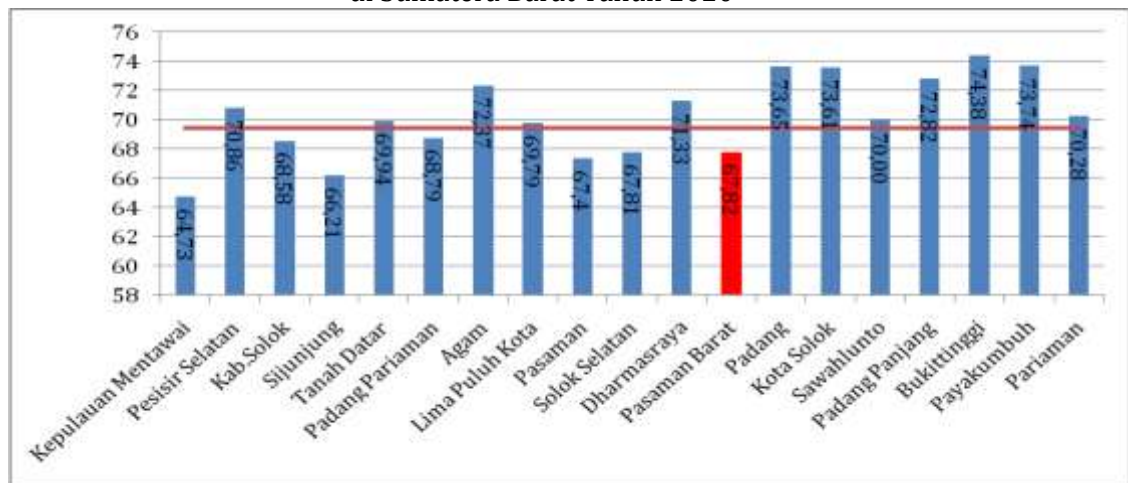
1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Dari aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup Kabupaten Pasaman Barat semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Perkembangan nilai UHH dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan adanya peningkatan dimana rata-rata peningkatan sepanjang periode ini adalah sebesar 0,28%. Peningkatan ini merupakan bukti adanya peningkatan dalam kualitas kesehatan masyarakat, baik dari aspek gizi maupun kebersihan hidup dan kecukupan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat di daerah ini. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan menjadi variable yang turut menentukan tingkat produktivitas dan kecakapan kerja bagi tenaga kerja di suatu daerah.



Grafik 2.9
Posisi Relatif Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pasaman Barat
di Sumatera Barat Tahun 2020



Sumber: BPS Pasaman Barat

Grafik di atas menunjukkan bahwa, sekalipun Usia Harapan Hidup Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun, posisi Pasaman Barat masih jauh dari rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2020, UHH Propinsi Sumatera Barat adalah 69,47 tahun, sedangkan UHH Kabupaten Pasaman Barat masih di angka 67,82 tahun. Bisa diartikan bahwa ketika seorang anak lahir di Kabupaten Pasaman Barat, maka diharapkan anak tersebut akan hidup hingga usia 67 sampai 68 Tahun. Dengan kata lain, peningkatan UHH agar setidaknya sejajar dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat membutuhkan komitmen yang sangat kuat.

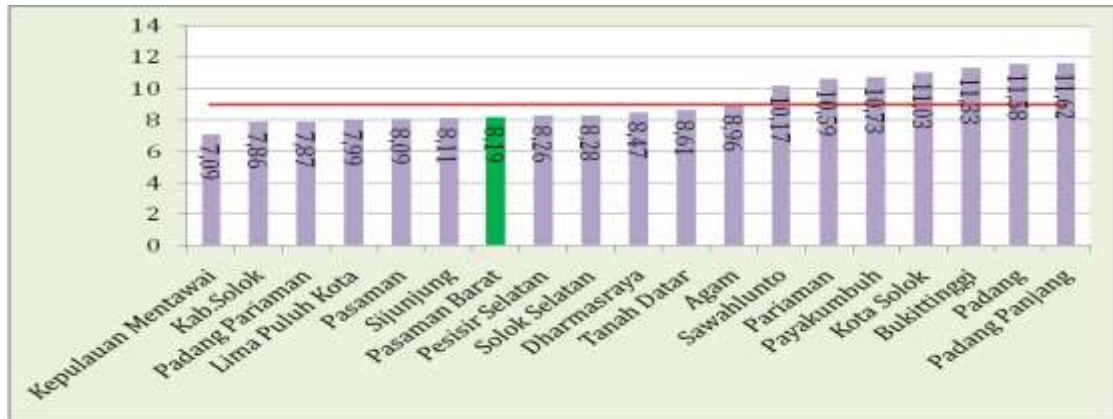
2) Rata-Rata Lama Sekolah (AHH)

Pendidikan menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasaman Barat sepanjang tahun 2016-2020 menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan yang sama juga terlihat pada indikator Harapan Lama Sekolah selama periode yang sama. Peningkatan capaian indikator pembentuk IPM ini tentunya dipengaruhi oleh upaya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat. Grafik berikut menunjukkan bahwa Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pasaman Barat

menunjukkan kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari 7,84 th pada Tahun 2016 menjadi 8,19 th pada Tahun 2020.

Grafik 2.10 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020



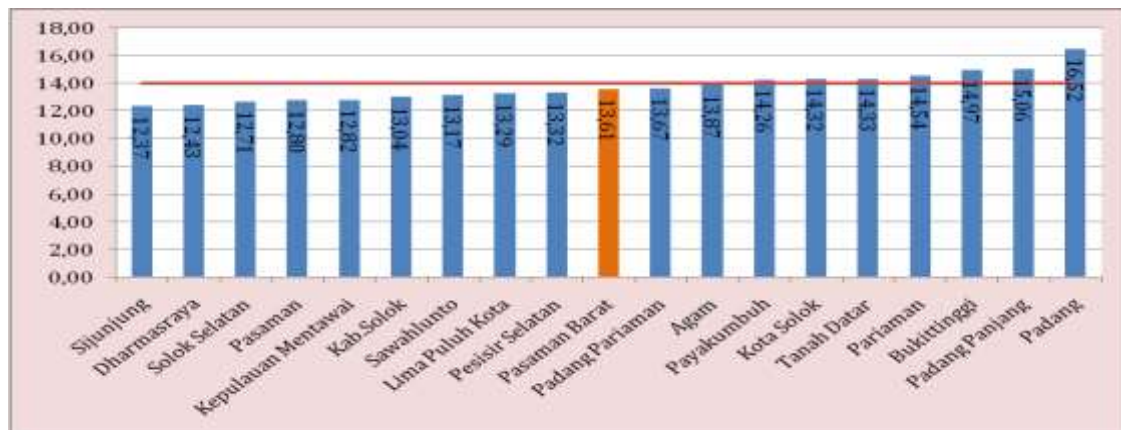
Sumber: BPS Pasaman Barat

Meski menunjukkan kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah RLS Sumatera Barat. Seperti terlihat pada grafik berikut, RLS Propinsi Sumatera Barat adalah 8,99 pada Tahun 2020, sedangkan RLS Kabupaten Pasaman Barat masih 8,19 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk Kabupaten Pasaman Barat menikmati masa pendidikan selama 8,19 tahun, atau tingkat VIII pada SLTP.

3) Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (RLH)

Sejalan dengan indikator IPM lainnya, rata-rata harapan lama sekolah (RLH) Kabupaten Pasaman Barat juga menunjukkan kenaikan dalam periode 2016-2021. Pada tahun 2016, RLH Pasaman Barat adalah 12,67 tahun, sedangkan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 13,61, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 1,86% per tahun.

Grafik 2.11 Posisi Relatif Rata-Rata Harapan Lama Sekolah (tahun)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020



Sumber: BPS Pasaman Barat



Rata-Rata HLS Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai angka 14,02 tahun pada Tahun 2020. Artinya, rata-rata penduduk usia sekolah di Kabupaten Pasaman Barat diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga Perguruan Tinggi.

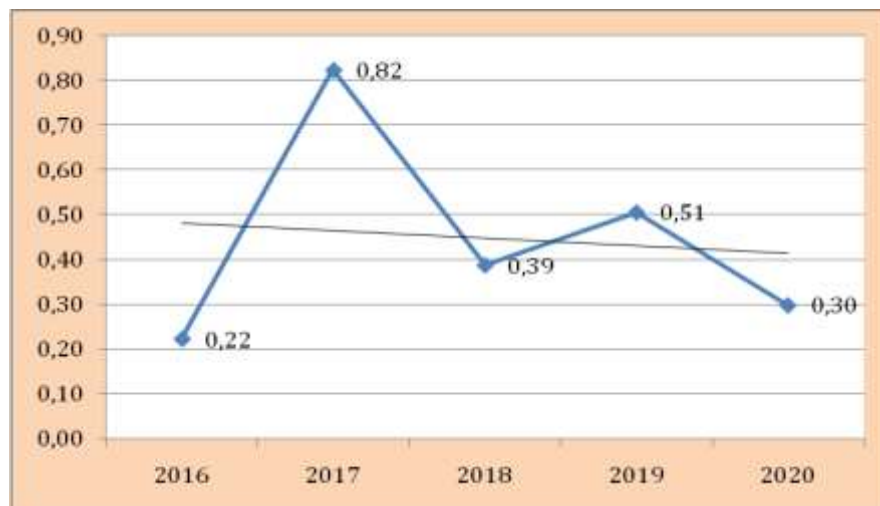
4) Cakupan Kepemilikan JKN

Kepemilikan jaminan kesehatan sangat penting dalam rangka meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Jaminan kesehatan menjamin bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pada saat yang tepat, mulai dari pelayanan kesehatan promotif, pencegahan sakit (pereventif), maupun layanan pengobatan (kuratif), serta layanan pemulihan setelah sakit (rehabilitatif). Namun, seperti disajikan pada tabel 2.29, belum semua penduduk Kabupaten Pasaman Barat memiliki JKN hingga Tahun 2020.

5) Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas adalah tujuan utama dari pembangunan berwawasan kependudukan. Salah satu strategi untuk mewujudkan tujuan ini adalah dengan mengendalikan kuantitas penduduk. Indikator utama untuk mengukur kuantitas penduduk adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). LPP Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2016-2021 menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.

Grafik 2.12 Perkembangan LPP (%) Pasaman Barat Tahun 2016-2020
(Sumber: BPS, Data Diolah)



Pada Tahun 2016, LPP Pasaman Barat adalah 0,22% dan pada Tahun 2020, LPP Pasaman Barat adalah 0,30%. Selama periode 2016-2021, LPP tertinggi terjadi pada Tahun 2017, yakni 0,82%, sedangkan LPP terendah adalah tahun dasar, yakni 0,22% pada Tahun 2016. Dengan kata lain, kinerja program keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Kabupaten Pasaman Barat belum menunjukkan hasil yang signifikan.



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.30
Cakupan Kepemilikan JKN Aktif Kabupaten Pasaman Barat (%) Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Jml Penduduk	Jml Peserta JKN	% JKN	Jml Penduduk	Jml Peserta JKN	% JKN	Jml Penduduk	Jml Peserta JKN	% JKN	Jml Penduduk	Jml Peserta JKN	% JKN	Jml Penduduk	Jml Peserta JKN	% JKN
1	Sungai Beremas	24.701	16.661	67.45	25.225	16.386	25.225	66.05	16.882	64,62	26.471	17.813	67.30	27.556	17.498	63.50
2	Ranah Batahan	25.993	14.873	57.22	26.438	15.252	56.26	27.365	16.718	61,09	27.721	18.130	65.40	27.481	18.059	65.71
3	Koto Balingka	29.226	16.943	57.97	29.878	17.225	56.71	31.071	17.821	57,36	31.442	19.310	61.41	30.550	19.020	62.26
4	Sungai Aur	35.487	19.315	54.43	36.539	19.662	52.86	38.296	20.600	53,79	38.511	21.341	55.41	36.031	20.905	58.02
5	Lembah Melintang	46.839	23.691	50.58	47.891	24.491	49.47	49.750	21.903	44,03	50.257	25.431	50.60	49.289	24.959	50.64
6	Gunung Tuleh	21.184	18.917	89.30	21.219	20.585	89.15	21.563	17.393	80,66	21.748	18.509	85.11	24.166	18.374	76.03
7	Talamau	27.023	21.052	77.90	26.922	20.943	78.20	27.332	22.900	83,78	27.470	23.734	86.40	29.805	23.594	79.16
8	Pasaman	73.101	46.808	64.03	75.127	48.377	62.31	78.924	37.074	46,97	81.748	34.715	42.46	77.102	33.071	42.89
9	Luhak Nan Duo	41.917	15.597	37.21	42.615	16.566	36.60	44.244	18.015	40,72	45.402	19.450	42.83	44.084	19.281	43.74
10	Sasak Ranah Pasisie	14.486	9.513	65.67	14.686	9.943	64.78	15.147	10.518	69,44	15.200	11.191	73.62	14.946	11.033	73.82
11	Kinali	70.350	34.046	48.40	72.245	36.263	47.13	75.794	36.221	47,79	77.752	37.638	48.41	70.662	36.274	51.33
	Pasaman Barat		237.416	57.86	418.785	245.693	56.69	435.612	236.045	54,19	443.722	247.262	55.72	431.672	242.068	56.08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat



2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kinerja Kabupaten Pasaman Barat di bidang seni budaya dan olahraga dianalisis dengan melihat pada indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. Penyediaan sarana dan prasarana seni dan budaya bertujuan untuk memberi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan pemanfaatan waktu luang, pengembangan budaya lokal, dan kesenian tradisional. Sama halnya dengan penyediaan sarana dan prasarana keolahragaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kecintaan dan kegemaran masyarakat untuk berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat dan aktif. Berikut adalah gambaran capaian pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di bidang seni budaya dan olahraga selama periode 2016-2021:

Tabel 2.31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016-2021
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Capaian Pembangunan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jumlah Group Kesenian per 10.000 Penduduk					
2	Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	3,14	3,49	4,87	5,07	5,06
4	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023

Sumber: Dinas Pendidikan & Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pasaman Barat

Data capaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat di bidang seni budaya dan olahraga di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah group kesenian per 10.000 penduduk
- 2) Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 penduduk

Selama periode 2016-2021 terdapat 1 (satu) unit gedung serba-guna yang dimanfaatkan untuk pertunjukan kesenian di daerah, yakni Gedung Buah Basamo. Oleh sebab itu, data capaian indikator ini tidak berubah selama periode 2016-2021, yakni 0,023 gedung kesenian per 10.000 penduduk. Hingga Tahun 2020, belum teridentifikasi adanya gedung-gedung di Kecamatan maupun nagari untuk keperluan kesenian, meskipun sebenarnya hampir seluruh kecamatan memiliki gedung serbaguna.

- 3) Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

Seperti disajikan pada grafik 2.19b, pada tahun 2019 terdapat 220.000 klub olah raga aktif di Kabupaten Pasaman Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 435.059 jiwa di tahun 2020, maka didapatkan rasio 5,06 klub olah raga



per 10.000 penduduk. Artinya, secara rata-rata terdapat 5 hingga 6 klub olah raga untuk setiap 10.000 penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

4) Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

Selama periode 2016-2020, terdapat 1 (satu) gedung olah raga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Sayangnya, gedung olah raga yang dikelola swasta dan masyarakat belum teridentifikasi, sehingga belum dilaporkan sesuai semestinya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum difokuskan pada pemenuhan layanan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, layanan urusan pemerintahan yang bersifat wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan.

2.3.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib memiliki dua urusan pembangunan daerah, yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia. Oleh karena ini, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan urusan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Kinerja Pemerintah Daerah di bidang pendidikan setidaknya diukur dari aspek aspek dan kualitas, melalui indikator beberapa indikator pokok terkait partisipasi dan kualitas, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), hingga jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

1) Tingkat Partisipasi pada Jenjang Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan sejumlah penduduk yang mengikuti jenjang pendidikan formal tanpa melihat batasan umur usia, sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi jumlah anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.



Berikut adalah perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia Tahun 2016-2020 di Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 2.32
APM, APK dan APS Menurut Kelompok Usia Sekolah (persen) Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Usia 7-12 Tahun	99,77	99,02	98,45	98,68	98,81
Usia 13-15 Tahun	84,92	83,55	80,88	80,25	81,05
Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Usia 7-12 Tahun	108,31	113,13	109,98	108,12	108,46
Usia 13-15 Tahun	90,36	89,00	99,17	91,78	94,15
Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	2016	2017	2018	2019	2020
Usia 7-12 Tahun	100,00	99,02	99,52	99,37	99,94
Usia 13-15 Tahun	95,62	95,62	96,60	96,24	97,76

Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka (2021)

Pada tabel di atas, terlihat bahwa pada kelompok usia 7-12 tahun (Sekolah Dasar), Angka Partisipasi Murni menunjukkan trend penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari 99,77% pada Tahun 2016 menjadi 98,81% pada Tahun 2020. Sebaliknya, Angka Partisipasi Kasar (APK) meningkat dari 108,31% pada Tahun 2016 menjadi 108,46% pada Tahun 2020. Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah mengalami penurunan, dari 100% pada Tahun 2016 menjadi 99,94% pada tahun 2020. Bisa diasumsikan bahwa masih ada anak usia 7-12 tahun yang belum/tidak lagi menikmati pendidikan.

Pada kelompok usia 13-15 tahun (SLTP), APM juga menunjukkan trend menurun, yakni dari 84,92% pada Tahun 2016 menjadi 81,05% pada Tahun 2020. Namun, penurunan pada APM diimbangi oleh perbaikan pada APK SLTP, yakni 90,36% pada Tahun 2016 menjadi 94,15% pada Tahun 2020. Perbaikan juga terlihat indikator APS, yakni dari 95,62% pada Tahun 2016 menjadi 97,76% pada Tahun 2020. Bisa disimpulkan bahwa pada kelompok usia 13-15 tahun, secara keseluruhan terjadi perbaikan tingkat partisipasi pendidikan.

2) Tingkat Partisipasi pada Jenjang Pendidikan Usia Dini

Seperti diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, penerima pelayanan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun hingga 6 (enam) tahun. Pemenuhan SPM bidang PAUD dihitung berdasarkan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini dibagi jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Berikut adalah capaian kinerja partisipasi



pendidikan pada jenjang PAUD di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2021.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Kasar PAUD (persen) di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

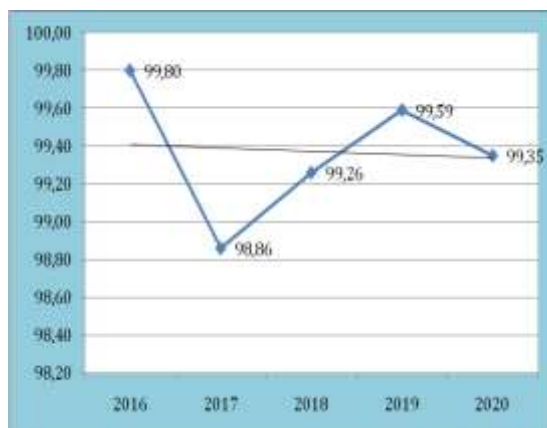
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	9.312	9.312	18.158	23.239	8.979
2	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	25.001	25.001	32.928	37.241	18.598
3	Angka Partisipasi PAUD (%)	37,25	37,25	55,14	62,40	48

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Angka tertinggi dicapai pada Tahun 2019, di mana sebanyak 62,40% anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Pasaman Barat tercatat aktif mengikuti proses pembelajaran di satuan PAUD. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 48 persen. Penurunan lebih drastis terlihat pada jumlah peserta didik, dari 23.239 anak pada Tahun 2019 menjadi 8.979 anak pada Tahun 2020. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat pandemi Covid-19, di mana sebagian besar satuan PAUD di Kabupaten Pasaman Barat sempat ditutup mulai dari bulan April hingga Desember 2020.

3) Pendidikan Kesetaraan

Indikator yang selama ini digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pendidikan kesetaraan adalah literasi penduduk atau angka melek huruf (AMH). AMH Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan penurunan dari 99,59% pada Tahun 2019 menjadi 99,35% pada Tahun 2020. Dengan kata lain, masih terdapat 0,65% penduduk Pasaman Barat yang tidak bisa baca-tulis. Sebenarnya, pada tahun 2016, AMH Pasaman Barat sudah cukup baik, yakni 99,80%. Penurunan yang terjadi pada Tahun 2020 mestinya menjadi perhatian.



Grafik 2.13a Perkembangan Angka Melek Huruf (%) Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Sumber: BPS)

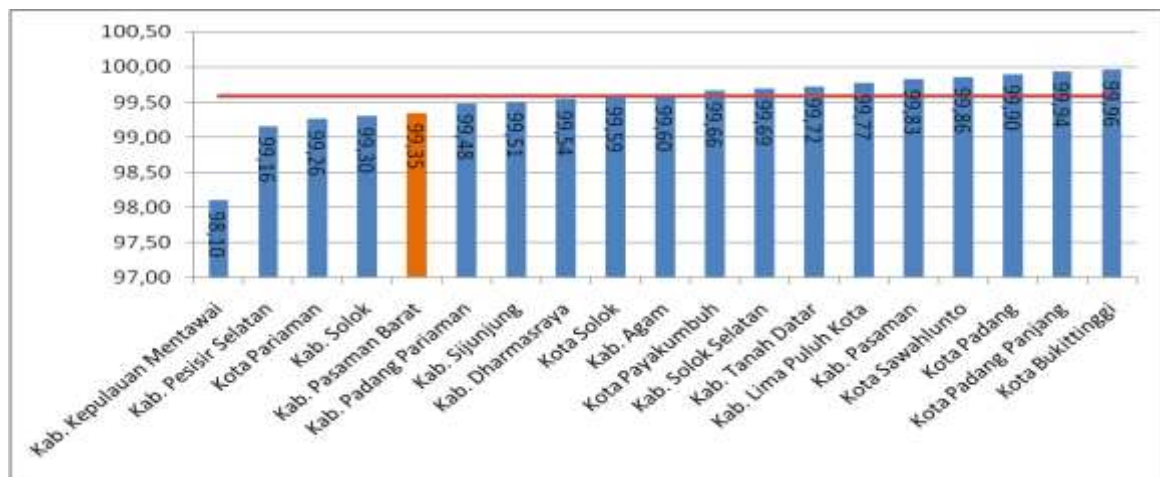


Grafik 2.13b Perbandingan AMH Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Grafik di atas menunjukkan bahwa selain mengalami penurunan pada tahun 2020, AMH Kabupaten Pasaman Barat juga menunjukkan ketimpangan antar-jenis kelamin. Pada Tahun AMH Laki-Laki menunjukkan trend kenaikan, dari 99,61% pada Tahun 2016 menjadi 99,82% pada Tahun 2020. Sebaliknya, AMH Perempuan menunjukkan trend penurunan, dari 100% pada tahun 2016 menjadi 98,85% pada Tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat, posisi relatif AMH Pasaman Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.14 Posisi Relatif Angka Melek Huruf (persen) Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Sumber: BPS)



Seperti terlihat pada grafik, AMH Pasaman Barat berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat, yang sudah mencapai angka 99,59% pada Tahun 2020. Terlihat bahwa posisi AMH Pasaman Barat berada pada peringkat ke-15 dari 19 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, peningkatan literasi mestinya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026. Salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan program pendidikan kesetaraan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan diarahkan menjadi salah satu indikator kinerja utama pada organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan. Pendidikan kesetaraan menyasar anak usia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun yang tidak mengikuti pendidikan di satuan pendidikan, baik SD maupun SMP.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Usia Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak aspek, seperti kematian dan kesakitan. Beberapa indikator pokok yang mempengaruhi capaian UHH adalah:

a. Angka Kematian Ibu

Untuk meningkatkan UHH, maka upaya utama yang diperlukan adalah meminimalisir kematian karena penyebab yang bisa dihindari. Kesehatan ibu mulai dari kehamilan hingga melahirkan menjadi indikator kesehatan yang turut



menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena terkait dengan angka kematian ibu saat melahirkan. Angka kematian ibu (MMR) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.34

Perkembangan Angka Kematian Ibu per 10.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Ibu	16	20	13	8	18
2	Jumlah Kelahiran Hidup	8.567	8.289	8157	8.287	8.203
3	Angka Kematian Ibu / 10.000 Kelahiran Hidup	186,76	241,28	159,37	96,54	219,4

Sumber: Dinas Kesehatan dan & GDPK Kab. Pasaman Barat 2020-2040

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada angka kematian ibu di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, yakni dari 186,8 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 naik menjadi 241,3 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2017, kemudian turun menjadi 159,4 per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2018. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka terendah dicapai pada Tahun 2019, yakni 96,54 per 100.000 kelahiran hidup, di mana tercatat 8 (delapan) kasus kematian ibu. Namun, pada tahun 2020, AKI Pasaman Barat kembali meningkat menjadi 219,4 per 100.000 kelahiran hidup, dengan 18 kasus kematian ibu. Hal ini merupakan permasalahan dan perlu berbagai upaya pada banyak aspek, baik aspek sistem kesehatan dan KIA, sarana dan prasana, maupun kesadaran masyarakat itu sendiri.

Jika dilihat berdasarkan distribusi wilayah, maka pada Tahun 2020, Kecamatan Sungai Aur mencatat AKI tertinggi, yakni 782,5 per 100.000 Kelahiran Hidup, dengan 5 kasus kematian ibu. Di posisi kedua terdapat Kecamatan Ranah Batahan, dengan AKI 595,2 per 100.000 Kelahiran Hidup atau 3 kasus, diikuti Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan AKI 384,6 per 100.000 Kelahiran Hidup atau 1 kasus. Kecamatan Kinali menyumbang 3 kasus kematian ibu pada Tahun 2020, dengan AKI 202 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sementara itu, satu-satunya kecamatan yang tidak mencatatkan kasus kematian ibu pada Tahun 2020 adalah Kecamatan Gunung Tuleh, dan kondisi ini sudah bertahan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Distribusi wilayah kasus kematian ibu disajikan pada tabel berikut :



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.35
Angka Kematian Ibu per 10.000 kelahiran hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI	Kelahiran Hidup	Kematian Ibu	AKI
1	Sungai Beremas	521	0	0.0	500	0	0.0	494	0	0.0	639	0	0.0	497	1	201.2
2	Ranah Batahan	509	1	196.5	484	1	206.6	480	2	416.7	666	1	150.2	504	3	595.2
3	Koto Balingka	626	4	639.0	518	1	193.1	569	2	351.5	745	0	0.0	557	1	179.5
4	Sungai Aua	778	1	128.5	687	1	145.6	682	4	586.5	895	0	0.0	639	5	782.5
5	Lembah melintang	887	4	451.0	890	4	449.4	914	0	0.0	1199	0	0.0	978	1	102.2
6	Gunung Tuleh	464	0	0.0	448	3	669.6	514	0	0.0	647	0	0.0	477	0	0.0
7	Talamau	592	2	337.8	622		0.0	558	1	179.2	729	2	274.3	537	1	186.2
8	Pasaman	1548	2	129.2	1500	4	266.7	1369	1	73.0	1802	2	111.0	1401	1	71.4
9	Luhak Nan Duo	844	0	0.0	835	3	359.3	838	1	119.3	1071	0	0.0	868	1	115.2
10	Sasak Ranah Pasisie	283	0	0.0	285	1	350.9	261	0	0.0	375	1	266.7	260	1	384.6
11	Kinali	1515	2	132.0	1520	2	131.6	1478	2	135.3	1791	2	111.7	1485	3	202.0
Kab. Pasaman Barat		8567	16	186.8	8289	20	241.3	8157	13	159.4	10559	8	75.8	8203	18	219.4



b. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun per 1.000 kelahiran hidup. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kelangsung hidup anak dan merupakan refleksi kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal dan pemeliharaan kesehatan anak. AKB juga dapat menggambarkan kesehatan reproduksi, karena banyak masalah kesehatan anak yang dibawa sejak anak masih dalam kandungan. Indikator ini digunakan untuk pemantauan program pemeliharaan kesehatan.

Tabel 2.36
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi	102	79	76	94	95
2	Jumlah Kelahiran Hidup	8567	8289	8157	8.287	8.203
3	Angka Kematian Bayi / 1.000 Kelahiran Hidup	11,91	9,53	9,32	11,34	11,58

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, & GDPK Kab. Pasaman Barat 2020-2040

Jika dilihat dari tabel diatas, AKB Kabupaten Pasaman Barat mengalami penurunan dari Tahun 2019 yaitu 11,34 menjadi 3,7 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup pada Tahun 2020. Sejalan dengan angka kematian ibu, AKB Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kenaikan pada tahun 2019 ke tahun 2020. Meski masih terlihat fluktuasi dari tahun ketahun, namun ada trend penurunan, yakni dari 11,91 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2016 menjadi 11,58 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2020. Tentunya ini perlu menjadi perhatian. Selama tahun 2020, berkurangnya kunjungan ke fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan akibat pandemi *Covid-19* diperkirakan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Pasaman Barat.

Sementara itu, distribusi kasus kematian bayi menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.35. Seperti terlihat pada tabel, berdasarkan jumlah kasus pada Tahun 2020, Kecamatan Kinali menyumbang kasus terbanyak, yakni 18 kasus kematian bayi, diikuti Kecamatan Pasaman sebanyak 16 kasus, dan Kecamatan Luhak Nan Duo sebanyak 12 kasus. Jika dilihat berdasarkan AKB, maka Kecamatan Ranah Batahan mencatat AKB tertinggi, yakni 19,84 per 1000 Kelahiran Hidup, diikuti Kecamatan



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Talamau (18,62 per 1000 Kelahiran Hidup), dan Kecamatan Sungai Beremas (14,08 per 1000 Kelahiran Hidup).



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.37
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB	Kelahiran Hidup	Kematian Bayi	AKB
1	Sungai Beremas	521	18	34,55	500	11	22,00	494	5	10,12	639	9	14,08	497	7	14,08
2	Ranah Batahan	509	7	13,75	484	6	12,40	480	7	14,58	666	14	21,02	504	10	19,84
3	Koto Balingka	626	13	20,77	518	4	7,72	569	8	14,06	745	8	10,74	557	4	7,18
4	Sungai Aua	778	2	2,57	687	4	5,82	682	4	5,87	895	7	7,82	639	4	6,26
5	Lembah melintang	887	8	9,02	890	7	7,87	914	10	10,94	1199	6	5,00	978	7	7,16
6	Gunung Tuleh	464	5	10,78	448	5	11,16	514	5	9,73	647	7	10,82	477	5	10,48
7	Talamau	592	4	6,76	622	7	11,25	558	4	7,17	729	6	8,23	537	10	18,62
8	Pasaman	1548	10	6,46	1500	10	6,67	1369	8	5,84	1802	16	8,88	1401	16	11,42
9	Luhak Nan Duo	844	6	7,11	835	5	5,99	838	11	13,13	1071	5	4,67	868	12	13,82
10	Sasak Ranah Pasisie	283	7	24,73	285	4	14,04	261	4	15,33	375	4	10,67	260	2	7,69
11	Kinali	1515	22	14,52	1520	16	10,53	1478	10	6,77	1791	12	6,70	1485	18	12,12
Kab. Pasaman Barat		8567	8567	102	11,91	8289	79	9,53	8157	76	9,32	10559	94	8,90	95	11,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat



c. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 6 (lima) tahun, per 100.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan Balita, seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, dan kecelakaan. Pada kondisi tertentu, AKABA juga menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial, karena permasalahan kesehatan Balita berkaitan dengan kemiskinan, sehingga orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial, dan ekonomi anak di bawah 5 (lima) tahun. Berikut adalah data perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Balita	118	94	86	105	103
2	Jumlah Kelahiran Hidup	8567	8289	8157	8.287	8.203
3	Angka Kematian Balita / 1.000 Kelahiran Hidup	13,77	11,34	10,54	12,67	12,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat & GDPK Kab. Pasaman Barat 2020-2040

Seperti terlihat pada Tabel 2.36, AKABA di Kabupaten Pasaman Barat cenderung menurun, hanya meningkat pada tahun 2019 yaitu 12,67 kematian per 1.000 kelahiran hidup dan kembali menurun pada Tahun 2020 yaitu 12,56 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terlihat trend penurunan yang cukup signifikan, dari 13,77 per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2016 menjadi 12,56 per 1000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2020. Namun, upaya pemeliharaan kesehatan Balita masih harus terus ditingkatkan, mengingat pentingnya menjaga kesehatan balita untuk tumbuh kembangnya. Selain itu, pada Tahun 2020 masih tercatat sebanyak 103 kasus kematian Balita. Ini tentu bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja.

Sementara itu, distribusi kasus kematian balita menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan jumlah kasus kematian balita pada Tahun 2020, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Pasaman masing-masing menyumbang 18 kasus kematian balita, diikuti Kecamatan Luhak Nan Duo (14 kasus kematian balita), dan Kecamatan Ranah Batahan (11 kasus kematian balita). Berdasarkan AKABA, Kecamatan Ranah Batahan menempati posisi pertama (21,83 per 1000 Kelahiran Hidup), diikuti Kecamatan Talamau (18,62 per 1000 Kelahiran Hidup) dan Kecamatan Luhak Nan Duo (16,13 per 1000 Kelahiran Hidup).



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.39
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA	Kelahiran Hidup	Kematian Balita	AKABA
1	Sungai Beremas	521	22	42,23	500	12	24,00	494	5	10,12	639	10	15,65	497	8	16,10
2	Ranah Batahan	509	9	17,68	484	8	16,53	480	7	14,58	666	14	21,02	504	11	21,83
3	Koto Balingka	626	14	22,36	518	8	15,44	569	8	14,06	745	8	10,74	557	4	7,18
4	Sungai Aua	778	2	2,57	687	5	7,28	682	4	5,87	895	8	8,94	639	5	7,82
5	Lembah melintang	887	11	12,40	890	8	8,99	914	12	13,13	1199	6	5,00	978	8	8,18
6	Gunung Tuleh	464	5	10,78	448	5	11,16	514	5	9,73	647	9	13,91	477	5	10,48
7	Talamau	592	5	8,45	622	7	11,25	558	6	10,75	729	7	9,60	537	10	18,62
8	Pasaman	1548	10	6,46	1500	11	7,33	1369	12	8,77	1802	17	9,43	1401	18	12,85
9	Luhak Nan Duo	844	6	7,11	835	7	8,38	838	13	15,51	1071	8	7,47	868	14	16,13
10	Sasak Ranah Pasisie	283	11	38,87	285	6	21,05	261	4	15,33	375	4	10,67	260	2	7,69
11	Kinali	1515	23	15,18	1520	17	11,18	1478	10	6,77	1791	14	7,82	1485	18	12,12
Kab. Pasaman Barat		8567	118	13,77	8289	94	11,34	8157	86	10,54	10559	105	9,94	8203	103	12,56

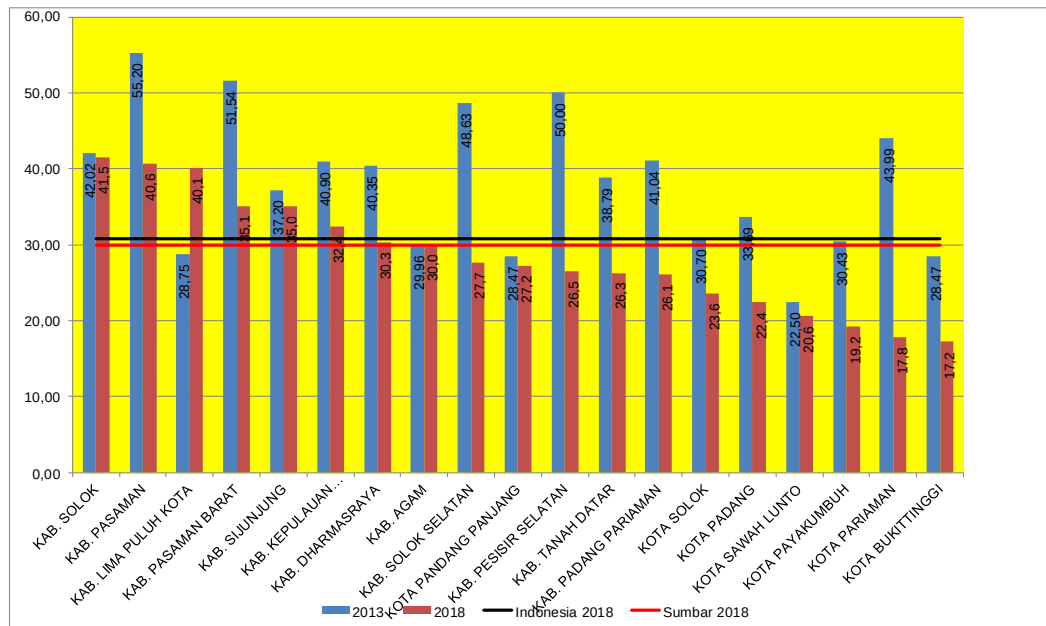
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat



d. Prevalensi *Stunting*

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah prioritas penanganan *stunting* secara nasional sejak Tahun 2018. Hal ini didasarkan pada tingginya prevalensi *stunting* pada bayi dan balita berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dan Tahun 2018, seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.15 Posisi Relatif Prevalensi *Stunting* (persen) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 dan Tahun 2018



Sumber: Riskesdas (2018)

Grafik di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 adalah 51,54%, dan kemudian turun menjadi 35,1% pada Tahun 2018. Berdasarkan hasil penimbangan menurut aplikasi e-PPGBM, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 adalah 28,35%, kemudian turun menjadi 17,80%, dan pada tahun 2020 kembali naik menjadi 21%. Terjadinya penurunan dan kenaikan prevalensi *stunting* di atas menunjukkan masih adanya permasalahan dengan pengukuran. Selain itu, selisih yang cukup signifikan antara hasil Riskesdas dengan hasil pengukuran di e-PPGBM juga perlu menjadi perhatian.

Sebagai salah satu daerah prioritas penanganan *stunting*, Kabupaten Pasaman Barat melakukan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* sejak tahun 2019, yang difokuskan pada penanganan 20 (dua puluh) indikator pokok gizi spesifik dan gizi sensitif, dan melibatkan sejumlah OPD pemegang program. Dua puluh indikator pokok dimaksud adalah:



Tabel 2.40
Indikator Intervensi Gizi Spesifik Terkait *Stunting* di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Cakupan Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan (%)	95,08	92,96
2	Cakupan Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (%)	67,9	76,29
3	Cakupan balita kurus yang mendapatkan PMT (%)	79,91	84,45
4	Cakupan kehadiran di posyandu (D/S) (%)	81,66	61,53
5	Cakupan Ibu Hamil-K4 (%)	60,94	73,01
6	Cakupan anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A (%)	84,03	89,40
7	Cakupan bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap (%)	61,62	48,54
8	Cakupan balita diare yang memperoleh suplementasi zinc (%)	100	67,76
9	Cakupan remaja putri mendapatkan TTD (%)	49,75	17,28
10	Cakupan layanan Ibu Nifas (%)	70,61	69,18
11	Cakupan kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan) (%)	83,97	68,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2021

Secara teknis, OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program terkait intervensi gizi spesifik adalah Dinas Kesehatan beserta jajaran, dan tentunya bekerja sama dengan unsur terkait, seperti organisasi perangkat daerah lainnya, pemerintah kecamatan, maupun pemerintah nagari. Sementara itu, intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh beberapa OPD yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pencegahan *Stunting*, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Indikator Intervensi Gizi Sensitif dan OPD Penanggung Jawab
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

No.	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
1	Cakupan keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita (%)	37,10	53,31	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
2	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak (%)	82,3	81,9	Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Kesehatan



No.	Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	OPD Penanggung Jawab
3	Cakupan rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak (%)	74,30	74,30	Urusan Pekerjaan Umum dan Urusan Kesehatan
4	Cakupan orang tua yang mengikuti kelas parenting (%)	10,93	NA	Urusan Pendidikan
5	Cakupan anak usia 2-6 tahun terdaftar (peserta didik) di PAUD (%)	21,40	28,01	Urusan Pendidikan
6	Cakupan rumah tangga peserta JKN/Jamkesda (%)	75,93	74,04	Urusan Sosial & Urusan Kesehatan
7	Cakupan KPM PKH yang mendapatkan FDS gizi dan kesehatan (%)	91,55	100	Urusan Sosial
8	Cakupan keluarga 1000 HPK kelompok miskin sebagai (%)	00	3,09	Urusan Sosial
9	Cakupan desa menerapkan KRPL (%)	10,65	11,11	Urusan Pangan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja intervensi gizi sensitif masih bermasalah untuk beberapa indikator. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian kinerja hingga tahun 2020. Bahkan, partisipasi orang tua pada kelas parenting belum terdata dengan baik. Beberapa indikator menunjukkan penurunan di Tahun 2020. Pandemi covid-19 diperkirakan ikut mempengaruhi penurunan layanan di berbagai aspek, seperti Posyandu, PAUD, hingga program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan.

e. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 3 (tiga) unit Rumah Sakit pada Tahun 2020, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jambak, Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Empat, dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Ihsan Simpang Empat. Pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit diukur dengan sejumlah indikator, seperti Akreditasi Rumah Sakit dan kecukupan tempat tidur.

Pada Tahun 2020, Akreditasi RSUD Pasaman Barat masih pada level dasar, sedangkan akreditasi RSI Yarsi Simpang Empat sudah mencapai Paripurna Bintang 5. Sementara itu, kecukupan tempat tidur per 1000 penduduk disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.42
Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit per 1000 Penduduk
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Jumlah Tempat Tidur	2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Pasaman Barat	126	128	128	145	145
2	RSI Yarsi Simpang Empat	60	60	110	112	111
3	RSIA Al-Ihsan	-	-	35	35	35



4	Jumlah	186	188	273	292	291
5	Jumlah Penduduk	426.391	429.904	431.575	433.761	435.059
6	Rasio per 1000 Penduduk	0,436	0,437	0,633	0,673	0,669

Sumber : RSUD; RSI Yarsi; dan RSIA Al-Ihsan (Data Diolah)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa rasio ketersediaan tempat tidur di fasilitas kesehatan rujukan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan dari 0.436 per 1000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,669 per 1000 penduduk pada Tahun 2020. Peningkatan terjadi karena adanya penambahan rumah sakit sejak Tahun 2018, yakni Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Ihsan, dan pembangunan gedung baru di Rumah Sakit Islam Yarsi Simpang Empat.

Sementara itu, pembangunan kembali RSUD Pasaman Barat belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penambahan ketersediaan tempat tidur, karena gedung yang baru belum difungsikan secara maksimal. Demikian juga dengan pembangunan Rumah Sakit Pratama di Ujung Gading yang hingga saat ini masih terkendala operasionalisasinya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan irigasi untuk menunjang aktivitas pertanian, penyediaan air bersih bagi masyarakat, pembenahan kawasan kumuh, dan penataan ruang. Adapun capaian beberapa indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang selama tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut:

a) Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, jalan kabupaten kondisi baik didefinisikan sebagai total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dalam kondisi yang bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan kecepatan >40 KM/jam dibandingkan total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan disajikan dalam persentase. Persentase jalan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	520,44	502,15	614,14	518,25	467,28
2.	Total Panjang Jalan Kabupaten (km)	1.314,7	824,65	824,65	824,65	824,65
3.	% Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	39,60	60,9	74,47	62,84	56,66

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2016, panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 1.314,7 KM. Namun karena terjadinya pengalihan status jalan ke propinsi dan APBN, sejak tahun 2017, panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten berkurang menjadi 824,65 KM, atau terjadi pengurangan sepanjang 490,05 KM. Dengan menggunakan data panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 824,65 KM, maka % jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 60,9%. Angka ini meningkat menjadi 74,47% pada Tahun 2017. Namun, pada tahun 2019 turun menjadi 62,84% karena adanya beberapa kejadian bencana. Terakhir pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi 56,66% karena pada Tahun 2020 tidak ada pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten.

b) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Pembangunan irigasi yang menjadi kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah irigasi kabupaten. Gambaran capaian kinerja pembangunan irigasi kabupaten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Persentase Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	6.453	9.219	7.344	8.307	7.269,8
2.	Luas irigasi kabupaten	9.219	11.992	9.219	9.577	9.219
3.	% Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	76,19	76,88	79,66	83,85	78,85

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Seperti terlihat pada tabel di atas, persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik berfluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, terjadi perbaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari 76,19% pada Tahun 2016 menjadi 78,85% pada Tahun 2020. Namun, yang perlu menjadi perhatian dalam pengukuran %luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah adanya variasi data dasar luas irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten. Data yang bervariasi dapat menimbulkan ketidakakuratan dalam penghitungan kinerja pembangunan irigasi di Kabupaten Pasaman Barat.

c) Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum

Akses terhadap air minum yang aman merupakan hak bagi setiap penduduk, karena kualitas air minum yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Penyediaan air minum yang layak menjadi salah satu prioritas kabupaten dan menjadi bagian dari program penanganan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Pasaman Barat. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum di Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.45
Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk berakses air minum (jiwa)	301.853	262.773	332.609	355.637	370.028
2.	Jumlah penduduk	443.722	427.295	435.612	432.052	451.705
3.	% Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum	72,08	61,50	76,4	82,3	81,9

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa akses air minum aman penduduk Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan fluktuasi. Jumlah penduduk yang memiliki akses air minum sebenarnya meningkat dari tahun ke tahun, namun karena jumlah penduduk total meningkat lebih cepat, maka akses air minum penduduk berfluktuasi. Namun secara umum, persentase penduduk berakses air minum menunjukkan perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir, yakni dari 72,08% pada Tahun 2016 menjadi 81,9% pada Tahun 2020.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan air minum juga merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) pelayanan dasar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Berikut adalah gambaran pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.46
Kinerja Pemenuhan SPM Air Minum
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tangga terlayani	12.806	12.806	30.049	90.826	68.713
2.	Jumlah total rumah tangga	78.581	78.581	75.668	108.013	87.634
3.	SPM Kabupaten Bidang Air Minum (%)	16,30	16,30	39,71	84,09	78,41

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020, dan Laporan SPM Dinas PU-PR Tahun 2019

Seperti terlihat pada tabel di atas, kinerja pemenuhan SPM Air Minum Kabupaten Pasaman Barat jika dihitung dari jumlah rumah tangga terlayani juga menunjukkan perbaikan. Namun, pada Tahun 2020, terjadi penurunan kinerja

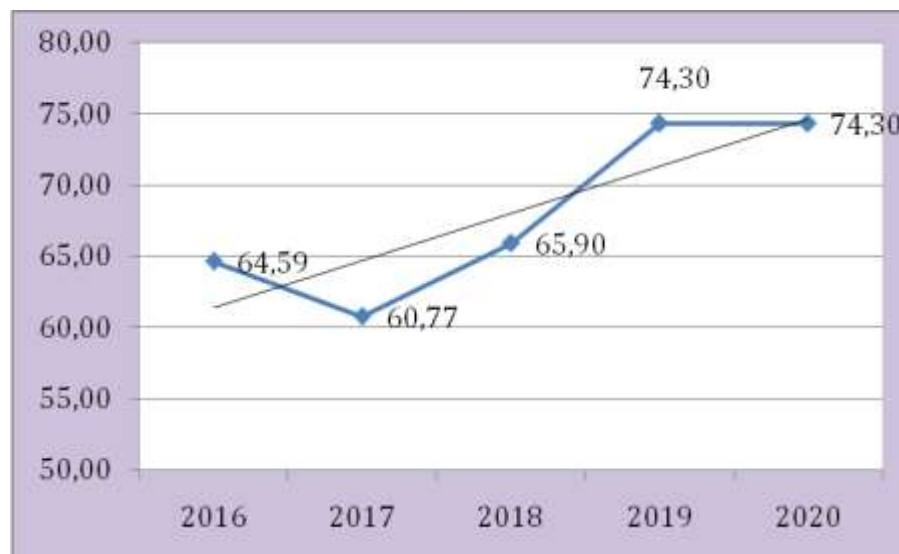


pemenuhan kebutuhan air minum, dari 84,09 persen di tahun 2019 menjadi 78,41 persen di Tahun 2020..

d) Persentase Penduduk Yang Mendapat Akses Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi permukiman yang layak bagi penduduk. Penyediaan sanitasi yang layak juga menjadi bagian dari intervensi penanganan stunting secara nasional. Sanitasi yang layak diperluka dalam pencegahan penyakit yang berkaitan dengan lingkungan, seperti diare dan kecacingan. Berikut adalah gambaran persentase penduduk yang mendapat akses sanitasi layak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021:

Grafik 2.16 Persentase penduduk yang mendapat akses sanitasi layak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026



Data di atas menunjukkan bahwa cakupan sanitasi layak di Kabupaten Pasaman Barat meningkat selama periode tahun 2016-2021. Hingga tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat belum mencapai *Universal Access*, yakni cakupan sanitasi layak 100%. Berbagai faktor mempengaruhi rendahnya cakupan kepemilikan sanitasi layak, antara lain tidak tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

e) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Ketaatan RTRW dalam pelaksanaannya minimal dapat terlaksana dan baru dapat terukur setelah 5 (lima) tahun masa berlakunya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031. Masa berlaku setelah lima tahun Perda tersebut adalah pada tahun 2017, sehingga pada tahun ini telah dilaksanakan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Pasaman Barat dimana ketentuan untuk mekanisme dan tahap penilaian kualitas RTRW itu sendiri mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.

Setelah melaksanakan PK RTRW Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2017, maka dihasilkan bobot dan nilai kualitas dan kuantitas dokumen RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031 sebesar 77,03% dengan rekomendasi perlu dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/872/BUP-PASBAR-2017 Tanggal 29 Desember 2017, ditetapkan Rekomendasi Perlunya Dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031. Hasil kegiatan yang diharapkan berupa Revisi Dokumen RTRW Kab. Pasaman Barat dan Ranperda RTRW Kab. Pasaman Barat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW, maka terdapat substansi dan muatan dari Revisi RTRW yang perlu disesuaikan dengan substansi lama yaitu banyak akan terjadi perubahan penamaan struktur ruang dan penempatan struktur ruang dalam hirarki dokumen yang lebih tinggi yang harus disesuaikan lagi. Terlebih lagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah selsesai melakukan Revisi RTRW pada tahun 2017 harus merubah lagi substansi dan peta kewenangan provinsi yang legalitasnya ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) masih banyak terdapat perbaikan sesuai pedoman pada Permen ATR/BPN 01 Tahun 2018 tersebut. Sehingga untuk realisasi kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 yang telah dianggarkan melalui DPA Badan Perencanaan tidak maksimal karena perlu penyesuaian lagi dengan substansi dan regulasi terbaru untuk pedoman penyusunan Revisi RTRW tersebut serta menunggu legalitas peta dan struktur ruang dari dokumen yang lebih tinggi yaitu RTRW Provinsi Sumatera Barat. Masa tenggang waktu untuk pelaksanaan Revisi RTRW dari waktu lima tahun pertama beralakunya Perda RTRW adalah 2 (dua) tahun. Kegiatan Revisi RTRW Kabupaten Pasaman Barat dianggarkan kembali pada tahun 2019 dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang karena merupaksan urusan wajib dan tupoksi serta SPM dari Dinas tersebut.

Dokumen perencanaan tata ruang atau RTRW terdapat pengendalian dan pemanfaatan ruang dimana pada tahun 2018 pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang dijalankan oleh Tim *Adhoc* Kabupaten yaitu Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Pelaksanaan TKPRD Provinsi dan TKPRD Kabupaten/Kota dilakukan melalui rapat koordinasi guna menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang. TKPRD berperan aktif dalam memberikan informasi dan data pada saat melakukan penerbitan kesesuaian ruang yang dimohon oleh setiap stakeholders/pemrakarsa. Tahapan-tahapan dan proses yang dilalui sebagai berikut:

- a. Pengajuan proses kesesuaian ruang
- b. Pelaksanaan survei lokasi



- c. Pembahasan pada rapat koordinasi di tingkat pokja teknis
- d. Rapat koordinasi pada tingkat pimpinan berupa sidang pleno pengambilan keputusan untuk kesesuaian ruang, penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan ruang/kesesuaian ruang dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 115 dan 117 Tahun 2017.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di bidang perumahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten dan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha, Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota, dan penyelenggaraan PSU perumahan.

Pencapaian Kinerja Urusan Perumahan dan permukiman dapat dilihat beberapa indikator persentase rumah layak huni dan persentase areal kawasan kumuh yang ada di sebuah kabupaten. Adapun capaian indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut :

a) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni merupakan perbandingan antara seluruh rumah yang layak huni dalam suatu wilayah pada periode tertentu dengan jumlah seluruh rumah pada periode yang sama di wilayah tersebut. Berikut adalah gambaran capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat selama periode 2016-2020.

Tabel 2.47

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni (unit)	NA	54.898	71.778	72.324	75.496
2.	Jumlah rumah (unit)	-	85.662	75.668	75.668	87.012
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	NA	64,08	94,85	95,58	86,77

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Seperti terlihat pada tabel, cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan fluktuasi selama 4 (empat) tahun terakhir. Namun secara keseluruhan, terlihat trend peningkatan. Pada Tahun 2017, cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Pasaman Barat adalah 64,08%, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 94,85% pada



Tahun 2018, dan meningkat lagi menjadi 95,58% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan cakupan ketersediaan rumah layak huni karena terjadinya pembaruan data jumlah total rumah di Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan penambahan rumah layak huni tidak begitu signifikan.

b) Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten adalah kawasan kumuh dengan luasan di bawah 10%. Berikut adalah capaian kinerja penataan areal kawasan kumuh di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2016-2020.

Tabel 2.48
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Kawasan Kumuh (ha)	617,72	121,89	311,216	175,49	175,49
2.	Luas Wilayah (ha)	3.887,77	3.887,77	3.887,77	3.887,77	3.887,77
3.	% Areal Kawasan Kumuh	15,90	3,13	8,00	4,51	4,51

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kinerja pembenahan areal kawasan kumuh di Kabupaten Pasaman Barat cukup baik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada Tahun 2016, kawasan kumuh di Kabupaten Pasaman Barat tercatat seluas 617,72 ha (15,90% dari total luas wilayah). Pada Tahun 2017, areal kawasan kumuh turun drastis menjadi 3,13%, namun kembali meningkat menjadi 8% pada Tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020, kawasan kumuh di Kabupaten Pasaman Barat tercatat 175,49 ha (4,51% dari total luas wilayah). Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020, tidak dilakukan pembenahan terhadap kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat terhadap tumbuhnya perekonomian, dengan adanya stabilitas sosial dan politik maka iklim investasi, teknologi, Infrastruktur dan tenaga kerja bisa tumbuh dengan baik, dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas daerah. Capaian Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka mewujudkan stabilitas daerah dapat digambarkan pada capaian indikator yang telah ditetapkan pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.49
Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	-	100	100	100	100
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	20 Menit	20 Menit	20 Menit	20 Menit
3	% Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-	100	96,9	96,10	100

Tabel 2.50
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan yang ditangani	-	82	344	234	234
2	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	-	82	344	234	234
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (%)	-	100	100	100	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Pasaman Barat sangat baik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Semua kasus pengaduan pelanggaran yang masuk dapat ditangani setiap tahunnya.

2) Bidang Kebencanaan

Secara geografis, Kabupaten Pasaman Barat rentan terhadap bencana. Oleh sebab itu, penanganan bencana mestinya mendapat perhatian khusus. Penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan melalui 3 strategi, yakni:

- Pra Bencana; Tahap Pencegahan dan Mitigasi – Strategi yang ditempuh dengan mengupayakan penanganan preventif agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan apabila terjadi bencana.
- Saat Terjadi Bencana. Tahap Tanggap Darurat, Dilakukan upaya penyelamatan, pencarian dan evakuasi serta pemberian bantuan darurat berupa tempat



penampungan sementara, bantuan pangan dan penanganan medis bagi korban bencana.

- c) **Pasca Bencana.** Tahap Rehabilitasi Dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta memberdayakan dan mengembalikan harkat hidup terhadap korban bencana secara manusiawi.

Pada prinsipnya, pencegahan dan mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana bertujuan untuk meminimalisir korban jiwa maupun kerugian materil akibat bencana. Selain itu, penanganan bencana bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah namun juga memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indikator ini instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Penilaian IKD dilakukan terhadap 71 indikator. Hasil penilaian IKD dikelompokkan menjadi 5 (lima) tingkatan, yakni:

- 1) Level 1: Belum Ada Inisiatif
- 2) Level 2: Sudah Ada Inisiatif
- 3) Level 3: Sudah Ada Output
- 4) Level 4: Sudah Ada Outcome
- 5) Level 5: Sudah Ada Impact

Pada Tahun 2019, IKD Kabupaten Pasaman Barat adalah 1.7 meningkat dari skala 1 pada tahun 2018. Indikator ini merupakan salah satu indikator baru sebagai hasil revisi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2021 yang dilakukan pada Tahun 2018. Nilai IKD 1.7 menunjukkan bahwa ketahanan daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam menghadapi bencana masih sangat rendah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, indikator kinerja bidang sosial adalah persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan PPKS dalam hal ini didefinisikan sebagai jumlah PPKS yang diberi bantuan dibanding total PPKS yang terdaftar. Data PPKS yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang menangani



urusan sosial. Berikut adalah gambaran penanganan PPKS di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2020:

Tabel 2.51
Persentase PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Jumlah Keluarga Dalam DTKS	40.038	40.038	43.759	43.065	42.474
B	Jumlah Jiwa dalam DTKS	161.197	161.197	183.186	179.003	165.075
1a	Jumlah Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan	2.879	7.800	16.848	16.102	17.804
1b	% Keluarga Penerima PKH	7,19	19,48	38,50	37,39	41,92
2a	Jumlah Keluarga Penerima BPNT (Rastra)	23.987	23.987	23.987	23.987	25.695
2b	% Keluarga Penerima PBNT	59,91	59,91	54,82	55,70	60,50
3a	Jumlah Penerima PBI APBN	152.039	154.260	155.522	162.635	162.635
3b	Jumlah Penerima PBI APBD	24.213	24.213	35.414	35.387	35.384
3c	Jamkes Tuah Basamo				687	688
3d	% Penerima PBI	109,34	110,72	104,23	111,01	120,37

Seperti disajikan pada tabel di atas, beberapa program prioritas dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai (PBNT) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beberapa informasi yang perlu ditambahkan terkait 3 program prioritas ini adalah:

- Program Keluarga Harapan* diarahkan kepada keluarga yang terdaftar pada Desil I dan Desil II pada DTKS, dengan kriteria memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, dan lansia. Oleh sebab itu, tidak semua keluarga yang terdaftar dalam DTKS memenuhi kriteria sebagai pemanfaat Program Keluarga Harapan.
- Bantuan Pangan Non-Tunai*, diarahkan kepada keluarga yang terdaftar pada Desil I hingga III.
- Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional* diarahkan kepada seluruh individu yang terdaftar pada DTKS. Selain itu, pemerintah daerah juga membiayai JKN untuk keluarga miskin dengan pembiayaan sistem sharing antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi. Iuran untuk Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato dibiayai 70% oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan 30% oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Selain itu, sejak tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat membiayai JKN bagi keluarga miskin melalui program Jamkesda Tuah Basamo.



Selain itu, sejak tahun 2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebenarnya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga yang sebagian besar di arah kepada keluarga yang terdaftar dalam DTKS. Program daerah dimaksud antara lain Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, bantuan Sambungan Listrik Gratis, dan Jamban Gratis.

2.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Kinerja pembangunan sektor tenaga kerja diukur melalui beberapa indikator, seperti produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Berikut adalah gambaran capaian indikator urusan tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020:

a. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan

Penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja semestinya bermuara pada penempatan pencari kerja sesuai dengan kompetensinya. Oleh sebab itu, persentase tenaga kerja yang ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri merupakan salah satu indikator capaian kinerja pembangunan bidang ketenagakerjaan. Berikut adalah gambaran capaian penempatan tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2016-2020:

Tabel 2.52
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	4.176	190	575	34	136
2.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	13.919	1.665	2.283	1.221	986
3.	% Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	30,01	11,50	25,19	2,78	13,79

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Seperti terlihat pada tabel, persentase tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan masih sangat rendah, dan cenderung berkurang setiap tahun. Pada Tahun 2016, persentase tenaga kerja yang ditempatkan dilaporkan sebesar 30,01%, atau sebanyak 4.176 tenaga kerja. Sementara itu, pada Tahun 2020, hanya 13,79% dari tenaga kerja yang terdaftar berhasil ditempatkan baik di dalam maupun di luar negeri.

b. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja

Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja diukur dengan membandingkan total PDRB atas dasar harga konstan dan jumlah total penduduk bekerja. Indikator ini membandingkan produktivitas per tenaga kerja sebagai penyumbang terhadap PDRB. Berikut adalah perkembangan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.53
Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (Rp. juta)
Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	9.857.619,49	10.384.391,53	10.925.625,62	11.411.833,24	11.259.452,26
2.	Jumlah tenaga kerja	183.878	194.982	192.908	194.387	212.825
3.	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja (%)	53,61	53,26	56,64	58,71	52,90

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Seperti terlihat pada tabel di atas, Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja Kabupaten Pasaman barat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Namun, secara umum trend-nya menurun. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih lebih cepat daripada pertumbuhan DPRB atas dasar harga konstan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus berupaya meningkatkan pengendalian penduduk, kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Terdapat beberapa indikator pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :



a. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan

Kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas semestinya mendapat perlakuan non-diskriminatif. Faktanya, masih terdapat beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (per 1000 penduduk perempuan)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	59	72	93	44	15
2.	Jumlah Seluruh Penduduk Perempuan	209.001	211.174	212.354	213.918	214.441
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 1000 penduduk perempuan	0,29	3,41	4,38	2,06	0,70

Sumber: Profil Gender dan Anak h 2017-2020 & LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan trend kenaikan selama 5 (lima) tahun terakhir. Angka tertinggi terlihat pada tahun 2018, dengan rasio kekerasan terhadap perempuan sebesar 4,38 per 10.000 penduduk perempuan. Selanjutnya, angka terendah dicapai pada tahun 2016, yakni 0,29 per 10.000 penduduk perempuan. Peningkatan rasio kekerasan terhadap perempuan tidak selalu bermakna negatif.

Semakin tingginya laporan terhadap kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat, dapat menunjukkan kalau masyarakat semakin melek dengan kesamaan hak kaum perempuan dan laki-laki. Namun di sisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan perlu menjadi perhatian, karena hal ini menunjukkan masih terjadi tindakan diskriminatif terhadap kaum yang lemah.

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan DPR

Indikator ini menggambarkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang non-diskriminatif bagi perempuan di lembaga formal, seperti instansi pemerintah. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah diukur dengan membandingkan jumlah seluruh pekerja perempuan di lembaga pemerintah, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal dengan seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.55
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan
di DPR Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	2.913	3.049	3.010	3.123	3.123



a	Jumlah pekerja perempuan	63.362	70.440	75.646	63.133	75.740
b	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	4,60	4,33	3,98	4,95	4,12
2	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	1	1	1	3	3
a	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	40	40	40	40	40
b	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	2,5	2,5	2,5	7,5	7,5

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Selain tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK), kedua indikator di atas ikut membentuk Indeks Keberdayaan Gender (IDG). Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan berfluktuasi, namun menunjukkan trend berkurang dari 4,60% pada Tahun 2016 menjadi 4,12% pada Tahun 2020. Meski demikian jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan juga terjadi pada proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, meningkat dari 1 orang (2,5%) menjadi 3 orang (7,5%).

c. Predikat Kabupaten Layak Anak

Dalam RPJMD periode 2016-2021, salah satu indikator kinerja daerah bidang perlindungan anak adalah pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak (KLA). Predikat ini adalah gambaran keberpihakan pembangunan terhadap kepentingan anak, yang mewakili hampir 40% dari penduduk Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat pertama kali lolos dalam seleksi KLA pada tahun 2018 dengan predikat Pratama. Pada tahun 2020, predikat KLA masih Pratama.

d. Rasio Kekerasan Terhadap Anak

Selain perempuan, anak adalah kelompok penduduk yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Berikut adalah perkembangan rasio kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 2.56
Rasio Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan	28	52	53	42	30
2.	Jumlah Seluruh Anak	155.949	153.481	158.562	160.901	181.321
3.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	1,80	3,39	3,34	2,61	1,65

Sumber : Profil Gender dan Anak h 2017-2020 & LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kekerasan terhadap anak berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 2016-2020. Angka tertinggi



terlihat pada Tahun 2017, dengan rasio kekerasan terhadap anak sebesar 3,39 per 10.000 anak. Sebaliknya, angka terendah tercatat pada Tahun 2020, dengan rasio 1,65 per 10.000 anak. Namun jika dilihat dari jumlah kasus, angka tertinggi tercatat pada Tahun 2018, yakni sebanyak 53 kasus dan angka terendah pada Tahun 2016, yakni 28 kasus.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Capaian urusan Pangan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, Stabilitas harga dan pasokan pangan, skor pola pangan harapan dan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan.

Tabel 2.57
Indikator Urusan Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ketersediaan pangan utama	369,55	325,70	NA	207,18	242,2
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita	84,10	87,57	88,88	77	79
3	Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indeks Ketahanan Pangan	-	-	44,35	64,11	77,17

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat, 2020

a. Persentase ketersediaan pangan utama

Angka ini menggambarkan total ketersediaan pangan utama dibanding kebutuhan. Data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan pangan utama di Kabupaten Pasaman Barat sangat memadai, meski menunjukkan *trend* berkurang selama periode 2016-2021.

b. Ketersediaan energi dan protein per kapita

Indikator ini dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan rata-rata 2200 kalori per kapita per hari. Capaian indikator ini agak kontradiktif dengan data ketersediaan pangan, karena faktanya, ketersediaan energi dan protein perkapita belum mencapai 100 persen. Selain itu, terlihat trend penurunan dari 84,10% pada Tahun 2016 menjadi 79% pada Tahun 2020. Angka ini menunjukkan kalau semakin banyak jumlah penduduk yang belum mampu memenuhi 2200 kalori per hari.

c. Indeks Ketahanan Pangan

Indikator ini mulai dihitung sejak Perubahan RPJMD Pasaman Barat Tahun 2016-2021. Indeks Ketahanan Pangan menggambarkan ketahanan pangan dalam 3 aspek, yakni ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan/akses pangan



(*accessibility*), dan kualitas dan keamanan pangan (*security*). Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2018-2020 meningkat cukup drastis dari 44,35 persen pada Tahun 2018 menjadi 77,17% pada Tahun 2020.

Perbaikan Nilai indeks ketahanan pangan tersebut diatas menunjukkan upaya keras Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah salah satu upaya adalah cetak sawah, intensifikasi lahan pertanian, bantuan alsintan, rehabilitasi irigasi tersier, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jalan produksi, lumbung pangan masyarakat, Toko Tani Indonesia dan melakukan percepatan diversifikasi pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah adalah Pemberian izin lokasi, Penyelesaian sengketa tanah garapan, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, penetapan tanah ulayat, penyelesaian masalah tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah.

Dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021, capaian kinerja bidang pertanahan diukur dalam beberapa indikator utama, antara lain luasan lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara, dan penyelesaian izin lokasi. Adapun capaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat bidang pertanahan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.58
Indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Bersertifikat	0,29	19,25	37,80	37,80	-
2	<i>Penyelesaian kasus tanah negara</i>					
a	Jumlah kasus tanah negara	3	1	2	16	-
b	Jumlah kasus tanah negara terselesaikan	10	1	10	16	-
c	Penyelesaian kasus tanah negara (%)	30	100	20	100	-

Sumber: LPPD Pasaman Barat Tahun 2016-2019

Sertifikat lahan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan dalam 5 tahun terakhir, namun masih membutuhkan upaya yang lebih intensif. Sementara itu, kinerja penyelesaian sengketa/ kasus tanah negara menunjukkan perbaikan. Namun, satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah kecenderungan kenaikan jumlah kasus, dari 3 kasus di tahun 2016 menjadi 16 kasus di Tahun 2020.

Penanganan konflik pertanahan baik tanah masyarakat/ulayat maupun tanah negara yang ada di Kabupaten Pasaman Barat masih menjadi polemik dan



belum dapat terselesaikan secara maksimal. Hal ini disebabkan minimnya data bahkan belum tersedianya data sebaran tanah negara yang diusahakan oleh masyarakat (*erpacht*) menjadi lahan pertanian maupun diusahakan masyarakat untuk perkebunan dan aktifitas budidaya lainnya. Sementara itu, untuk penguasaan tanah HGU perusahaan dan plasma masyarakat perlu peninjauan ulang terhadap izin-izin dan perpanjangan HGU.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan.

Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut:

1) Jumlah wilayah kecamatan yang dilayani

Jumlah wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA pada 5 (lima) tahun terakhir adalah 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pasaman, Luhak Nan Duo, dan Kecamatan Talamau. Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan kecukupan sumber daya dan infrastruktur dalam penanganan sampah di kabupaten Kota.

2) Persentase Sampah Yang Tertangani

Indikator ini menggambarkan ketersediaan dan kecukupan sumber daya dan infrastruktur dalam penanganan sampah di kabupaten Kota. Persentase sampah yang tertangani dihitung berdasarkan total volume sampah (m³/hari) yang bisa ditangani dibagi total volume sampah (m³/hari). Berikut adalah gambaran kinerja penanganan sampah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020.

Tabel 2.59

Persentase Sampah Yang Tertangani Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Total volume sampah yang dapat ditangani (m ³ /hari)	90	90	288	144	144
2.	Total timbunan sampah kab/kota (m ³ /hari)	176,78	176,78	516,58	518	522,06
3.	% Sampah Yang Tertangani	50,91	50,91	55,75	27,75	27,58

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja penanganan sampah di Kabupaten Pasaman Barat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah



daerah maupun masyarakat. Persentase penanganan sampah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena kenaikan volume sampah yang signifikan tidak diiringi dengan kenaikan kemampuan dalam menangani sampah. Beberapa permasalahan terkait rendahnya kinerja pelayanan persampahan di Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a) Tidak tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memenuhi syarat;
- b) Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah ke TPA;
- c) Kuantitas dan kualitas SDM yang masih terbatas;
- d) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan proporsi : IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKU 30%) + (IKTL 40%). Berikut adalah capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur secara rutin di Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2018 (setelah Perubahan Perda RPJMD Tahun 2016-2021). Tabel di atas menunjukkan bahwa IKLH Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2019 adalah 70,89 dan kemudian turun menjadi 70,84 pada Tahun 2020. Penurunan terjadi karena penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, dari 47,65 pada tahun 2019 menjadi 46,68 pada tahun 2020.

Tabel 2.60
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Air (IKA) (30%)	80	80	80	80	80
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU) (40%)	91,57	92,15	92,82	92,77	93,86
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) (40%)	-	-	-	47,65	46,68
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,61	69,91	71,05	70,89	70,84

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat

6. Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak asasi penduduk mendapatkan tanda identitas berupa dokumen kependudukan terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak. Berikut adalah



capaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama Tahun 2016-2020:

1) Kepemilikan KTP Elektronik (Wajib KTP/17+)

Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan selama periode 2016-2021, meningkat dari 79,61% pada Tahun 2016 menjadi 94,19% pada Tahun 2020. Artinya, pada Tahun 2020 terdapat 17.088 penduduk usia 17 tahun ke atas yang belum memiliki KTP di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.61
Perkembangan Kepemilikan KTP Elektronik Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Wajib KTP-el	288.634	294.698	290.885	290.154	294.117
2	Jumlah Penduduk Memiliki KTP-el	229.789	237.635	262.279	264.186	277.029
3	% Kepemilikan KTP-el	79,61	80,64	90,17	91,05	94,19

Masih terdapat kendala dalam mencapai indikator ini disebabkan kesadaran sebagian masyarakat yang masih kurang untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Selain itu, adanya penduduk Pasaman Barat yang tidak ditemukan dilapangan karena sudah pindah tapi tidak mengurus surat pindah, sudah meninggal tapi tidak dilaporkan, sekolah diluar Pasaman Barat, keterbatasan Peralatan Rekam KTP-El.

2) Kepemilikan Akta Kelahiran (Usia 0-18 tahun)

Kepemilikan akta kelahiran merupakan salah satu hak sipil anak, yang diperlukan untuk berbagai keperluan terkait pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi anak. Berikut adalah gambaran Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.

Tabel 2.62
Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk 0-18 Tahun	155.949	153.481	158.562	160.901	158.452
2	Memiliki Akta Kelahiran	75.837	101.679	142.917	152.463	151.931
3	% Kepemilikan Akta Kelahiran	48,63	66,25	90,13	94,76	95,88



Kepemilikan Akta Kelahiran juga menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan selama periode 2016-2021. Pada Tahun 2016, hanya 48,63% anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Pasaman Barat memiliki akta kelahiran. Pada Tahun 2020, sebanyak 95,88% anak usia 0-18 tahun sudah memiliki akta kelahiran. Peningkatan ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran. Terdapat 6.521 anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki Akta Kelahiran. Tentunya, masih diperlukan upaya untuk percepatan pemenuhan hak anak, terutama bagi anak yang berada di daerah tertinggal dan terpencil.

3) Kepemilikan Akta Kematian

Meski dianggap tidak begitu penting oleh sebagian orang, akta kematian sebenarnya memiliki banyak manfaat baik bagi keluarga maupun bagi pemerintah daerah. Bagi keluarga, misalnya, akta kematian menjadi prasyarat untuk penetapan status janda/duda bagi pasangan yang ditinggalkan, dan menjadi prasyarat untuk menghentikan tagihan iuran jaminan kesehatan atas nama yang bersangkutan.

Bagi pemerintah daerah, akta kematian diperlukan untuk pemutakhiran data penduduk, sehingga diperoleh data yang lebih akurat. Sayangnya, kesadaran untuk mengurus akta kematian masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kecilnya cakupan kepemilikan akte dibanding jumlah penduduk yang meninggal setiap tahunnya.

Tabel 2.63
Perkembangan Kepemilikan Akta Kematian (%) di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk Meninggal	14.412	15.041	15.078	15.367	14.464
2	Memiliki Akta Kematian	815	1.359	2.352	2.200	8.640
3	Kepemilikan Akta Kematian (%)	5,66	9,04	15,60	14,32	59,73

Sebenarnya, kesadaran untuk mendapatkan akte kematian sudah meningkat secara signifikan di Kabupaten Pasaman Barat selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan bagi penduduk dan juga adanya inovasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk mendorong masyarakat mengurus akta kematian jika anda anggota keluarga yang meninggal. Namun, cakupan kepemilikan secara total masih rendah. Diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini.

4) Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) menjadi identitas bagi sebuah keluarga karena di dalamnya termuat data penting seperti alamat, nama, anggota keluarga, hubungan, pekerjaan dan informasi penting lainnya. Bagi penduduk Indonesia, KK memiliki



banyak fungsi. Dokumen ini kerap menjadi prasyarat administrasi untuk berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tabel 2.64
Perkembangan Kepemilikan Kartu Keluarga (%) di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Keluarga	110.716	114.788	112.340	116.318	117.787
2	Jumlah Keluarga Memiliki KK	108.904	111.176	109.747	112.437	113.103
3	Kepemilikan KK (%)	98,36	96,85	97,69	96,66	96,02

Data di atas menunjukkan bahwa kesadaran penduduk Kabupaten Pasaman Barat untuk mengurus kartu keluarga sudah sangat baik. Namun, pertambahan jumlah keluarga tampaknya tidak sebanding dengan jumlah keluarga yang mengurus KK, sehingga persentase kepemilikan KK justru menunjukkan trend penurunan setiap tahunnya.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan Kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Penyelenggaraan penataan Desa, fasilitasi Kerja sama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi Desa dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Kinerja pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat diukur dengan beberapa sebagai berikut:

1. Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM

Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit dari Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Sosial, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang diukur pada tingkat desa/nagari, dan dimutakhirkan setiap tahunnya. Berdasarkan IDM, desa dikelompokkan menjadi lima strata, yakni: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri.



Tabel 2.65
Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Tertinggal Menurut IDM	2	2	1	0	0
2.	Jumlah Seluruh Desa	19	19	19	19	19
3.	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	10,53	10,53	5,26	0	0

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

Tabel di atas menyajikan perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun. Pada Tahun 2016-2017, masih terdapat 2 (dua) dari 19 (sembilan belas) nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang masih berstatus tertinggal, yakni Katiagan dan Rabi Jonggor. Pada Tahun 2018, Nagari Rabi Jonggor berubah status menjadi nagari berkembang, dan pada Tahun 2019, tidak ada lagi nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang masih berstatus tertinggal.

2. Persentase Status Desa Mandiri Menurut IDM

Hingga tahun 2020, belum ada satupun nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang sudah berstatus Mandiri menurut Indeks Desa Membangun, meskipun tidak ada lagi nagari yang dinyatakan tertinggal. Berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Tahun 2021, maka seluruh nagari di Kabupaten Pasaman Barat masih berstatus Berkembang dan Maju, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Status Nagari di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020

No.	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
1	Aia Bangih	0,9143	0,8833	0,6	0,7992	Maju
2	Ujung Gading	0,92	0,8833	0,6	0,8011	Maju
3	Lingkuang Aua	0,9429	0,9	0,6	0,8143	Maju
4	Aua Kuniang	0,8286	0,8167	0,8	0,8151	Maju
5	Aia Gadang	0,8686	0,7167	0,8	0,7951	Maju
6	Kajai	0,7771	0,7	0,4667	0,6479	Berkembang
7	Talu	0,7771	0,8667	0,7333	0,7924	Maju
8	Sinuruik	0,8571	0,7167	0,8	0,7913	Maju
9	Kinali	0,9429	0,9667	0,4667	0,7921	Maju
10	Katiagan	0,6457	0,3333	0,8667	0,6152	Berkembang
11	Muaro Kiawai	0,8914	0,7333	0,6667	0,7638	Maju
12	Rabi Jonggor	0,7829	0,7333	0,6667	0,7276	Maju



No.	NAMA DESA	IKS 2020	IKE 2020	IKL 2020	NILAI IDM 2020	STATUS IDM 2020
13	Batahan	0,8629	0,75	0,4	0,671	Berkembang
14	Desa Baru	0,84	0,7167	0,6667	0,7411	Maju
15	Parit	0,8457	0,6167	0,8	0,7541	Maju
16	Sungai Aua	0,8971	0,85	0,6	0,7824	Maju
17	Koto Baru	0,8571	0,8667	0,6667	0,7968	Maju
18	Kapa	0,9029	0,8167	0,6	0,7732	Maju
19	Sasak	0,8686	0,5667	0,9333	0,7895	Maju

Sumber: Pemutakhiran IDM Pasaman Barat Tahun 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari 19 Nagari di Kabupaten Pasaman Barat, 16 (enam belas) sudah berstatus maju dan 3 (tiga) berstatus berkembang. Berdasarkan IDM, nagari yang memiliki Skor IDM tertinggi adalah Aua Kuniang, dengan skor IDM 0,8151 dan Nagari Lingkuang Aua, yakni 0,8143. Oleh sebab itu, upaya untuk mendorong terciptanya nagari mandiri dapat difokuskan pada dua nagari ini.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat idealnya didukung oleh penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas. Salah satu upayanya adalah melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan program keluarga berencana. Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pengendalian kuantitas penduduk adalah Total Fertility Rate (TFR), *modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*, dan *unmet need*. Indikator ini menggambarkan keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, keberhasilan program keluarga berencana, dan peningkatan program kesehatan ibu dan anak.

1) Total Fertility Rate (TFR)

Angka TFR yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan di RPJMD Tahun 2016-2021 adalah 3,38 berdasarkan data SUPAS. Terakhir di tahun 2020, BPS merilis data SUPAS terbaru berdasarkan Susenas 2019, di mana TFR Pasaman Barat adalah 3,05. Hal ini berarti bahwa wanita usia subur (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Pasaman Barat rata-rata mempunyai 3 hingga 4 orang anak. Tingginya TFR mencerminkan rata-rata usia perkawinan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan angka kemiskinan yang tinggi.

2) Modern Contraceptive Prevalence Rate (CPR)

Indikator ini mengacu kepada persentase wanita usia subur (WUS) yang sudah menikah atau pasangan yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Wanita usia reproduksi dalam hal ini adalah usia 15-49 tahun. Sama halnya dengan TFR, data mCPR dihitung kabupaten/kota dihitung melalui



SUPAS. Data terakhir tahun 2019, mCPR Kabupaten Pasaman Barat adalah 46 persen. Hal ini menunjukkan rendahnya wanita usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern. Bisa diasumsikan bahwa rendahnya mCPR berkorelasi dengan tingginya TFR.

3) *Unmeet Need*

Unmeet need menggambarkan jumlah wanita usia 15-49 yang sebenarnya tidak menginginkan anak atau ingin menunda kehamilan, namun tidak menggunakan metode kontrasepsi tertentu. Angka *unmet need* juga termasuk jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi tradisional. *Unmet need* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan metode kontrasepsi, hambatan sosial, akses, dan sebagainya.

Menurut Susenas Tahun 2019, *unmeet need* Kabupaten Pasaman Barat adalah 29%. Artinya sebanyak 29% PUS yang ingin ber-KB ternyata tidak ber-KB karena berbagai alasan. Angka ini juga berkorelasi dengan tingginya TFR di Kabupaten Pasaman Barat.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayanan, Penerbangan, dan Perkeretaapian. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan urusan perhubungan di Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada peningkatan keselamatan penumpang. Indikator kecelakaan lalu lintas yang terdiri dari jumlah kejadian, korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian cenderung fluktuatif. Berikut tabel perkembangan indikator urusan perhubungan :

Tabel 2.67
Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rambu Lalu Lintas	798	798	803	803	803
2	Jumlah Apill	8	8	8	8	8
3	Marka Jalan	405.318	405.668	408.217	408.217	452.453
4	Jumlah Kasus Kecelakaan	172	143	255	262	216
5	Jumlah Korban Meninggal	36	36	66	62	32
6	Jumlah Korban Luka Berat	14	6	17	29	21
7	Jumlah Korban Luka Ringan	302	255	321	331	287
8	Jumlah Kerugian	153,450,0	100,671,00	51,571,000	594,700,00	213,120,00



No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	(rupiah)	00	0		0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat (2021)

Kabupaten Pasaman Barat juga memiliki sarana perhubungan yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Pasaman Barat, yakni Bandara Pusako Anak Nagari dan Pelabuhan Teluk Tapang. Untuk itu, kedua sarana perhubungan itu diharapkan dioperasionalkan segera untuk memberikan daya dukung terhadap perekonomian Kabupaten Pasaman Barat.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Di era revolusi industri 4.0 ini atau disebut juga dengan era digitalisasi kemajuan dibidang komunikasi dan informatika menjadi hal yang penting demi tercapainya visi dan misi kepala daerah. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. hal ini menuntut pemerintah daerah untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Selama Periode 2016-2021, pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika. Adapun capaian kinerja yang terukur hingga Tahun 2021 adalah:

Tabel 2.68

Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan OPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (%)	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Website Pemerintah Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pasaman Barat

1) Cakupan OPD yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (%)

Seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang ditetapkan oleh Kepala OPD masing-masing sejak tahun 2014. Namun, peran dan fungsi PPID yang ada di OPD masih perlu ditingkatkan, sehingga informasi pembangunan yang disajikan ke publik terklasifikasi dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat.

2) Ketersediaan Website Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki satu (1) website domain dengan 117 sub domain pada Tahun 2021 sebagai salah satu upaya pelayanan informasi kepada masyarakat.

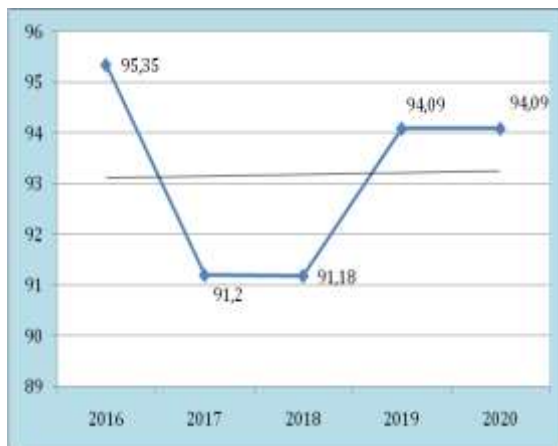


3) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

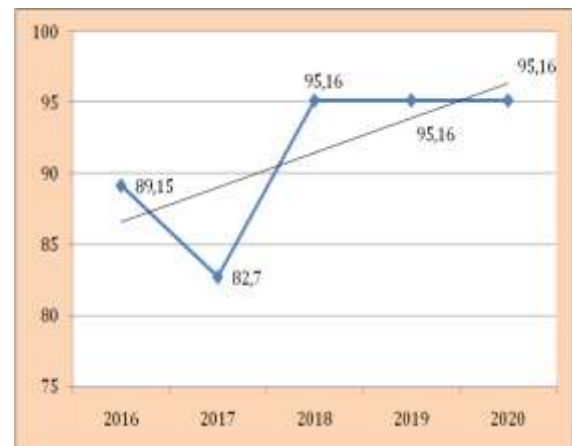
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika semestinya diarahkan untuk pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Evaluasi kematangan SPBE Kabupaten Pasaman Barat baru dilaksanakan 1 kali pada tahun 2018. Capaian SPBE Tahun 2018 adalah 1,89 dari target 2.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah pada Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada peningkatan persentase koperasi berprestasi dan peningkatan pertumbuhan usaha mikro. Berikut adalah beberapa indikator capaian bidang koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020.



Grafik 2.17a Perkembangan Koperasi Aktif di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021



Grafik 2.17b Perkembangan rasio Usaha Mikro di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2021

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu. Kinerja pembangunan bidang koperasi berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi kemampuan organisasi perangkat daerah dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada, baik dari segi anggaran maupun SDM. Pada Tahun 2020, dari 423 koperasi yang terdaftar, 398 unit (94,09%) melakukan RAT tepat waktu.



Tabel 2.69
Persentase Koperasi aktif Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi aktif	349	300	355	398	398
2	Jumlah seluruh koperasi	366	332	381	423	423
3	% Koperasi aktif	95,35	91,2	91,18	94,09	94,09

Sumber : LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

2) Persentase Usaha Mikro

Indikator ini menggambarkan banyaknya Usaha Mikro dibandingkan total Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di kabupaten/kota. Organisasi perangkat daerah yang menangani urusan koperasi dan UKM di Kabupaten Pasaman Barat terakhir melakukan updating data usaha mikro pada Tahun 2018, dan masih menggunakan data yang sama hingga Tahun 2020. Dari 2.645 UKM yang terdaftar, tercatat sebanyak 2.517 (95,16%) yang merupakan Usaha Mikro. Kinerja pembangunan dalam pengembangan industri UKM di Kabupaten Pasaman Barat idealnya ditandai dengan semakin berkembangnya usaha mikro menjadi usaha kecil.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

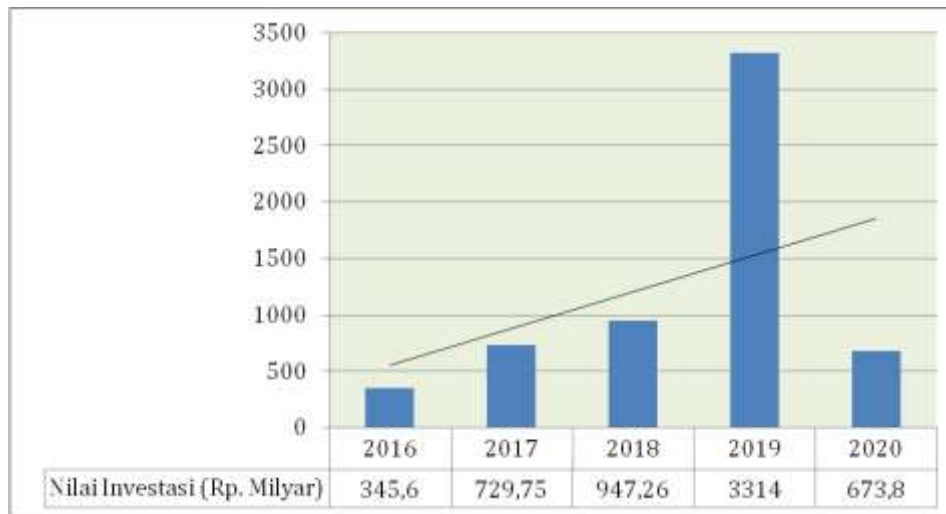
1. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat meliputi berupa penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).



Grafik 2.18 Perkembangan Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Sumber: DPMPTSP Pasaman Barat, 2021)



Grafik di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2016-2021, nilai investasi di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend meningkat. Angka tertinggi diperoleh pada Tahun 2019, di mana nilai investasi di Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp. 3,3 triliyun, namun berkurang secara signifikan menjadi Rp. 673,8 Milyar pada Tahun 2020. Pandemi Covid-19 ternyata mempengaruhi perkembangan investasi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Pasaman Barat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala BPMP2T. Pelimpahan ini meliputi 40 izin. Terakhir, pelimpahan perizinan ini diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat, yang mencakup 70 perizinan dan non-perizinan.

Pelayanan perizinan terpadu menjadi salah satu upaya untuk mendorong investasi di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga proses perizinan dilakukan satu atap, agar menjadi lebih ringkas, mudah, dan murah. Kinerja pelayanan perizinan diukur dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), seperti terlihat sebagai berikut:



Grafik 2.19 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan perizinan meningkat setiap tahunnya. Hal diperoleh berkat berbagai upaya dan inovasi untuk mempermudah proses perizinan bagi masyarakat, baik dari segi prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1. Kepemudaan

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan pemuda di Kabupaten Pasaman Barat dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif. Pada tahun 2020 dan 2019, di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 15 pemuda pelopor yang berperan dalam masyarakat, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 10 orang.

Mengingat pentingnya peran pemuda di dalam pembangunan baik ekonomi maupun sosial, diperlukan program kegiatan yang mampu mendorong keterlibatan pemuda secara lebih luas dan aktif untuk berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Terkait hal ini, Pasaman Barat setiap tahun melaksanakan pemilihan Uda/Uni duta wisata. Uda/Uni yang terpilih nanti akan berperan aktif dalam mempromosikan Pasaman Barat baik promosi wisata, sosial budaya, dan lainnya. Capaian indikator kepemudaan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.70

Capaian Pembangunan Bidang Kepemudaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan	352	352	352	352	352

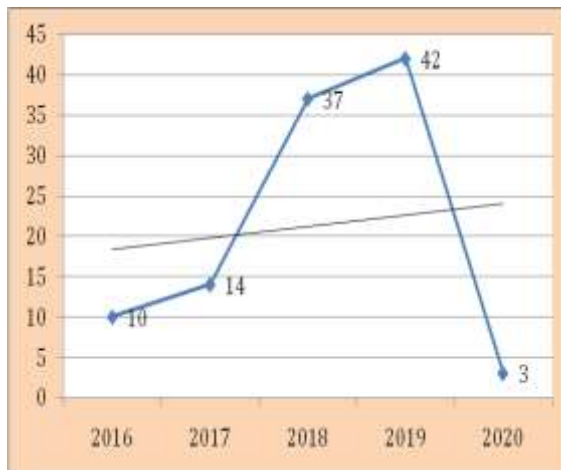


2	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di bidang sosial	18	20	23	5	5

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembangunan stagnan selama periode 2016-2021. Sementara itu, jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di bidang sosial justru berkurang secara signifikan, dari 18 organisasi pada Tahun 2016 menjadi 5 organisasi pada Tahun 2020. Perlu dilakukan evaluasi dan pembinaan secara intensif bagi organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sehingga memberikan kontribusi bagi masyarakat.

2. Olah Raga

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Berikut adalah capaian kinerja pembangunan bidang olah raga di Kabupaten Pasman Barat Tahun 2016-2020:



Grafik 2.20a Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Grafik 2.20b Jumlah Klub Olah Raga Aktif Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021

Grafik di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2020 memang terjadi penurunan prestasi bidang olah raga, karena berkurangnya event-event keolahragaan akibat pandemi. Jumlah prestasi tertinggi diperoleh pada Tahun 2019, yakni 42 medali di tingkat propinsi maupun nasional. Namun sebaliknya, jumlah klub olah raga aktif justru menunjukkan kenaikan secara signifikan, dari 134 klub pada Tahun 2016 menjadi 220 klub pada Tahun 2020.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan statistik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota. Penyediaan data statistik menjadi sangat urgen sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan program prioritas. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan urusan statistik masih sebatas penyediaan data dan



informasi daerah. Adapun kinerja bidang statistik selama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku "PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Pelaksanaan urusan statistik selama periode 2016-2021 belum berjalan secara optimal, ditandai dengan belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan dikelola pemerintah daerah. Selain itu, penyusunan buku Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka dan Buku PDRB dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai penyumbang data dan pemanfaat.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan statistik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, kinerja bidang statistik ditandai dengan jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Namun hingga Tahun 2021, belum ada perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat yang menggunakan sandi dalam komunikasi.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 5 (lima) sub-urusan, yakni: Kebudayaan, Kesenian Tradisional, Sejarah, Cagar Budaya, dan Permuseuman. Pada Sub-urusan kebudayaan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota, dan Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

Pada sub-urusan lainnya, pemerintah daerah berwenang melakukan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota. Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota, Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah



kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, dan Pengelolaan museum kabupaten/kota. Hingga Tahun 2020, belum semua sub-urusan pada urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Misalnya adalah pengelolaan museum, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah. Dua sub-urusan ini belum dilaksanakan karena belum tersedia.

Berikut adalah gambaran capaian pembangunan urusan kebudayaan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020:

Tabel 2.72

Persentase cagar budaya yang dilestarikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	3	3	21	21	7
2	Jumlah cagar budaya yang terdata	15	15	35	35	12
3	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	20	20	60	60	58

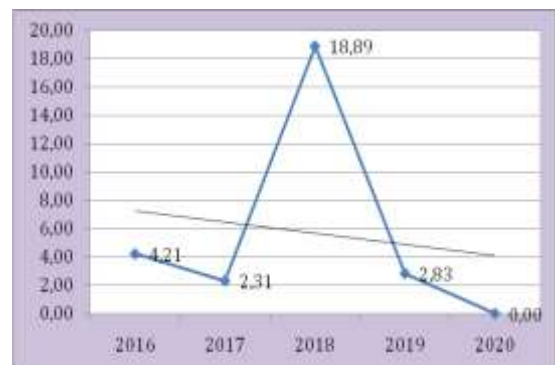
Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019-2020

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Urusan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah adalah Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.



Grafik 2.21a Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Grafik 2.21b Perkembangan Pertambahan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Pasaman Barat meningkat secara konsisten setiap tahunnya hingga Tahun 2019. Selain menambah koleksi buku dan melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan, Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Di antaranya adalah kerja sama dengan satuan



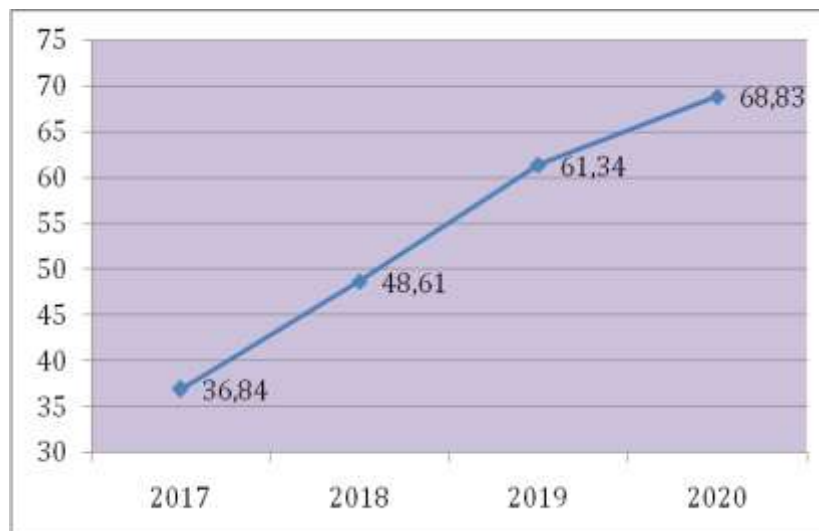
pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga SLTA, dan pelaksanaan berbagai event literasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, Pandemi Covid-19 menyebabkan pengurangan kunjungan secara signifikan di Tahun 2020. Akibatnya, jumlah pengunjung perpustakaan mencapai angka terendah dalam lima tahun terakhir. Di sisi lain, penambahan jumlah pemustaka terjadi paling signifikan dari 2,31% pada Tahun 2017 menjadi 18,89% di Tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020, pertumbuhan jumlah pemustaka menunjukkan angka negatif, -30,30% dibanding tahun sebelumnya.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Sistem kearsipan yang baik sangat berpengaruh terhadap tata administrasi di pemerintahan. Sayangnya, belum semua stakeholders memberikan perhatian yang cukup terhadap sistem arsip di lembaga masing-masing. Hal ini tergambar dari rendahnya capaian kinerja bidang kearsipan di Kabupaten Pasaman Barat. Berikut tabel perkembangan indikator urusan kearsipan tahun 2017-2021:

Grafik 2.21 Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Pasaman Barat Tahun 2017-2021 (Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Pasaman Barat)



Indikator di bidang kearsipan dapat dilihat dari nilai laporan audit kearsipan eksternal (LAKE), pada tahun 2017 dan 2018 nilai laporan audit kearsipan eksternal (LAKE) Dinas Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat masih predikat buruk, meskipun demikian, nilai pada tahun 2018 sudah mengalami peningkatan dibandingkan dari tahun 2017. dari 36,84 menjadi 48,61. pada tahun 2019 predikat nilai LAKE Kearsipan Kabupaten Pasaman Barat sudah baik dengan nilai 61,34, dan kembali meningkat menjadi 68,83 pada Tahun 2020.



2.3.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan difokuskan pada peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya, 5 (lima) tahun terakhir produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya berfluktuatif.

Tabel 2.73

Indikator Urusan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	103.056	115.100	108.937	105.982	106.193
1.1	% Peningkatan produksi Perikanan Tangkap	-	11,69	-5,36	-2,79	0,20
2	Jumlah Produksi perikanan budidaya	6.398	6.096	6.224	6.213	5.911
2.1	% Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	-	-4,72	2,10	-0.18	-4.86
3.	Persentase Peningkatan produksi ikan olahan	18,72	18,57	19,32	19,67	20,34

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman Barat (2021)

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasaman Barat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Angka tertinggi diperoleh pada Tahun 2017, yakni 115.100 ton. Namun kemudian menunjukkan penurunan di tahun-tahun berikutnya. Data di atas menunjukkan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Tahun 2020 tidak berdampak terhadap produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pasaman Barat.

Sebaliknya, produksi perikanan budidaya menunjukkan angka terendah selama periode 2016-2021 di tahun 2020, yakni 5.911 ton. Angka ini turun dari 6.213 ton pada Tahun 2019 (-4,86%). Berita baiknya adalah bahwa produksi ikan olahan menunjukkan kenaikan secara konsisten selama lima tahun terakhir.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

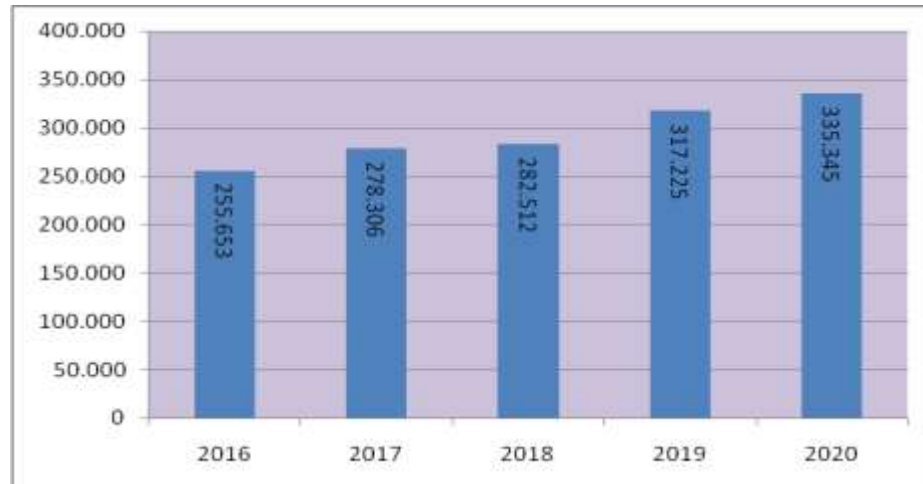
Perkembangan urusan pariwisata dapat dilihat dari jumlah wisatawan setiap tahunnya baik wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Pada akhirnya, sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan daya dorong terhadap perekonomian daerah. Pembangunan terhadap destinasi wisata yang ada diharapkan dapat mengundang wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk berkunjung.

Terdapat beberapa tempat yang menjadi tujuan wisata di Kabupaten Pasaman Barat di antaranya adalah Pohon Seribu Sasak, Gunung Talamau, Pulau Panjang, Pulau Sipagago, Danau Laut Tinggal, Rumah Gadang Tuanku Bosa, Pantai Sikabau dan tempat wisata lainnya yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan



luar negeri. Saat ini Dinas Pariwisata dan *stakeholder* terkait sedang mengupayakan pembentukan *geopark* Talamau untuk diusulkan menjadi *Geopark* Nasional.

Grafik 2.22 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Grafik di atas menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan setiap tahunnya. Munculnya beberapa objek wisata bertema alam dan budaya di Kabupaten Pasaman Barat menarik minat masyarakat untuk datang. Namun, seperti disajikan pada tabel berikut, sektor pariwisata pada kenyataannya belum memberikan daya ungkit yang cukup terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2016-2021.

Tabel 2.74
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB dan PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD sektor pariwisata	1.335.758.400	1.682.784.159	1.527.771.160	1.473.639.330	902.942.242
2	Total PAD	91.174.717.114	161.699.196.656	104.523.535.551	104.071.607.688	108.856.844.191
3	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap PAD	1,47	1,04	1,46	1,42	0,83

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, 2021



3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Produksi Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, peternakan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dan peternakan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, peternakan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari. Produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan produksi komoditi perkebunan mengalami fluktuasi, perkembangan indikator urusan pertanian dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Indikator Urusan Pertanian
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)					
	- Padi	121.212	136.380	159.942	138.322	147.471
	- Jagung	201.541	340.890	367.865	311.576	262.510
	- Kedelai	23	14	41	5	1
	- Kacang Tanah	571	526	623	538	582
	- Ubi Kayu	9.235	7.235	8.533	8.289	3.451
	- Ubi Jalar	2.139	2.211	13.270	8.198	6.155
	- Kacang hijau	152	137	175	223	932
1.1	% Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	-	45,55	12,94	-15,13	-9,86
2	Luas Tanam Tanaman pangan (Hektar)					
	- Padi	31.502	31.901	34.606	26.522	31.490
	- Jagung	38.572	64.532	46.146	45.593	43.889
	- Kedelai	14	16	44	2	1
	- Kacang Tanah	435	428	432	451	474
	- Ubi Kayu	177	176	209	196	141
	- Ubi Jalar	116	120	390	235	198
	- Kacang hijau	108	117	131	164	177
3	Populasi ternak					
	- Sapi Potong	17.587	18.277	18.980	19.291	19.929



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	- Kambing	12.708	13.049	13.635	14.319	14.056
	- Unggas	373.930	418.475	430.862	735.249	720.934
3.1	% Kenaikan/Penurunan Populasi Ternak	-	11,27	3,04	65,89	-1,81
4.	Luas Tanam Komoditi Perkebunan (Hektar)					
	- Kelapa Sawit	163.438	164.809	166.547	184.871	185.209
	- Karet	8.737	8.677	8.631	7.845	7.840
	- Kakao	12.404	11.351	10.308	10.215	9.696
	- Nilam	2.395	2.870	2.386	2.937	2.165
	- Kopi	1.132	1.152	1.084	1.135	1.130
	- Aren	218	218	238	272	272
	- Kelapa Dalam	2.789	2.787	2.799	1.503	1.503
5.	Jumlah produksi komoditi perkebunan					
	- Kelapa Sawit	2.378.850	2.877.875	2.881.261	2.710.431	2.757.227
	- Karet	7.459	7.546	7.748	7.998	7.949
	- Kakao	9,396	9,304	9,307	9,111	9,199
	- Nilam	186	210	212	214	230
	- Kopi	361	454	456	463	479
	- Aren	168	237	239	239	247
	- Kelapa Dalam	1.982	2.002	2.016	1.741	1.763
6.	Produktivitas komoditi perkebunan					
	- Kelapa Sawit	14,56	17,46	17,30	14,66	14,89
	- Karet	0,85	0,87	0,90	1,02	1,01
	- Kakao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
	- Nilam	0,08	0,07	0,09	0,07	0,11
	- Kopi	0,32	0,39	0,42	0,41	0,42
	- Aren	0,77	1,09	1,00	0,88	0,91
	- Kelapa Dalam	0,71	0,72	0,72	1,16	1,17

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat (2020)

Secara keseluruhan, produksi sektor pertanian mengalami penurunan di tahun 2020, kecuali sub-sektor perkebunan. Produksi sub-sektor tanaman pangan tumbuh negatif (-9,86%) pada tahun 2020, demikian juga dengan sub-sektor

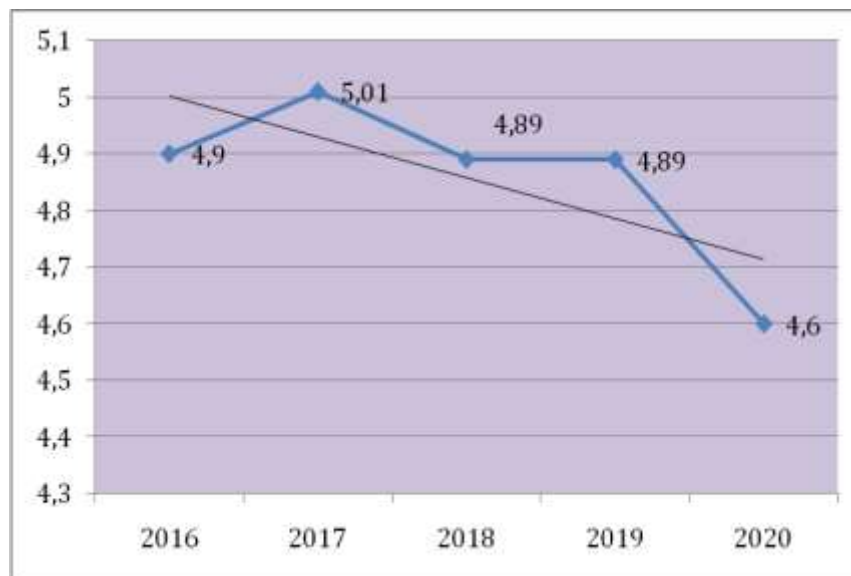


peternakan, yang tumbuh negatif (-1,81%). Namun, produksi di sub-sektor perkebunan justru mengalami kenaikan, kecuali kelapa sawit pada tahun 2018 hingga 2020 yang mengalami penurunan karena faktor masa peremajaan (*replanting*).

b. Produktivitas Pertanian

Produktivitas hasil pertanian, terutama komoditi bahan pangan utama seperti padi dan jagung di Kabupaten Pasaman Barat perlu mendapat perhatian. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa produktivitas sub-sektor tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni dari 4,9 ton per hektar pada Tahun 2016 menjadi 4,6 ton per hektar pada Tahun 2020. Bisa diasumsikan bahwa penambahan luas lahan berpengaruh terhadap produksi, namun tidak berbanding lurus dengan produktivitas. Produktivitas komoditi pangan dipengaruhi berbagai aspek, seperti irigasi, pupuk, sarana dan prasarana yang digunakan petani, kualitas benih, dan aspek lainnya.

Grafik 2.23 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Sementara itu, produktivitas hasil pertanian dari sektor perkebunan terutama komoditi unggulan Pasaman Barat seperti kelapa sawit menunjukkan peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017, dari 14,56 ton/ha menjadi 17,46 ton/ha, namun mengalami penurunan mulai tahun 2018 hingga 2020. Hal tersebut dipengaruhi oleh masa produktivitas lahan kelapa sawit masyarakat yang telah berada pada batas masa produksi dan harus dilakukan peremajaan (*replanting*) kembali. Sehingga, sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki cukup modal untuk melaksanakan peremajaan memilih untuk melakukan konversi lahan untuk penanaman komoditas pertanian lainnya. Produktivitas



komoditi pangan juga dipengaruhi berbagai aspek lainnya, seperti irigasi, pupuk, sarana dan prasarana yang digunakan petani, kualitas benih, dan aspek lainnya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang perdagangan Perdagangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan perdagangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada bidang Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Sarana Distribusi Perdagangan, yakni Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, dan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya, dan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yakni Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota, Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota, dan Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota, serta Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

Pada sub-urusan pengembangan ekspor, pemerintah daerah berwenang melakukan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota). Kemudian, pada sub-urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pemerintah daerah berwenang melaksanakan metrologi legal berupa tera ulang dan pengawasan.

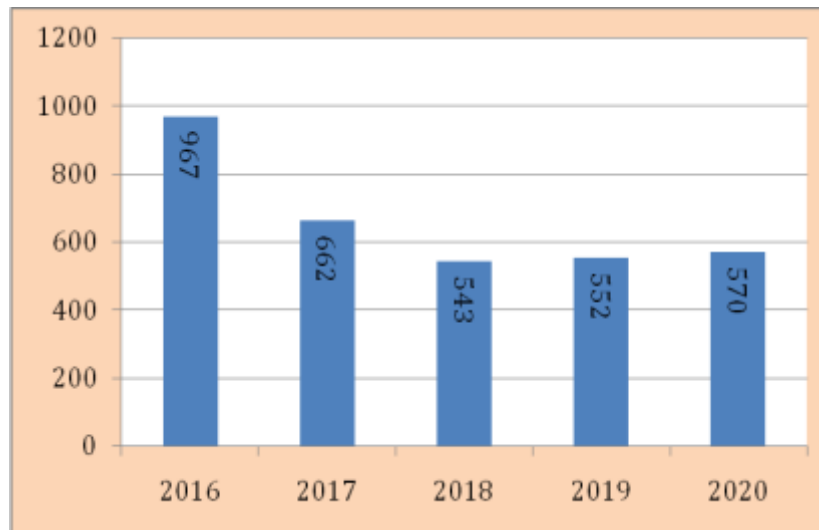
Berikut adalah gambaran capaian indikator kinerja bidang perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020:

1) Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Pendaftaran perusahaan dagang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani penanaman modal, atas rekomendasi dari OPD yang menangani urusan perdagangan. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah salah satu bentuk perizinan perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bagi pelaku usaha dagang. Sepanjang tahun 2016-2021, jumlah perusahaan dagang yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) cenderung berkurang, seperti disajikan pada data berikut:



Grafik 2.24 Perkembangan Jumlah SIUP yang dikeluarkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



2) Sarana perdagangan

Kabupaten Pasaman Barat memiliki 35 (tiga puluh lima) pasar, yang sebagian besar terdaftar sebagai pasar nagari. Hingga saat ini, belum terdapat kawasan perdagangan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana perdagangan yang menunjang aktivitas perekonomian.

3) Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tabel 2.76
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Rp.)	1.069.889,56	1.156.159,33	1.242.903,19	1.342.598,11	1.327.426,08
2	Total PDRB (Rp.)	9.857.619,49	10.384.391,53	10.925.625,62	11.411.833,24	11.259.452,26
3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	10,85	11,13	11,38	11,76	11,79

Sumber : BPS Pasaman Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor perdagangan terus menunjukkan kenaikan selama periode 2016-2021, meskipun pada tahun 2020 sempat terjadi penurunan. Selain itu, sektor perdagangan memberikan kontribusi

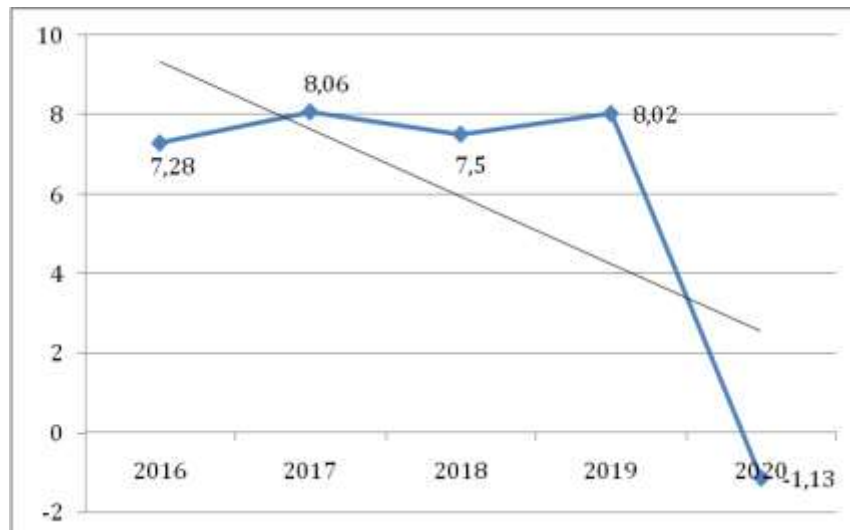


yang cukup besar terhadap perekonomian daerah, dengan kontribusi PDRB menjadi 11,79% pada tahun 2020.

4) Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pasaman Barat, seperti terlihat pada grafik di bawah ini mengalami penurunan secara drastis, terutama di Tahun 2020. Pada Tahun 2016, PDRB sektor perdagangan tumbuh 7,28 persen, dan menunjukkan trend meningkat hingga Tahun 2019, yakni 8,02%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan secara tajam menjadi -1,13%. Hal ini diperkirakan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas perdagangan sepanjang Tahun 2020. Berikut ini adalah perkembangan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan di Kabupaten Pasaman selama periode 2016-2020.

Grafik 2.25 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Sumber: BPS Pasaman Barat)



5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

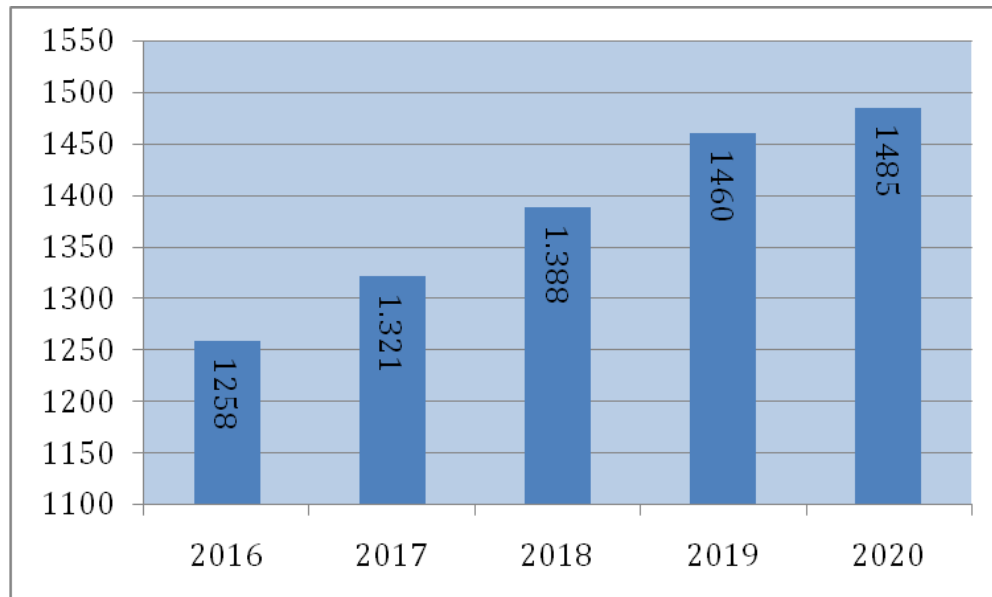
Pelaksanaan kewenangan daerah pada urusan perindustrian diawali dengan Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota, pemberian izin-izin usaha bidang perindustrian, dan penyusunan sistem informasi industri nasional. Beberapa indikator pokok yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan bidang perindustrian adalah penambahan jumlah unit usaha industri kecil dan menengah di wilayah kabupaten/kota.

1. Jumlah Unit Usaha IKM

Jumlah unit usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Pasaman Barat bertambah setiap tahunnya, selama periode 2016-2021, dengan rata-rata pertumbuhan 4,5% setiap tahunnya. Pada tahun 2016, terdapat 1.258 IKM di Kabupaten Pasaman Barat, dan pada Tahun 2020, bertambah menjadi 1.485.



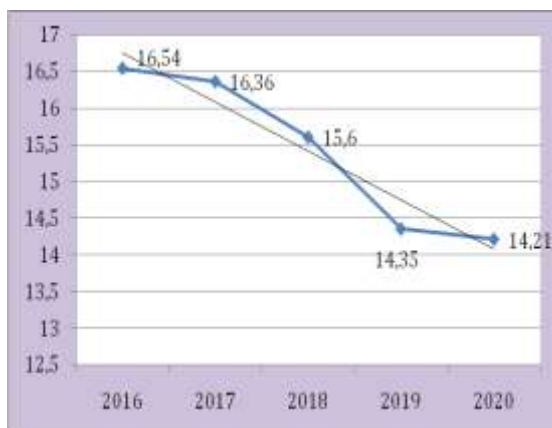
Grafik 2.26 Perkembangan Jumlah IKM (unit) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



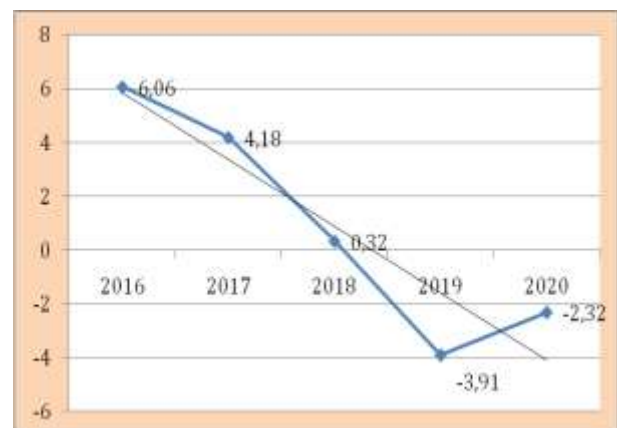
Sumber: Badan Pusat Statistik

2. PDRB Sektor Industri

Meningkatnya aktivitas di sektor perindustrian diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Sektor industri di Kabupaten Pasaman Barat memberikan kontribusi yang cukup besar, yakni 14,21% terhadap PDRB Pasaman Barat. Meski demikian, seperti terlihat pada data berikut, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung berkurang dari tahun ke tahun.



Grafik 2.27a Perkembangan Kontribusi PDRB dari sektor Industri (%)Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Sumber: BPS)



Grafik 2.27b Laju Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%) Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Sumber: BPS)

Pada Tahun 2016, sektor industri menyumbang 16,54% terhadap PDRB Kabupaten Pasaman Barat, namun pada tahun 2020 berkurang menjadi 14,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa pertambahan jumlah industri kecil dan menengah



tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap perekonomian. Bahkan di tahun 2019 dan tahun 2020, PDRB sektor industri tumbuh negatif, yakni -3,91% pada Tahun 2019 dan -2,32% pada Tahun 2020.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan transmigrasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di Daerah kabupaten/kota, Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, dan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. Pelaksanaan kewenangan daerah bidang transmigrasi lebih banyak difokuskan pada peningkatan kualitas SDM pada daerah-daerah eks transmigrasi. Hingga Tahun 2020, tidak ada lagi kawasan transmigrasi baru yang dibentuk.

Berdasarkan laporan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2018, terdapat pengembangan kawasan transmigrasi di Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Ranah Batahan, dan Kecamatan Sungai Beremas. Sejalan dengan hal tersebut, Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/21.8/BUP-PASBAR/2019 tentang Usulan Penetapan Rencana Kawasan Transmigrasi Ranah Balingka Beremas, menyebutkan bahwa wilayah calon kawasan transmigrasi mempunyai sekitar 70.000 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, dan Kecamatan Sungai Beremas. Calon kawasan transmigrasi yang diusulkan tersebut sebagai calon kawasan transmigrasi satuan permukiman Pugar

2.3.4. Fungsi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Perencanaan pembangunan harus konsisten antar perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan OPD. Konsistensi perencanaan pembangunan OPD ini dinilai dengan dokumen perencanaan baik, berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah.



Data berikut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016, sebanyak 65 persen organisasi perangkat daerah yang ada memiliki dokumen perencanaan dengan nilai indeks minimal Baik. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan menjadi 72,34 persen. Namun sebenarnya, angka tertinggi dicapai pada tahun 2019, yakni 75%. Berikut adalah data perkembangan kinerja perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2020:

Grafik 2.28 Perkembangan Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan Minimal Baik di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Sumber: Bappeda (2021)

2. Unsur Keuangan

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 4 tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

Tabel 2.77

Indikator Urusan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam milyar	91,174	158,969	104,525	82,387	108,857
3	% Realisasi PAD	116,89	106,98	71,09	116,89	96,46
4	% PAD terhadap Pendapatan Daerah	8.53	14.83	8.94	7.29	9,90

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (2021)



Kinerja terkait Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman Barat 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif, tercatat pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2017 sebesar Rp.158,969 Milyar atau sebesar 14,83% dari total pendapatan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan tahun 2016 pendapatan asli daerah terendah sebesar Rp. 91,174 Milyar. Jika dilihat dari realisasi per target, maka kinerja terbaik terlihat pada tahun 2016 dan tahun 2019, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat berhasil merealisasikan PAD sebesar 116,89% dari targetnya pada tahun tersebut. Berikut tabel perkembangan indikator urusan keuangan dan asset Kabupaten Pasaman Barat:

Tabel 2.78
Persentase Realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Target PAD	78.000.000.000	151.150.505.386	147.026.490.802	142.828.775.352	112.846.255.189
2	Realisasi PAD	91.174.717.114	161.699.196.656	104.523.535.551	104.071.607.688	108.856.844.191
3	% Realisasi PAD	116,89	106,98	71,09	116,89	96,46

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (2021)

3. Unsur Kepegawaian

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan peningkatan pendidikan pegawai negeri sipil, baik struktural maupun fungsional, kemudian peningkatan kapasitas aparatur yang profesional, penempatan formasi jabatan sesuai dengan kompetensi jabatan. Selain itu juga dilakukan survei terhadap indeks kepuasan pegawai.

Untuk Indeks Kepuasan Pegawai, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat baru melakukan survei pada tahun 2019. Berikut tabel perkembangan indikator urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 .

Tabel 2.79
Indikator Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN dengan jenjang pendidikan minimal S1	-	-	43,5%	53,15%	53
2	persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	100%	100%	99,34	58



3	Persentase formasi jabatan yang terisi sesuai kompetensi jabatan	88,33%	100%	100%	100%	94,07
4	Indeks kepuasan pegawai	-	-	-	2,91	3,15

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pasaman Barat, 2021

4. Unsur Pengawasan

Aspek pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian urusan pengawasan pada Kabupaten Pasaman Barat diukur dari indikator OPD dengan nilai SPIP minimal 3 dan OPD dengan nilai SAKIP minimal B. OPD dengan nilai SPIP minimal 3 pada tahun 2018 tercatat 23 OPD, dan pada tahun 2019 masih dalam proses penilaian. Sedangkan OPD dengan nilai SAKIP minimal B belum ada, karena SAKIP Kabupaten Pasaman Barat masih bernilai CC. berikut tabel indikator urusan pengawasan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015-2019.

Tabel 2.80
Indikator Urusan Pengawasan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	OPD dengan nilai SPIP Minimal 3	0	0	0	21 OPD	21 OPD
2	OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	0	0	15 OPD	13 OPD	-
3	Jumlah OP Yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	0	0	0	0	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat, 2021

5. Unsur Kewilayahan

Sesuai dengan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota. Seperti dijelaskan pada pasal 221 UNDANG-UNDANG No. 23 tahun 2014, pasal 225, tugas Camat adalah:

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;



- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021, Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Monitoring dan Pendistribusian Beras untuk keluarga miskin (Raskin)
- b. Pelaksanaan MTQ Nasional Kecamatan dan MTQ Nasional Kabupaten
- c. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.
- d. Monitoring penyaluran Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.
- e. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan (Tim Ramadhan, Pekan Maulid, Isra' Mi'raj, dan Tahun Baru Islam).
- f. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera.
- g. Penyaluran Bantuan untuk Mesjid, Imam, Khatib, Gharin dan Guru TPA/MDA.
- h. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
- i. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan.
- j. Membantu pelaksanaan kegiatan bagi calon pengantin harus bisa baca Al-Qur'an.
- k. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
- l. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam lingkungan sehari-hari.

6. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berkontribusi dengan menyediakan telaahan dan analisis secara mendalam dan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Selama periode 2016-2021, Fungsi Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan penunjang perencanaan pembangunan, yakni Bappeda. Kinerja penelitian dan pengembangan selama periode 2016-2021 dievaluasi melalui jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah.

7. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan terdiri dari Unsur Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan



kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- 4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Selama periode 2016-2021, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.81

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No	Indikator Capaian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Peningkatan Aktivitas Keagamaan	70	75	80	77	98,22
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,24 (C)	37,56 (C)	50,81 (CC)	57,16 (CC)	60,82 (B)
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPP)	2,842 (Tinggi)	2,9097 (Tinggi)	3,0669 (Sangat Tinggi)	-	-
4	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	-	79,86 (Zona Kuning)	85 (Zona Hijau)	-	-
5	Rasio Produk Hukum yang diharmonisasi	1,37	1,12	0,97	1,23	1,24
6	Rasio Penanganan Kasus/Perkara	2	1	1,25	2,75	0,50
7	% Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	98,76	91,19	97,50	95	95,78

8. Unsur Penghubung

Penanaman modal pada suatu daerah memainkan peran penting dalam menjalankan roda ekonomi daerah. Nilai investasi telah menjadi salah satu indikator utama untuk menentukan kinerja daerah terutama dalam perbandingan antara nilai tersebut dengan potensi sumber daya daerah. Sedangkan tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. Menciptakan lapangan kerja di daerah;



- c. Meningkatkan kemampuan daya saing daerah;
- d. Mengembangkan kemitraan dan kerja sama di antara pelaku usaha;
- e. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan melindungi keberlangsungan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari para investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri; dan
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar dibidang penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal

Selama periode 2016-2021, kinerja pelaksanaan Unsur Pelayanan Satu Pintu dinilai dengan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan terpadu satu pintu, seperti disajikan pada gambar berikut:

Grafik 2.29 Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat bidang Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Pasaman Barat

Tabel di atas menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Pelayanan Satu Pintu di Kabupaten Pasaman Barat meningkat selama periode 2016-2021, yakni dari 73,27 pada tahun 2016 menjadi 85,14 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan satu pintu menunjukkan perbaikan. Faktor pendukung keberhasilan adalah tersedianya regulasi dan SDM yang memadai untuk meningkatkan kinerja pelayanan.



2.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Di Kabupaten Pasaman Barat, pemenuhan SPM diatur melalui Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal. Sementara itu, kelembagaan implementasi pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

1. SPM Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimum Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. SPM Bidang Pendidikan mencakup Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Tabel 2.82
Capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian	Realisasi Tahun 2020
1	2	3	4	5	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun	SD: 99,94% SLTP: 97,76%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun	3%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	48%

Tabel di atas menunjukkan bahwa SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat belum tercapai sebagaimana mestinya di tahun 2020. Bahkan, capaian SPM Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Anak Usia Dini tidak mencapai 50%. Capaian yang rendah ini dikarenakan oleh berbagai permasalahan, antara lain:

- 1) Lemahnya pemahaman aparat sekolah dalam memahami aturan serta keharusan penuntasan SPM Bidang Pendidikan ini di tingkat satuan pendidikan.
- 2) Masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia.
- 3) Tidak tersedianya sistem data yang akurat dalam pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, mulai dari tingkat Satuan Pendidikan hingga tingkat kabupaten.



- 4) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam penuntasan SPM Bidang Pendidikan.
- 5) Anggaran pendidikan dalam rangka penuntasan SPM ini masih terfokus kepada penyelesaian fisik sekolah, belum menyentuh kepada pembenahan kurikulum dan sumber daya manusianya.

2. SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang mencakup 12 (dua belas) indikator pokok. Oleh sebab itu, pengukuran terhadap capaian indikator SPM di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini baru dilakukan sejak Tahun 2019, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.83
Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No.	Indikator SPM	2018	2019	2020
1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62,13	62,32	58,62
2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	73,47	73,31	72,88
3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	74,12	78,26	73,82
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	53,86	68,01	58,93
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,99	85,66	27,81
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	10,30	24,86	12,14
7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77,27	23,41	49,59
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	6,19	3,32
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	2,71	18,51
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	65,09	24,57	48,89
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	82,17	53,86	13,78
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	100,00	67,17	46,06



	mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			

Sama halnya dengan capaian SPM Pendidikan, capaian SPM Kesehatan juga sangat rendah, terutama di Tahun 2020. Pada Tahun 2018, beberapa indikator SPM seperti cakupan layanan kesehatan bagi penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan HIV sudah tercapai. Namun di tahun 2020, tidak ada satupun indikator SPM bidang kesehatan yang tercapai.

3. SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, mencakup Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, capaian SPM diukur dengan persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada. Hingga tahun 2020, capain SPM ini belum terlaporkan secara memadai, karena tidak adanya database layanan penegakan hukum baik Perda maupun Perkada di Kabupaten Pasaman Barat.

Sementara itu, capain SPM di bidang kebakaran, yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilaporkan mencapai 100% pada Tahun 2020. Pada tahun 2020, terdapat 31 kejadian kebakaran yang melibatkan 5 (lima) orang korban. Semua korban dapat dievakuasi sesuai standar.

4. SPM Bidang Kebencanaan

Standar Pelayanan Minimal bidang kebencanaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan SPM bidang kebencanaan diukur melalui 3 (tiga) indikator yang memuat tahap pencegahan dan mitigasi, tahap tanggap darurat, dan tahap rehabilitasi. Capaian SPM Kabupaten Pasaman Barat pertama kali diukur pada Tahun 2020, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.84
Capaian Standar Pelayanan Minimum pada Bidang Kebencanaan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

No	Indikator Capaian	2019	2020
1	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71,16	77,55
2	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	63,34	14,06



No	Indikator Capaian	2019	2020
3	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	97,96	99

Sumber: Laporan pencapaian SPM BPBD Kab. Pasaman Barat 2019-2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator SPM tertinggi adalah pada tahap penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Sementara itu, pelaksanaan SPM pada pelayanan informasi rawan bencana mengalami penurunan di Tahun 2020, yakni dari 63,34% menjadi 14,06%. Hal itu terjadi karena ada beberapa poin pencapaian SPM yang tidak dilaksanakan selama tahun 2020, yakni:

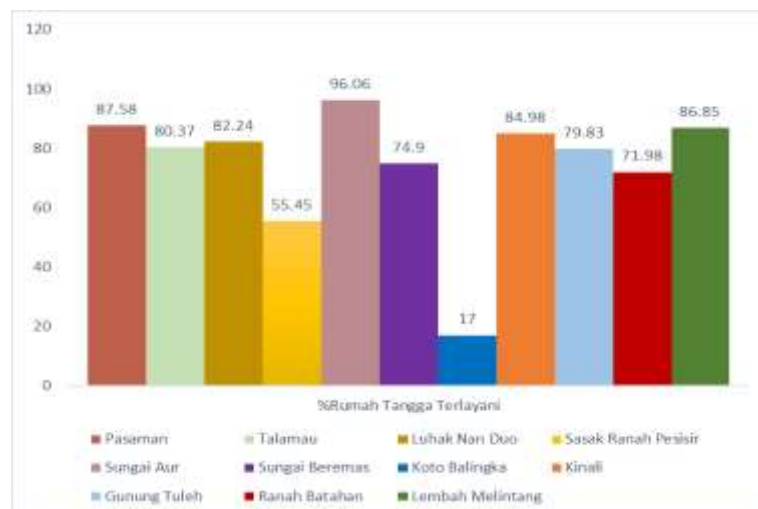
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

5. SPM Bidang Pekerjaan Umum

a) Penyediaan Air Minum Layak

Seperti disajikan pada tabel 2.43 Cakupan pemenuhan SPM Air Minum pada Tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat adalah 81,9%. Jika dilihat dari distribusi per kecamatan, maka cakupan pemenuhan kebutuhan air minum layak disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.30 Cakupan Pemenuhan SPM Air Minum (%) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020



Sumber : Dinas PUPR Pasaman Barat (2021)



Grafik bawah ini menunjukkan bahwa pemenuhan SPM air minum terendah di Kecamatan Koto Balingka, sedangkan tertinggi di Kecamatan Sungai Air. Daerah-daerah dengan pemenuhan SPM terendah semestinya menjadi perhatian dalam penyusunan rencana pemenuhan SPM di tahun-tahun berikutnya.

b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik menggambarkan banyaknya jumlah penduduk yang telah terlayani sistem air limbah yang memadai, dibandingkan jumlah total penduduk di satu kabupaten/kota. Pada RPJMD Pasaman Barat periode 2016-2020, pengelolaan air limbah domestik diukur dengan cakupan kepemilikan sanitasi layak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemenuhan SPM Bidang pengolahan Air Limbah di Kabupaten Pasaman Barat diukur pertama kali pada Tahun 2020, dengan realisasi 80%.

6. SPM Bidang Perumahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Kabupaten Bidang Perumahan adalah:

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan

Tabel 2.85
Capaian SPM Bidang Perumahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Daerah	Realisasi Daerah
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.	Persentase tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerinah kabupaten	0	0

Sumber: DPKP Pasaman Barat, Tahun 2021



Berdasarkan LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020, tercatat sebanyak 1.209 rumah yang terkena bencana alam. Namun, belum ada informasi tentang jumlah rumah layak huni yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah bagi korban bencana tersebut. Dengan kata lain, Standar Pelayanan Minimum bidang perumahan belum terpenuhi pada Tahun 2020.

Sementara itu, pada tahun 2020 tidak tercatat adanya rumah yang terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, sehingga tidak ada rumah layak huni yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang terdampak.

7. SPM Bidang Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Berikut adalah capaian SPM bidang Sosial di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020:

- 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebelumnya dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah PPKS yang berada di luar panti. Sementara itu, PPKS di dalam panti menjadi kewenangan propinsi.

Tabel 2.86

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	142	147	6.971
2.	Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	141	736	7.386



	pengemis			
3.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	78,45	19,77	94,38

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Data di atas menunjukkan fluktuasi capaian SPM yang sangat signifikan, terutama di Tahun 2019, di mana capaian SPM untuk pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti hanya 19,77%. Angka tertinggi dicapai pada Tahun 2020, yakni 94,38%, karena adanya bantuan pangan dan sembako bagi PPKS setelah Pandemi Covid-19 dari berbagai sumber, mulai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

- 2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Indikator ini mencerminkan pemenuhan SPM kebutuhan dasar korban bencana selama masa tanggap darurat, untuk bencana skala kabupaten. Berikut adalah capaian SPM Bidang Sosial untuk kebencanaan selama tahun 2019-2020.

Tabel 2.87

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	40	181
2.	Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	40	181
3.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Pada Tahun 2020, jumlah korban bencana yang dilaporkan sebanyak 40 kejadian bencana dengan jumlah korban sebanyak 181 Jiwa dan telah ditanggapi dan diberikan jaminan sosial oleh Bidang Bantuan



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

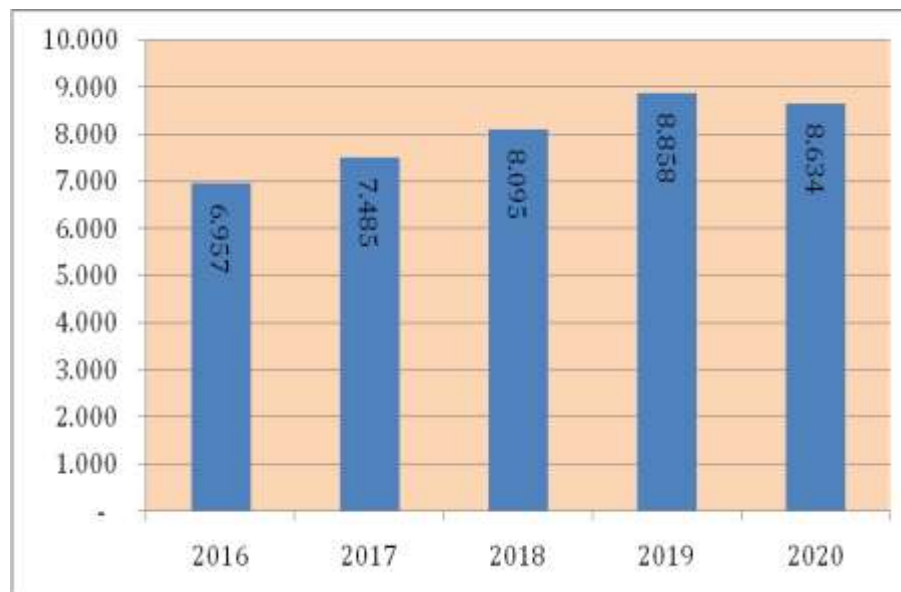
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Analisis kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Salah satu pendekatan di dalam pemetaan pendapatan masyarakat adalah melalui pendekatan pengeluaran, dengan asumsi besaran antara pendapatan dan pengeluaran berbanding lurus, yang artinya semakin besar pendapatan seseorang maka pengeluarannya pun akan semakin besar. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2020 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5,66% per tahun.

Gambaran pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Grafik 2.31 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rp) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Sumber : Pasaman Barat Dalam Angka (2021)

Peningkatan konsumsi rumah tangga per kapita tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan konsumsi barang dan jasa. Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi mempengaruhi perubahan selera dan perilaku konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi tersebut dapat diartikan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Akan tetapi, peningkatan ini perlu diimbangi dengan peningkatan pendapatan di kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (kelompok miskin) sehingga ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat tidak semakin lebar.



Selanjutnya, indikator kemampuan ekonomi daerah diukur dari pengeluaran per kapita, baik untuk makanan maupun bukan-makanan. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Berikut adalah gambaran pengeluaran per kapita rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2016-2021:

Tabel 2.88
Pengeluaran per kapita rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat
Selama Tahun 2016-2021

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran per Kapitan perbulan	952.538	884.108	963.226	951.349	1.013.423
2	Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan	550.198	535.038	546.951	556.932	571.032
3	% Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan	57,76	60,52	56,78	58,54	56,35
4	Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan-Makanan	402.340	349.070	416.275	394.417	442.391
5	% Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan-Makanan	42,24	39,48	43,22	41,46	43,65

Sumber: BPS

Data di atas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat masih didominasi oleh pengeluaran makanan, yang menunjukkan fluktuasi selama periode 2016-2021. Pengeluaran per kapita makanan menunjukkan persentase tertinggi pada tahun 2017, yakni 60,52% dan terendah pada tahun 2020, yakni 56,35%. Penurunan pengeluaran konsumsi makanan dibanding total pengeluaran menjadi indikator adanya perbaikan pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat.

2. Iklim Investasi

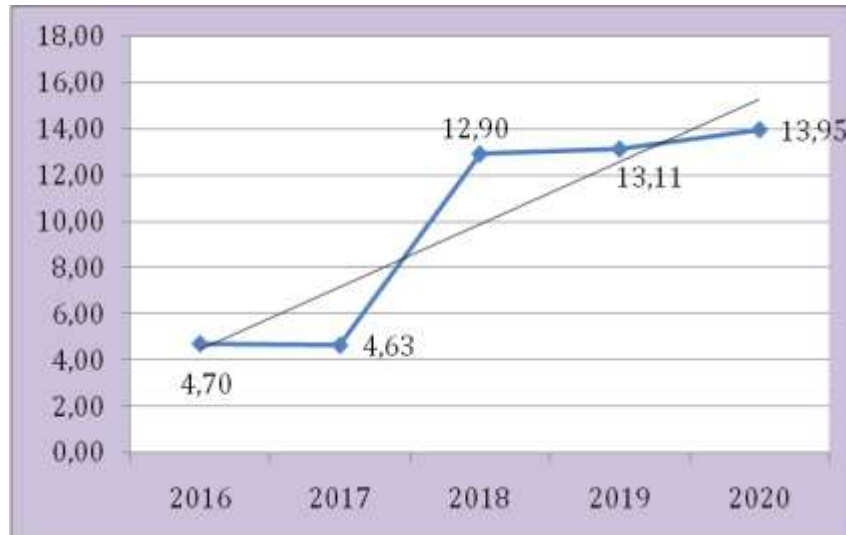
A. Angka Kriminalitas

Stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik dan aman bagi para investor. Dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah



Kabupaten Pasaman Barat terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal terkait seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Kepolisian Resort Pasaman Barat, dan Komando Distrik Militer (Kodim) 0305 Pasaman dan instansi terkait lainnya. Angka kriminalitas di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2016-2021 disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.32 Perkembangan Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021



Sumber : LPPD dan LKj Pasaman Barat Tahun 2016-2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Pasaman Barat cenderung meningkat selama periode 2016-2021. Di satu sisi, angka kriminalitas yang meningkat menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan segala bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat kepada pihak yang berwenang. Di sisi lain, angka kriminalitas yang meningkat dapat menghambat masuknya investasi di sebuah daerah. Kurangnya rasa aman dapat menghambat seseorang untuk menanamkan modal di sebuah daerah.

Angka kriminalitas 13,95 per 10.000 penduduk di Tahun 2020 berarti bahwa dalam setiap 10.000 penduduk, terjadi 13 hingga 14 kasus kejahatan yang ditangani pihak kepolisian. Sejak pemekaran Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman di Tahun 2003, konflik berbau Suku Bangsa, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA) hampir tidak terjadi lagi. Namun, masih ada beberapa hal yang berpotensi menimbulkan polemik dan konflik horisontal maupun vertikal antara lain:

- Belum tuntasnya penentuan tapal batas antar Nagari dan antar batas Kabupaten (khususnya dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Madailing Natal);
- Belum optimalnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pembangunan sehingga cenderung mengarahkan masyarakat untuk bersikap arogan dan anarkis;
- Pemanfaatan lahan khususnya tanah Ulayat yang hampir selalu menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat;



- d. Masih banyaknya lahan yang belum memiliki legalitas hukum berupa sertifikat sehingga memiliki kecenderungan untuk terjadinya konflik dalam masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Tumpang tindih penetapan luas HGU dengan lahan masyarakat, terindikasi luas lahan yang digarap oleh perusahaan perkebunan yang ada di Kab. Pasaman Barat melebihi dari HGU yang ditetapkan;
- f. Adanya sejumlah fasilitas umum yang tidak dilengkapi penerangan dan penjagaan yang memadai berpotensi sebagai sumber terjadinya kejahatan di malam hari.
- g. Banyaknya ruas jalan yang belum dilengkapi penerangan juga berpotensi memicu terjadinya kejahatan.

B. Lama Proses Perizinan

Selain stabilitas keamanan dan ketertiban daerah, proses perizinan juga sangat menentukan investasi yang akan masuk ke suatu daerah. Proses perizinan yang mudah dan tidak memakan waktu lama serta tidak berbelit-belit akan menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi pada suatu daerah. Lama proses perizinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat meliputi pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan untuk 110 jenis perizinan. Berikut tabel contoh pelayanan perizinan di Kabupaten Pasaman Barat :

Tabel 2.89
Contoh Jenis Pelayanan Perizinan di Kabupaten Pasaman Barat

NO	Nama/Jenis Perizinan	Syarat	Waktu	Biaya (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy Surat Keterangan Tanah / Sertifikat 4 Gambar Teknis Bangunan 5 Rekomendasi Tata Ruang (Bagi Yang Diperseharatkan) 6 Dokumen Perusahaan 7 Dokumen UKL/UPL bagi yang dipersyaratkan 8 Siteplane yang sdh di sahkan 9 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 10 Surat Tanda Bukti Lunas PBB 11 Rekomendasi FKUB Bagi Bangunan Keagamaan	7 hari	Bangunan Hunian. Rp. 5.000,-/M² Bangunan Keagamaan. Rp, 0,-/M² Bangunan Usaha. Rp. 7.000,-/M² Bangunan Sosial/Bud Rp. 3.000,-/M² Bangunan Campuran. Rp. 7.000,-/M² (Bangunan lebih dari II Lantai, tarif Sesuai Perbup Nomor 97 Tahun 2017)



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	Nama/Jenis Perizinan	Syarat	Waktu	Biaya (Rp)
2	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 6 Materai Rp 6.000,- 1 lembar	2 hari	Rp. 0,-
3	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 6 Materai Rp 6.000,- 1 lembar	2 hari	Rp. 0,-
		7 SPPL/UKL/UPL (bagi Perusahaan yang diwajibkan)		
4	Tanda Daftar Gudang (TDG)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy SIUP 4 Foto Copy TDP 5 Foto Copy IMB Gudang	5 hari	Rp. 0,-
5	Tanda Daftar Agen atau Distributor	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Surat Perjanjian Agen yang telah dilegalisir oleh Notaris 5 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 6 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 7 Foto Copy SIUP 8 Foto Copy TDP/NIB 9 Foto Copy IUI dari prinsipal	2 hari	Rp. 0,-



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

NO	Nama/Jenis Perizinan	Syarat	Waktu	Biaya (Rp)
		produsen		
6	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum)	2 hari	Rp. 0,-
		4 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 5 Rekomendasi dari Dinas Teknis 6 Perjanjian Kemitraan dengan UMKM 7 Foto Copy IMB 8 Foto Copy Izin Lokasi		
7	Izin Usaha Industri	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 6 SPPL/UKL/UPL (bagi Perusahaan yang diwajibkan)	2 hari	Rp. 0,-
8	Izin Perluasan Usaha Industri	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP	2 hari	Rp. 0,-
		3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 6 SPPL/UKL/UPL (bagi Perusahaan yang diwajibkan)		
9	Izin Usaha Kawasan Industri	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum)	2 hari	Rp. 0,-



NO	Nama/Jenis Perizinan	Syarat	Waktu	Biaya (Rp)
		5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum) 6 SPPL/UKL/UPL (bagi Perusahaan yang diwajibkan)		
10	Izin Perluasan Kawasan Industri	1 Permohonan 2 Foto Copy KTP 3 Foto Copy NPWP dan SPT 4 Foto Copy Akta Notaris (usaha yg berbadan hukum) 5 Foto Copy pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham (usaha yg berbadan hukum)	2 hari	Rp. 0,-
		6 SPPL/UKL/UPL (bagi Perusahaan yang diwajibkan)		

Sumber : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat (2020)

Berdasarkan tabel contoh jenis pelayanan perizinan Kabupaten Pasaman Barat rata-rata lama pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah lebih kurang 3 hari, dan hampir semua pelayanan tidak dipungut biaya kecuali izin mendirikan bangunan. Pelayanan perizinan tersebut relatif lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini tentu menjadi faktor pendukung dalam memberi kemudahan kepada investor dalam berinvestasi di Kabupaten Pasaman Barat.

3. Sumber Daya Manusia

a. Rasio Ketergantungan

Berdasarkan data tahun 2020, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan total adalah sebesar 47,44, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak kurang lebih 47-48 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 47,44 ini tersusun oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 41,28, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 6,06. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) ini termasuk kategori tinggi terutama penduduk muda. Berikut tabel perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020.



Tabel 2.90
Rasio Ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	120.473	117.487	122.454	124.498	122.101
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	16.407	18.060	17.751	17.272	17.879
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	136.880	135.547	140.205	141.770	139.980
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	289.511	294.357	291.370	291.991	295.079
5	Rasio ketergantungan total (3)/(4)	47,28	46,05	48,12	48,55	47,44
6	Rasio Ketergantungan muda (1/4)	41,61	39,91	42,03	42,64	41,38
7	Rasio ketergantungan tua (2/4)	5,67	6,14	6,09	5,92	6,06
8	Jumlah Penduduk	426.391	429.904	431.575	433.761	435.059

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, 2021

Rasio ketergantungan total tertinggi tercatat pada tahun 2019, yakni 48,55, sedangkan angka terendah dicapai pada tahun 2017, yakni 46,05. Rasio ketergantungan menggambarkan beban tanggungan bagi pencari nafkah di keluarga. Semakin banyak anggota keluarga yang tergantung pada kepala keluarga, maka semakin kecil peluang bagi pencari nafkah untuk menyisihkan pendapatannya baik untuk tabungan atau investasi.

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan data kependudukan menurut tingkat pendidikan tahun 2016-2020 penduduk dengan pendidikan tidak/belum sekolah memiliki persentase tertinggi diantara tingkat pendidikan lain yang tercatat rata-rata sebesar 25,05% dari total jumlah penduduk dalam 5 (lima) tahun terakhir, kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan tamat SD/Sederajat dengan rata-rata 23,36% . Gambaran kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Tidak/Belum Sekolah	Laki-laki	56.507	57.449	54.482	53.941	53.687
	Perempuan	53.009	53.922	51.075	50.762	50.485
	Jumlah	109.516	111.371	105.557	104.703	104.172
Belum Tamat	Laki-laki	32.559	32.594	32.888	33.007	33.122

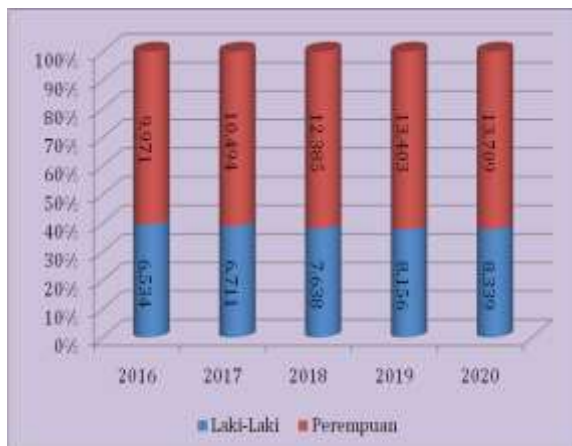


BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

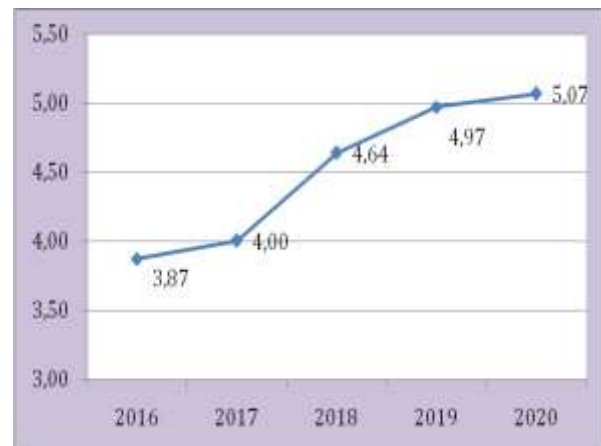
SD/Sederajat	Perempuan	31.323	31.110	30.630	30.494	30.553
	Jumlah	63.882	63.704	63.518	63.501	63.675
Tamat SD/Sederajat	Laki-laki	51.230	51.250	50.204	49.386	49.503
	Perempuan	50.440	50.661	49.827	49.137	49.109
	Jumlah	101.670	101.911	100.031	98.523	98.612
SLTP / Sederajat	Laki-laki	35.631	35.668	35.652	35.623	35.745
	Perempuan	33.543	33.854	34.269	34.498	34.575
	Jumlah	69.174	69.522	69.921	70.121	70.320
SLTA / Sederajat	Laki-laki	34.929	35.058	38.357	39.730	40.222
	Perempuan	30.715	31.133	34.168	35.624	36.010
	Jumlah	65.644	66.191	72.525	75.354	76.232
Diploma I / II	Laki-laki	983	943	868	811	809
	Perempuan	2.513	2.427	2.269	2.129	2.115
	Jumlah	3.496	3.370	3.137	2.940	2.924
Akademi / Diploma III/ Sarjana Muda	Laki-laki	1.245	1.256	1.341	1.392	1.403
	Perempuan	2.397	2.543	2.929	3.061	3.086
	Jumlah	3.642	3.799	4.270	4.453	4.489
Diploma IV / Strata I	Laki-laki	4.112	4.300	5.191	5.692	5.851
	Perempuan	4.958	5.408	7.033	8.029	8.311
	Jumlah	9.070	9.708	12.224	13.721	14.162
Strata II	Laki-laki	191	207	233	254	269
	Perempuan	103	116	153	183	195
	Jumlah	294	323	386	437	464
Strata III	Laki-laki	3	5	5	7	7
	Perempuan	-	-	1	1	2
	Jumlah	3	5	6	8	9
Total	Laki-laki	217.390	218.730	219.221	219.843	220.618
	Perempuan	209.001	211.174	212.354	213.918	214.441
	Jumlah	426.391	429.904	431.575	433.761	435.059

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat diberikan gambaran tentang jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan minimal Diploma I/Sederajat, sebagai sebuah gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat.



Grafik 2.33a Perkembangan Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan Minimal D1/Sederajat menurut jenis kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Sumber: Disdukcapil, diolah)



Grafik 2.33b Perkembangan Jumlah Penduduk yang menamatkan pendidikan Minimal D1/Sederajat (%) di Kab. Pasaman Barat Tahun 2016-2021 (Sumber: Disdukcapil, diolah)

Jika dilihat secara lebih dekat, persentase penduduk yang menamatkan pendidikan Minimal D1/ sederajat di Kabupaten Pasaman Barat meningkat dari tahun ke tahun, yakni 3,87% pada Tahun 2016 menjadi 5,07% pada Tahun 2020. Suatu lagi trend yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa penduduk yang menamatkan pendidikan minimal D1/ sederajat sebagian besar adalah perempuan.

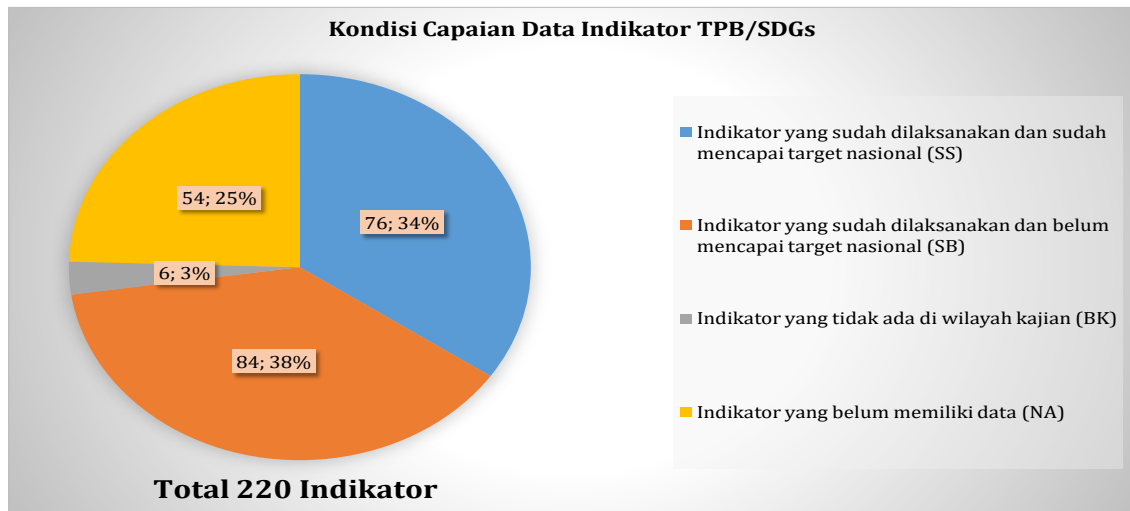
Data ini kontradiktif dengan TPAK perempuan yang lebih rendah dan TPT perempuan yang lebih tinggi. Bisa diasumsikan bahwa perempuan yang menganggur cenderung berpendidikan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya memperhatikan potensi penduduknya.

2.5. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh sebab itu, dokumen perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah harus disinkronkan untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Pembangunan mestinya dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung alam, serta tidak menimbulkan dampak yang merusak terhadap lingkungan hidup. Evaluasi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Pasaman Barat disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.33 Capaian Indikator TPB/SDGs di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa dari 220 indikator SDGs yang teridentifikasi, porsi tertinggi adalah indikator yang sudah dilaksanakan, namun belum mencapai target (SB), yakni sebanyak 84 indikator (38%), diikuti oleh indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai (SS), yakni 76 indikator (34%). Sementara itu, ada 6 indikator (3%) yang bukan merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Selain itu, ada 54 indikator (25%) yang tidak tersedia datanya di Kabupaten Kota. Jumlah ini tentunya sangat besar. Evaluasi pencapaian TPB/SDGs kabupaten akan sulit dilakukan jika tidak tersedia data yang memadai. Ketersediaan data menjadi hal yang sangat krusial, sehingga evaluasi pencapaian dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara memadai. Jika dilihat berdasarkan pilar pembangunan, maka capaian TPB/SDGs di Kabupaten Pasaman Barat disajikan sebagai berikut:

1. Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.92

Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

TPB/SDGs	SS	SB	BK	NA	Jumlah IndikatorTPB
1. Tanpa Kemiskinan	9	9	0	6	24
2. Tanpa Kelaparan	5	1	0	5	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	13	0	6	34



4. Pendidikan Berkualitas	5	6	0	2	13
5. Kesenjangan Gender	6	4	0	4	14
Jumlah	40	33	0	23	96

Sumber : Hasil Analisis (2020)

Tabel di atas menunjukkan bahwa porsi tertinggi di pilar sosial adalah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai, yakni 40 indikator (41,67%), diikuti oleh indikator yang sudah dilaksanakan, namun belum tercapai, yakni 33 indikator (34,38%), dan 23 indikator (23,96%) tidak tersedia datanya.

2. Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.93
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2020

TPB/SDGs	SS	SB	BK	NA	Jumlah Indikator TPB
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	2	0	2
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	10	0	3	19
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	4	2	3	13
10. Berkurangnya Kesenjangan	6	3	0	2	11
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	7	6	0	3	16
Jumlah	23	23	4	11	61

Sumber : Hasil Analisis (2020)

Keterangan:

SS: Sudah Dilaksanakan dan Sudah Tercapai

SB: Sudah Dilaksanakan dan Belum Tercapai

BK: Bukan Kewenangan

NA: Data Tidak Tersedia

3. Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Dalam hal ini Tujuan 14, yakni ekosistem laut tidak menjadi kewenangan kabupaten, seperti telah



dijelaskan di atas. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.94
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan

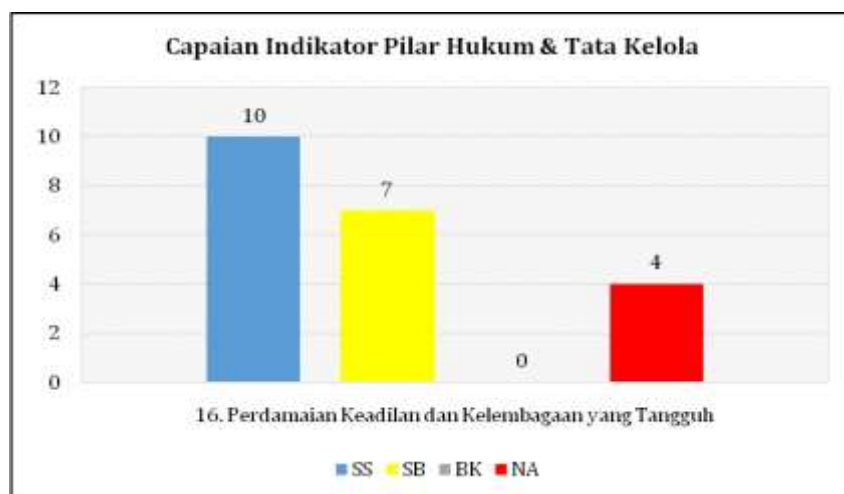
TPB/SDGs	SS	SB	BK	NA	Jumlah IndikatorTPB
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	11	0	5	18
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3	4	4	2	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	3	0	2	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	1	1	0	0	2
15. Ekosistem Daratan	0	2	0	2	4
Jumlah	6	21	4	11	42

Sumber : Hasil Analisis (2020)

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator yang merupakan pilar hukum dan tata Kelola adalah Tujuan 16, yakni Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian indikator untuk TPB/SDGs 16 ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Grafik 2.34. Grafik Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020





Pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat terintegrasi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs mengalami berbagai tantangan disebabkan oleh :

- a) Tidak tercapainya target pada indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan pada OPD sebanyak 79 indikator (35,01%)
- b) indikator yang belum memiliki data sebanyak 62 indikator (28,18%)

Sedangkan untuk kesesuaian capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) kegiatan pada OPD Kabupaten Pasaman Barat yang sudah sesuai dan mencapai target adalah sebanyak 73 indikator (33,18%). Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 73 indikator (33,18%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 79 indikator (35,91%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 62 indikator (28,18%). Pada gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak 76 indikator atau dengan persentase 34,55%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.95
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional (SS) di Kabupaten Pasaman Barat

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
1	Tanpa Kemiskinan	9	Sosial
2	Tanpa Kelaparan	4	Sosial
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	Sosial
4	Pendidikan Berkualitas	3	Sosial
5	Kesetaraan Gender	6	Sosial
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	Lingkungan
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	Ekonomi
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	Ekonomi
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	Ekonomi
10	Berkurangnya Kesenjangan	6	Ekonomi



BAB 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

No. TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Pilar
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	Lingkungan
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	Lingkungan
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	Lingkungan
15	Ekosistem Daratan	0	Lingkungan
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	10	Hukum dan Tata Kelola
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	7	Ekonomi
	Jumlah	76	

Sumber: KLHS Pasaman Barat Tahun 2020



BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai “semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menganalisis kinerja keuangan. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman Barat mengacu kepada peraturan-peraturan pengelolaan keuangan yang terkait, meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas System Keuangan; serta peraturan perundangan undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, struktur APBD Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021

Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Selama empat tahun terakhir, Kabupaten Pasaman Barat pernah menghasilkan kemampuan keuangan yang relatif tinggi sebesar dua digit, yaitu sebesar 15,05% pada tahun 2017. Namun kinerja ini tidak mampu dipertahankan, karena pada tahun-tahun berikutnya, kemampuan keuangan Pasaman Barat hanya satu digit saja, yaitu 8,94% pada tahun 2018. Kondisi keuangan Pasaman Barat kemudian turun menjadi 8,62% pada tahun 2019, dan sedikit meningkat menjadi 9,90% pada tahun 2020. Tabel 3.1 memperlihatkan bagaimana perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Pasaman Barat selama lima tahun terakhir.

Tabel 3.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Pendapatan	Persentase
2016	91.174.717.113,57	1.069.252.362.654,57	8,53
2017	161.699.196.655,99	1.074.412.480.794,99	15,05
2018	104.523.535.551,25	1.169.078.296.398,25	8,94
2019	104.071.607.688,23	1.207.899.830.099,23	8,62
2020	108.856.844.190,82	1.099.444.702.466,82	9,90

Sumber: BPKD Kab Pasaman Barat, Data diolah

Pada Tabel 3.1 tergambar bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Pasaman Barat meningkat pada tahun 2020. Peningkatan derajat otonomi fiskal ini terjadi karena adanya pengurangan dana transfer pusat sebagai akibat pengalihan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19. Akibatnya, sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan.

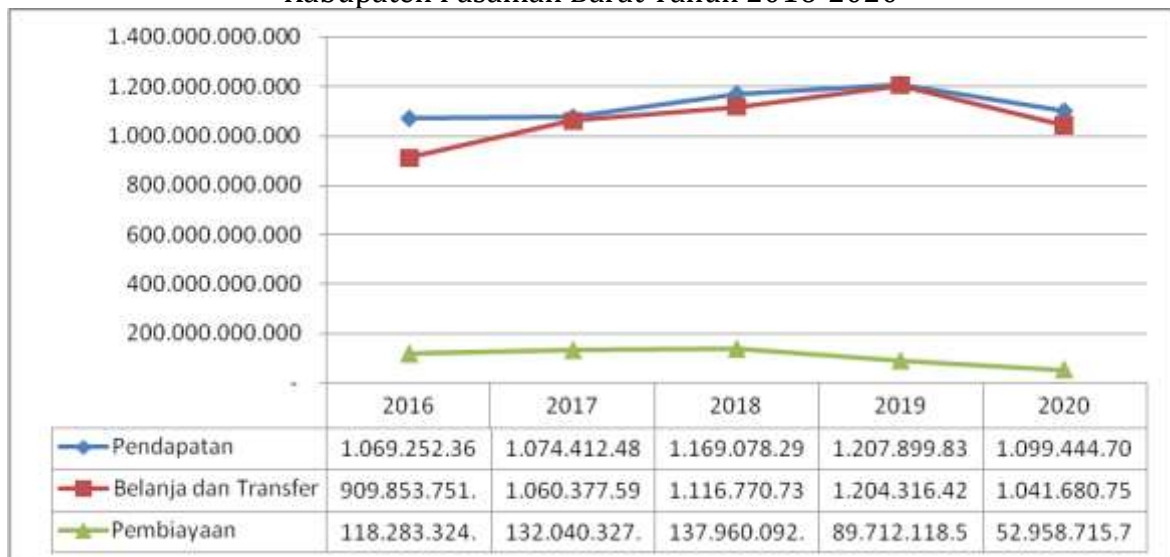
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020



Sumber: BPKD Kab Pasaman Barat, Data diolah

1) Pendapatan Daerah

Sumber penerimaan daerah terdiri atas:

- (1) PAD yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Dana Perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- (3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 berjumlah Rp 1.069.252,36 juta dan meningkat menjadi Rp 1.207.899,83 juta pada tahun 2019, namun kembali turun menjadi Rp 1.099.444,70 juta pada tahun 2020. Penurunan pendapatan terjadi karena berkurangnya realisasi pendapatan dari sumber pendapatan yang terkena imbas pandemi Covid-19, seperti pendapatan dari hotel, restoran, dan aktivitas pariwisata.

Analisis pertahun menunjukkan perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 8,81%. Tetapi, pada tahun 2019 pertumbuhan pendapatan daerah ini kembali mengalami penurunan menjadi 3,32%, dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi -8,98%. Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 menyebabkan perlambatan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun menjadi 2,82%.



Analisis lebih rinci berdasarkan jenis pendapatan daerah menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2016 berjumlah Rp 91.174,72 juta dan meningkat menjadi Rp 108.856.844.190,82 pada tahun 2020. Berarti, pada periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 4,85%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 77,35%. Namun pertumbuhan seperti ini tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, malah cenderung mengalami penurunan yang signifikan.

Pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan meningkat dari Rp 871.533.936.589 pada tahun 2016 dan menjadi Rp 824.449.118.018,00 pada tahun 2020. Berarti dalam periode tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -1,35%. Penurunan dana transfer akibat refocusing APBN pada Tahun Anggaran 2020 berdampak besar terhadap postur APBD Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020.

Berdasarkan perbandingan kedua kelompok pendapatan daerah tersebut, pertumbuhan rata-rata pertahun PAD jauh lebih baik daripada Dana Perimbangan. Namun demikian, tingkat ketergantungan Kabupaten Pasaman Barat terhadap sumber dana dari pemerintah pusat relatif masih tinggi, yaitu sebesar 90,10% pada tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Dari empat sumber Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menunjukkan pertumbuhan penerimaan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan PAD lainnya. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2016 berjumlah Rp 1.761.751.076 dan meningkat menjadi Rp 7.711.662.101 pada tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 84,43%. Pajak daerah menunjukkan pertumbuhan tertinggi kedua, yaitu dari Rp.13.693.338.011,57 pada tahun 2016 menjadi Rp.19.462.573.774,59 pada tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan penerimaan daerah dari sektor pajak rata-rata pertahun sebesar 10.53%.

Sementara, pendapatan retribusi daerah menunjukkan pertumbuhan negatif dalam lima tahun terakhir, yakni dari Rp12.716.266.213 pada Tahun 2016 menjadi Rp3.384.931.489,42. Artinya, terjadi penurunan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar -18,35%. Salah satu penyebab penurunan Retribusi Daerah ini adalah karena perubahan status pengelolaan keuangan RSUD Pasaman Barat menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2016, sehingga pendapatan Retribusi RSUD dikategorikan sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.

Dilihat dari segi jumlah, Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi tertinggi sebagai sumber PAD yang tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat, rata-rata 5 tahun terakhir berjumlah 71,93% dari total penerimaan PAD pada Tahun 2020. Namun dilihat perkembangannya, relatif mengalami peningkatan yang rendah, yaitu dari Rp63.003.361.813 pada tahun 2016 menjadi Rp.78.297.676.825,81 pada tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,07%. Pertumbuhan tertinggi jumlah penerimaan Lain-lain PAD yang Sah terjadi pada tahun tahun 2017, yaitu sebesar 113,35%, namun pada tahun-tahun berikutnya pertumbuhan ini mengalami penurunan.



Salah satu penyebab fluktuasi yang sangat tinggi pada tahun 2018 karena terjadi perubahan perlakuan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana awalnya diperlakukan sebagai pendapatan Hibah, tetapi tahun 2017 diperlakukan sebagai Lain-lain PAD yang Sah, namun tahun berikutnya diubah lagi menjadi pendapatan Hibah. Akibatnya, pada tahun 2017 dan tahun 2018 terjadi fluktuasi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah, yang perubahannya sejalan dengan fluktuasi dari penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam menunjukkan pertumbuhan pertahun yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam pada Tahun 2016 berjumlah Rp673.166.125 dan meningkat menjadi Rp1.702.480.789,- pada Tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 38,23%.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus juga menunjukkan trend kenaikan, Pada tahun 2016, Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus berjumlah Rp185.632.196.735 dan meningkat menjadi Rp.208.772.537.581 pada tahun 2020, sehingga mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,12%. Sekalipun faktor penyebab peningkatan Dana Alokasi Khusus juga karena adanya peralihan penerimaan untuk sertifikasi guru sebagai DAK Non Fisik, namun kedepan peningkatan DAK dari pemerintah pusat ini perlu diupayakan agar sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat lebih ditingkatkan.

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum justru menunjukkan trend penurunan, yaitu dari Rp.655.854.990.000 pada tahun 2016 menjadi Rp.661.892.619.000 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan DAU menjadi Rp.598.772.766.000. Sumber pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2016, pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak berjumlah Rp29.373.583.729, dan turun menjadi Rp15.201.333.648, sehingga diperoleh rata-rata penurunan per tahun sebesar -12,06%. Ke depan, perlu upaya dan komitmen yang lebih baik untuk meningkatkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak di Kabupaten Pasaman Barat antara lain dengan membuat keijakan yang dapat meningkatkan investasi swasta dan kebijakan yang lebih berorientasikan kepada rakyat banyak sehingga pendapatan mereka meningkat dan pajak yang mereka bayarkan meningkat selanjutnya jumlah yang akan dibagihasilkan ke Kabupaten Pasaman Barat juga meningkat.

Sumber pendapatan Kabupaten Pasaman Barat yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terutama berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi menunjukkan peningkatan, meski tidak begitu signifikan. Pada tahun 2016 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi hanya berjumlah Rp.42.477.783.486 maka pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.47.457.631.995. Hal ini berarti bahwa setiap tahun terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 2,93%. Secara tidak langsung peningkatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat Kabupaten Pasaman memiliki kendaraan, yang berarti semakin banyak yang lebih sejahtera, dan seharusnya juga mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan penerimaan PAD, khususnya Retribusi daerah.



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Informasi kinerja pengelolaan pendapatan Kabupaten Pasaman Barat yang lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Per tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	PENDAPATAN	1.069.252.362.654,57	1.074.412.480.794,99	1.169.078.296.398,25	1.207.899.830.099,23	1.099.444.702.466,82	0,71
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91.174.717.113,57	161.699.196.655,99	104.523.535.551,25	104.071.607.688,23	108.856.844.190,82	4,85
	Pendapatan Pajak Daerah	13.693.338.011,57	17.971.245.923,02	20.846.294.093,29	20.941.331.211,76	19.462.573.774,59	10,53
	Pendapatan Retribusi Daerah	12.716.266.213,00	6.761.627.754,00	6.729.281.989,00	3.100.491.793,00	3.384.931.489,42	-18,35
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1.761.751.076,00	2.551.764.917,00	7.078.742.144,00	7.397.804.307,00	7.711.662.101,00	84,43
	Lain-lain PAD yang sah	63.003.361.813,00	134.414.558.061,97	69.869.217.324,96	72.631.980.376,47	78.297.676.825,81	6,07
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	91.174.717.113,57	161.699.196.655,99	104.523.535.551,25	104.071.607.688,23	108.856.844.190,82	4,85
B	PENDAPATAN TRANSFER	971.428.039.075,00	907.658.284.139,00	1.006.996.758.739,00	1.043.626.655.699,00	927.390.973.926,00	-1,13
	1. TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT-DANA	871.533.936.589,00	835.170.390.501,00	887.119.463.273,00	919.575.539.335,00	824.449.118.018,00	-1,35
	Dana Bagi Hasil Pajak	29.373.583.729,00	21.719.258.088,00	24.036.418.603,00	21.955.589.419,00	15.201.333.648,00	-12,06
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	673.166.125,00	1.189.551.105,00	1.524.675.595,00	1.844.086.365,00	1.702.480.789,00	38,23
	Dana Alokasi Umum	655.854.990.000,00	644.333.727.000,00	644.333.727.000,00	661.892.619.000,00	598.772.766.000,00	-2,18
	Dana Alokasi Khusus	185.632.196.735,00	167.927.854.308,00	217.224.642.075,00	233.883.244.551,00	208.772.537.581,00	3,12
	Sub Jumlah	871.533.936.589,00	835.170.390.501,00	887.119.463.273,00	919.575.539.335,00	824.449.118.018,00	-1,35
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	57.416.319.000,00	25.173.383.001,00	70.589.479.000,00	69.803.966.000,00	54.884.223.913,00	-1,10
	Dana Penyesuaian	57.416.319.000,00	25.173.383.001,00	70.589.479.000,00	69.803.966.000,00	54.884.223.913,00	-1,10
	Sub Jumlah	57.416.319.000,00	25.173.383.001,00	70.589.479.000,00	69.803.966.000,00	54.884.223.913,00	-1,10
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	42.477.783.486,00	50.346.766.002,00	141.178.958.000,00	54.247.150.364,00	48.057.631.995,00	3,28
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.477.783.486,00	47.314.510.637,00	49.287.816.466,00	54.247.150.364,00	47.457.631.995,00	2,93



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	Per tahun (%)
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	600.000.000,00	-
	Sub Jumlah	42.477.783.486,00	47.314.510.637,00	49.287.816.466,00	54.247.150.364,00	48.057.631.995,00	3,28
	Jumlah Pendapatan Transfer	971.428.039.075,00	907.658.284.139,00	1.006.996.758.739,00	1.043.626.655.699,00	927.390.973.926,00	-1,13
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.649.606.466,00	5.055.000.000,00	57.558.002.108,00	60.201.566.712,00	63.196.884.350,00	212,60
	Pendapatan Hibah	-	2.955.000.000,00	57.558.002.108,00	60.201.566.712,00	63.073.784.350,00	678,16
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	6.649.606.466,00	2.100.000.000,00	-	-	123.100.000,00	-24,54
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	6.649.606.466,00	5.055.000.000,00	57.558.002.108,00	60.201.566.712,00	63.196.884.350,00	212,60
	JUMLAH PENDAPATAN	1.069.252.362.654,57	1.074.412.480.794,99	1.169.078.296.398,25	1.207.899.830.099,23	1.099.444.702.466,82	0,71

Sumber: BKD Kab Pasaman Barat, Data diolah



Tabel 3.3
Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Tahun
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	Per tahun (%)
I	PENDAPATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,53	15,05	8,94	8,62	9,90	4,03
	Pendapatan Pajak Daerah	1,28	1,67	1,78	1,73	1,77	9,56
	Pendapatan Retribusi Daerah	1,19	0,63	0,58	0,26	0,31	-18,53
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	0,16	0,24	0,61	0,61	0,70	81,43
	Lain-lain PAD yang sah	5,89	12,51	5,98	6,01	7,12	5,22
B	PENDAPATAN TRANSFER	90,85	84,48	86,14	86,40	84,35	-1,79
	1. TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT-DANA	81,51	77,73	75,88	76,13	74,99	-2,00
	Dana Bagi Hasil Pajak	2,75	2,02	2,06	1,82	1,38	-12,42
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	0,06	0,11	0,13	0,15	0,15	36,49
	Dana Alokasi Umum	61,34	59,97	55,11	54,80	54,46	-2,80
	Dana Alokasi Khusus	17,36	15,63	18,58	19,36	18,99	2,34
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5,37	2,34	6,04	5,78	4,99	-1,76
	Dana Penyesuaian	5,37	2,34	6,04	5,78	4,99	-1,76
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	3,97	4,69	12,08	4,49	4,37	2,51
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3,97	4,40	4,22	4,49	4,32	2,16
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	0,05	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0,62	0,47	4,92	4,98	5,75	206,07
	Pendapatan Hibah	-	0,28	4,92	4,98	5,74	661,96
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	0,62	0,20	-	-	0,01	-24,55

Sumber: BKD Kab Pasaman Barat, Data diolah

Analisis pengelolaan keuangan yang lain yang dapat dilakukan adalah berdasarkan perkembangan proporsi masing-masing jumlah pendapatan daerah terhadap total pendapatan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk lebih memberdayakan daerah dalam menghasilkan sumber pendapatan, maka Kabupaten Pasaman Barat telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan PAD. Namun dalam 5 tahun terakhir kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tidak banyak mengalami perubahan. Jika pada tahun 2016, kontribusi PAD sebesar 8,53%, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,90%. Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang mengalami



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

peningkatan dalam periode yang sama, yaitu dari 0,16% pada tahun 2016 menjadi 0,70% pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi kedua berasal dari Pajak Daerah yang meningkat dari 1,28% pada tahun 2016 menjadi 1,77% pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 9,56%.

Tabel 3.4
Efektitas Pengelolaan Pendapatan dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan per Tahun (%)
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	
I	PENDAPATAN	97,85	97,89	94,32	94,61	94,98	-0,73
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	116,89	106,98	71,09	72,86	96,46	-4,37
	Pendapatan Pajak Daerah	85,58	102,69	43,73	55,11	81,28	-1,26
	Pendapatan Retribusi Daerah	176,48	77,41	63,05	42,06	79,03	-13,80
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	88,04	99,03	100,00	100,19	100,00	3,39
	Lain-lain PAD yang sah	119,34	109,87	85,62	80,64	101,81	-3,67
B	PENDAPATAN TRANSFER	96,64	96,42	98,00	97,86	95,70	-0,24
	1. TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT-DANA	96,23	96,23	98,58	97,84	95,58	-0,17
	Dana Bagi Hasil Pajak	134,24	87,13	110,08	91,63	-	-25,00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	45,35	53,41	97,51	76,33	5,38	-22,03
	Dana Alokasi Umum	100,00	100,00	100,00	100,00	98,69	-0,33
	Dana Alokasi Khusus	81,96	85,51	93,56	92,93	93,09	3,40
	2. TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	98,29	99,68	100,00	100,00	97,03	-0,32
	Dana Penyesuaian	98,29	99,68	100,00	100,00	97,03	-0,32
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	103,37	99,68	100,00	95,67	96,34	-1,70
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	103,37	98,16	102,25	95,67	96,30	-1,71
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	0,00	-	100,00	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	70,06	99,12	88,69	89,18	83,50	4,80
	Pendapatan Hibah	-	98,50	88,69	89,18	83,47	-5,09
	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	70,06	100,00	-	-	100,00	10,68
	JUMLAH PENDAPATAN	97,85	97,89	94,32	94,61	94,98	-0,73

Sumber: BPKD Kab Pasaman Barat, Data diolah



Kontribusi pendapatan Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Hibah dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Kontribusi Dana Alokasi Khusus meningkat dari 17,36% pada tahun 2016 menjadi 18,99% pada tahun 2020. Demikian juga peningkatan kontribusi Pendapatan Hibah dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang relatif tinggi. Tabel 3.3 menunjukkan perkembangan proporsi sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 sampai tahun 2020.

Analisis berikutnya yang dapat dilakukan untuk menilai efektifitas pelaksanaan anggaran pendapatan adalah berdasarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Perbandingan seperti dapat menggambarkan seberapa efektif rencana/target pendapatan dapat direalisasikan.

Pengolahan data pendapatan menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan Kabupaten Pasaman Barat lebih efektif pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Jika pada tahun 2016, 97,85% rencana penerimaan pendapatan daerah dapat direalisasikan, tetapi pada tahun 2020 rencana pendapatan daerah tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar 94,98%. Penurunan realisasi pendapatan daerah tersebut terutama terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD ini mengalami penurunan dari 116,89% pada tahun 2016 menjadi 96,46% pada tahun 2020. Trend penurunan juga terjadi pada dana perimbangan, terutama terjadi di tahun 2020, setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi postur APBN secara signifikan.

Pendapatan dana perimbangan mengalami penurunan efektifitas pengelolaan dari 96,64% pada tahun 2016 menjadi 95,70% pada tahun 2020. Kecuali pendapatan Dana Alokasi Khusus yang menunjukkan peningkatan efektifitas,. Tabel 3.4 menunjukkan perkembangan efektifitas pengelolaan pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2020.

Secara umum pendapatan daerah tahun 2020 mengalami kenaikan kecuali Pendapatan Asli Daerah untuk jenis Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah dari pendapatan jasa layanan umum BLUD sementara untuk Pajak Daerah mengalami penurunan. Pendapatan daerah turun sebesar Rp108.455.127.632,41 atau 9 % dari jumlah pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019.

Penurunan pendapatan daerah ini terjadi akibat perubahan kebijakan keuangan negara akibat wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadi perubahan alokasi dana transfer ke daerah, disamping itu wabah pandemi COVID-19 ini juga melemahkan roda perekonomian di Kabupaten Pasaman Barat, ini terlihat dari rendahnya realisasi pajak hotel akibat berkurangnya jumlah kunjungan, rendahnya pajak restoran akibat banyak restoran ataupun rumah makan yang tutup. Pelaksanaan rapat secara virtual baik oleh pemerintah daerah maupun lembaga lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan rapat maupun sosialisasi lebih diutamakan di fasilitas kantor dibandingkan dengan di hotel, ini juga ikut mempengaruhi penurunan penerimaan daerah dari objek pajak restoran. Hal yang sama juga terjadi terhadap objek pajak maupun retribusi lainnya seperti pajak reklame dan lain-lain.



2) Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang boleh dibayarkan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel serta meningkatkan penetapan prioritas alokasi anggaran menjadi fokus utama dalam era keterbatasan sumber pendanaan saat ini.

Kebijakan belanja daerah pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan dan pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan, kesehatan serta prasarana pendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan belanja Kabupaten Pasaman Barat juga mempedomani visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 -2021, yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera. Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasaman Barat, setiap tahun Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing.

Analisis belanja untuk menilai kinerja belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja dilakukan melalui:

- a. Analisis perkembangan realisasi belanja daerah
- b. Analisis kontribusi elemen belanja terhadap total belanja
- c. Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran;
- d. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- e. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan
- f. Analisis proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

a. Realisasi Belanja

Realiasi belanja Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dari Rp989.165.066.439,50 pada tahun 2016 dan menjadi Rp1.004.985.133.062,63 pada tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,40%. Analisis berdasarkan kelompok belanja utama menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan yang berarti dalam 5 tahun terakhir ini. Belanja pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,28%, yaitu dari



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Rp469.598,64 juta pada tahun 2016 menjadi Rp474.867,21 juta pada tahun 2020. Sedangkan Belanja Barang dan Jasa menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,84%, yaitu dari Rp227.488,22 juta pada tahun 2016 menjadi Rp271.508,56 juta pada tahun 2020. Sebaliknya, belanja modal mengalami pertumbuhan negatif rata-rata pertahun sebesar -7,97%, yaitu dari Rp267.700,82 juta pada tahun 2016 menjadi Rp182.357,59 juta pada tahun 2020.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Belanja transfer, yang antara lain terdiri dari Bantuan Kepada Nagari dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp66.970,75 juta pada tahun 2016 dan naik menjadi Rp110.468,23 juta pada tahun 2020. Tabel 3.5 menyajikan perkembangan dan pertumbuhan Belanja Daerah dan Transfer Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016-2020.



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan per tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
II	BELANJA	989.165.066.439,50	1.020.608.430.730,42	1.099.069.786.599,06	1.076.131.059.745,45	1.004.985.133.062,63	0,40
A	BELANJA OPERASI	721.464.247.452,50	757.601.546.657,42	771.301.066.317,36	814.840.535.297,90	800.836.807.125,78	2,75
	Belanja Pegawai	469.598.639.898,00	432.561.165.097,00	465.238.783.507,00	482.423.525.540,00	474.867.210.732,00	0,28
	Belanja Barang	227.488.221.804,50	293.484.158.710,42	277.828.488.390,36	321.140.440.305,90	271.508.557.923,78	4,84
	Bunga	-	-	-	-	-	-
	Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Hibah	24.377.385.750,00	31.556.222.850,00	28.033.794.420,00	11.276.569.452,00	54.461.038.470,00	30,85
	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	200.000.000,00	-	-	-
	Jumlah	721.464.247.452,50	757.601.546.657,42	771.301.066.317,36	814.840.535.297,90	800.836.807.125,78	2,75
B	BELANJA MODAL	267.700.818.987,00	263.006.884.073,00	327.268.292.281,70	261.167.537.747,55	182.357.589.116,85	-7,97
	Belanja Tanah	432.774.640,00	915.550.500,00	783.749.710,00	2.030.367.800,00	-	-25,00
	Belanja Peralatan Dan mesin	44.829.642.310,00	37.600.779.861,00	40.131.529.816,70	32.654.792.576,50	56.904.529.536,00	6,73
	Belanja Gedung dan Bangunan	66.956.447.431,00	43.586.766.035,00	133.421.059.425,00	90.341.104.966,56	85.318.264.789,22	6,86
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	154.004.265.076,00	167.986.324.855,00	141.236.649.284,00	122.927.595.670,49	31.449.443.736,63	-19,89
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.477.689.530,00	12.917.462.822,00	11.159.206.352,00	9.774.062.330,00	8.445.421.305,00	117,88
	Belanja Modal BLUD	-	-	386.646.894,00	2.139.983.984,00	-	-
	Belanja Modal BOS	-	-	1.260.800,00	-	-	-
	Belanja Aset Lainnya	-	-	148.190.000,00	1.299.630.420,00	239.929.750,00	30,95
	Jumlah	267.700.818.987,00	263.006.884.073,00	327.268.292.281,70	261.167.537.747,55	182.357.589.116,85	-7,97
C	BELANJA TAK TERDUGA	488.844.645,00	625.729.900,00	500.428.000,00	122.986.700,00	21.790.736.820,00	1.089,40
	Belanja Tak Terduga	488.844.645,00	625.729.900,00	500.428.000,00	122.986.700,00	21.790.736.820,00	1.089,40



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan per tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Jumlah	488.844.645,00	625.729.900,00	500.428.000,00	122.986.700,00	21.790.736.820,00	1.089,40
	JUMLAH BELANJA	989.653.911.084,50	1.021.234.160.630,42	1.099.069.786.599,06	1.076.131.059.745,45	1.004.985.133.062,63	0,39
III	TRANSFER	70.723.686.535,00	95.568.115.342,00	105.246.634.060,00	117.963.538.735,00	113.863.826.525,00	15,25
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	2.761.735.216,00	2.529.832.282,00	2.167.547.750,00	2.036.936.833,00	2.331.889.923,00	-3,89
	Bagi Hasil Pajak	2.000.000.000,00	1.677.995.246,00	1.625.815.167,00	1.768.711.039,00	2.010.328.559,00	0,13
	Bagi Hasil Retribusi	761.735.216,00	851.837.036,00	541.732.583,00	268.225.794,00	321.561.364,00	-14,45
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa	2.761.735.216,00	2.529.832.282,00	2.167.547.750,00	2.036.936.833,00	2.331.889.923,00	-3,89
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	67.961.951.319,00	93.038.283.060,00	103.079.086.310,00	115.926.601.902,00	111.531.936.602,00	4,10
	Bantuan Kepada Nagari	66.970.752.789,00	92.056.123.442,00	102.142.345.892,00	114.917.261.399,00	110.468.234.329,00	4,08
	Transfer Bantuan Keuangan	991.198.530,00	982.159.618,00	936.740.418,00	1.009.340.503,00	1.063.702.273,00	6,78
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	67.961.951.319,00	93.038.283.060,00	103.079.086.310,00	115.926.601.902,00	111.531.936.602,00	4,10
	JUMLAH TRANSFER	70.723.686.535,00	95.568.115.342,00	105.246.634.060,00	117.963.538.735,00	113.863.826.525,00	15,25
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	1.060.377.597.619,50	1.116.802.275.972,42	1.204.316.420.659,06	1.194.094.598.480,45	1.118.848.959.587,63	1,38
	SURPLUS/(DEFISIT)	8.874.765.035	- 42.358.254.680	- 35.238.124.261	13.805.231.619	- 19.404.257.121	-79,66

Sumber: BKD Kab Pasaman Barat, Data diolah



b. Analisis Kontribusi Elemen Belanja Terhadap Total Belanja

Pertumbuhan rata-rata per tahun dari Belanja Pegawai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok belanja lainnya sebagaimana di jelaskan di atas, mengakibatkan proporsi Belanja Pegawai mengalami penurunan, yaitu sebesar minus -1,04% rata-rata pertahun. Jika pada tahun 2016, proporsi Belanja Pegawai di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 44,29%, dan turun menjadi 42,44% pada tahun 2020. Sebaliknya, proporsi Belanja Barang dan Jasa naik dari 21,45% pada tahun 2016 menjadi 24,27% pada tahun 2020, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 3,28%.

Tabel 3.6 Proporsi Penggunaan Anggaran Belanja Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan per tahun (%)
II	BELANJA	93,33	91,44	91,26	90,12	89,82	-0,94
A	BELANJA OPERASI	68,04	67,84	64,04	68,24	71,58	1,30
	Belanja Pegawai	44,29	38,73	38,63	40,40	42,44	-1,04
	Belanja Barang	21,45	26,28	23,07	26,89	24,27	3,28
	Hibah	2,30	2,83	2,33	0,94	4,87	27,93
B	BELANJA MODAL	25,25	23,55	27,17	21,87	16,30	-8,86
	Belanja Tanah	0,04	0,08	0,07	0,17		105,54
	Belanja Peralatan Dan mesin	4,23	3,37	3,33	2,73	5,09	5,08
	Belanja Gedung dan Bangunan	6,31	3,90	11,08	7,57	7,63	5,19
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,52	15,04	11,73	10,29	2,81	-20,16
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,14	1,16	0,93	0,82	0,75	110,42
	Belanja Aset Lainnya	-	-	0,01	0,11	0,02	37,14
C	BELANJA TAK TERDUGA	0,05	0,06	0,04	0,01	1,95	1.031,16
	Belanja Tak Terduga	0,05	0,06	0,04	0,01	1,95	1.031,16
III	TRANSFER	6,67	8,56	8,74	9,88	10,18	13,15
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	0,26	0,23	0,18	0,17	0,21	-4,99
	Bagi Hasil Pajak	0,19	0,15	0,13	0,15	0,18	-1,18
	Bagi Hasil Retrebusi	0,07	0,08	0,04	0,02	0,03	-15,00
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	6,41	8,33	8,56	9,71	9,97	13,88
	Bantuan Kepada Nagari	6,32	8,24	8,48	9,62	9,87	14,08
	Transfer Bantuan Keuangan	0,09	0,09	0,08	0,08	0,10	0,43

Sumber: BPKD Kab Pasaman Barat, Data diolah

Sekalipun beberapa jenis belanja modal menunjukkan peningkatan proporsi, namun secara keseluruhan, proporsi belanja modal juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 25,25% pada tahun 2016 menjadi 16,30% persen pada tahun 2020. Elemen-elemen belanja dan transfer menunjukkan trend yang berbeda, yakni naik cukup signifikan. Pada Tahun 2016, proporsi belanja transfer adalah



6,67%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 10,18%, sehingga menunjukkan kenaikan rata-rata 13,15% per tahun. Kenaikan yang signifikan terjadi pada elemen Bantuan kepada nagari, yang naik dari 6,32% pada Tahun 2016 menjadi 9,97% pada Tahun 2020, atau naik rata-rata 13,08% per tahun.

3.1.2 Efektifitas Pengelolaan Belanja Daerah

Analisis efektifitas pengelolaan belanja daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Semakin tinggi realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanja berarti semakin efektif pengelolaan belanja yang dilakukan Kabupaten Pasaman Barat.

Pengolahan data belanja menunjukkan bahwa pengelolaan belanja Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2020 relatif baik, efektifitas realisasi setiap tahun menunjukkan peningkatan, yaitu dari 85,81% pada tahun 2016, naik menjadi 91,05% pada tahun 2017, dan naik menjadi 90,19% pada tahun 2018. Terakhir, pada tahun 2020, efektifitas realisasi belanja Kabupaten Pasaman Barat meningkat menjadi 91,05%.

Analisis lebih rinci terhadap kelompok belanja menunjukkan bahwa efektifitas meningkat pada hampir semua kelompok belanja, kecuali belanja tanah, yang tidak dianggarkan pada Tahun 2020. Efektivitas belanja gedung dan bangunan juga sedikit berkurang, dari 89,33% pada Tahun 2016 menjadi 88,42% pada Tahun 2020. Demikian juga dengan efektifitas belanja asset tetap lainnya, yang berkurang dari 99,09% pada Tahun 2016 menjadi 98,22% pada Tahun 2020. Belanja Bagi Hasil Pendapatan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Efektivitas terbaik dicapai pada Tahun 2016, yakni 100%, namun kemudian turun terus-menerus dari tahun 2017 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2020, efektifitas Bagi Hasil Pendapatan kembali meningkat menjadi 82,61%.

Di satu sisi, efektifitas belanja yang meningkat terus-menerus menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pasaman Barat sudah membaik. Namun di sisi lain, semakin ketatnya sistem pengalokasian anggaran membuat pemerintah daerah harus lebih seksama dalam menyusun rencana anggaran. Seperti halnya pada tahun 2020. Efektivitas belanja mengalami perbaikan karena uang yang akan dibelanjakan memang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Karena pandemi Covid-19, dana transfer, yakni DAU dan DAK, ke daerah mengalami pengurangan. Proses *refocusing* yang dilakukan berulang-ulang di tahun 2020 memberi peluang bagi daerah untuk memperbaiki efektifitas belanjanya.

Dari segi pertumbuhan, Belanja Tak Terduga menunjukkan pertumbuhan efektifitas tertinggi, yakni 29,23% per tahun selama periode 2016-2021. Pada tahun 2020, penyerapan Belanja Tak Terduga mengalami kenaikan secara signifikan karena adanya alokasi untuk penanganan Covid-19.



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja (%)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016 - 2020

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbuhan per tahun
BELANJA		85,81	89,65	90,11	89,29	91,05	1,52
	BELANJA OPERASI	88,57	89,67	92,41	91,01	92,74	1,18
	Belanja Pegawai	92,20	91,63	94,81	92,78	94,75	0,69
	Belanja Barang	83,21	86,34	89,04	81,99	88,39	1,56
	Hibah	76,64	96,08	88,50	299,48	98,79	7,23
	BELANJA MODAL	79,39	89,82	85,32	84,67	87,06	2,42
	Belanja Tanah	32,23	58,98	78,85	96,06	0,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	84,61	93,83	89,25	87,41	91,71	2,10
	Belanja Gedung dan Bangunan	89,33	87,85	85,24	85,43	88,42	-0,25
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	74,61	89,40	83,68	82,69	76,56	0,66
	Belanja Aset Tetap Lainnya	99,09	94,59	97,59	99,63	98,22	-0,22
	BELANJA TAK TERDUGA	32,59	41,72	33,36	8,20	70,70	29,23
	Belanja Tak Terduga	32,59	41,72	33,36	8,20	70,70	29,23
TRANSFER		98,90	99,25	64,12	97,19	98,13	-0,19
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	100,00	95,58	46,53	44,07	82,61	-4,35
	Bagi Hasil Retribusi	100,00	95,88	44,00	44,93	83,96	-4,01
	Bagi Hasil Pajak	100,00	95,00	56,19	39,57	75,07	-6,23
	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	98,85	99,36	64,91	99,29	98,51	-0,09
	Bantuan Kepada Nagari	99,21	99,63	64,61	99,30	98,50	-0,18
JUMLAH BELANJA & TRANSFER		86,58	90,40	87,99	90,01	91,72	1,48

Sumber: BKD Kab Pasaman Barat, Data diolah



3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk pelunasan hutang, penyertaan modal dan transfer ke dana Cadangan.

Kebijakan untuk menutup defisit yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dalam 5 tahun terakhir ditutupi dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang terjadi hanya untuk menambah penyertaan modal.

Penggunaan SiLPA pada tahun 2016 berjumlah Rp173.415,33 juta dan setiap tahun menunjukkan penurunan, yaitu menjadi Rp 140.915,09 juta pada tahun 2017, dan menjadi Rp92.600,48 juta pada tahun 2018, dan turun menjadi Rp56.516,72 juta. Sayangnya pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena SiLPA pada tahun 2019 relatif besar yang sebabkan beberapa kegiatan tidak bisa diselesaikan sampai akhir tahun 2019. SiLPA pada tahun 2020 adalah Rp.73.219,22 juta. Secara rata-rata, pengurangan penggunaan SiLPA setiap tahun selama periode 2016-2020 adalah - 1444,45%.

Pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal juga menunjukkan penurunan yang signifikan, yaitu dari Rp41.375,00 juta pada tahun 2016 menjadi Rp8.363,98 juta pada tahun 2020. Bahkan, pada tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat tidak melakukan penyertaan modal. *Refocusing* anggaran dan pengurangan dana transfer menyebabkan daerah tidak mampu untuk membiayai penyertaan modal. Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus membiayai pokok utang sebesar Rp8.363,98 juta pada Tahun 2020.

Realisasi pembiayaan APBD Kabupaten Pasaman Barat untuk 4 tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 3.8:



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

**Tabel 3.8 Realisasi Pembiayaan Daerah APBD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016 - 2020**

No.	Uraian		2016	2017	2018	2019	2020	% pertumbuhan per tahun
IV	PEMBIAYAAN							
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		173.415.327.232,82	140.915.092.268	92.600.482.505	56.516.715.771	73.219.220.753	-1444,45%
		Penggunaan SiLPA	173.415.327.232,82	140.915.092.267,89	92.492.581.397,46	54.362.358.244,65	66.762.861.253,36	-1537,53%
		Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-	107.901.108,00	246.736.826,00	-	-
		Pencairan Dana Deposito dan Giro	-	-	-	1.907.620.700,00	6.456.359.500,00	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		41.375.000.000,00	2.955.000.000	3.000.000.000	3.558.000.000	8.363.980.200	-1994,62%
		Penyertaan Modal Pem. Daerah	41.375.000.000,00	2.955.000.000,00	3.000.000.000,00	3.558.000.000,00	-	-
		Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	8.363.980.200,00	-
		PEMBIAYAAN NETTO	132.040.327.232,82	137.960.092.267,89	89.600.482.505,46	52.958.715.770,65	64.855.240.553,36	-1272,06%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		140.915.092.267,89	92.781.299.747,46	54.362.358.244,65	66.763.947.389,43	45.450.983.432,55	-1693,65%

Sumber: BPKAD Kab. Pasaman Barat



3.2. Kebijakan Keuangan RPJMD Tahun 2016 - 2020

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpotensi menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

3.2.1. Belanja Aparatur

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Pasaman Barat di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan keuangan daerah dari pemerintah pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, terjadi sedikit peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan di sisi lain terjadi penurunan proporsi pendapatan yang berasal dari dana perimbangan.

Dari sisi belanja aparatur, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2019, telah terjadi penurunan jumlah Belanja Aparatur Kabupaten Pasaman Barat, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar -11,30%. Pada tahun 2017 Belanja Aparatur Kabupaten Pasaman Barat berjumlah Rp 584.612.32 juta dan sedikit naik berfluktuasi selama periode 2018-2020. Pada Tahun 2020, Belanja Aparatur Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp386.471,18 juta. Proporsi terbesar dari belanja aparatur ini adalah untuk Belanja Tidak Langsung. Jika pada tahun 2017, jumlah Belanja Tidak Langsung aparatur adalah sebesar Rp 469.790,53 juta dan turun menjadi Rp 326.484,69 juta pada tahun 2020.

Jika dilihat dalam rincian, maka Belanja Gaji dan Tunjangan pada Belanja Tidak Langsung Aparatur justru mengalami kenaikan, yakni dari Rp.311.976,36 juta pada tahun 2017 menjadi Rp.219.324,53 juta pada tahun 2020. Sebaliknya, komponen belanja lainnya mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi pada Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH.

Sementara itu, Belanja Langsung Aparatur juga mengalami penurunan secara signifikan, dengan rata-rata penurunan -15,92% setiap tahunnya selama periode 2017-2020. Beberapa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja sangat mempengaruhi komposisi Belanja Langsung Aparatur selama periode 2017-2020. Di antaranya adalah:

- 1) Kebijakan meminimalisir belanja honorarium PNS
- 2) Pengurangan belanja lembur PNS dan Non-PNS secara signifikan, termasuk pengurangan tarif lembur 200% pada hari libur (Sabtu dan Minggu)
- 3) Sejak tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak lagi mengalokasikan belanja beasiswa PNS. ASN Pasaman Barat dianjurkan untuk mengikuti seleksi beasiswa dengan pembiayaan yang disediakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
- 4) Efisiensi belanja bimbingan teknis/sosialisasi aturan perundang-undangan



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Aparatur Tahun Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 - 2020

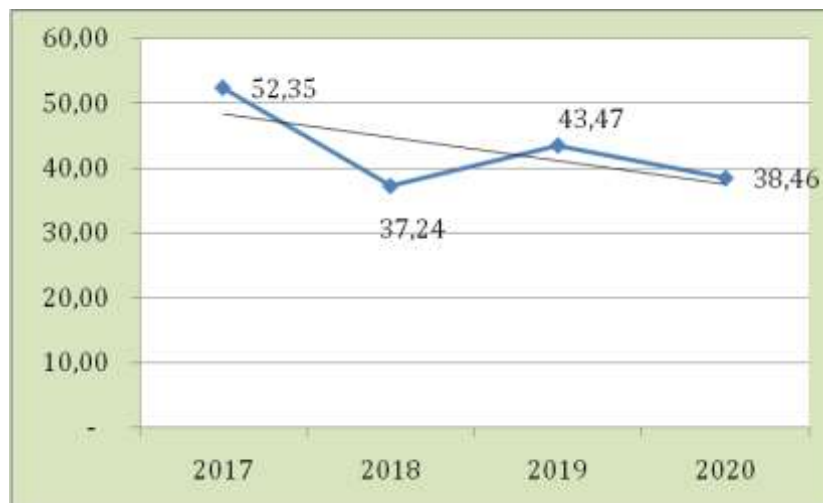
Kode	Keterangan	Tahun (Rp)				% Pertumbuhan per tahun
		2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Tidak Langsung	469.790.529.472,00	315.952.057.526,00	320.932.147.806,00	326.484.658.626,00	-10,17
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	311.796.356.092,00	307.452.929.026,00	313.964.103.884,00	319.324.533.936,00	0,80
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	151.473.110.292,00	5.440.000.000,00	5.379.997.000,00	5.321.666.448,00	-32,16
3	Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4.264.000.000,00	1.581.000.000,00	786.362.500,00	1.168.000.000,00	-24,20
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	1.857.000.000,00	1.047.000.000,00	793.580.422,00	588.894.709,00	-22,76
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	400.063.088,00	431.128.500,00	8.104.000,00	81.563.533,00	-26,54
B	Belanja Langsung	114.821.787.343,00	93.330.007.723,00	80.630.879.206,00	59.986.525.344,00	-15,92
1	Belanja Honorarium PNS	11.031.783.250,00	9.540.417.000,00	7.186.690.250,00	6.145.339.500,00	-14,76
2	Belanja Uang Lembur	3.636.704.890,00	1.589.084.000,00	210.241.750,00	185.259.500,00	-31,64
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35.200.000,00	-	-	-	-33,33
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.423.512.450,00	2.625.244.063,00	2.105.025.690,00	1.188.740.000,00	-26,03
5	Belanja premi asuransi kesehatan	6.046.230.400,00	8.168.969.600,00	11.828.040.647,00	13.456.847.503,00	40,86
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	18.470.305.500,00	12.661.615.650,00	8.855.757.050,00	4.661.514.000,00	-24,92
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.647.062.500,00	880.925.000,00	1.064.865.000,00	101.726.000,00	-32,40
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	2.160.484.100,00	1.185.954.520,00	798.612.000,00	258.650.000,00	-29,34
9	Belanja Perjalanan Dinas	61.325.972.314,00	53.814.145.557,00	47.548.658.819,00	32.808.454.615,00	-15,50
10	Belanja Modal untuk keperluan kantor (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	3.044.531.939,00	2.863.652.333,00	1.032.988.000,00	1.179.994.226,00	-20,41
Jumlah		584.612.316.815,00	409.282.065.249,00	401.563.027.012,00	386.471.183.970,00	-11,30



- 5) Belanja pakaian dinas dan hari-hari tertentu tidak dianggarkan untuk PNS selama periode 2018-2020. Pengadaan pakaian dinas hanya disediakan untuk pimpinan daerah dan anggota DPRD;
- 6) Efisiensi belanja perjalanan dinas di semua tingkatan
- 7) Efisiensi belanja makan/minum pegawai
- 8) Efisiensi Belanja Modal untuk keperluan kantor (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)

Sementara itu, peningkatan signifikan terjadi pada belanja premi asuransi kesehatan mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Daerah untuk membiayai program Jaminan Kesehatan Daerah Sumbar Sakato dengan sistem *sharing* antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, di mana Pemerintah Daerah membayar 70% dari total biaya premi. Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah membiayai premi Jaminan Kesehatan Nasional bagi 35.412 jiwa penduduk miskin.

Untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat semakin baik atau tidak, maka perlu diketahui proporsi belanja aparatur dengan total belanja daerah. Pada tahun 2017 belanja aparatur memiliki proporsi sebesar 52,35% dari total belanja pemerintah daerah, sedangkan pada tahun 2020 proporsi belanja ini turun menjadi 38,46% dari total belanja daerah. Data ini memberi penjelasan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Pasaman Barat semakin baik dengan semakin meningkatnya belanja untuk keperluan publik.



Grafik 3.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (Sumber: BKD Kab Pasaman Barat, Data diolah)

3.2.2. Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas

Belanja periodik wajib dan mengikat merupakan belanja yang wajib dibayarkan dan tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak boleh menjadi hutang untuk tahun berikutnya. Hal ini berarti bahwa belanja yang menjadi prioritas utama dalam sebuah anggaran atau APBD seperti gaji, belanja bagi hasil pada desa yang



merupakan kewajiban setiap penerimaan pendapatan daerah yang harus dibagi kepada desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah belanja yang harus dibayar setiap periodik oleh pemerintah daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

RSUD Pasaman Barat sudah mengikuti Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, dan pendapatan yang diperoleh oleh RSUD-BLUD tersebut boleh digunakan untuk Jasa Medis dan Non Medis, maka berarti Pendapatan RSUD-BLUD ini dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang mengikat. Demikian, juga dengan dana BOS, karena dana BOS peruntukannya tidak bisa digantikan untuk pengeluaran lain, maka Dana BOS juga dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang mengikat.

Secara total, Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama mengalami kenaikan dari Rp.544.687,27 juta pada Tahun 2016 menjadi Rp.664.551.64 juta pada tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 5,50% per tahun. Belanja gaji dan tunjangan PNS sedikit mengalami penurunan dari Rp338.977,06 juta pada tahun 2016 menjadi Rp319.324,53 juta pada tahun 2020, atau rata-rata penurunan -1,45% per tahun.

Sementara itu, belanja untuk guru dan sekolah mengalami kenaikan dari Rp.109.148,16 juta di Tahun 2016 menjadi Rp.191.899,18 juta di Tahun 2020, dengan rata-rata pertumbuhan 18,95% per tahun selama tahun 2016-2020. Hal ini terjadi karena adanya penambahan *item* belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Guru dan Sekolah sejak Tahun 2019-2020. Belanja untuk tenaga medis juga mengalami kenaikan cukup signifikan, dari Rp91.384,30 juta pada tahun 2016 menjadi Rp.130.450,60 juta pada tahun 2020, dengan rata-rata kenaikan 10,69% per tahun.



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.10 Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun					% Pertumbuhan per tahun
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	338.977.064.469	311.796.356.092	307.452.929.026	313.964.103.884	319.324.533.936	-1,45
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.416.000.000	4.264.000.000	5.440.000.000	5.379.997.000	5.321.666.448	30,07
3	Belanja Bagi Hasil (Transfer ke desa)	2.761.735.216	2.646.759.679	4.658.696.846	2.036.936.833	2.331.889.923	-3,89
4	BELANJA UNTUK GURU DAN SEKOLAH	109.148.175.495	129.956.954.164	119.433.931.185	198.485.589.285	191.899.176.905	18,95
a	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	-	-	-	70.577.674.144	64.151.236.519	-
b	Tambahan Penghasilan Tunjangan Profesi Guru	105.860.175.495	86.608.808.000	86.529.073.000	85.936.431.040	80.572.774.280	-5,97
c	Tambahan Penghasilan Guru	3.288.000.000	1.857.000.000	1.581.000.000	786.362.500	1.168.000.000	-16,12
d	Tambahan Tunjangan Khusus Guru	-	-	1.337.952.000	1.307.755.800	-	-
e	Belanja Pegawai Dana BOS	-	500.898.250	5.955.267.400	7.986.490.920	16.981.981.500	1096,77
f	Belanja Barang Jasa BOS	-	40.990.247.914	24.030.638.785	31.890.874.881	29.025.184.606	-9,73
g	Belanja Modal Dana BOS	-	15.059.914.836	10.692.493.815	15.248.458.506	15.223.774.022	0,36
5	BELANJA TENAGA MEDIS	91.384.296.134	133.545.297.470	141.684.288.232	128.652.128.300	130.450.599.946	10,69
a	Belanja Honorarium PNS Khsus Untuk Tenaga Medis	6.569.938.446	3.235.749.000	15.248.132.271	2.969.249.400	-	-25,00
b	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.798.750.000	2.751.950.000	2.376.000.000	-	-	-
c	Pendapatan Rumah Sakit (data ini digunakan untuk menghitung belanja Remunerasi tenaga Medis karena belanja termasuk belanja terikat)	21.746.636.067	37.845.031.768	38.923.825.627	58.140.441.967	64.951.381.461	49,67
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35.200.000	35.200.000	-	-	-	-
7	Belanja Jasa Kantor (khusus Tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	61.233.771.621	89.677.366.702	85.136.330.334	67.542.436.933	65.499.218.485	1,74
Total		544.687.271.314	597.269.282.241	589.362.339.104	663.767.213.808	664.551.641.180	4,80

Sumber: BPKD Kab Pasaman Barat, Data diolah



3.3. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Analisis kinerja Neraca Kabupaten Pasaman Barat tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 85,42%, 6,34%, dan 2,75% sedangkan sisanya adalah aset lainnya.

Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp2.146.604,02 juta dan kemudian naik menjadi 2.365.846,28 juta pada tahun 2020. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain terutama melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar. Selama periode 2016-2021, nilai aset yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat naik rata-rata 2,55% per tahun.

Nilai aset lancar mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2016-2020, yakni dari Rp.184.536,46 juta pada Tahun 2016 menjadi Rp.84.589,78 juta pada tahun 2020. Rata-rata penurunan nilai aset lancar yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2016-2021 mencapai -13,54% per tahun. Sementara itu, aset tetap mengalami peningkatan dari Rp1.700.462,61 juta pada tahun 2016 menjadi Rp2.129.869,61 juta pada tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,31%. Peningkatan terbesar terjadi pada konstruksi dalam pengerjaan, yang meningkat dari Rp17.437,77 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 191.397,09 juta pada tahun 2020, atau meningkat rata-rata 249,40% per tahun.

Meskipun menyumbang terhadap kenaikan nilai aset tetap yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat, kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan juga berimplikasi pada banyaknya proyek konstruksi yang nilainya sudah dihitung namun belum termanfaatkan selama Tahun 2016-2020. Kenaikan nilai aset yang cukup baik terlihat pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang meningkat dari Rp 1.049.508,87 juta pada tahun 2016 menjadi Rp 1.625.666,33 juta pada Tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan kenaikan nilai aset yang berasal dari proyek konstruksi jalan, jembatan, dan jaringan konstruksi lainnya.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 1,37% berbanding 89,77%. Namun karena komposisi jumlah ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan jumlah kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas. Tabel 3.12 menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 3.11
Perkembangan Neraca Daerah dan Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 – 2020 (Rp)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbuhan per tahun
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	34.055.514.873,82	10.650.831.602,39	11.319.281.269,58	53.791.434.691,70	34.216.390.256,52	0,12
Kas di Bendahara Penerimaan	75.664.673,00	46.681.649,00	3.026.920,00	23.959.962,00	10.208.737,00	-21,63
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	33.968.350,00	-	-	-	-
Kas Lainnya	1.404.856.222,00	222.875,00	906.293,00	26.423.377,00	3.643.673,00	-24,94
Kas di BLUD	1.788.567.665,00	10.321.325.157,00	11.028.230.136,00	4.080.176.281,80	3.929.940.203,55	29,93
Kas di Bendahara FKTP	-	-	-	6.371.170.048,85	5.437.356.245,48	-
Kas di Bendahara BOS	-	1.689.673.949,00	2.039.594.087,00	2.514.705.709,00	1.851.209.848,00	3,19
Setara Kas	105.000.000.000,00	70.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	-	-25,00
Piutang Pajak	10.776.602.448,60	19.921.755.751,00	21.383.155.732,67	22.987.868.236,47	23.149.502.138,69	28,70
Penyisihan Piutang Pajak	281.758.008,72	13.972.805.698,83	15.309.905.480,91	16.964.870.645,08	(18.150.274.663,98)	-1635,45
Piutang Pajak Netto	10.494.844.439,88	5.948.950.052,17	6.073.250.251,76	6.022.997.591,39	4.999.227.474,71	-13,09
Piutang Retribusi	6.448.311.588,00	87.720.140,00	619.524.340,00	169.926.340,00	225.970.340,00	-24,12
Penyisihan Piutang Retribusi	34.875.221,00	10.440.525,00	24.679.545,00	94.384.720,00	(102.609.890,00)	-98,56
Piutang Retribusi Netto	6.413.436.367,00	77.279.615,00	594.844.795,00	75.541.620,00	123.360.450,00	-24,52
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	-	14.410.092.738,47	16.804.127.173,47	24.769.129.063,47	17.823.539.704,27	7,90
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	-	1.529.760.044,05	2.072.766.164,17	4.578.015.138,72	(4.567.825.273,71)	-132,87
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Netto	-	12.880.332.694,42	14.731.361.009,30	20.191.113.924,75	13.255.714.430,56	0,97
Piutang Dana Bagi Hasil	281.758.479,38	4.329.350.353,38	4.699.300.234,38	6.522.539.998,38	3.750.013.589,38	307,73
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	281.758.479,38	4.329.350.353,38	4.699.300.234,38	6.522.539.998,38	3.750.013.589,38	307,73
Piutang Lain-lain	10.931.004.006,47	170.180.504,50	277.646.314,50	355.495.025,55	318.048.477,50	-24,27
Penyisihan Piutang Lain-Lain	998.799.264,93	139.171.693,70	139.164.638,50	152.883.528,88	(202.387.337,85)	-30,07
Piutang Lain-Lain Netto	9.932.204.741,54	31.008.810,80	138.481.676,00	202.611.496,67	115.661.139,65	-24,71



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbuhan per tahun
Beban Dibayar Dimuka	101.098.763,50	66.658.322,00	76.513.245,00	63.039.472,00	-	-25,00
Persediaan	14.988.508.947,57	19.032.145.141,74	15.306.759.971,49	13.197.186.955,79	16.897.058.260,75	3,18
JUMLAH ASET LANCAR	184.536.455.172,69	135.108.428.571,90	96.011.549.888,51	113.082.901.129,33	84.589.784.308,60	-13,54
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	2.115.000.000,00	2.115.000.000,00	2.007.098.892,00	1.788.056.066,00	1.788.056.066,00	-3,86
Investasi Non Permanen yang diragukan tertagih	-1.770.404.936,75	-1.773.529.230,00	-1.786.806.066,00	-1.772.950.066,00	(1.772.950.066,00)	0,04
Investasi Permanen	58.026.149.085,25	58.821.917.503,25	59.189.251.141,25	52.162.590.586,25	51.449.899.000,00	-2,83
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	58.370.744.148,50	59.163.388.273,25	59.409.543.967,25	52.177.696.586,25	51.465.005.000,00	-2,96
ASET TETAP						
Tanah	330.607.509.121,00	301.327.955.662,00	305.004.861.180,00	310.034.262.980,00	311.860.882.980,00	-1,42
Peralatan dan Mesin	270.792.165.155,21	295.441.817.254,58	321.368.578.354,84	346.649.302.420,44	80.225.850.773,57	-17,59
Gedung dan Bangunan	684.089.515.806,08	650.963.825.518,31	684.506.120.967,47	776.770.934.879,42	790.000.931.375,10	3,87
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.049.508.869.266,53	1.204.589.343.095,67	1.353.573.667.926,67	1.473.188.588.779,01	1.625.666.334.555,81	13,72
Aset Tetap Lainnya	96.558.973.535,32	106.249.589.279,37	117.377.822.025,37	128.073.402.903,37	134.820.870.893,67	9,91
Konstruksi dalam Pengerjaan	17.437.770.217,00	36.192.579.340,86	134.434.745.456,33	154.086.477.349,92	191.397.094.181,07	249,40
Akumulasi Penyusutan	-748.532.197.661,32	-983.064.959.667,54	-1.100.217.162.890,58	-1.191.751.055.156,89	(1.326.134.256.529,72)	19,29
JUMLAH ASET TETAP	1.700.462.605.439,82	1.611.700.150.483,25	1.816.048.633.020,10	1.997.051.914.155,27	2.129.869.608.229,46	6,31
ASET LAINNYA						
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	15.401.867.300,00	15.401.867.300,00	15.401.867.300,00	15,11
Aset Tak Berwujud	3.508.928.286,00	7.275.390.286,00	7.737.980.286,00	8.987.610.706,00	9.391.410.456,00	41,91
Amortisasi	-	-	-1.970.077.464,32	-2.520.670.962,51	(3.059.494.996,91)	
Aset Lain-lain	190.028.622.754,87	52.072.378.312,90	63.355.010.238,11	79.113.248.378,71	78.091.937.180,10	-14,73
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	96.664.741,00	96.164.741,00	96.164.741,00	96.164.741,00	96.164.741,00	-0,13
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-	135.561.500,00	40.242.750,00	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	203.234.215.781,87	69.043.933.339,90	84.756.506.600,79	101.118.462.913,20	99.921.884.680,19	-12,71
JUMLAH ASET	2.146.604.020.542,88	1.875.015.900.668,30	2.056.226.233.476,65	2.263.430.974.784,05	2.365.846.282.218,25	2,55
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	21.268.332,00	20.344.925,00	29.117.461,00	45.322.387,00	22.542.683,00	1,50



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	% Pertumbu han per tahun
Utang Bunga	-	-	-	88.634,00	34.128,00	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	113.000.417,00	108.027.367,00	104.523.950,01	92.386.367,67	94.179.583,34	-4,16
Utang Beban	4.559.645.420,00	11.029.964.716,00	14.464.326.139,00	15.291.021.969,04	15.656.915.291,00	60,85
Utang Jangka Pendek Lainnya	33.355.000,00	5.741.178.006,00	1.340.645.880,80	14.972.726.699,32	2.449.890.150,00	1811,22
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.727.269.169,00	16.899.515.014,00	15.938.613.430,81	30.401.546.057,03	18.223.561.835,34	71,37
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	1.907.620.700,00	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	1.907.620.700,00	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	4.727.269.169,00	16.899.515.014,00	15.938.613.430,81	32.309.166.757,03	18.223.561.835,34	71,37
EKUITAS	2.141.876.751.373,88	1.858.116.385.654,30	2.040.287.620.045,84	2.231.121.808.027,02	2.347.622.720.382,91	2,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.146.604.020.542,88	1.875.015.900.668,30	2.056.226.233.476,65	2.263.430.974.784,05	2.365.846.282.218,25	2,55

Sumber: BPKD Pasaman Barat (Diolah)



Untuk memahami kemampuan keuangan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konseptual ada empat macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio kas lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage.

3. Rasio Leverage

Rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

4. Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan.

Berdasarkan pengertian dari keempat analisis resiko keuangan di atas, rasio profitabilitas tidak relevan untuk dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas menjadi analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Kabupaten Pasaman Barat.

Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan melunasi kewajiban yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Kabupaten Pasaman Barat, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan pada tahun 2016 dengan tahun 2019. Pada tahun 2016, perlakuan akuntansi masih menggunakan basis kas menuju akrual dan tidak ada pengakuan hutang belanja. Tetapi, dengan pemberlakuan basis akrual dari tahun 2016, maka pada setiap akhir tahun harus diakui hutang-hutang belanja yang



akan dilunasi pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2019 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 rasio lancar mengalami penurunan sebesar 3.903,66% dan pada tahun 2020 menjadi 464,18%. Sedangkan rasio quick turun dari 3.586,59% pada tahun 2016 menjadi 500,62% pada tahun 2020. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas, turun dari 3.010,72% pada tahun 2016 menjadi 249,40 % pada tahun 2020. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau Kabupaten Pasaman Barat memiliki jumlah hutang yang sangat kecil sekali. Namun di sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini menggambarkan bahwa fungsi pemerintah sebagai penggerak pembangunan cenderung kurang baik. Kondisi ini dapat diartikan bahwa saldo kas keuangan Kabupaten Pasaman Barat pada akhir tahun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin pada tahun berikutnya.

Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil ini juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset yang hanya berkisar 3 sampai dengan 4% saja. Kondisi ini menggambarkan bahwa hutang yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat hanya kurang dari 1,5% dari total aset atau ekuitas. Berdasarkan analisis terhadap empat rasio keuangan ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya sebagaimana disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rasio Keuangan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Pertahun (%)
1	Rasio lancar (current ratio)	3.903,66	799,48	602,38	371,96	464,18	(22,03)
2	Rasio quick (quick ratio)	3.586,59	686,86	506,35	328,55	500,62	(21,51)
3	Kas Rasio	3.010,72	548,79	341,25	219,75	249,40	(22,93)
4	Rasio total hutang terhadap total aset	0,22022	0,90130	0,77514	1,42744	0,77028	62,44
5	Rasio hutang terhadap modal	0,22071	0,90950	0,78119	1,44811	0,77626	62,93

Sumber: LKPD (Neraca) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-Tahun 2020 (diolah)

3.4. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian digunakan untuk menghitung kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2021 hingga 2026.



1. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan data yang dihubungkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

- a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
- b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
- c. Kebijakan intensifikasi pendapatan daerah; dan
- d. Kebijakan dibidang keuangan negara.

Penghitungan proyeksi pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir, yakni tahun 2016 hingga 2020. Kemudian untuk mendapatkan proyeksi keuangan menggunakan data dasar keuangan APBD pada tahun 2021. Metode penghitungan angka proyeksi ini dilakukan agar asumsi proyeksi pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tidak terpaut jauh dengan angka pendanaan indikatif pada tahun berikutnya. Proyeksi pendapatan dan belanja secara keseluruhan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 tidak begitu optimis. Pendapatan daerah secara total diproyeksikan meningkat rata-rata 4,27% setiap tahunnya. Peningkatan proyeksi pendapatan ini dihitung berdasarkan pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pasaman Barat yang tidak signifikan selama periode 2016-2021. PAD Kabupaten Pasaman Barat diproyeksikan meningkat dari Rp 114.205.400.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp 140.287.886.653,00 pada Tahun 2026. Pada tahun 2026, diasumsikan bahwa derajat otonomi fiskal Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar 11,01%.

Pendapatan Pajak dan Retribusi diproyeksi meningkat dengan rata-rata 3,17% per tahun dan 3,04% per tahun selama lima tahun ke depan. Pemerintah Daerah berupaya mendorong peningkatan PAD dengan beberapa upaya, antara lain:

1. Membentuk tim pemungut pajak, yang akan bekerja untuk mengidentifikasi potensi-potensi pajak dan retribusi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat juga akan berupaya meningkatkan PAD melalui hilirisasi komoditi unggulan, yakni mendirikan perusahaan daerah untuk pabrik pengolahan kelapa sawit.
3. Mengidentifikasi dan membentuk sentra-sentra pedagang kecil dan UMKM, seperti sentra kuliner, pasar yang dikelola kabupaten, dan sentra Usaha Mikro, yang diharapkan akan mendatangkan PAD.
4. Mengoptimalkan pengelolaan usaha-usaha pariwisata, seperti destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan menerapkan protokol kesehatan.
5. Pemanfaatan teknologi inovasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi.

Sementara itu, Pendapatan Transfer diproyeksikan tumbuh rata-rata 2.06% per tahun selama periode 2021-2026. Proyeksi ini tidak cukup optimis karena tren



BAB 3 Gambaran Keuangan Daerah

selama periode 2016-2021 menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer Kabupaten Pasaman Barat tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, setelah pandemi Covid-19, pemerintah mengambil kebijakan efisiensi dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah. Berikut secara terperinci dapat dilihat pada tabel Tabel 3.13 tentang Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.



Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No	Uraian	Penyesuaian Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	PENDAPATAN		1,200,786,164,498	1,209,104,813,333	1,234,495,265,950	1,263,243,652,830	1,290,769,894,637	1,322,551,605,629
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH		124,121,854,077	130,041,920,788	137,802,817,377	146,325,658,390	154,890,210,560	164,611,492,384
1	Pendapatan Pajak Daerah	3.17	29,990,284,077	30,940,976,082	32,440,703,488	34,092,894,126	35,714,067,000	37,581,180,982
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.17	4,683,280,000	4,860,067,976	5,533,030,595	6,332,248,002	7,073,408,394	8,032,613,498
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	5.5	7,711,660,000	8,135,801,300	9,102,168,835	10,226,608,459	11,329,500,055	12,687,600,616
4	Lain-lain PAD yang sah	4.76	81,736,630,000	86,105,075,430	90,726,914,460	95,673,907,804	100,773,235,111	106,310,097,288
B	PENDAPATAN TRANSFER		1,060,925,600,421	1,063,151,056,735	1,080,086,684,105	1,099,505,746,225	1,117,735,473,001	1,140,546,146,364
	1. TRANSFER PEMERINTAHAN PUSAT-DANA		937,214,000,421	939,315,745,135	955,089,740,265	973,136,164,767	990,158,665,700	1,011,371,806,140
1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.1	25,401,720,000	25,427,121,720	26,317,379,615	27,383,397,557	28,311,494,506	29,564,769,430
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	0.1	1,888,960,000	1,890,848,960	2,238,672,118	2,656,791,015	3,019,733,227	3,512,738,332
3	Dana Alokasi Umum	0.1	618,790,690,421	619,409,481,305	627,812,367,743	637,682,545,987	646,724,868,964	658,016,414,009
4	Dana Alokasi Khusus	0.5	291,132,630,000	292,588,293,150	298,721,320,789	305,413,430,207	312,102,569,004	320,277,884,370
	2.TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		62,711,600,000	62,774,311,600	63,355,984,375	64,043,160,697	64,647,631,989	65,447,257,679
1	Dana Penyesuaian	0.1	62,711,600,000	62,774,311,600	63,355,984,375	64,043,160,697	64,647,631,989	65,447,257,679
	3. TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		61,000,000,000	61,061,000,000	61,640,959,464	62,326,420,761	62,929,175,312	63,727,082,545
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.1	61,000,000,000	61,061,000,000	61,640,959,464	62,326,420,761	62,929,175,312	63,727,082,545



*Bab 3 - Gambaran Keuangan
Daerah*

No	Uraian	Penyesuaian Pertumbuhan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		15,738,710,000	15,911,835,810	16,605,764,468	17,412,248,214	18,144,211,075	19,078,775,455
1	Pendapatan Hibah	1.1	15,738,710,000	15,911,835,810	16,605,764,468	17,412,248,214	18,144,211,075	19,078,775,455

Sumber: BPKD Pasaman Barat (Diolah)



2. Proyeksi Belanja dan Transfer Daerah

Proyeksi belanja dan transfer daerah Kabupaten Pasaman Barat juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama lima tahun terakhir tahun 2016 hingga 2020. Kemudian proyeksi menggunakan data dasar keuangan APBD tahun 2021. Hal ini dilakukan agar proyeksi belanja dan transfer daerah Kabupaten Pasaman Barat tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan dan belanja secara keseluruhan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat pada 3.15.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang

Memperhatikan penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020, bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5 % (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4 % (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Dampaknya sudah terlihat dengan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi hingga ke angka - 1,34% pada Tahun 2020.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga beberapa tahun ke depan, baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN sepanjang tahun, atau disebut *refocusing* anggaran, berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi ataupun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN dari sisi Pendapatan Negara. Dan pada akhirnya kebijakan tersebut juga berpengaruh terhadap besaran dana transfer ke daerah sehingga menyebabkan penurunan penerimaan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020.



Tabel 3.14
Proyeksi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	Penyesuaian Pertumbuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
II	BELANJA		1,057,543,580,990	1,091,372,395,833	1,115,585,524,275	1,142,954,558,151	1,170,764,607,172	1,201,140,426,428
A	BELANJA OPERASI		876,936,491,990	904,231,462,792	921,628,787,393	946,747,923,122	972,281,975,176	1,000,355,395,901
1	Belanja Pegawai	2.50	542,125,680,000	555,678,822,000	569,570,792,550	576,177,813,744	582,861,476,383	589,622,669,509
2	Belanja Barang dan Jasa	2.50	323,329,961,990	336,842,173,792	340,113,318,503	358,486,874,793	377,197,098,687	398,367,534,844
3	Hibah	2.00	10,964,950,000	11,184,249,000	11,407,933,980	11,540,266,014	11,674,133,100	11,809,553,044
4	Bantuan Sosial	2.00	515,900,000	526,218,000	536,742,360	542,968,571	549,267,007	555,638,504
B	BELANJA MODAL		167,607,089,000	174,010,933,042	180,695,436,881	182,791,503,949	184,911,885,395	187,056,863,265
1	Belanja Tanah	2.00	-	2,092	2,134	2,158	2,184	2,209
2	Belanja Peralatan Dan mesin	2.00	57,150,530,000	58,293,540,600	59,459,411,412	60,149,140,584	60,846,870,615	61,552,694,314
3	Belanja Gedung dan Bangunan	5.00	31,398,530,000	32,968,456,500	34,616,879,325	35,018,435,125	35,424,648,973	35,835,574,901
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.00	70,324,809,000	73,841,049,450	77,533,101,923	78,432,485,905	79,342,302,741	80,262,673,453
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.00	8,718,600,000	8,892,972,000	9,070,831,440	9,176,053,085	9,282,495,300	9,390,172,246
6	Belanja Aset Lainnya	2.00	14,620,000	14,912,400	15,210,648	15,387,092	15,565,582	15,746,143
C	BELANJA TAK TERDUGA		13,000,000,000	13,130,000,000	13,261,300,000	13,415,131,080	13,570,746,601	13,728,167,261
1	Belanja Tak Terduga	1.00	13,000,000,000	13,130,000,000	13,261,300,000	13,415,131,080	13,570,746,601	13,728,167,261
D	TRANSFER		115,537,120,000	117,732,417,500	118,909,741,675	120,289,094,678	121,684,448,177	123,095,987,776
	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA		3,175,710,000	3,207,467,100	3,239,541,771	3,277,120,456	3,315,135,053	3,353,590,619
1	Bagi Hasil Pajak	1.00	2,902,090,000	2,931,110,900	2,960,422,009	2,994,762,904	3,029,502,154	3,064,644,379
2	Bagi Hasil Retribusi	1.00						



Bab 3 - Gambaran Keuangan Daerah

No.	URAIAN	Penyesuaian Pertumbuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			273,620,000	276,356,200	279,119,762	282,357,551	285,632,899	288,946,240
E	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN		112,361,410,000	114,524,950,400	115,670,199,904	117,011,974,223	118,369,313,124	119,742,397,156
1	Bantuan Kepada Nagari	1.00	112,361,410,000	113,485,024,100	114,619,874,341	115,949,464,883	117,294,478,676	118,655,094,629
2	Transfer Bantuan Keuangan	1.00	-	1,039,926,300	1,050,325,563.00	1,062,509,339.53	1,074,834,447.87	1,087,302,527.46
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER		1,173,080,700,990	1,209,104,813,333	1,234,495,265,950	1,263,243,652,830	1,292,449,055,348	1,324,236,414,204
	SURPLUS/ (DEFISIT)		(16,209,629,990)	(17,826,510,867)	(3,707,960,744)	(18,179,214,883)	(27,941,869,922)	(30,118,945,426)

Sumber: BPKD Pasaman Barat (Diolah)



Sesuai amanat Pasal 158 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Kapasitas riil keuangan Daerah dialokasikan ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 diatur sebagai berikut sebagai berikut:

- 1) Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- 2) Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- 3) Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Selain itu, untuk pendanaan indikatif pada tahun 2022 hingga 2026 sangat dipengaruhi oleh kebijakan dibidang keuangan negara yang muncul akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini. Di sisi lain Kebijakan dibidang Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belanja prioritas lainnya.

Dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:

- 1) Dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat berupa:
 - a. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ke fasilitas kesehatan; dan
 - d. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- 2) Mendukung pemerintah nagari dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melalui penyediaan anggaran sesuai dengan



kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;

- 3) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- 4) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021, dukungan pendanaan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.

3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Pasaman Barat juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah selama lima tahun terakhir tahun 2016 hingga 2020. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup penggunaan SiLPA, Penerimaan Kembali Dana Bergulir, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pembiayaan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya. Berikut adalah Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.



Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	Penyesuaian Pertumbuhan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
III	PEMBIAYAAN		83,918,710,000	66,056,722,000	53,073,607,184	49,226,130,911	45,334,023,914	41,396,768,475
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		98,418,710,000	80,701,722,000	67,865,057,184	64,189,161,731	60,470,625,891	56,708,955,036
1	Penggunaan SILPA		88,418,710,000	70,601,722,000	57,664,057,184	53,869,830,131	50,031,590,045	46,148,826,373
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	1.00	251,700,000	254,217,000	256,759,170	259,737,576	262,750,532	265,798,438
5	Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi							
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.00	9,748,300,000	9,845,783,000	9,944,240,830	10,059,594,024	10,176,285,314	10,294,330,224
7	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		14,500,000,000	14,645,000,000	14,791,450,000	14,963,030,820	15,136,601,978	15,312,186,560
1	Pembentukan Dana Cadangan							
2	Penyertaan Modal Pem. Daerah	1.00	4,500,000,000	4,545,000,000	4,590,450,000	4,643,699,220	4,697,566,131	4,752,057,898
3	Pembay. Pokok Pinj. DN Lainnya	1.00	10,000,000,000	10,100,000,000	10,201,000,000	10,319,331,600	10,439,035,847	10,560,128,662
4	Pembay. Pokok Pinj. DN Obligasi	-	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO							
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		67,709,080,010	48,230,211,133	49,365,646,440	31,046,916,028	17,392,153,992	11,277,823,049

Sumber: BPKD Pasaman Barat (Diolah)



BAB 4

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Kebijakan pembangunan daerah dilakukan bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah. Dengan ini melalui pembangunan yang berkualitas diharapkan masyarakat dapat merasakan dampaknya sehingga akan memperbaiki daya saing serta kualitas kehidupan masyarakat yang akan berakhir pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan daerah dalam proses pembangunan, maka perlu dilakukan perumusan kebijakan publik. Salah satu tahapan yang harus dilakukan di awal perumusan kebijakan publik adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*). identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) menjadi salah satu tahap awal dalam perumusan isu strategis daerah. Pada tahapan ini, analisis permasalahan pembangunan dilakukan untuk menentukan permasalahan utama yang dihadapi daerah dengan melakukan pendalaman pada akar masing-masing masalah. Analisis akar masalah dibutuhkan untuk memprediksi dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang. Dinamika lingkungan eksternal harus dikenali dengan baik untuk mengidentifikasi tantangan, peluang atau sebaliknya ancaman bagi masyarakat, sehingga rumusan isu-isu strategis pembangunan daerah menjadi solusi pembangunan strategis daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Identifikasi permasalahan pembangunan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Oleh karena itu, hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pembangunan periode RPJMD lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan dan menjadi rujukan dalam melakukan proyeksi untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, demografis, aspek kesejahteraan, aspek daya saing dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan umum serta pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2016-2019, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat yang diidentifikasi secara umum sebagai berikut:

4.1.1. Kesejahteraan Masyarakat

Pada Bab II, ditemukan beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Pasaman Barat pada aspek kesejahteraan masyarakat, yakni:

1. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk kali pertama setelah berdirinya Kabupaten Pasaman Barat, pertumbuhan ekonomi Pasaman Barat berada di angka negatif, yakni -1,34% pada tahun 2020.



Tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Menurut data statistik, menurunnya pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh penurunan di sektor pertanian, terutama sub-sektor perkebunan, industri pengolahan, dan jasa. Penutupan destinasi wisata berimbas terhadap penurunan aliran uang dan barang di sektor rumah makan dan perhotelan. Penurunan ini juga berimbas terhadap terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2020.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Rendahnya kualitas sumber daya manusia ditandai dengan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pasaman Barat dibanding kabupaten/kota lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh belum optimalnya kinerja pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

3. Tingginya Prevalensi *Stunting*

Permasalahan prevalensi *stunting* menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sejak ditetapkan sebagai lokasi prioritas penanganan *stunting* secara nasional tahun 2018. Masalah *stunting* sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Faktanya, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat masih tinggi, dan hal ini menggambarkan perlunya fokus dalam memberikan layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial bagi keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Permasalahan daerah terkait prevalensi *stunting* adalah:

- 1) Rendahnya cakupan rumah tangga yang memiliki sanitasi layak;
- 2) Belum terlaksananya kegiatan FDS Gizi dan kesehatan;
- 3) Suplementasi tablet tambah darah kepada remaja putri masih rendah;
- 4) Rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 5) Rendahnya cakupan kelas ibu hamil;
- 6) Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);
- 7) Rendahnya cakupan kelas ibu hamil;
- 8) Rendahnya partisipasi anak usia 2 - 3 tahun dan keluarga 1000 HPK di PAUD;
- 9) Rendahnya cakupan kehadiran di posyandu;
- 10) Belum terintegrasinya keseluruhan layanan sosial dasar di posyandu;
- 11) Rendahnya cakupan ibu hamil K-4;
- 12) Belum terlaksananya kegiatan parenting di PAUD maupun terintegrasi dengan posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 13) Rendahnya cakupan rumah tangga yang memiliki akses air minum layak;
- 14) Rendahnya cakupan desa yang menerapkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 15) Rendahnya cakupan kelompok BKB;
- 16) Rendahnya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- 17) Masih rendahnya kualitas data yang dihasilkan, mulai dari tingkat nagari (Laporan Konvergensi Nagari) hingga publikasi tingkat kabupaten.



Seperti disajikan pada Bab 2, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) adalah 35,10, sementara data publikasi daerah yang diperoleh dari aplikasi e-PPGBM berdasarkan hasil penimbangan massal bulan Agustus 2018, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat adalah 28,35%. Hal ini menunjukkan masih adanya *gap* dalam sistem pengukuran dan penyediaan data. Menurut Laporan e-PPGM, prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2018-2020, setelah pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* di daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkembangan Prevalensi *Stunting* (%) dan Jumlah Anak pendek dan Sangat Pendek Menurut e-PPGBM Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018-2020

No.	Tahun	Prevalensi <i>Stunting</i> (%)	Jumlah Anak Pendek dan Sangat Pendek (jiwa)
1	2018	28,35	8.091
2	2019	17,8	5.516
3	2020	21	7.599

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Data di atas menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* Kabupaten Pasaman Barat periode 2018-2020 berfluktuasi. Penurunan dan kenaikan prevalensi *stunting* secara signifikan menunjukkan masih adanya permasalahan dalam pengukuran tinggi badan anak di posyandu, baik masalah ketersediaan sarana dan prasarana penimbangan di posyandu maupun kualitas sumber daya manusia, terutama kader posyandu.

4. Belum Terwujudnya Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Permasalahan ini terlihat dari masih terjadinya ketimpangan gender dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan kenaikan selama periode 2016-2021. Namun hingga Tahun 2020, IPG Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat, bahkan berada di posisi ke-3 terendah se-Kabupaten Pasaman Barat.

Selama periode 2016-2021, Kabupaten Pasaman Barat sebenarnya telah berupaya mewujudkan pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan, melalui partisipasi dalam berbagai penilaian seperti Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Anugerah Parahita Ekapraya, dan Kabupaten Layak Anak. Namun pada kenyataannya, berbagai permasalahan yang menunjukkan ketimpangan masih terjadi, antara lain:

- a. Belum optimalnya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan masyarakat yang aman, tentram, berbudaya dan berketahanan, baik dalam memerangi kasus kejahatan, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta ketahanan dalam



menghadapi bencana, baik bencana alam maupun non-alam, seperti pandemi Covid-19 yang kita hadapi saat ini.

- b. Masih perlunya peningkatan kondisi sosial kehidupan masyarakat yang harmonis berlandaskan peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan pelestarian nilai-nilai adat dan budaya serta menjaga hubungan toleransi kehidupan bermasyarakat antar kelompok, suku, agama dan golongan serta meningkatkan hubungan kerjasama antara pengusaha dengan masyarakat sekitar.
 - c. Permasalahan pelestarian lingkungan hidup yaitu pelestarian hutan, sungai dan laut serta mitigasi terhadap bencana potensial seperti kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor dan mitigasi terhadap potensi bencana alam lainnya seperti gempa bumi dan angin putting beliung. Mitigasi bencana juga diperlukan untuk menghadapi bencana non alam yaitu pandemic Covid-19 dan dampak social ekonominya.
5. Tingginya Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Pasaman Barat masih berada di atas rata-rata Propinsi Sumatera Barat selama periode 2016-2020. Tingginya angka kemiskinan dipengaruhi multi-faktor, antara lain:

- a. Perlambatan dan bahkan penurunan sektor-sektor perekonomian berbasis pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan baik dalam upaya peningkatan produksi, pemasaran dan hilirisasi produk/komoditi unggulan.
- b. Rendahnya nilai tambah dan pendapatan petani dan nelayan, karena belum berkembangnya industri pengolahan berbasis komoditi lokal, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, karena minimnya akses terhadap permodalan dan rendahnya pemanfaatan teknologi.
- c. Terbatasnya kondisi infrastruktur transportasi dan perlunya kelanjutan pembangunan ibukota kabupaten, jalan-jalan evakuasi/mitigasi bencana, pembangunan jalan-jalan strategis yang menghubungkan antar jorong, antar nagari dan antar kecamatan serta pembangunan jalan untuk mengentaskan daerah terisolir dan daerah tertinggal.
- d. Permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan perumahan layak huni dan penuntasan kawasan dan pemukiman kumuh termasuk ketersediaan air bersih serta pembangunan kawasan-kawasan pertumbuhan.
- e. Permasalahan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi, yaitu kelanjutan pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang dan Pelabuhan Udara Pusako Anak Nagari serta penuntasan kawasan-kawasan yang masih blankspot.
- f. Rendahnya cakupan program penanggulangan kemiskinan yang diterima masyarakat miskin, terutama program yang bersifat bantuan langsung, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Esensi dari program-program yang bersifat langsung ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga sumber daya ekonomi yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.



6. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend meningkat dalam periode 2016-2021 meskipun masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Namun jika tidak diatasi segera, bisa jadi TPT Pasaman Barat akan berada di atas rata-rata propinsi suatu saat nanti. Selain itu, terdapat ketimpangan TPT antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menggambarkan bahwa peluang pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat masih didominasi oleh pekerjaan yang berorientasi kepada kaum laki-laki.

Ketimpangan penyediaan lapangan kerja di Kabupaten Pasaman Barat mempengaruhi ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Jika dilihat secara lebih dekat, faktor yang paling mempengaruhi rendahnya IPG Kabupaten Pasaman Barat adalah ketimpangan rata-rata pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan.

7. Rendahnya Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Pemanfaatan Waktu Luang, Seni Budaya, dan Olah Raga

Hal ini terlihat dari minimnya ketersediaan gedung olah raga maupun gedung kesenian. Selain itu, terdapat permasalahan data pada penilaian bidang seni budaya dan olah raga. Tidak tersedianya database yang handal terkait gedung olah raga dan sarana kesenian yang ada di masyarakat, menjadikan penilaian kinerja daerah menjadi rendah.

8. Masih Dibutuhkannya Peningkatan Reformasi Borokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Professional, Melayani dengan Memperkuat Pembangunan Pilar-Pilar Reformasi Birokrasi

Pembangunan pada aspek aparatur sipil negara, kelembagaan dan pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta akuntabilitas dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk peningkatan kemandirian nagari sebagai unit pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat masyarakat dalam koordinasi pemerintahan kecamatan.

4.1.2. Kesejahteraan Sosial

Pada Aspek Kesejahteraan Sosial, beberapa permasalahan pembangunan yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam pembangunan di masa mendatang adalah:

1. Rendahnya Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) menggambarkan keberhasilan pembangunan daerah bidang kesehatan. Faktanya, AHH Kabupaten Pasaman Barat sebesar 67,82 di tahun 2020 masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, dan tingginya laju pertumbuhan penduduk. Permasalahan tersebut berakar dari beberapa permasalahan berikut:



- a. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan terutama di daerah terpencil;
 - b. Rendahnya cakupan kepemilikan air minum aman dan sanitasi layak;
 - c. Permasalahan lingkungan dan persampahan;
 - d. Belum meratanya distribusi tenaga medis dan non-medis di fasilitas kesehatan, mulai dari Polindes, Pustu, Puskesmas, hingga rumah sakit;
 - e. Rendahnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan, karena terkendala biaya pengobatan;
 - f. Belum optimalnya program keluarga berencana;
 - g. Penurunan kunjungan di fasilitas kesehatan sebagai dampak pandemi Covid-19 yang berakibat terhadap peningkatan angka kematian.
2. Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah

Seperti disajikan pada Bab II, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pasaman Barat berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat, yakni posisi ke-13 dari 19 Kabupaten/Kota. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan belajar, terutama di jorong-jorong tertinggal;
- b. Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mulai dari PAUD hingga SLTP;
- c. Belum meratanya pelayanan pendidikan nonformal, informal, dan pembelajaran berbasis masyarakat;
- d. Berkembangnya isu kualitas belajar-mengajar dan isu kelengkapan sarana pembelajaran online pada masa Pandemi Covid-19, karena proses belajar mengajar di sekolah kemudian dipindahkan ke rumah.

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Menurut RPJPD

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir pelaksanaan RPJPD Pasaman Barat Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, RPJMD periode ini merupakan tahapan terakhir dalam mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Pasaman Barat, yakni:

1. **Penanganan Sampah** - Pola penanganan sampah yang dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar bersifat individual tidak langsung, dimana sampah dari masing-masing rumah tangga dikumpulkan lalu dibakar atau dibuang ke suatu tempat atau lubang.
2. **Mitigasi Bencana** - Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah yang berada di lintasan bencana gempa bumi dan dikelilingi oleh perbukitan, sebagian jalan berada di kawasan rawan longsor dan bencana alam. Oleh karena itu, tingkat kerusakan jalan karena bencana alam frekuensinya cukup tinggi disamping kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian manusia berupa tonase sarana angkutan yang melebihi kapasitas jalan.
3. **Pengelolaan Air Limbah** – Pengelolaan air limbah di Kabupaten Pasaman Barat hingga saat ini masih bersifat individual dengan sistem setempat (*on site system*). Sistem ini menggunakan *cubluk* dan *septic tank*, yang secara periodik perlu dilakukan penyedotan lumpurnya.



4. **Rendahnya Cakupan Pelayanan Air Bersih** – Penyediaan air bersih di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh PDAM dan Pansimas. Penyediaan air bersih oleh PDAM belum mencakupi seluruh kebutuhan masyarakat Pasaman Barat. Hal ini dikarenakan rendahnya pelayanan PDAM sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Oleh sebab itu, pada umumnya masyarakat Pasaman Barat bergantung pada pasokan air bersih yang didapat melalui sumur dan jaringan perpipaan Pansimas. Namun, jaringan perpipaan Pansimas hanya memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan yang dekat dengan sumber air.
5. **Belum Meratanya Jaringan Telekomunikasi** - Wilayah Kabupaten Pasaman Barat telah dilayani berbagai jaringan telekomunikasi, baik, jaringan telepon otomatis, jaringan telepon seluler dan radio komunikasi, namun masih ada sejumlah jorong yang belum mendapat jaringan telekomunikasi. Kondisi ini diakibatkan karena masih sulitnya akses menuju beberapa lokasi daerah tertinggal dan terisolir di kawasan Pasaman Barat. Belum meratanya akses jaringan telekomunikasi ini membutuhkan pemetaan kawasan *blankspot* merumuskan strategi pembangunan jaringan telekomunikasi di area tersebut.

Sebagian besar permasalahan jangka panjang di atas masih relevan saat ini. Oleh sebab itu, permasalahan jangka panjang daerah mestinya menjadi prioritas dalam penyelesaiannya di tahun 2021-2026.

4.1.4. Permasalahan Pembangunan Menurut Urusan Pemerintahan

Permasalahan menurut urusan pemerintahan menggambarkan permasalahan pembangunan makro seperti dibahas sebelumnya. Permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan menjadi akar masalah dari permasalahan utama pembangunan daerah. Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, permasalahan menurut urusan pemerintahan dikelompokkan menjadi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib tetapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang.

4.1.4.1 Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat salah satunya dipengaruhi oleh sektor pendidikan, yakni rendahnya rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan lama sekolah. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan adalah:

a. Belum Tercapainya SPM Bidang Pendidikan Dasar

Masih ditemuinya anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Pasaman Barat yang ditandai dengan angka partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang belum mencapai 100 persen pada tahun 2020. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat belum berhasil memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan Dasar.



b. Partisipasi Pendidikan Kesetaraan

Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan kesetaraan dihitung berdasarkan jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang sudah menamatkan atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dengan jumlah anak usia 7 sampai dengan 18 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hingga tahun 2020, kinerja pembangunan bidang pendidikan kesetaraan di Kabupaten Pasaman Barat belum terukur secara memadai. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pengelolaan data satuan pendidikan kesetaraan yang ada. Hal ini terlihat dari inkonsistensi pengukuran tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan pada tahun 2019-2020, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

No.	Uraian	2019	2020
1	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau yang sedang belajar di pendidikan kesetaraan	3.044	3.318
2	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	3.948	108.206
3	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan (%)	77.10	3

Sumber: LPPD Kab. Pasaman Barat Tahun 2019-2020

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai melakukan perhitungan SPM bidang pendidikan kesetaraan pada tahun 2019, dengan capaian seperti terlihat pada tabel di atas. Data jumlah sasaran program pendidikan kesetaraan pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan kesetaraan masih memerlukan perhatian khusus, baik dari aspek desain program maupun pengelolaan sistem data.

c. Tingginya Disparitas atau Kesenjangan antara Rata-Rata Lama Sekolah dengan Rata-Rata Harapan Lama Sekolah.

Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 8,19 tahun. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat hanya menikmati pendidikan hingga Kelas VIII (tahun kedua di SLTP). Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat belum mewujudkan pendidikan wajib dasar 9 tahun.

Sebaliknya, rata-rata harapan lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 sudah mencapai 13,61 tahun. Data ini menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang ada saat ini bisa diharapkan menikmati pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Disparitas mendekati angka 5 tahun ini



menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk meningkatkan Derajat pendidikan, baik dari segi akses maupun kualitas.

d. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2020, partisipasi PAUD tercatat sebesar 48%. Data ini menunjukkan bahwa anak usia 4-6 tahun di Kabupaten Pasaman Barat belum sampai setengahnya terdaftar di PAUD. Pendidikan anak usia dini memegang peranan penting bagi perkembangan anak kelak, karena pada tahap inilah karakter anak dibentuk. Selain itu, partisipasi pada PAUD merupakan salah satu SPM Bidang Pendidikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sama halnya dengan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Belum terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan, seperti terlihat pada evaluasi pencapaian SPM pada Bab II. Pemenuhan SPM menggambarkan kondisi pemenuhan pelayanan di berbagai aspek, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan bayi, ibu hamil, pelayanan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pemenuhan SPM juga menggambarkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana maupun SDM kesehatan.
- b. Rendahnya cakupan kepemilikan jaminan kesehatan.
- c. Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana kesehatan, antara daerah yang berkembang dan maju dengan daerah yang masih relatif tertinggal.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dan peduli dalam menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan, tergambar dari rendahnya cakupan pelayanan air minum, sanitasi, maupun persampahan.
- e. Pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap penurunan layanan kesehatan di semua aspek, terlihat dari memburuknya capaian kinerja pelayanan, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bayi, dan pelayanan kesehatan balita.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan rujukan. Cakupan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada tahun 2020 adalah 0,669. Idealnya, setiap 1000 penduduk terdapat 1 tempat tidur di fasilitas kesehatan rujukan. Akar dari permasalahan ini antara lain:
 - 1) Belum berfungsinya gedung baru RSUD Pasaman Barat di Jambak
 - 2) Belum beroperasinya RS Pratama di Ujung Gading

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a. Belum terpenuhinya SPM Bidang Air Minum. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM Air Minum di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain:
 - 1) Belum terbentuknya tim penerapan SPM Air Minum, sehingga peran lintas-sektor dalam pemenuhan SPM Air Minum belum dirumuskan dan disepakati dengan baik.



- 2) Minimnya sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan SPM.
- 3) Masih kurangnya personil yang ada untuk pendataan.
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan SPM.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana jalan, tercermin dari menurunnya cakupan jalan kabupaten dalam kondisi baik. Permasalahan ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menciptakan konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Rendahnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya.
- d. Rendahnya cakupan irigasi dalam kondisi baik.
- e. Rendahnya cakupan sanitasi layak dan pengelolaan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah yang belum berkembang dengan baik dan sehat.
- f. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan di seluruh wilayah kecamatan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah:

- a. Belum Terpenuhinya SPM Bidang Perumahan
Beberapa masalah yang dihadapi dalam pemenuhan SPM Bidang Perumahan di Kabupaten Pasaman Barat adalah:
 - 1) Tidak tersedianya alokasi anggaran untuk penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Selama periode 2016-2021 program rehabilitasi rumah tidak layak huni belum diarahkan kepada pemenuhan SPM. Program rehabilitasi rumah disediakan bagi masyarakat miskin sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan daerah.
 - 2) Tidak tersedianya alokasi anggaran dalam rangka penerapan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten.
- b. Rendahnya penanganan areal permukiman kumuh dan ketersediaan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas
Di Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas, permasalahan yang dihadapi antara lain:
 - 1) Belum tercapainya SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Tidak tercapainya SPM ini salah satunya disebabkan tidak adanya evaluasi yang memadai, karena tidak adanya sistem data yang akurat. Selain itu, Pemerintah Daerah belum menyediakan anggaran yang memadai untuk pemenuhan SPM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - 2) Keterbatasan SDM bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas, seperti PPNS dan Linmas yang handal.



- 3) Keterbatasan sarana dan prasarana bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas

b. Bidang Kebencanaan

Permasalahan di bidang kebencanaan tergambar jelas dari rendahnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Pasaman Barat. Artinya, Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki masalah dengan:

- 1) Kebijakan dan kelembagaan penanganan bencana;
- 2) Ketersediaan kajian resiko dan perencanaan terpadu;
- 3) Ketersediaan sistem informasi kebencanaan;
- 4) Ketersediaan SDM;
- 5) Ketersediaan sarana dan prasarana.

Selain itu, kerentanan terhadap bencana dipengaruhi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan dan persebaran penduduk, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Permasalahan berikutnya yang perlu menjadi perhatian di bidang kebencanaan adalah:

- 1) Pasaman Barat merupakan daerah rawan bencana, dengan kejadian bencana sepanjang tahun 2015-2020 didominasi oleh kebakaran hutan, dan adalah Banjir;
- 2) Belum tercapainya SPM Kebencanaan, khususnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Di Bidang Sosial, terdapat dua permasalahan utama yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah, yakni:

a. Minimnya Pemenuhan SPM Bidang Sosial

SPM Bidang Sosial diarahkan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti. Laporan SPM Bidang Sosial hingga Tahun 2020 menunjukkan bahwa penanganan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti masih sangat terbatas. Selain itu, penanganan yang dimaksud masih terbatas pada program pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ bantuan pangan, dan JKN, sedangkan bentuk penanganan lainnya sesuai petunjuk teknis pelaksanaan SPM belum dilaksanakan.

b. Belum Optimalnya Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Permasalahan data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan masih perlu mendapatkan perhatian. Program-program yang ada belum terukur efektivitasnya karena data-data yang ada tidak ter-update. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, pemutakhiran DTKS semestinya dilakukan secara rutin dan berjenjang mulai dari tingkat nagari.

c. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Hal ini tercermin dari minimnya keberadaan lembaga-lembaga sosial berbasis masyarakat yang bergerak di bidang penanganan masalah sosial.

d. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana daerah di bidang sosial. Misalnya, belum tersedianya LKSA;



- e. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang inklusif atau ramah bagi penyandang disabilitas pada instansi pemerintah maupun swasta.

4.1.4.2 Permasalahan Pembangunan pada Urusan Wajib Tetapi Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok sesuai kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni:

- a. Bidang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Permasalahan utama yang dihadapi adalah:
 - 1) Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Hal ini terlihat dari rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Indikator ini mulai menjadi bahan perhatian sejak Tahun 2019, setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tabel 4.3 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat	369	32
2.	Jumlah tenaga kerja keseluruhan	185.371	202.846
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,1990	0,0015

Sumber LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019-2020

Indikator ini menunjukkan banyaknya jumlah tenaga kerja terdaftar yang bersertifikat dibagi jumlah keseluruhan tenaga kerja terdaftar. Sertifikat kompetensi tentunya mempengaruhi peluang bagi tenaga kerja untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan sesuai kompetensi. Sertifikat kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, maupun lembaga kursus dan pelatihan lainnya.

- 2) Belum optimalnya sistem pendataan dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Sistem database untuk kepemilikan sertifikat kompetensi perlu mendapat perhatian. Pelatihan kompetensi tenaga kerja dilaksanakan oleh beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, maupun Pemerintah Nagari.
- b. Pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penempatan tenaga kerja. Permasalahan ini terjadi karena masih



minimnya ketersediaan informasi tentang lowongan kerja yang ada, keterbatasan jumlah bursa kerja, belum tersedianya layanan terpadu satu atap (LTSA), dan beberapa masalah lainnya.

- c. Pada Bidang Hubungan Industrial, capaian kinerja selama tahun 2019 dan 2020 sebenarnya sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:
 - 1) Kasus hubungan industrial antara perusahaan dengan pekerja masih terjadi. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10 kasus hubungan industrial dan tahun 2020 sebanyak 9 kasus, dengan tingkat penyelesaian melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial sebesar 100% pada tahun 2019, dan 81,81% pada tahun 2020. Pada tahun 2020, dilaporkan sebanyak 21 orang tenaga kerja melakukan mogok kerja, dan terdapat 9 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
 - 2) Sedikitnya jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang berpihak pada pemenuhan hak-hak pekerja. Pada tahun 2020, dari total 53 perusahaan yang memiliki tenaga kerja minimal 10 orang, hanya 7 perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan.
 - 3) Sedikitnya jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2020, sebesar 37,12% dari total perusahaan di Pasaman Barat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Pasaman Barat menempati posisi ke-3 terendah dari 19 kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu gambaran pembangunan inklusif dan berkeadilan. Hal ini ditandai dengan penurunan kasus kekerasan dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok rentan, penyediaan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta penyediaan kesempatan yang sama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Faktanya, pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Pasaman Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Masih terdapatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Rendahnya partisipasi dan kesempatan bagi perempuan dalam pembangunan, ditandai dengan ketimpangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara laki-laki dan perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di instansi pemerintahan, dan rendahnya keterwakilan perempuan di DPR.
- c. Belum optimalnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah, khususnya aspek kelembagaan. Kelembagaan PUG di Kabupaten Pasaman Barat sudah ada di organisasi perangkat daerah (OPD) sejak tahun 2014, baik dalam bentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Peran yang belum optimal ini



tergambar dari rendahnya Anggaran Yang Responsif Gender (ARG) pada APBD Kabupaten Pasaman Barat.

Pengukuran persentase ARG pada belanja langsung APBD mulai dilakukan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 4.4. Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah ARG pada belanja langsung	12.325.444.900	24.392.698.320
2.	Jumlah seluruh belanja langsung	685.574.006.055	526.913.031.110,33
3.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,80	4,63

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Ketahanan pangan Kabupaten Pasaman Barat cukup baik selama periode 2016-2021. Namun, ada permasalahan yang perlu diantisipasi, yakni:

1. Penurunan ketersediaan pangan utama, yang terjadi secara konsisten dalam lima tahun terakhir;
2. Penurunan ketersediaan energi dan protein per kapita;
3. Penyediaan sistem data yang handal dan akurat;
4. Penurunan capaian kinerja ketersediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein per kapita berbanding terbalik dengan peningkatan indeks ketahanan pangan sejak tahun 2018 hingga Tahun 2020;
5. Tidak tersedianya rancangan kebijakan ketahanan pangan/pertanian yang memadai di Kabupaten Pasaman Barat demi terwujudnya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan dengan pendanaan yang cukup.

Akar dari persoalan tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi daerah-daerah rawan pangan, menghitung produksi pangan utama yang sesungguhnya, dan memetakan luasan lahan pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah bidang pertanahan adalah:

- a. Proses sertifikasi lahan yang masih memerlukan percepatan;
- b. Selain itu, penanganan urusan pertanahan menunjukkan kecenderungan eskalasi sengketa atau kasus, seperti terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus pertanahan yang ditangani;
- c. Perlunya perbaikan sistem data. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan



Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat perlu memperhatikan pencapaian beberapa indikator hasil (*outcome*) yang tidak terukur selama tahun 2020;

d. Permasalahan Hak Guna Usaha (HGU);

HGU perkebunan kelapa sawit merupakan penguasaan lahan tertinggi, diikuti oleh HGU pertambangan besi. Setelah itu, hak guna bangunan, dan hak milik. HGU perkebunan, HGU pertambangan, dan HGB PKS merupakan lahan privat. Begitu juga dengan hak milik, baik oleh masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Berdasarkan data yang ada, belum terlihat penguasaan tanah oleh publik atau pemerintah.

HGU perkebunan kelapa sawit dimulai sejak tahun 1989 hingga tahun 2000-an. Beberapa HGU akan berakhir dalam rentang tahun 2020 dan rentang tahun 2030. Artinya, dalam masa jangka waktu pelaksanaan RTRW ini hingga tahun 2040 akan ada beberapa HGU akan berakhir. Kondisi tersebut akan mempengaruhi rencana pola ruang. HGU yang berakhir tersebut akan diperbolehkan memperpanjang HGU atau harus berakhir. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan HGU, HGU diberikan paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Setelah jangka waktu HGU dan perpanjangannya berakhir, kepada pemegang hak kemudian dapat diberikan pembaruan HGU paling lama untuk jangka waktu 35 tahun di atas tanah yang sama. Oleh karena itu, jumlah jangka waktu HGU dengan dua kali perpanjangan adalah 95 tahun. Apabila dikaitkan dengan masa tanam komoditas kelapa sawit dan karet, jangka waktu 95 tahun tersebut dapat disamakan hampir 4 kali masa tanam kedua komoditas.

Berdasarkan tabel HGU Perkebunan di Kabupaten Pasaman Barat, HGU dominan akan berakhir di bawah tahun 2040, hanya 1 perusahaan yang berakhir pada tahun 2044. Dikaitkan dengan pengembangan kegiatan industri pengolahan kepala sawit, maka perlu dilakukan perpanjangan HGU dalam rangka mempertahankan kapasitas produksi TBS dan CPO yang dibutuhkan untuk industri pengolahan. Pengembangan kawasan industri pengolahan kelapa sawit dapat menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan HGU. Namun, bila pengembangan industri pengolahan kelapa sawit bukan prioritas, maka perpanjangan HGU dapat ditolak.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Pasaman Barat dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup adalah:

- a. Di bidang persampahan. Pengelolaan persampahan merupakan salah satu permasalahan jangka panjang daerah, namun hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik. Permasalahan utama persampahan di Pasaman Barat adalah rendahnya kapasitas pengelolaan sampah. Akar dari permasalahan ini antara lain:



- 1) Minimnya ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan. Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat belum dapat melaksanakan program daur ulang karena belum mempunyai alat untuk proses daur ulang. Untuk penanganan dan pengurangan sampah, Kabupaten Pasaman Barat hanya mempunyai 1 Bank Sampah Induk dan 1 Bank Sampah Mandiri Binaan yaitu Bank Sampah Buah Basamo yang berlokasi di Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Selain itu, pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan Program TPS3R di empat kenagarian yang berlokasi di empat kecamatan sebagai langkah untuk penanganan dan pengurangan sampah di Kabupaten Pasaman Barat;
 - 2) Tidak tersedianya TPA yang memenuhi syarat;
 - 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik. Sampah dibuang di pekarangan rumah, tanah kosong, pinggir jalan dan saluran drainase, sekitar pasar, dan sungai/ kali. Jenis sampah terdiri atas sampah domestik dan sampah kegiatan pasar. Pengelolaan sampah dilakukan dengan dibakar dan dibiarkan begitu saja tanpa diolah. Prasarana pengumpulan di kawasan permukiman dan pengangkutan sampah belum ada;
- b. Di bidang lingkungan hidup, masalah utama yang teridentifikasi adalah belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.5
Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2019	2020
1.	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	13	13
2.	Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	15	14
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	86,67	92,86

Sumber: LPPD Kabupaten Pasaman Barat 2016-2020

Izin Lingkungan merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemilik usaha dan/atau kegiatan yang mengatur upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan apabila terjadi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Faktanya, belum semua pemilik usaha menaati ketentuan terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH. Selain itu keharusan bagi Kabupaten Pasaman Barat untuk mempersiapkan dokumen



perencanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang juga perlu sinkronisasi dengan propinsi dan nasional.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan. Namun demikian, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi:

- a. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat terendah, yakni nagari. Dengan demikian, masyarakat tidak harus ke Simpang Empat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini tentunya akan menghemat banyak waktu, tenaga, dan biaya;
- b. Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai hingga ke tingkat nagari. Gangguan jaringan masih kerap menjadi masalah, karena masih ada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet;
- c. Penyediaan sistem otomatis (*auto-print*) bagi layanan administrasi kependudukan tertentu. Layanan *auto-print* dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan dan antrian panjang di loket pelayanan. Namun, diperlukan investasi sarana dan prasarana yang cukup besar agar layanan ini tersedia dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan memastikan ketersediaan program/kegiatan, anggaran, dan data yang akurat untuk mendukung capaian kinerja;
- d. Rendahnya Kepemilikan Kartu Identitas Anak, yakni Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA. Berdasarkan LPPD Pasaman Barat Tahun 2020, baru 30.477 (21,62%) dari 40.941 anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA. Capaian ini masih belum mencapai target nasional;
- e. OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih sangat rendah. Pada Tahun 2020, dari 40 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat, baru 3 (7,5%) OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Pemanfaatan data kependudukan dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat;

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pasaman Barat dinyatakan keluar dari status Daerah Tertinggal pada Tahun 2019. Demikian juga di tingkat nagari. Hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada lagi nagari



berstatus Tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kinerja Kabupaten Pasaman Barat di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, terutama setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain:

- a. Pemutakhiran Indeks Desa Membangun dilakukan berbasis 19 (sembilan belas) nagari definitif. Sesuai petunjuk teknis pemutakhiran IDM, pengukuran jarak yang menunjukkan akses ke fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelayanan umum lainnya dilakukan menggunakan Kantor Wali Nagari sebagai titik tumpu. Pada kenyataannya, sebagian besar Kantor Wali Nagari bertempat di Ibukota Kecamatan, sehingga pengukuran IDM tidak menggambarkan akses yang sesungguhnya, karena banyak pemukiman penduduk yang sebenarnya jauh dari ibukota kecamatan;
- b. Pemekaran nagari masih berproses hingga tahun 2021. Jika pemekaran nagari berhasil dan dilakukan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) kembali, maka akan didapatkan gambaran status ketertinggalan nagari secara lebih akurat;
- c. Meski tidak ada lagi nagari berstatus tertinggal, hingga tahun 2020, belum ada satupun nagari di Kabupaten Pasaman Barat yang mencapai status mandiri. Nagari Aua Kuniang dan Lingsuang Aua menunjukkan skor IDM tertinggi dan berpotensi untuk didorong agar mencapai status mandiri;
- d. Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan nagari yang dapat mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak tercapai secara optimal;
- e. Masih kurang dan lemahnya lembaga-lembaga kemasyarakatan nagari dalam membantu meningkatkan IDM;
- f. Masih lemahnya kualitas pengelola lembaga-lembaga ekonomi nagari dalam meningkatkan produk-produk unggulan nagari guna meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli nagari.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kinerja pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dipercepat dengan mendorong pencapaian indikator terkait, yakni:

- a. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa;
- c. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan;
- d. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2020, angka kelahiran total (TFR) Pasaman Barat adalah 3,05. Artinya, wanita usia subur (usia 15-49 tahun) di Kabupaten Pasaman Barat rata-rata mempunyai 3 hingga 4 orang anak. Tingginya TFR mencerminkan menunjukkan



masih banyaknya wanita yang menikah di usia muda, rendahnya tingkat pendidikan, serta rendahnya status sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan beberapa permasalahan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Pasaman Barat:

- a. Belum optimalnya program keluarga berencana (KB). Angka TFR yang tinggi, yakni 3,05% dapat disebabkan oleh beberapa akar masalah yang teridentifikasi, antara lain:
 - 1) Rendahnya pemakaian kontrasepsi modern (mCPR). Pada tahun 2019, hanya 46% pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Pasaman Barat menggunakan KB modern;
 - 2) Tingginya *unmet need*, yakni 29% pada tahun 2019;
 - 3) Tingginya *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) usia 15-19 tahun. Menurut LPPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019, ASFR usia 15-19 tahun di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 38,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya untuk menaikkan rata-rata usia perkawinan masih harus ditingkatkan;
 - 4) Minimnya pengetahuan masyarakat, terindikasi dari rendahnya persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE). Pada tahun 2020, dilaporkan bahwa hanya 11,63% masyarakat yang menjadi sasaran program KKBPK (advokasi dan KIE) yang terpapar isi pesan program tersebut.
- b. Belum optimalnya program pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga, tercermin dari rendahnya partisipasi KB pada keluarga tri-bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia). Kepesertaan BKB sendiri pada tahun 2019 tercatat 37,10%, dan meningkat menjadi 53,31% pada tahun 2020.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, data perhitungan ratio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang melewati Kabupaten Pasaman belum tersedia. Hal ini dikarenakan tingkat kepadatan lalu lintas dan kendaraan yang melewati jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional yang melintasi Kabupaten Pasaman Barat relatif rendah, sehingga belum diprioritaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan data dimaksud.

Pada periode pembangunan tahun 2021-2026, nilai atau ratio tersebut akan menjadi indikator kinerja utama urusan perhubungan sesuai dengan penjabaran program kerja urusan perhubungan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Angka dan ratio panjang jalan terhadap kendaraan yang melewatinya diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Nilai ini berguna untuk menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Kejadian kecelakaan lalu lintas masih terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, dengan pengurangan yang tidak begitu signifikan. Artinya, kinerja pemerintah daerah dalam pengamanan lalu-lintas masih perlu dioptimalkan. Pelaksanaan



urusan perhubungan mestinya diarahkan untuk mencapai perbaikan kinerja dalam pelayanan angkutan darat, laut, dan udara. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, indikator yang akan tetap menjadi acuan dalam mengukur kinerja pembangunan di bidang perhubungan antara lain:

a. Konektivitas Kabupaten

Pada tahun 2020, konektivitas Kabupaten Pasaman Barat dilaporkan terdapat 3 jenis konektivitas sendiri, yaitu bagaimana kemudahan masyarakat menuju tempat yang diinginkan dengan indikator jarak tempuh, waktu tempuh dan kemudahan mendapatkan angkutan umum. Beberapa indikator ini bisa dihitung dengan mengukur nilai alpha, beta dan gama dengan masing-masing indikator dan nilai maksimal yang berbeda-beda.

Untuk mempercepat peningkatan konektivitas kabupaten, beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- 1) Menyediakan fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C. Kabupaten Pasaman Barat memiliki 5 terminal penumpang angkutan jalan Tipe C, namun belum ada yang memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan.
- 2) Meningkatkan cakupan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor. Tahun 2020, dilaporkan bahwa dari 4.628 kendaraan wajib uji, baru 2.512 (54%) yang sudah melalui pengujian. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah mengadakan 1 (satu) unit mobil pelayanan keliling, namun belum berfungsi dengan baik.

b. V/C Ratio di Jalan Kab/Kota

V/C ratio adalah satu kinerja dari jalan dimana dapat diartikan volume per kapasitas, volume sendiri diambil dari kondisi lalu lintas yang ada, sedangkan sekarang di Kabupaten Pasaman Barat belum pernah dilakukan pengukuran V/C ratio di jalan kabupaten. Hingga tahun 2020, pengukuran V/C ratio di jalan Kabupaten Pasaman Barat belum dilakukan secara memadai, karena minimnya ketersediaan data. Untuk mendapatkan data V/C ratio, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Pelaksanaan survey setiap tahun sehingga dapat melihat kinerja jalan dan dapat dilakukan penanggulangan apabila dalam indikator V/C ratio tersebut sudah di atas ambang batas;
- 2) Pendataan inventarisasi jalan sehingga data kapasitas jalan yang diinginkan dapat diketahui. Pemenuhan terhadap ketersediaan data kapasitas jalan ini dimanfaatkan untuk penyusunan kebutuhan Pasaman Barat terhadap peningkatan kapasitas jalan, sehingga penanganan jalan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jalan.

c. Angkutan umum

Pesatnya perkembangan teknologi dan informatika membuat masyarakat cenderung lebih memilih untuk menggunakan angkutan umum dibandingkan



angkutan tradisional. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan. Pasaman Barat sendiri saat ini hampir memiliki semua moda transportasi seperti angkutan darat, angkutan udara dan angkutan lainnya. Untuk dapat mengefisiensikan moda yang ada dibutuhkan beberapa pengembangan seperti:

- a) Angkutan darat - perlu tersedianya aplikasi online moda transportasi darat, seperti GOJEK atau yang lainnya yang dapat mengakomodir pengusaha angkutan lokal, ojek dan sebagainya;
- b) Angkutan laut - perlu adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyeberangan di Air Bangis sehingga sarana dan prasarana dapat terpelihara dan pola penyeberangan lebih terstruktur;
- c) Angkutan udara – pengelolaan bandar udara perlu diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sehingga dapat berkembang lebih pesat sesuai dengan master plan yang sudah ada. Penyerahan pengelolaan bandar udara kepada pihak kementerian akan menguntungkan masyarakat sekitar bandar udara karena dapat memanfaatkan *aerocity* di sekitar bandara.

d. Dokumen Perencanaan

Kebutuhan dokumen perencanaan untuk pengembangan sektor transportasi di sangat penting dimiliki oleh Dinas Perhubungan. Ketersediaan dokumen perencanaan sektor perhubungan dapat dijadikan pedoman dalam *forecasting* pembangunan dan pengembangan sektor transportasi sehingga pemerintah dapat menyiapkan solusi terhadap permasalahan transportasi. Berikut beberapa dokumen perencanaan transportasi yang wajib dimiliki daerah:

- 1) Membuat Rencana induk Lalu Lintas dan angkutan jalan;
- 2) Membuat kajian-kajian teknis dalam manajemen rekayasa lalu lintas;
- 3) Membuat kajian-kajian teknis dalam sektor PAD.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Selama tahun 2016-2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat masih berada pada tahap inisiasi untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk mencapai tujuan ini, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) pada organisasi perangkat daerah. Meski sudah ditetapkan setiap tahunnya sejak tahun 2014, peran kelembagaan PPID masih belum terlihat, dibuktikan dengan minimnya informasi publik yang terklasifikasi dan terakses dengan baik di website daerah. Selain itu, data perangkat daerah pada sub-domain tidak ter-update secara teratur;
- b. Semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat sudah terlayani akses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, namun perangkat daerah ini belum memiliki layanan publik yang terintegrasi antar perangkat daerah;
- c. Minimnya pemberdayaan masyarakat bidang komunikasi dan informatika. Penyebaran informasi publik, seperti kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah lebih banyak mengandalkan media sosial, seperti *Facebook*, *YouTube*, atau *WhatsApp* yang dikelola perangkat daerah yang



menangani urusan komunikasi dan informatika. Sebaliknya, peran kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tidak begitu terlihat, sehingga penyebaran informasi publik belum secara komprehensif dilakukan oleh perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan komunikasi dan informatika.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak difokuskan pada pembinaan kelembagaan dan kapasitas SDM, karena keterbatasan anggaran dan SDM yang ada. Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Pasaman Barat semestinya juga diarahkan pada pengembangan kapasitas (*capacity building*) dan pengembangan usaha, sehingga koperasi yang ada menjadi lebih sehat dan produktif, dan usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah:

- a. Belum optimalnya upaya pengembangan koperasi;
Pengembangam perkoperasian semestinya tidak hanya difokuskan pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), namun diarahkan pada pembinaan kapasitas, pengembangan SDM, skala usaha, dan permodalan.
- b. Belum optimalnya pembinaan usaha mikro;
Pemberdayaan usaha mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sementara itu, pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil. Namun indikator peningkatan skala usaha ini belum terukur secara memadai hingga tahun 2020, sehingga pembinaan usaha mikro belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Tidak tersedianya sistem data yang handal dan akurat;
Upaya pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro mestinya didukung dengan ketersediaan sistem data (*database*) yang handal, sehingga kinerja perekonomian bidang koperasi dan usaha mikro dapat diukur dengan baik setiap tahunnya. Upaya untuk mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas mulai dilaksanakan pada tahun 2019, namun pengukuran belum didukung dengan sistem data yang memadai. Selain itu, pengukuran kinerja peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil juga belum dilaksanakan secara menyeluruh. Indikator ini mestinya mengukur jumlah usaha mikro yang berkembang skala usahanya, sehingga memenuhi syarat sebagai usaha kecil.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal mencakup investasi dan pelayanan perizinan terpadu. Nilai investasi di Kabupaten Pasaman Barat meningkat dalam periode 2016-2021, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai investasi secara signifikan. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan urusan penanaman modal di Kabupaten Pasaman Barat:

- a. Kinerja penanaman modal belum terpantau secara optimal, sehingga tidak semua perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal



- (LKPM) secara tepat waktu. Rendahnya penyampaian LKPM juga dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan para investor. Saat ini, pemerintah memang telah menyediakan sistem pelaporan LKPM online, namun pemanfaatan sistem ini belum secara maksimal digunakan oleh para investor;
- b. Upaya promosi investasi, khususnya tahun 2020, terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Sebagai akibat pandemi Covid-19, banyak *event-event* promosi dan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa ditiadakan;
 - c. Di bidang pelayanan perizinan terpadu, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya SDM handal di bidang perizinan, serta ketergantungan terhadap jaringan internet di daerah;
 - d. Pada periode 2021-2026, capaian bidang penanaman modal difokuskan pada nilai investasi, yakni nilai investasi yang didaftarkan oleh investor pada saat mengurus izin usaha. Penggunaan nilai investasi sebagai dasar penghitungan nilai investasi, maka penghitungan nilai investasi dapat dilakukan secara akurat meskipun baru terlaksana untuk tahun-tahun tertentu saja.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka isu strategis bidang penanaman modal adalah optimalisasi peningkatan investasi melalui pemanfaatan media komunikasi dan informasi. Penyediaan sistem pelayanan investasi dan perizinan secara online mestinya didukung dengan penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur komunikasi yang mumpuni.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Bidang Kepemudaan;
Kinerja pembangunan di bidang kepemudaan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, dan bahkan cenderung menurun. Hal ini terlihat dari kurangnya partisipasi organisasi pemuda dalam pembangunan maupun kegiatan-kegiatan sosial. Beberapa masalah yang teridentifikasi, antara lain:
 - 1) Minimnya informasi yang diterima masyarakat tentang peran dan prestasi pemuda yang telah ada selama ini;
 - 2) Belum ada sistem *reward* bagi pemuda-pemuda yang aktif, sehingga minat dan antusiasme pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan cenderung berkurang;
 - 3) Belum optimalnya pembinaan bagi organisasi kepemudaan baik yang berbasis masyarakat maupun satuan pendidikan.

Selama periode 2016-2021, kinerja pembangunan bidang kepemudaan semestinya diarahkan untuk mendorong pemuda berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kinerja pemerintah daerah bidang kepemudaan akan diukur melalui:

- 1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri;
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pemuda di usia 16-30 tahun yang berwirausaha dengan total jumlah pemuda di suatu wilayah.



Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 125 pemuda yang berwirausaha dari total 122.654 penduduk usia 16-30 tahun di Kabupaten Pasaman Barat (0,102%). Angka ini masih jauh dari yang diharapkan, ditambah lagi RPJMD Propinsi Sumatera Barat menargetkan penambahan wirausaha millenial sebanyak 100.000 selama periode 2021-2026. Pemuda Kabupaten Pasaman Barat semestinya berkontribusi aktif dalam mewujudkan pemuda-pemuda yang produktif dan aktif.

- 2) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial;

Indikator ini membandingkan jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibanding jumlah seluruh pemuda di suatu daerah. Pada tahun 2020, dari 122.654 penduduk usia 16-30 tahun, tercatat sebanyak 4.853 (3,96%) sebagai anggota aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial.

- b. Bidang Olah Raga;

Di bidang olah raga, permasalahan yang teridentifikasi adalah penambahan jumlah klub olah raga aktif tidak sebanding dengan pertambahan prestasi bidang olah raga, khususnya di tahun 2020. Akar dari permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Belum optimalnya pembinaan kepada atlet;
- 2) Sarana dan prasarana keolahragaan yang belum memadai;
- 3) Rendahnya minat masyarakat di bidang keolahragaan, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa;
- 4) Belum terwujudnya inklusivitas bidang keolahragaan. Hingga saat ini, Kabupaten Pasaman Barat belum menyediakan sarana dan prasarana olah raga yang inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyediaan data statistik menjadi sangat urgen sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan program prioritas. Selama periode 2016-2021, urusan statistik masih belum optimal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan data. Berbagai permasalahan yang teridentifikasi, antara lain:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi;
Sebagian organisasi perangkat daerah sudah memiliki sistem data statistik yang dikelola oleh perangkat daerah secara mandiri. Namun, sistem data tersebut belum terintegrasi, sehingga aksesibilitas data oleh masyarakat atau instansi pemerintah di luar instansi pemilik data masih sangat terbatas.
- b. Belum optimalnya peran kelembagaan data di daerah;
Pemerintah Kabupaten memiliki Forum Data. Terbentuknya forum ini akan dapat memaksimalkan pelaksanaan gerakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pasaman Barat.

Pengelolaan sistem data dan statistik tidak hanya sebatas keberadaan sistem data, namun sudah diarahkan kepada pemanfaat data-data tersebut untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13



Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kinerja pemerintah daerah bidang statistik diukur melalui:

- a. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
Indikator ini membandingkan jumlah OPD yang menggunakan data statistik untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan jumlah seluruh OPD. Pada tahun 2020, dilaporkan sebanyak 23 OPD dari total 31 OPD yang ada atau sebesar 74,19% perangkat daerah yang telah menggunakan data statistik untuk perencanaan.
- b. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;
Capaian indikator ini sama dengan capaian indikator persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, yakni sebesar 74,19% pada tahun 2020.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Selama periode 2016-2021, belum ada satupun organisasi perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi. Penggunaan sandi bertujuan untuk pengamanan informasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat keamanan informasi di daerah diukur dengan indeks KAMI.

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi. Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi, yaitu (a) tata kelola keamanan informasi, (b) pengelolaan resiko keamanan informasi, (c) kerangka kerja keamanan informasi, (d) pengelolaan asset informasi dan (e) teknologi dan keamanan informasi. Hingga Tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat belum melakukan penilaian indeks KAMI.

Tingkat ketersediaan data keluaran (*output*) untuk mendukung pengamanan informasi pemerintah daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Capaian Bidang Persandian Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No.	Uraian	Capaian Tahun 2020
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Nihil
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	1,6% (1 dari 64 Sistem Elektronik yang ada)



No.	Uraian	Capaian Tahun 2020
3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Nihil
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Nihil

Rendahnya capaian kinerja bidang persandian disebabkan oleh berbagai permasalahan, antara lain kurangnya SDM yang kompeten di bidang persandian, dan belum tersedianya sarana dan prasarana persandian yang memadai.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak difokuskan kepada pengelolaan kebudayaan, cagar budaya, dan seni tradisional. Namun, hasil dari pembinaan dan pengelolaan keragaman budaya tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Begitu juga dengan cagar budaya yang dilestarikan, Pasaman Barat belum memiliki cagar budaya yang berhasil terdaftar ke tingkat propinsi maupun nasional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2016-2021, antara lain:

- Tidak tersedianya database kebudayaan, lembaga adat dan budaya, seni tradisional, dan sejarah kepurbakalaan yang handal dan akurat, untuk digunakan secara bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait;
- Kurangnya SDM yang mumpuni untuk melakukan pengelolaan database dan pembinaan lembaga adat, seni, budaya, dan kepurbakalaan.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Salah satu daya dorong terhadap naiknya kunjungan perpustakaan daerah adalah lokasi strategis pustaka daerah. Meskipun pustaka daerah berlokasi di pusat ibukota kabupaten, namun tingkat kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat masih tergolong rendah. Terdapat beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan urusan perpustakaan, antara lain:

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan. Gedung Pustaka Daerah masih terintegrasi dengan gedung kantor, sehingga ruang yang tersedia masih sangat terbatas;
- Keterbatasan koleksi buku di perpustakaan;
- Keterbatasan koleksi digital;
- Belum optimalnya layanan perpustakaan digital. Selain itu, sistem kunjungan pustaka secara virtual belum terbangun dan tersosialisasi dengan baik. Jumlah pemustaka yang dihitung masih terbatas pada kunjungan fisik;
- Perpustakaan yang ada di nagari dan dimasyarakat belum dioptimalkan fungsinya;
- Keterbatasan sumber daya manusia, misalnya, belum ada pustakawan profesional yang mengelola perpustakaan daerah.



Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penilaian kinerja pemerintah daerah bidang perpustakaan tidak lagi sebatas peningkatan jumlah pengunjung. Namun, kinerja perpustakaan akan diukur dari aspek *outcome* atau hasil, yakni:

a. Tingkat kegemaran membaca masyarakat

Penilaian tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan melalui *survey* tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019, tingkat kegemaran membaca masyarakat Pasaman Barat adalah 42,5, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 52,98. Peningkatan kegemaran membaca masyarakat dapat dilakukan dengan:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan koleksi perpustakaan;
- 2) Meningkatkan ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat;
- 3) Menyediakan tenaga perpustakaan yang profesional;
- 4) Memenuhi standar kelayakan fasilitas perpustakaan; dan
- 5) Melakukan kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat.

b. Pembangunan Literasi Masyarakat

Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dinilai untuk pertama kalinya, dengan skor 20,05. Nilai indeks yang sangat rendah ini dipengaruhi oleh beberapa persoalan, antara lain:

- 1) Belum optimalnya akuisisi naskah kuno/alih media yang terdaftar di daerah. Tahun 2020, tercatat 63 akuisisi naskah kuno;
- 2) Belum adanya naskah kuno yang dialihaksara dan alih bahasa, karena memang belum ada yang diidentifikasi;
- 3) Tidak adanya koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan/terdaftar di Perpustakaan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan selama periode 2016-2021, namun masih ada sejumlah permasalahan yang ditemui, antara lain:

- a. Minimnya ketersediaan sarana kearsipan. Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki depo arsip, sehingga arsip-arsip statis yang ada di organisasi perangkat daerah lainnya belum bisa dikumpulkan di satu depo;
- b. Minimnya ketersediaan SDM kearsipan yang profesional di seluruh PD;
- c. Kurangnya kepedulian dan kesadaran tentang pentingnya arsip.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka kinerja kearsipan mesti diarahkan pada:

- a. Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional. Pada tahun 2019, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Kabupaten Pasaman Barat adalah 60,45 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 66,55.
- b. Peningkatan keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk



kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

4.1.4.3 Permasalahan Pembangunan pada Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan berpengaruh cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, karena banyaknya penduduk di wilayah pesisir yang mengandalkan sektor ini sebagai sumber mata pencaharian utama. Namun, selama periode 2016-2021, terlihat trend penurunan produksi, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Beberapa masalah yang teridentifikasi di sektor kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Rendahnya kapasitas nelayan, terutama nelayan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan nelayan kecil masih membutuhkan perhatian lebih.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan maupun budidaya ikan.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan ikan pasca panen.
- d. Rendahnya diversifikasi usaha nelayan, sehingga sebagian besar nelayan hanya mengandalkan sumber mata pencaharian dari penangkapan ikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Jumlah kunjungan wisatawan di destinasi wisata unggulan daerah masih tergolong rendah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini belum optimal didapatkan. Sementara pajak hotel menjadi salah satu penyumbang PAD sektor pariwisata. Namun, tingkat hunian hotel di Pasaman Barat relatif masih rendah, karena jumlah wisatawan luar yang berkunjung ke Pasaman Barat sangat rendah.

Ada beberapa permasalahan yang teridentifikasi pada sektor pariwisata, yakni:

- a. Destinasi wisata Pasaman Barat tidak terkonsentrasi pada satu kawasan, sehingga pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata belum optimal dilakukan. Luasnya wilayah Kabupaten Pasaman Barat juga berpengaruh sehingga banyak objek wisata yang ada di Pasaman Barat tersebar di banyak tempat.
- b. Jarak Kabupaten Pasaman Barat yang cukup jauh dari ibukota provinsi menjadikan sektor pariwisata sulit berkembang. Saat ini sebagian besar pengunjung adalah wisatawan lokal, sementara kunjungan wisatawan luar Pasaman Barat relatif masih sangat sedikit.
- c. Belum berkembangnya objek wisata minat khusus. Objek wisata minat khusus seperti Gunung Talamau dan Danau Laut Tinggal berpotensi mendatangkan wisatawan dari luar daerah Kabupaten Pasaman Barat. Eksplorasi objek wisata minat khusus yang dapat dikembangkan di Pasaman Barat, seperti potensi Geopark Talamau (taman bumi berbasis warisan geologi, nature, kultur dan sejarah).
- d. Kurangnya SDM bidang pariwisata, seperti Kelompok Sadar Wisata.



- e. Kurang gencarnya promosi wisata Pasaman Barat. Informasi tentang lokasi wisata Pasaman Barat belum dikemas sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, informasi objek wisata Pasaman Barat baru dipromosikan pada *event-event* pariwisata berskala lokal. Oleh sebab itu, perlu dibangun pola promosi dengan memanfaatkan secara intensif teknologi dan informasi.
- f. Perlunya penyesuaian dan update Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR KAB/KOTA) dan penyesuaian dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Master Plan Geopark Talamau sebagai landasan dalam kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pasaman Barat.
- g. Inovasi dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kreatif dengan kultur (budaya) dan kearifan lokal yang berkembang dimasyarakat.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

a. Sub-Sektor Tanaman Pangan

Secara keseluruhan, produksi komoditi sub-sektor tanaman pangan mengalami penurunan, terutama selama periode 2019 dan 2020. Komoditi yang mengalami penurunan produksi paling signifikan adalah jagung. Produksi jagung pada tahun 2018 turun dari 367.865 ton menjadi 311.576 ton pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 kembali turun menjadi 262.510 ton. Produksi komoditi ubi jalar juga turun secara signifikan selama dua tahun terakhir.

Permasalahan lainnya di sub-sektor tanaman pangan adalah penurunan produktivitas yang terjadi selama periode 2016-2021. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sub-sektor tanaman pangan, antara lain:

- 1) Rendahnya kapasitas petani, terutama petani yang mengandalkan sistem pertanian tradisional;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian;
- 3) Keterbatasan sarana distribusi hasil pertanian, seperti jalan usaha tani;
- 4) Belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun Gapoktan;
- 5) Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah, karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani;
- 6) Masalah ketersediaan pupuk;
- 7) Konversi lahan;
- 8) Belum optimalnya sistem irigasi.

b. Sub-Sektor Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren naik secara konsisten dalam lima tahun terakhir, terutama populasi sapi potong dan kambing. Sebaliknya, populasi unggas mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019, namun sedikit berkurang pada tahun 2020. Pengurangan populasi unggas sepertinya tidak cukup berpengaruh terhadap kontribusi sub-sektor peternakan terhadap PDRB Pasaman Barat, karena PDRB dari sub-sektor ini masih tumbuh sebesar 0,73% pada Tahun 2020.



c. Sub-Sektor Perkebunan

Perkebunan menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB Pasaman Barat. Selama tahun 2016-2021, produksi sektor perkebunan sebenarnya mengalami peningkatan untuk sebagian besar komoditi, kecuali kakao, dan kelapa dalam. Sementara itu, produksi komoditi andalan, yakni kelapa sawit, tetap tumbuh secara konsisten, meskipun angka tertinggi sebenarnya dicapai pada Tahun 2018, yakni 2.881.261 ton.

Namun, data statistik menunjukkan bahwa PDRB dari sub-sektor perkebunan pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan negatif, yakni -2,41%. Hal ini berdampak besar terhadap pertumbuhan sektor pertanian yang juga negatif, yakni -1,29. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat diasumsikan bahwa kontribusi negatif dari sub-sektor perkebunan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan produksi dari komoditi perkebunan ternyata tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap PDRB. Beberapa permasalahan yang dihadapi di sektor perkebunan antara lain:

- 1) Rendahnya kapasitas petani, terutama petani kebun, terutama petani tradisional;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana perkebunan;
- 3) Keterbatasan sarana distribusi hasil pertanian, seperti jalan produksi;
- 4) Belum optimalnya fungsi penyuluh pertanian, kelompok tani, kelompok wanita tani, maupun Gapoktan;
- 5) Rendahnya akses para petani terhadap program pemerintah, karena masih banyaknya masalah dalam kelembagaan tani;
- 6) Ketidakstabilan harga komoditi perkebunan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Namun, PDRB sektor perdagangan berkembang cukup lambat selama periode 2016-2021 meski terlihat tren peningkatan. Ada beberapa masalah yang perlu diatasi khususnya di sektor perdagangan, antara lain:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan, terutama pasar. Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki pasar induk, karena sebagian besar pasar di Pasaman Barat berstatus sebagai pasar nagari, sehingga pengelolaannya dilakukan oleh nagari;
- b. Tidak tersedianya kawasan perdagangan berskala kabupaten;
- c. Belum optimalnya perlindungan konsumen. Selain belum berfungsinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pasar-pasar tradisional yang ada belum memenuhi standar pasar tertib ukur. Hal ini terlihat dari data tahun 2020, bahwa dari 5.867 potensi UTTP wajib tera dan tera ulang di Kabupaten Pasaman Barat, hanya 157 UTTP (0,027%) yang memiliki tanda tera yang masih berlaku;
- d. Belum optimalnya pendaftaran perusahaan dagang yang ada. Tidak tersedia data yang memadai tentang berapa jumlah perusahaan yang semestinya mengurus SIUP.



5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Peran sektor industri terhadap perekonomian Kabupaten Pasaman Barat semakin melemah selama periode 2016-2021. Sebaliknya, penambahan unit usaha Industri Kecil dan Menengah belum mampu memberi daya dorong yang memadai terhadap perekonomian. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor industri di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain:

- a. Minimnya pembinaan terhadap para pelaku industri kecil dan menengah, sehingga pelaku IKM yang ada mengalami kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya;
- b. Belum tersedianya rencana pembangunan industri yang disusun berdasarkan analisa mendalam terhadap potensi industri di Kabupaten Pasaman Barat
- c. Kurangnya kesadaran bagi para pelaku IKM untuk mendaftarkan usahanya, sehingga banyak IKM tidak terpapar dengan program pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait semestinya menjadi salah satu indikator kinerja organisasi perangkat daerah yang menangani urusan ini.

4.1.4.4 Permasalahan Pembangunan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Kualitas perencanaan pada organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan trend perbaikan selama periode 2016-2021. Pada Tahun 2020, sebanyak 72,34% dari seluruh OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sudah mendapat predikat baik berdasarkan indikator yang ditetapkan. Namun, angka ini belum mencapai target kinerja yang diharapkan. Beberapa kendala yang dialami dalam mewujudkan perencanaan yang profesional di Kabupaten Pasaman Barat antara lain:

- a. Belum terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) baru diberlakukan tahun 2021 untuk perencanaan Tahun 2022. Selama tahun 2016-2021, proses perencanaan masih dilaksanakan secara manual;
- b. Kurangnya kualitas SDM perencanaan di instansi pemerintah. Siklus mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat ikut mempengaruhi kualitas perencanaan, karena seringnya pergantian pejabat perencana di OPD;
- c. Belum optimalnya sistem evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan. Sejalan dengan proses perencanaan, proses evaluasi juga masih dilakukan secara manual;
- d. Belum optimalnya sistem *reward and punishment* dalam perencanaan.

2. Unsur Keuangan

Kinerja pelaporan keuangan daerah sudah cukup baik selama periode 2016-2021, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat selalu mendapatkan opini



Wajar Tanpa Pengecualian (BPK) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2020, PAD hanya menyumbang 9,90% terhadap total pendapatan daerah.

Ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, antara lain:

- a. Masih banyaknya sumber-sumber pendapatan daerah yang belum dioptimalkan, baik pajak daerah maupun retribusi.
- b. Kurangnya SDM dan sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan realisasi PAD;
- c. Minimnya kajian tentang potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

3. Unsur Kepegawaian serta Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tentunya diperlukan ASN yang cakap dan mumpuni di bidangnya, yakni PNS yang profesional, handal, dan netral. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Pasaman Barat masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain:

- a. Belum tersedianya *Merit System* sesuai ketentuan. Akibatnya, upaya untuk melakukan pemetaan, penilaian, kinerja, dan pengembangan kompetensi ASN masih sangat terbatas;
- b. Jumlah pegawai belum terdistribusi sesuai beban kerja;
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur, terlihat dari rendahnya persentase ASN yang menamatkan jenjang pendidikan minimal S1;
- d. Penempatan pejabat struktural belum sepenuhnya memenuhi unsur kompetensi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja;
- e. Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya;
- f. Masih terbatasnya jumlah ASN, terutama pada bidang-bidang yang memerlukan keahlian khusus.

4. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Kontribusi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pasaman Barat masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah, yakni:

- a. Minimnya ketersediaan SDM bidang penelitian dan pengembangan. Bahkan hingga tahun 2020, belum ada satu pun tenaga fungsional peneliti di Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga penelitian. Dewan Riset Daerah yang sudah dibentuk pada Tahun 2018 belum memberikan kontribusi yang optimal dalam memberikan saran dan kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang pengawasan berperan utama dalam Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Peran APIP sangat sentral dalam mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Hingga tahun 2020,



Kabupaten Pasaman Barat mencapai nilai SAKIP B untuk pertama kalinya. Namun nilai ini masih relatif rendah dibanding kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Salah satunya permasalahannya adalah rendahnya kematangan SPIP Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun 2020, Kematangan SPIP Pasaman Barat adalah 2 dari indeks 5. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Rendahnya kapabilitas APIP
Pada tahun 2020, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pasaman Barat masih di Level 2. Hal ini menunjukkan kalau kapabilitas APIP Pasaman Barat masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas saja, jumlah APIP yang ada belum memadai, dibanding jumlah objek pengawasan yang ada, belum lagi jangkauan wilayah yang luas hingga ke tingkat nagari. Pada Tahun 2020, Kabupaten Pasaman Barat baru memiliki 7 (tujuh) orang pejabat fungsional P2UPD dan 17 (tujuh belas) tenaga auditor;
- b. Rendahnya kesadaran organisasi perangkat daerah dalam menerapkan sistem pengendalian internal;
- c. Belum terbangunnya sistem pengendalian internal yang handal dan terintegrasi.

4.1.5. Daya Saing Daerah

Daya saing daerah Kabupaten Pasaman Barat masih relatif rendah, terutama dalam dua tahun terakhir. Beberapa indikator aspek daya saing daerah menunjukkan penurunan secara signifikan. Beberapa permasalahan daya saing daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- 1) Iklim investasi belum kondusif;

Meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah mengupayakan berbagai cara dalam mempermudah proses perizinan investasi, namun iklim investasi cenderung menurun karena pengaruh dari peningkatan angka kriminalitas. Kurangnya rasa aman sangat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di suatu daerah.

- 2) Rendahnya daya saing sumber daya manusia;

Dependency Ratio cenderung membaik, namun daya saing SDM masih rendah karena sebagian penduduk yang menamatkan pendidikan minimal Diploma 1 masih sangat rendah, yakni 5,07% pada tahun 2020. Rendahnya daya saing sumber daya manusia akan mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau kemampuan mengelola usaha dengan baik.

4.1.6. Pembangunan Berkelanjutan

Pada Bab II disajikan bahwa dari total 220 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Kabupaten Pasaman Barat baru berhasil merealisasikan 76 indikator atau sebesar 34%, sedangkan 84 indikator atau sebesar 38% indikator TPB belum mencapai target. Beberapa masalah yang dihadapi dalam implementasi TPB di Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- 1) Permasalahan tujuan pembangunan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Pasaman Barat:



- a) Peningkatan timbunan sampah;
 - b) Masih minimnya pengelolaan sampah;
 - c) *Illegal logging*;
 - d) Narkoba;
 - e) Bencana (banjir, genangan, abrasi, daya tampung drainase);
 - f) Banyaknya DAS yang rusak karena kegiatan *illegal mining*;
 - g) Belum tercapainya SPM air bersih;
 - h) Alih fungsi lahan;
 - i) Maraknya *illegal mining*;
 - j) Penurunan kualitas air sungai;
 - k) Pencemaran udara, di lingkungan sekitar pabrik yang berdampak terhadap GRK;
 - l) Belum terjaminnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat kurang mampu;
 - m) Permasalahan ekonomi masyarakat akibat Covid-19.
- 2) Ketersediaan Data
- Berdasarkan analisis, sebanyak 54 indikator TPB (25%) tidak bisa diukur karena tidak tersedia data sesuai definisi operasional pengukuran capaian TPB. Ketersediaan data merupakan masalah yang perlu disikapi, karena jika data tidak tersedia, maka capaian pembangunan tidak bisa diukur dengan baik. Akibatnya, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang dirancang menjadi lebih mahal.

4.2. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai. Identifikasi isu-isu strategis Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama pembangunan. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah, apalagi Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki pekerjaan rumah yang berat di bidang ini. Peningkatan kualitas SDM mesti dilakukan sejalan antara bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

- a. Isu strategis di bidang pendidikan secara rinci adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, yang selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 - 2) Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana belajar;
 - 3) Meniadakan segala macam pungutan bagi orang tua siswa;
 - 4) Re-distribusi tenaga pendidik dan kependidikan;
 - 5) Peningkatan kualitas belajar dengan menerapkan teknologi informasi, serta mendorong minat baca masyarakat.



- 6) Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - 7) Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan perlu mendapat perhatian lebih, karena dua bidang pendidikan yang mengampu SPM ini masih mendapat perhatian minim.
 - b. Isu strategis di bidang kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Secara rinci, isu strategis bidang kesehatan adalah:
 - 1) Peningkatan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan dan pengobatan gratis;
 - 2) Memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak;
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau hingga ke tingkat kejurongan;
 - 5) Re-distribusi tenaga medis dan non-medis;
 - 6) Percepatan operasionalisasi RSUD Pasaman Barat dan RSUD Pratama Ujung Gading;
 - 7) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD;
 - 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penanganan *stunting*;
 - 9) Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - 10) Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
 - 11) Promosi gemar berolahraga dan prestasi keolahragaan.
2. Percepatan Penanganan *Stunting*

Penanganan *stunting* merupakan isu strategis nasional bahkan global, karena *stunting* sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Penanganan *stunting* melibatkan peran multi-sektor karena sektor kesehatan (gizi spesifik) hanya menyumbang 30% terhadap kejadian *stunting* sedangkan 70% lagi dipengaruhi oleh gizi spesifik, yakni pola asuh, lingkungan, kondisi ekonomi, dan ketahanan pangan.

Percepatan penanganan *stunting* dilakukan melalui delapan Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* di daerah, dan Kabupaten Pasaman Barat telah menerapkannya sejak tahun 2019. Penanganan *stunting* melibatkan peran sejumlah OPD yang bertanggung jawab dalam penanganan gizi spesifik dan gizi sensitif. Isu strategis penanganan *stunting* di Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Intervensi gizi spesifik yang mencakup gizi, komunikasi dan informasi tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), penanganan penyakit menular pada 1000 HPK (ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun), bayi di bawah 5 tahun, dan remaja putri;
- b. Pemenuhan air minum dan sanitasi layak, yang dilakukan melalui pemenuhan SPM bidang air minum dan sanitasi;
- c. Pemenuhan jaminan sosial, seperti JKN, bantuan pangan non tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan yang diprioritaskan pada keluarga 1000 HPK miskin;
- d. Peningkatan cakupan edukasi, *parenting* atau pengasuhan bagi keluarga 1000 HPK melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



- e. Peningkatan partisipasi keluarga 1000 HPK pada program Bina Keluarga Balita (BKB);
 - f. Peningkatan ketahanan pangan, yakni Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - g. Pemenuhan administrasi kependudukan, terutama Akte Kelahiran pada anak usia 0-18 tahun, yang menjadi prasyarat bagi pengurusan administrasi di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - h. Percepatan integrasi 10 (sepuluh) layanan dasar di Posyandu;
 - i. Implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku dalam penanganan *stunting* mulai dari tingkat nagari hingga tingkat kabupaten;
 - j. Peningkatan sinkronisasi, kolaborasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan *Stunting* mulai dari tingkat nagari hingga Kabupaten;
 - k. Peningkatan kualitas data dan sistem manajemen data.
3. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana alam dan non alam (pandemi Covid-19) beserta pengendalian dampak sosial ekonominya. Bencana alam dapat menghambat pembangunan sekaligus menghambat akses penduduk terhadap pelayanan publik. Selanjutnya, bencana non-alam Covid-19 terbukti telah memberikan dampak yang buruk terhadap kinerja pembangunan daerah, bukan hanya karena berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, namun juga memburuknya capaian indikator di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.
 4. Peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat, melalui peningkatan pengamalan ajaran agama, penerapan nilai-nilai budaya dalam masyarakat, pemenuhan SPM bidang kebencanaan dan ketenteraman dan ketertiban umum, pencegahan dan penanganan konflik, penegakan peraturan daerah, pemberdayaan peningkatan peran serta kepemudaan dan lembaga masyarakat, serta memerangi segala macam tindak diskriminatif terhadap wanita, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Upaya ini juga perlu didukung dengan peningkatan kerjasama dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, antara suku, agama dan golongan dan dengan dunia usaha.
 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan menjadi isu yang sangat relevan, terutama karena dampak pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aspek perekonomian masyarakat. Isu strategis penanggulangan kemiskinan selanjutnya dirinci sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum bidang Sosial;
 - b) Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan miskin;
 - c) Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
 - d) Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu;
 - e) Pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial;
 - f) Penyediaan sarana dan prasarana umum, sarana sosial, dan pendidikan yang inklusif (ramah bagi lansia, penyandang disabilitas, maupun anak).
 - g) Penyediaan sistem data yang handal dan akurat;



- h) Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yang aktif dan menjalankan fungsinya dengan baik, mulai dari tingkat terendah (nagari) hingga tingkat kabupaten.
6. Percepatan penurunan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perlindungan terhadap tenaga kerja secara berkeadilan. Penyediaan kesempatan kerja yang sama antara laki-laki dan perempuan mesti mendapat perhatian.
7. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Pasaman Barat terutama ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, dan industri. Oleh sebab itu, untuk mendorong tumbuhnya perekonomian daerah, maka tiga sektor ini mesti mendapat perhatian khusus. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dapat didorong melalui:

 - a) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dan komoditi peternakan;
 - b) Peningkatan produksi dan pengolahan komoditi perikanan;
 - c) Hilirisasi komoditi unggulan untuk peningkatan nilai tambah;
 - d) Peningkatan keberdayaan kelembagaan petani, koperasi, usaha mikro, sektor jasa perdagangan, perdagangan;
 - e) Pengembangan pariwisata ekonomi kreatif;
 - f) Membangun iklim investasi yang dapat mendorong tumbuhnya perekonomian daerah secara lebih cepat.
8. Pembangunan infrastruktur secara berkeadilan.

Konektivitas wilayah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Daerah-daerah tertinggal mendapatkan akses yang kurang terhadap sarana dan prasarana perekonomian, sehingga arus barang dan jasa menjadi terhambat. Upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah perlu didukung dengan berbagai upaya, seperti:

 - a) Peningkatan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah, transportasi dan telekomunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik
 - b) Pembangunan sarana air bersih, kawasan permukiman dan kawasan pertumbuhan
 - c) Pengentasan daerah tertinggal dan daerah terisolir;
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi; dan
 - f) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.
9. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
Isu strategis peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani selanjutnya dirinci sebagai berikut:
 - a) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang bersih dan profesional;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi (*e-government*).



Pada Tahun 2020, Indeks Kepuasan Masyarakat IKM) di bidang pelayanan publik di Kabupaten Pasaman Barat mencapai rata-rata 82,59. Sayangnya, penilaian IKM baru dilakukan pada empat OPD pemberi layanan, yakni:

Tabel 4.7. Nilai IKM Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020

No	OPD	Nilai
1	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,15
2	RSUD	75,99
3	Capil	82,23
4	BKD	87,00
	Rata-Rata	82,59

Idealnya, penilaian IKM dilakukan pada semua OPD, termasuk Kecamatan, Puskesmas, dan Pemerintahan Nagari, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

- c) Penyederhanaan birokrasi, perampingan struktur organisasi;
- d) Penguatan sistem pengawasan internal;
- e) Penguatan sistem inovasi daerah untuk pelayanan publik;
- f) Penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis data dan informasi yang handal dan akurat;
- g) Penyediaan sistem data daerah yang handal dan akurat.

10. Percepatan pemenuhan SPM;

Analisa pada Bab II maupun analisis permasalahan di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat belum berhasil memenuhi SPM di seluruh bidang, terutama di Tahun 2020. Pemenuhan SPM semestinya menjadi prioritas pada seluruh organisasi perangkat daerah pemegang SPM.

11. Peningkatan daya saing daerah;

Daya saing daerah di Kabupaten Pasaman Barat, baik di bidang ekonomi, iklim investasi, dan kualitas SDM, perlu menjadi perhatian. Untuk mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, maka daerah harus memiliki daya saing, sehingga bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Peningkatan daya saing daerah dapat dilakukan melalui percepatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

12. Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs);

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan hasil dari kesepakatan internasional. Pelaksanaan TPB di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilakukan dengan mendorong program yang berorientasi pada TPB di nagari dan memprioritaskan program/kegiatan yang sejalan dengan



Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

TPB pada OPD terkait. Selain itu, evaluasi pencapaian TPB/SDGs mestinya didukung dengan data-data yang akurat.



Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Tabel 4.8. Strukturisasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan pertumbuhan ekonomi	Masih tingginya angka kemiskinan	1) Perlambatan sektor-sektor perekonomian berbasis pertanian
			2) Rendahnya nilai tambah dan pendapatan petani dan nelayan karena: a. Belum berkembangnya industri pengolahan berbasis komoditi lokal, perdagangan, koperasi dan usaha mikro. b. Minimnya akses terhadap permodalan dan rendahnya pemanfaatan teknologi.
			3) Masih terbatasnya kondisi infrastruktur transportasi dan perlunya kelanjutan pembangunan ibukota kabupaten, jalur evakuasi, jalan-jalan penghubung antar jorong, antar nagari dan antar kecamatan serta daerah terisolir dan tertinggal.
			4) Permasalahan kawasan dan pemukiman kumuh termasuk ketersediaan air bersih dan pembangunan kawasan pertumbuhan.
			5) Permasalahan infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi yaitu kelanjutan pembangunan pelabuhan teluk tapang dan pelabuhan udara pusako anak nagari serta penuntasan kawasan-kawasan yang masih <i>blankspot</i> .
			6) Belum terwujudnya kedaulatan pangan;
			7) Lemahnya sistem perlindungan sosial dan penanganan PPKS;
			8) Belum optimalnya Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro;
			9) Keterbatasan infrastruktur (Jalan, jembatan);
			10) Belum berkembangnya sektor Industri dan perdagangan;
			11) Belum berkembangnya sektor pariwisata;
		Meningkatnya pengangguran terbuka	1) Rendahnya kualitas tenaga kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja; 2) Rendahnya penanaman modal, sehingga lapangan kerja terbatas;
2	Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	Belum terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1) Belum Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Belum Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif; 3) Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas; 4) Rendahnya kontribusi PAD; 5) Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 6) Rendahnya kapabilitas APIP.



Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			7) Belum terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi 8) Belum optimalnya sistem evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan 9) Belum optimalnya sistem penataan kearsipan 10) Masih rendahnya keberdayaan masyarakat nagari
		Belum terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	1) Rendahnya kualitas SDM dan profesionalitas ASN 2) Belum optimalnya peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) 3) Belum ada layanan publik yang terintegrasi antar-OPD 4) Minimnya pemberdayaan masyarakat bidang komunikasi dan informatika
		Belum terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1) Kontribusi penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pasaman Barat masih sangat terbatas 2) Minimnya inovasi dalam pelayanan publik 3) Rendahnya replikasi inovasi 4) Minimnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik
3	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya pelayanan bidang pendidikan	1) Belum Tercapainya SPM Bidang pendidikan dasar 2) Partisipasi Pendidikan Pendidikan Kesetaraan masih rendah 3) Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah 4) Rendahnya Tingkat Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 5) Rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
		Rendahnya Derjat Kesehatan Masyarakat	1) Rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2) Rendahnya kepemilikan air minum dan sanitasi 3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak a. Rendahnya cakupan kelas ibu hamil b. Rendahnya cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) c. Rendahnya cakupan kelas ibu hamil d. Rendahnya partisipasi anak usia 2 - 3 tahun dan keluarga 1000 HPK di PAUD e. Rendahnya cakupan kehadiran di posyandu f. Belum terintegrasinya keseluruhan layanan sosial dasar di Posyandu g. Rendahnya cakupan ibu hamil K-4 h. Belum terlaksananya kegiatan parenting di PAUD maupun terintegrasi dengan Posyandu dan BKB i. Suplementasi tablet tambah darah kepada remaja putri masih rendah



Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			4) Permasalahan gizi dan ketahanan pangan 5) Pandemi Covid-19 berkontribusi terhadap penurunan layanan kesehatan di semua aspek 6) Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas kesehatan rujukan. Cakupan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada tahun 2020 adalah 0,669. Idealnya, setiap 1000 penduduk terdapat 1 tempat tidur di fasilitas kesehatan rujukan. Akar dari permasalahan ini antara lain: a) Belum berfungsinya gedung baru RSUD Pasaman Barat di Jambak b) Belum beroperasinya RS Pratama di Ujung Gading
		Belum Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang	1) Belum optimalnya program pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga 2) Belum optimalnya program keluarga berencana (KB)



BAB 5

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat periode 2021-2026. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan, sasaran, dan kebijakan, dan diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat tentunya juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang dapat mempengaruhi keberhasilan program-program pembangunan di masa mendatang.

Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera"

Visi ini mewakili harapan dan impian seluruh lapisan masyarakat Pasaman Barat untuk memperoleh kehidupan yang bermartabat, masyarakat yang mengamalkan ajaran agama dan menjunjung tinggi adat dan budaya lokal, serta masyarakat yang sejahtera dan setidaknya setara dengan masyarakat di daerah lainnya di Propinsi Sumatera Barat atau bahkan di dunia. Dari pernyataan visi tersebut, ada beberapa kata kunci yang menjadi penekanan, yakni: Masyarakat yang Bermartabat, Masyarakat yang Agamais, dan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera.

1) Pasaman Barat Yang Bermartabat

Secara harfiah, martabat berarti harkat kemanusiaan atau harga diri. Artinya, bermartabat berarti mempunyai harga diri. Martabat merupakan hak setiap orang untuk dihormati, dihargai, dan diperlukan secara etis, sehingga tidak melukai harga diri orang tersebut. Konsep martabat sangat penting di bidang etika, hukum moralitas, dan politik, karena martabat merupakan hak yang melekat pada diri setiap orang. Istilah 'bermartabat' juga dapat mendeskripsikan cara seseorang bertindak atau berperilaku.

Visi untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat memiliki makna yang sangat mendalam. Masyarakat yang bermartabat berarti masyarakat yang dihormati, diperlakukan secara etis dan setara dengan masyarakat lainnya di Propinsi Sumatera Barat maupun di Indonesia secara umum. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat yang bermartabat diukur dengan kemampuan pemerintah untuk memposisikan Kabupaten Pasaman Barat dengan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemampuan pemerintah untuk mengelola pemerintahan secara efektif, transparan, efisien, kinerja yang baik, pengendalian internal secara profesional. Selain itu, upaya untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat ditandai dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah diakses, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).



2) Pasaman Barat Yang Agamais

Agamais mengandung makna yang mendalam, terkait pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Pernyataan visi ini merupakan wujud impian masyarakat untuk menikmati tatanan kehidupan yang berlandaskan ajaran agama. Kabupaten Pasaman Barat memiliki masyarakat yang heterogen, terdiri dari tiga suku besar, yakni Minangkabau, Mandahiling, dan Jawa. Demikian juga dengan keyakinan. Sebagian besar masyarakat beragama Islam, dan sebagian lagi menganut agama Kristiani.

Masyarakat yang agamais diwujudkan dengan sebuah tatanan kehidupan di mana setiap masyarakat dapat menjalankan ajaran agamanya dengan bebas, tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, terwujud sebuah masyarakat yang heterogen dan memiliki toleransi yang tinggi. Upaya mewujudkan masyarakat yang agamais juga didukung dengan penerapan norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat serta kearifan lokal yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram.

Memang, tidak mudah untuk menentukan ukuran tercapainya masyarakat yang agamais. Namun, ada beberapa indikator yang dapat mencerminkan tercapainya tujuan tersebut. Misalnya adalah masyarakat di mana rumah ibadah diramaikan oleh para penganutnya, terdapatnya lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama yang aktif mensyiarkan ajaran agama, dan terdapatnya event-event keagamaan dengan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dari masyarakat.

Sementara itu, masyarakat yang aman dan tenteram bisa terwujud dari rendahnya tingkat kejahatan di masyarakat, rendahnya praktek-praktek yang merugikan seperti penyakit masyarakat, kebiasaan gotong royong, tingginya filantropi masyarakat, dan terciptanya masyarakat dengan ketahanan sosial budaya yang tinggi.

3) Pasaman Barat Yang Maju dan Sejahtera

Pernyataan visi untuk menciptakan masyarakat yang maju dan sejahtera mengandung implikasi yang sangat luas. Masyarakat maju dan sejahtera merupakan impian semua orang. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Barat periode 2005-2025. Tahun 2021-2026 merupakan periode terakhir untuk pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Oleh sebab itu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengusung visi yang sama untuk pembangunan Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

Masyarakat Maju dan Sejahtera tercermin dari banyak indikator, seperti tingkat kemiskinan yang rendah, penurunan ketimpangan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah, peningkatan pendapatan masyarakat, pembangunan yang merata dan inklusif (berkeadilan dan dinikmati oleh semua orang), kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan publik, pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam, dan sebagainya. Namun demikian, investasi dan komitmen yang diperlukan untuk mewujudkan impian ini juga paling besar.



5.2. Misi

Adapun misi pembangunan Pasaman Barat dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, dikelompokkan secara garis besar dalam 3 (tiga) misi berikut:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan inovatif;
- 2) Membangun Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing; dan
- 3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif.

Misi tersebut dimaknai sebagai nilai fundamental dari beberapa poin misi, sebagai berikut :

- 1) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing;
- 2) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;
- 5) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT;
- 6) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olah raga pemuda Pasaman Barat;
- 7) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran);
- 8) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih;
- 9) Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah;
- 10) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;
- 11) Membangun jalan yang menghubungkan kejurongan yang berada di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan;
- 12) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut;
- 13) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat;
- 14) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut;
- 15) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan;
- 16) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;
- 17) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat ;
- 18) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda;
- 19) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketentraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat;
- 20) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan;
- 21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;



- 22) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurangan transmigrasi;
- 23) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industry rumah tangga;
- 24) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai.

Untuk mempermudah perumusan arah kebijakan dan program prioritas daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan, 24 (dua puluh empat) poin misi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 (tiga) misi, yang memiliki benang merah dengan kata kunci pada pernyataan misi pembangunan. Pengelompokan misi dilakukan berdasarkan misi yang memiliki arah dan tujuan yang selaras, seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1. Penjabaran Kata Kunci Visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Kata Kunci Visi	Poin Misi	Misi
A. Masyarakat Yang Bermartabat	1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional dan melayani;	1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif
B. Masyarakat Yang Agamais	2) Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;	2) Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing
	3) Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT;	
	4) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran);	
	5) Mewujudkan cita-cita masyarakat yang dapat menikmati kenyamanan dan ketenteraman tinggal di Pasaman Barat dan domisili Pasaman Barat;	
C. Masyarakat Yang Maju dan Sejahtera	6) Membangun SDM yang mampu mandiri dan memiliki daya saing;	
	7) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan;	
	8) Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat;	
	9) Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda;	



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

	10) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan;	
	11) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;	3) Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif
	12) Membangun hubungan yang harmonis dengan partai pengusung dan partai lainnya, sehingga Nampak sinergi yang baik dalam melaksanakan pembangunan di Pasaman Barat;	
	13) Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih;	
	14) Membangun irigasi guna menunjang percontakan sawah;	
	15) Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;	
	16) Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut	
	17) Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat dan pemerintah;	
	18) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurangan transmigrasi;	
	19) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga;	
	20) Membangun jalan yang menghubungkan kejurangan yang berada di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan;	
	21) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;	
	22) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mampu menunjang prestasi olah raga pemuda Pasaman Barat;	
	23) Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai;	
	24) Meningkatkan upaya menjaga kelestarian hutan, sungai dan laut;	



1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Inovatif

Untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, maka misi yang diusung oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2021-2026 adalah mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan inovatif. Tata kelola yang dimaksud termasuk pengelolaan internal pemerintahan secara profesional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan internal pemerintah mencakup pengelolaan birokrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya finansial, pengawasan internal. Birokrasi yang bersih hanya akan tercipta jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Birokrasi yang bersih dan efisien juga terwujud dari sistem kerja dan kelembagaan yang efektif, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal.

Sementara itu, pelayanan publik yang berkualitas terwujud dari sistem pelayanan publik yang ringkas, efektif, dan bebas biaya. Hal ini juga hanya dapat diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan teknologi informasi, ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan profesional, serta tersedianya dukungan regulasi yang jelas. Inovasi dari lembaga pemerintahan maupun masyarakat mesti didorong untuk mempercepat tercapainya birokrasi dan pelayanan publik yang profesional.

2) Membangun Sumber Daya Manusia Yang Beriman dan Bertaqwa, Berbudaya, dan Berdaya Saing

Untuk mewujudkan visi masyarakat yang agamais, maka misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2021-2026 adalah membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya dihitung secara angka-angka dari jenjang pendidikan yang ditamatkan atau nilai akademis semata. Namun, keimanan dan ketaqwaan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari tidak kalah pentingnya.

Pembangunan sumber daya manusia dipengaruhi pembentukan masyarakat yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya. Maknanya adalah mengoptimalkan hal-hal baik yang selama ini sudah terjadi di masyarakat Pasaman Barat. Sebagian besar penduduk Pasaman Barat berasal dari suku Minangkabau. Seperti diketahui, budaya Minangkabau memiliki falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Dengan kata lain, nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau sebenarnya sangat relevan dengan visi untuk menciptakan masyarakat yang agamais.

Agar masyarakat bisa menjalankan ajaran agamanya, maka diperlukan suatu lingkungan yang aman dan tentram, bebas dari ancaman kejahatan, tindakan diskriminatif, perlakuan yang tidak manusiawi, serta ketidakadilan. Lingkungan yang aman memberikan rasa tenang bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya. Keamanan dan ketentraman juga dipengaruhi oleh ketahanan masyarakat dalam menghadapi situasi-situasi ekstrim, seperti kondisi bencana alam, bencana non-alam, konflik sosial, dan bahkan perubahan iklim. Masyarakat yang tangguh ditandai dengan minimnya korban dan kerugian ekonomis yang



ditimbulkan oleh kondisi-kondisi ekstrem tersebut.

Pasaman Barat memiliki beberapa daerah rawan bencana. Sepanjang garis pantai Barat merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana gempa dan tsunami. Sementara itu, sepanjang daerah aliran sungai rawan terhadap bencana banjir, dan ada sejumlah daerah yang rawan gerakan tanah. Resiko bencana dapat dikelola dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan dapat dimitigasi dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai, dan menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh terhadap bencana. Pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dilakukan dengan menerapkan pembangunan yang memperhatikan daya dukung daya tampung dan mematuhi pemanfaatan ruang yang sudah ditetapkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah.

Selanjutnya, infrastruktur kebencanaan perlu dibenahi, mengingat luasnya rentang kendali wilayah. Sarana dan prasarana mitigasi bencana dan tanggap darurat mesti disediakan sesuai karakteristik masing-masing daerah. Demikian juga dengan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-bencana, harus dilakukan secara terintegrasi, bukan hanya memperhatikan aspek fisik seperti infrastruktur dan perumahan yang rusak, namun juga rehabilitasi kondisi fisik, psikis, dan emosional korban bencana.

Hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram adalah bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai adat dan budaya sangat relevan dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram, penuh toleransi dan gotong royong. Adat dan budaya Minangkabau, Mandahiling dan Jawa memiliki keistimewaan masing-masing. Jika disatukan dalam sebuah tatanan masyarakat yang damai dan toleran, akan menjadi sebuah modal sosial yang kuat dalam pembangunan.

Kualitas sumber daya manusia secara global diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hingga tahun 2019, IPM Kabupaten Pasaman Barat masih berada di bawah rata-rata Propinsi Sumatera Barat maupun nasional. Oleh sebab itu, misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat relevan dalam rangka mewujudkan visi menciptakan masyarakat Pasaman Barat yang maju dan sejahtera selama periode 2021-2026.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui tiga aspek pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Di bidang pendidikan, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat adalah rata-rata lama sekolah, yakni jumlah rata-rata tahun masyarakat menikmati pendidikan, dan rata-rata usia harapan hidup masyarakat. Di bidang kesehatan, ukuran keberhasilan pembangunan adalah rata-rata harapan hidup masyarakat. Sedangkan di bidang ekonomi, ukuran yang digunakan adalah rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat.

Misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dicapai dengan mewujudkan pembangunan yang inklusif, yakni memperhatikan kondisi dan potensi penduduk, kondisi dan potensi alam, prinsip keadilan, dan kesetaraan



gender. Salah satu upayanya adalah dengan menyediakan layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis bagi semua lapisan masyarakat. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama dalam pembangunan, karena bisa menjadi motor-motor penggerak aktivitas ekonomi di daerah.

3) Mewujudkan Perekonomian Yang Tangguh, Berdaya Saing, dan Inklusif

Perekonomian yang tangguh dan berdaya saing adalah kunci mewujudkan visi masyarakat yang maju dan sejahtera. Kemiskinan dan ketimpangan adalah dua isu utama yang harus menjadi perhatian dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing. Ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses sumber daya keuangan dan lemahnya sumber daya manusia menjadi penghambat terciptanya perekonomian yang tangguh.

Perekonomian yang tangguh diukur dengan persentase penduduk miskin, distribusi pendapatan, dan tingkat ketimpangan di sebuah daerah. Selain mendorong aktivitas ekonomi melalui koperasi dan usaha mikro, pemerintah juga harus memberikan dukungan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang perekonomian. Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki sejumlah daerah (jorong) yang sulit di akses dengan kendaraan roda 4. Hal ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian rakyat.

Selain itu, Kabupaten Pasaman Barat memiliki topografi yang bermacam-macam. Pasaman Barat memiliki wilayah pantai, memiliki wilayah perkebunan yang sangat luas, dan memiliki daerah pegunungan. Karakteristik perekonomian masyarakat di daerah-daerah ini tentunya berbeda-beda, sehingga memerlukan strategi pengembangan ekonomi yang berbeda-beda pula.

Perekonomian Pasaman Barat ditopang oleh sektor pertanian secara khusus, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Selain itu, sektor perikanan juga memberikan sumbangan yang berarti. Jalan-jalan ke lokasi pertanian masyarakat perlu dibenahi, sehingga hasil pertanian bisa didistribusikan keluar dalam keadaan yang masih baik dan berkualitas. Demikian juga dengan hasil perikanan. Selain membenahi infrastruktur dari lokasi sentra penghasil ikan, perhubungan laut juga memainkan peran penting. Dua aspek ini harus menjadi perhatian pemerintah.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki infrastruktur yang cukup potensial untuk memperlancar arus keluar-masuk barang dan jasa, yakni Bandara Pusako Anak Nagari dan Pelabuhan Teluk Tapang. Kedua infrastruktur besar ini perlu dioptimalkan pemanfaatannya, sehingga memberikan daya dorong yang besar bagi pengembangan ekonomi lokal.

Lembaga-lembaga ekonomi mikro perlu mendapat perhatian, baik dari aspek permodalan maupun pembinaan kelembagaan. Produk pertanian, perkebunan, dan buah-buahan akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian daerah jika didistribusikan keluar dalam bentuk produk jadi atau setengah jadi. Untuk itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif untuk mengundang investasi ke Pasaman Barat, terutama perusahaan yang nantinya akan mengolah bahan mentah hasil produk lokal menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Investasi baru



akan membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja di daerah. Dampak jangka menengah yang diharapkan adalah berkurangnya pengangguran dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemulihan kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19 menjadi isu yang perlu diperhatikan dalam lima tahun ke depan. Diperlukan strategi yang tepat, sehingga dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalisir. Penyediaan bantuan sosial atau bantuan langsung bagi masyarakat hanyalah solusi sementara. Sebaliknya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penguatan tatanan sosial dan ekonomi masyarakat akan memberikan dampak jangka panjang.

Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mesti direalisasikan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat membahayakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang secara ketat, sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat merusak keberlanjutan lingkungan hidup dapat diminimalisir dan dihindarkan.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dapat didefinisikan sebagai penjabaran visi dan misi. Secara harfiah, tujuan berarti sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pemerintahan, tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan dalam jangka waktu tertentu dan merupakan suatu hal yang akan dicapai melalui pembangunan. Tujuan idealnya bersifat kuantitatif dan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan.

Sementara itu, sasaran menggambarkan tingkat-tingkat atau tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran bersifat lebih konkret dan operasional. Periode waktunya lebih spesifik, lebih terukur, dan lebih spesifik. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan mesti bersifat SMART, yakni:

- a) *Specific*, atau spesifik. Perencanaan pembangunan idealnya menghindari hal-hal yang bersifat umum. Tujuan yang hendak dicapai harus jelas dan spesifik.
- b) *Measurable*; tujuan yang hendak dicapai harus bisa diukur, dan memiliki ukuran yang jelas. Dengan demikian, di akhir periode pembangunan, bisa dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan.
- c) *Action-Oriented*; Orientasi pada tindakan maknanya adalah bahwa tujuan yang dirumuskan harus bisa dilaksanakan.
- d) *Realistic*. Penentuan target pencapaian tujuan harus realistis, yakni mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan untuk mencapainya,
- e) *Timely*; Maknanya adalah bahwa harus ada penentuan waktu yang jelas kapan sebuah tujuan akan dicapai dan tahapan-tahapan dalam pencapaiannya.

Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. **Misi ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif**

Tujuan 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif

Sasaran:

1.1.1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel



1.1.2. Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif

1.1.3. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

2. Misi ke-2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing

Tujuan 2: Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh

Sasaran:

2.1. Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya

2.2. Masyarakat yang rukun dan berkeadilan

2.3. Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana

Tujuan 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Sasaran:

3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

3.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

3.3. Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas

3. Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif

Tujuan 4: Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan

Sasaran:

4.1. Pengentasan kemiskinan

4.2. Perluasan Kesempatan Kerja

4.3. Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026, maka secara operasional, dirumuskan tujuan dan sasaran masing-masing misi, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Barat
Visi: “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	SKPD Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
Mewujudkan Pasaman Barat Bermartabat													
1	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	<u>Tujuan 1</u> Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	C (49,19)	CC (53)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (72)	
			<u>Sasaran 1.1.</u> Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1) Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD
				2) Nilai SAKIP	B (60,82)	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)	Seluruh OPD, koord Setda
				3) Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6	>2,6	Seluruh OPD, koord Inspektorat
				4) Tingkat Kapabilitas APIP	2 (2019)	3	3	3	3	3	3	3	Seluruh OPD, koord Inspektorat
			<u>Sasaran 1.2.</u> Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	5) Indeks Profesionalitas ASN	58	70	70	75	75	80	80	80	Seluruh OPD, koord BKPSDM
				6) Indeks Maturitas SPBE	1.86 (cukup)	1,98	2,11	2,25	2,35	2,48	2,6	>2,6 (baik)	Seluruh OPD, koord. Kominfo
			<u>Sasaran 1.3</u> Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7) Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,59	83,00	84,5	85	85,7	85,8	86	86	Seluruh OPD, koord Setda
			Mewujudkan Pasaman Barat Agamais										
2	Membangun sumber daya manusia yang	<u>Tujuan 2:</u> Mewujudkan Masyarakat		Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	13,95	13	12	11	10	9	8	8	



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	SKPD Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
	beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh											
			<u>Sasaran 2.1:</u> Masyarakat Yang Agamais dan berbudaya	8) % Capaian PASBAR Mengaji	-	35	50	65	75	85	90	90	Pendidikan & Kebudayaan, Dispora (kepemudaan), kecamatan Pendidikan & Kebudayaan
				9) Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	1	3	5	7	9	10	12	12	
			<u>Sasaran 2.2:</u> Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	10)Indeks Pembangunan Gender	90,06 (2019)	90,38	90,71	91,03	91,35	91,68	92	92	DPPKBP3A, Kesbangpol, SatPol-PP,
				11)Predikat Kabupaten Peduli HAM	Sangat Peduli (SP)	SP	SP	SP	SP	SP	SP	SP	
				12)Indeks Pemberdayaan Gender	60,88	62,07	63,25	64,44	65,63	66,81	68,00	68,00	
				13)Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama (501)	Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (850)	
			<u>Sasaran 2.3:</u> Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	14)Indeks Ketahanan Daerah	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.80	1.80	Dinas Sosial (penanganan bencana), BPBD, Satpol-PP (Damkar)
Pasaman Barat maju dan Sejahtera													
		<u>Tujuan 3:</u> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indek Pembangunan Manusia	68,49	68,95	69,41	70,07	70,73	71,41	71,97	71,97	



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	SKPD Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			<u>Sasaran 3.1:</u> Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	15) Rata-rata lama sekolah (th)	8,19 th	8,27	8,38	8,48	8,58	8,68	8,79	8,79 th	Pendidikan, Arsip dan Pustaka
				16) Rata-rata harapan lama sekolah (th)	13,61 th	13,93	14,22	14,50	14,79	15,08	15,37	15,37 th	
			<u>Sasaran 3.2:</u> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	17) Usia Harapan Hidup (th)	67,82 th	67,85	67,87	67,97	68,07	68,17	68,27	68,27 th	Kesehatan, Dispora (olah raga), Lingkungan Hidup, PU-PR
				18) Prevalensi Stunting (%)	21	20,60	19,00	17,00	14,00	13,50	13,00	13,00	
			<u>Sasaran 3.3:</u> Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	19) Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,25%	1,24%	1,23%	1,22%	1,21%	1,2%	1,2%	1,2%	Pengendalian Penduduk dan KB, Disdukcapil
				Indeks Gini	0,258	0,257	0,256	0,255	0,253	0,252	0,251	0,251	
				Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,34%	2,81	2,97	4,26	4,60	4,71	4,84	4,84	
3	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	<u>Tujuan 4:</u> Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	<u>Sasaran 4.1:</u> Pengentasan kemiskinan	20) % Penduduk Miskin	7,04	7,02	7,00	6,96	6,84	6,71	6,58	6,58	Dinsos, Dinas Ketahanan Pangan, DPKP, PU-PR (air minum), DPPKBP3A, kesehatan,
			<u>Sasaran 4.2:</u> Perluasan Kesempatan Kerja	21) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	4,44	4,35	4,19	4,06	3,89	3,69	3,69	DKUKM, DPMPSTP, Disnaker



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	SKPD Penanggung jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026	
			Sasaran 4.3: Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	22) PDRB per Kapita ADHB (Rp. juta)	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46	36,17	37,71	Dishub, DPTPHP, Disbun, Diskan, DPMN, PU-PR, DLH, Dispar, DKUKM



5.4. Sinkronisasi Visi-Misi RPJMD dengan Visi-Misi RPJPD, RPJMD Propinsi, dan RPJMN

Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Meski demikian, visi dan misi pembangunan daerah selama tahun 2021-2026 bisa didapatkan sinkronisasinya dengan dokumen perencanaan lainnya, yakni RPJPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025, Visi Misi Guber dan Wakil Gubernur pada Rancangan Akhir RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 merupakan tahap akhir dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pasaman Barat periode 2005-2026, sehingga perencanaan yang disusun pada periode ini mestinya juga bertujuan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Demikian juga, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 mesti mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia secara umum.

Persandingan antara Visi – Misi RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, serta RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.3
Persandingan Visi Misi dan Prioritas pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, RPJMD Propinsi Sumatera Barat, dan RPJMN

No	RPJPD Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040	Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026	Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
Visi	Visi “Pasaman Barat yang Maju, Bermartabat dan Sejahtera”	Visi ‘Mewujudkan ruang wilayah Kabupaten aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan yang mandiri dan berdaya saing dengan memperhatikan pelestarian kawasan berfungsi lindung yang lestari’	Visi “Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera”	Visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”	Visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”
Misi					
1	Pembangunan Hukum dan Pemerintahan		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
				Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
					Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	RPJPD Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040	Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026	Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
					Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
					Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
					Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
3	Pembangunan Perekonomian	Pengembangan produk unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
		Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.	
		Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah kabupaten sebagai pusat perkebunan dan		Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing	



BAB 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No	RPJPD Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025	RTRW Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2040	Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2021-2026	Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	RPJMN Tahun 2020-2024
		perikanan; • Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana pengelolaan permukiman.		kepariwisataan	
4	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Wilayah	• Pelestarian kawasan berfungsi lindung yang lestari; • Pengembangan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana;	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berkeadilan yang berkelanjutan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
		Pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan sistem pusat permukiman, keterkaitan antar sistem pusat permukiman, dan mendukung sentra ekonomi;			Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pengembangan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, dan sumber daya air untuk mendukung sistem pusat permukiman dan kawasan budi daya;	Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur berkeadilan yang berkelanjutan	Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.



BAB 6

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk melaksanakan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Strategi juga bisa diartikan sebagai proses penentuan rencana untuk mencapai tujuan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek organisasi. Strategi juga diartikan sebagai proses menentukan arah yang dituju oleh organisasi agar sasarannya bisa dicapai. Dalam konteks pembangunan 5 tahun, strategi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam periode 2021-2026 adalah proses penentuan rencana untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai visi dan misi kepala daerah.

Sementara itu, arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam penyusunan program/kegiatan prioritas pada suatu periode tertentu. Arah kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan, sehingga lebih sinergis dan berkesinambungan. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, arah kebijakan pembangunan ditetapkan setiap tahunnya selama periode RPJMD, yakni Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 6.1.1 berikut:

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Visi: Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif</i>		
<u>Tujuan 1:</u> Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif	<u>Sasaran 1.1</u> Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	<u>Strategi 1.1.1:</u> Penyederhanaan birokrasi pemerintahan dan peningkatan SDM Aparatur <u>Strategi 1.1.2:</u> Pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien <u>Strategi 1.1.3:</u> Pematangan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan
	<u>Sasaran 1.2</u> Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif	<u>Strategi 1.2.1:</u> 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik 2. Penguatan pengelolaan sistem kearsipan di instansi pemerintah pada semua tingkatan



*BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah*

		<u>Strategi 1.2.2</u> Penyelenggaraan <i>e-government</i>
	<u>Sasaran 1.3</u> Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<u>Strategi 1.3.1</u> Mendorong inovasi dalam pelayanan publik <u>Strategi 1.3.2.</u> Mengurangi rata-rata waktu pelayanan bagi masyarakat (<i>dwelling time</i>)
<i>Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing</i>		
<u>Tujuan 2:</u> Mewujudkan Masyarakat Yang Agamais dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh	<u>Sasaran 2.1:</u> Masyarakat yang agamais dan berbudaya	<u>Strategi 2.1.1:</u> Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat <u>Strategi 2.1.2:</u> Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat
	<u>Sasaran 2.2:</u> Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	<u>Strategi 2.2.1:</u> Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran agamanya <u>Strategi 2.2.2:</u> Mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun
	<u>Sasaran 2.3:</u> Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana	<u>Strategi 2.3.1:</u> Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan daerah
<u>Tujuan 3:</u> Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<u>Sasaran 3.1:</u> Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<u>Strategi 3.1.1:</u> Memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah <u>Strategi 3.1.2:</u> Meningkatkan kualitas hasil belajar <u>Strategi 3.1.3:</u> Peningkatan Minat Baca Masyarakat
	<u>Sasaran 3.2.</u> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<u>Strategi 3.2.1:</u> Memastikan setiap penduduk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas <u>Strategi 3.2.2:</u> Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan <u>Strategi 3.2.3</u> Melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di semua tingkatan
	<u>Sasaran 3.3:</u> Terwujudnya	<u>Strategi 3.3.1:</u> Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk



*BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah*

	penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	
<i>Misi 3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif</i>		
<u>Tujuan 4:</u> Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	<u>Sasaran 4.1:</u> Pengentasan kemiskinan	<u>Strategi 4.1.1</u> Mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin
	<u>Sasaran 4.2:</u> Perluasan kesempatan kerja	Strategi 4.2.1: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Strategi 4.2.2: Menyediakan Sistem Perlindungan bagi tenaga kerja Strategi 4.2.3: Memperluas lapangan kerja, dengan cara mendorong penanaman modal dan promosi peluang investasi sesuai komoditi unggulan
	<u>Sasaran 4.3:</u> Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	<u>Strategi 4.3.1.</u> Peningkatan kemandirian pangan <u>Strategi 4.3.2.</u> Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan <u>Strategi 4.3.3.</u> Hilirisasi komoditas unggulan lokal <u>Strategi 4.3.4.</u> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar

Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut di atas diuraikan menjadi arah kebijakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif									
Tujuan 1: Penerapan tata kelola pemerintaha n profesional, akuntabel dan inovatif	Sasaran 1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi 1.1.1: Penyederhanaan birokrasi pemerintahan dan peningkatan SDM aparatur	Arah Kebijakan: a) Penyederhanaan organisasi b) penyederhanaan eselonisasi dan perluasan jabatan fungsional c) Penguatan kapasitas SDM aparatur d) Penyediaan <i>merit system</i> e) Menjamin SDM aparatur yang profesional	1. Penyederhanaan organisasi dan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional;	1. Penguatan kapasitas SDM aparatur	1. Penyediaan <i>merit system</i>	1. Menjamin ketersediaan SDM aparatur yang profesional	1. Penguatan kapasitas SDM aparatur	1. Penguatan kapasitas SDM aparatur
		Strategi 1.1.2: Pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien	Arah Kebijakan: a) Penerapan sistem <i>money follow</i> program b) Penguatan sistem data dan aksesibilitas data c) Penguatan peran kelitbangan daerah d) Reformasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan; e) Mengoptimalkan sumber-sumber PAD f) Memperkuat	2. Menerapkan sistem perencanaan berbasis elektronik 3. Memperkuat kelembagaan data 4. Memperkuat SDM kelitbangan 5. Membangun database potensi-potensi PAD 6. Perbaikan tata kelola pemerintahan di nagari	2. Penguatan sistem data dan aksesibilitas data perencanaan 3. Memperkuat Perencanaan sistem perencanaan berbasis elektronik 4. Memperkuat perencanaan berbasis elektronik 5. Merancang sistem monev terintegrasi berbasis	2. Penguatan peran kelitbangan daerah; 3. Optimalisasi sistem perencanaan terintegrasi berbasis elektronik; 4. Penerapan sistem monev terintegrasi berbasis elektronik; 5. Penguatan inovasi dalam sistem	2. Optimalisasi sistem perencanaan terintegrasi berbasis elektronik 3. monitoring dan evaluasi pembangunan kelembagaan daerah 4. Penguatan kelembagaan kelitbangan daerah 5. Penerapan sistem monev terintegrasi berbasis	2. Memperkuat kemandirian desa secara administratif, keuangan, dan kelembagaan; 3. Optimalisasi sistem perencanaan terintegrasi berbasis elektronik 4. monitoring dan evaluasi pembangunan kelembagaan	2. Memperkuat kemandirian desa secara administratif, keuangan, dan kelembagaan; 3. Optimalisasi sistem perencanaan terintegrasi berbasis elektronik 4. monitoring dan evaluasi pembangunan kelembagaan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			kemandirian desa secara administratif, keuangan, dan kelembagaan.		6. elektronik 6. Membentuk Tim Pemungutan Pajak 7. Mendorong inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD; 8. Perbaikan tata kelola pemerintahan di nagari	6. penerimaan PAD; 6. Penguatan tata kelola pemerintahan nagari	6. elektronik; 6. Penguatan inovasi dalam sistem penerimaan PAD; 7. Penguatan tata kelola pemerintahan nagari	6. kelitbangan daerah 6. Penerapan sistem monev terintegrasi berbasis elektronik; 7. Penguatan inovasi dalam sistem penerimaan PAD;	6. kelitbangan daerah 6. Penerapan sistem monev terintegrasi berbasis elektronik; 7. Penguatan inovasi dalam sistem penerimaan PAD;
		<u>Strategi 1.1.3:</u> Pematangan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan	7. Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	9. Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran	7. Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			efisien						
	<u>Sasaran 1.2</u> Terwujudnya birokrasi yang efisien dan efektif	<u>Strategi 1.2.1:</u> 1. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik 2. Penguatan pengelolaan sistem kearsipan di instansi pemerintah pada semua tingkatan	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Diseminasi informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi b) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi	8. Mendorong sistem pengamanan informasi pemerintah 9. pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi	10. Mendorong sistem pengamanan informasi pemerintah 11. Peningkatan SDM PPID 12. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan informasi 13. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi;	8. Meningkatkan sistem pengamanan terhadap informasi pemerintah 9. Pemberdayaan PPID 10. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan informasi 11. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi	9. Melaksanakan diseminasi informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi; 10. Meningkatkan sistem pengamanan terhadap informasi pemerintah 11. Pemberdayaan PPID 12. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan informasi 13. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi	9. Perluasan diseminasi informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi; 10. Meningkatkan sistem pengamanan terhadap informasi pemerintah 11. Pemberdayaan PPID 12. Pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan informasi 13. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi	9. Perluasan diseminasi informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi; 10. Meningkatkan sistem pengamanan terhadap informasi pemerintah 11. Pemberdayaan PPID 12. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi
		<u>Strategi 1.2.2</u> Penyelenggaraan e-government	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat b) Melaksanakan penatalaksanaan dan	10. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	14. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 15. Melaksanakan penatalaksanaan	12. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 13. Melaksanakan penatalaksanaan	14. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 15. Melaksanakan penatalaksanaan	14. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 15. Melaksanakan penatalaksanaan	13. Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 14. Melaksanakan penatalaksanaan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat		dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat	dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat	dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat	dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat	dan pengawasan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat
	<u>Sasaran 1.3</u> Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	<u>Strategi 1.3.1</u> Mendorong inovasi dalam pelayanan publik	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pemberian pelayanan publik b) Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik c) Meningkatkan pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah	11. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pemberian pelayanan publik	16. Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pemberian pelayanan publik 17. Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik; 18. Merancang sistem inovasi pelayanan publik yang terintegrasi	14. Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik 15. Meningkatkan pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah; 16. Mengintegrasikan pelayanan publik hingga ke tingkat kecamatan	16. Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah 18. Memperluas integrasi pelayanan publik	16. Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah 18. Memperluas integrasi pelayanan publik 19. Mendorong partisipasi masyarakat, swasta, dan media dalam integrasi pelayanan	15. Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik 16. Meningkatkan pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah; 17. Memperluas integrasi pelayanan publik 18. Mendorong partisipasi masyarakat, swasta, dan media dalam integrasi pelayanan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Strategi 1.3.2.</u> Mengurangi rata-rata waktu pelayanan bagi masyarakat (<i>dwelling time</i>)	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana b) Pemanfaatan teknologi untuk pelayanan c) Menyiapkan SDM pelayanan yang handal d) Menyiapkan norma, sistem dan prosedur yang mendukung kemudahan pelayanan publik e) Menyediakan sistem <i>reward</i> dalam pelayanan publik	12. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana	19. Pemanfaatan teknologi untuk pelayanan 20. Menyiapkan SDM pelayanan yang handal 21. Menyiapkan norma, sistem dan prosedur yang mendukung kemudahan pelayanan publik	17. Menyediakan sistem <i>reward</i> dalam pelayanan publik 18. Penguatan SDM pelayanan publik yang handal 19. Menerapkan NSP dalam pelayanan publik	19. Menyediakan sistem <i>reward</i> dalam pelayanan publik; 20. Penguatan SDM pelayanan publik yang handal 21. Menerapkan NSP dalam pelayanan publik	20. Menyediakan sistem <i>reward</i> dalam pelayanan publik; 21. Penguatan SDM pelayanan publik yang handal 22. Menerapkan NSP dalam pelayanan publik	19. Menyediakan sistem <i>reward</i> dalam pelayanan publik; 20. Penguatan SDM pelayanan publik yang handal 21. Menerapkan NSP dalam pelayanan publik
<u>Misi 2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing</u>									
<u>Tujuan 2:</u> Mewujudkan sumber daya manusia yang agamais dan berbudaya, serta tangguh	<u>Sasaran 2.1:</u> Masyarakat yang agamais dan berbudaya	<u>Strategi 2.1.1:</u> Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan b) Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat c) Peningkatan melek Al-Qur'an bagi siswa sekolah dasar d) Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga e) Penyediaan regulasi	13. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 14. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 15. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga 16. Penyediaan	22. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 23. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 24. Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok	20. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 21. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 22. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga 23. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung	22. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 23. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 24. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga 25. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk	23. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 24. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 25. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga 26. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk	22. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan 23. Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat 24. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga 25. Mengoptimalkan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tentang Pondok Al-Quran dan Rumah Tahfidz, serta program Maghrib Mengaji f) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran) g) Penyediaan tenaga da'i yang memiliki tugas dan fungsi tanggungjawab yang jelas hingga tingkat kejurongan h) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program "Pasbar Mengaji; i) Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". j) Menyediakan reward system untuk lembaga masyarakat dan	regulasi tentang Pondok Al-Quran dan Rumah Tahfidz, serta program Pasbar Mengaji; 17. Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga; 18. Sosialisasi tentang peran BAZNAS;	Al-Quran) 25. Penyediaan tenaga da'i yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang jelas hingga tingkat kejurongan 26. Meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, guru TPA/MDA/TPQ 27. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program "Pasbar Mengaji; 28. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". 29. Mendorong	program "Pasbar Mengaji 24. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". 25. Mendorong kerjasama BAZNAS dengan pihak swasta dan masyarakat; 26. Melaksanakan program PASBAR MENGAJI pada satuan pendidikan	mendukung program "Pasbar Mengaji 26. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". 27. Mengoptimalkan fungsi BAZNAS 28. Membangun Islamic Center 29. Melaksanakan program PASBAR MENGAJI pada satuan pendidikan	mendukung program "Pasbar Mengaji 27. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". 28. Menyediakan reward system untuk lembaga Rumah Tahfidz dan Pondok Al-Quran serta masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi terhadap tercapainya program "Pasbar Mengaji" 29. Operasionalisasi Islamic Center 30. Melaksanakan program PASBAR MENGAJI pada satuan pendidikan	n pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program "Pasbar Mengaji 26. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji". 27. Penguatan kelembagaan Islamic Center; 28. Melaksanakan program PASBAR MENGAJI pada satuan pendidikan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tokoh yang berprestasi dan berkontribusi terhadap tercapainya program "Pasbar Mengaji" k) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk membayar zakat l) Integrasi program PASBAR MENGAJI pada muatan lokal		kerjasama BAZNAS dengan pihak swasta dan masyarakat 30. Menyusun rencana pembanguna Islamic Center; 31. Menyusun kurikulum muatan lokal untuk mendukung program PASBAR MENGAJI				
		Strategi 2.1.2: Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat	Arah Kebijakan: a) Meningkatkan pendidikan adat dan budaya b) Pembinaan lembaga adat c) Penyediaan sistem reward bagi perorangan atau organisasi yang berkontribusi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya lokal d) Adanya praktik baik (<i>best practice</i>) dalam pengamalan adat dan budaya lokal e) Mendorong	19. Meningkatkan pendidikan adat dan budaya 20. Pembinaan lembaga adat dan budaya 21. Pembinaan organisasi kepemudaan	32. Pembinaan lembaga adat 33. Mendorong partisipasi lembaga adat, tokoh adat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya lokal 34. Merancang sistem reward di bidang adat dan kebudayaan 35. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan	27. Pembinaan lembaga adat 28. Penyediaan sistem reward bagi perorangan atau organisasi yang berkontribusi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya lokal 29. Adanya praktik baik (<i>best practice</i>) dalam pengamalan adat dan budaya lokal 30. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan	30. Pembinaan lembaga adat dan budaya lokal 31. Mendorong partisipasi lembaga adat, tokoh adat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya lokal 32. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan	31. Pembinaan lembaga adat dan budaya lokal 32. Adanya praktik baik (<i>best practice</i>) dalam pengamalan adat dan budaya lokal 33. Mendorong partisipasi lembaga adat, tokoh adat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya lokal 34. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan	29. Pembinaan lembaga adat dan budaya lokal 30. Adanya praktik baik (<i>best practice</i>) dalam pengamalan adat dan budaya lokal 31. Penguatan kapasitas organisasi kepemudaan



*BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah*

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			partisipasi lembaga adat, tokoh adat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya lokal						
	Sasaran 2.2: Masyarakat yang rukun dan berkeadilan	Strategi 2.2.1: Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran agamanya;	Arah Kebijakan: a) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup antarumat beragama b) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	22. Pemberdayaan lembaga keagamaan, adat, dan budaya;	36. Operasionalisasi Tim Harmonisasi Pembangunan dan tim penanganan konflik	31. Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup antarumat beragama 32. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	33. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	35. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	32. Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup antarumat beragama 33. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
		Strategi 2.2.2: Mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum	Arah Kebijakan: 1) Penyediaan regulasi yang inklusif dan responsif gender 2) Penguatan SDM kelembagaan perlindungan anak,	23. Penyediaan regulasi yang inklusif dan responsif gender; 24. Penguatan SDM kelembagaan	38. Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif	33. Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	34. Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	36. Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	34. Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun	lansia, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas; 3) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi serta memberikan hak sipil anak; 4) Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) 5) Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, melalui pendewasaan usia perkawinan anak; dan penguatan kelembagaan dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan keluarga	perlindungan anak, lansia, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas; 25. Merintis kerjasama dengan masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi	gender (PPRG) 39. Memperbaiki database perlindungan anak, lansia, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas; 40. Menyusun rencana dan kebijakan perlindungan khusus bagi anak dari orang tua korban Covid-19; 41. Menjalin kerjasama dengan masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi;	34. Advokasi pencegahan pernikahan anak dan pernikahan paksa 35. Pemberian perlindungan khusus bagi anak dari orang tua korban Covid-19 36. Penguatan SDM dan kelembagaan perlindungan anak, lansia, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas 37. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi serta memberikan hak sipil anak	35. Promosi, advokasi, dan edukasi program ketahanan keluarga secara luas; 36. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi serta memberikan hak sipil anak 37. Penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan;	37. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi serta memberikan hak sipil anak 38. Promosi, advokasi, dan edukasi program ketahanan keluarga secara luas; 39. Penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan;	gender (PPRG) 35. Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 36. Penguatan Promosi, advokasi, dan edukasi program ketahanan keluarga secara luas; 37. Perluasan sistem perlindungan bagi kelompok rentan;
	Sasaran 2.3 Masyarakat Yang	Strategi 2.3.1: Meningkatkan pemberdayaan	Arah Kebijakan: a) Penyediaan perluasan	26. Penyediaan perluasan informasi	42. Penyediaan perluasan informasi	38. Penyediaan perluasan informasi	38. Penyediaan perluasan informasi	40. Penyediaan perluasan informasi	38. Penyediaan perluasan informasi



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Tangguh Menghadapi Bencana	dan ketahanan masyarakat	informasi kebencanaan b) Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan c) Pengelolaan lingkungan hidup d) Pendampingan psikososial korban bencana e) Pendidikan politik sehat bagi masyarakat f) Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi g) Penanganan konflik pertanahan	kebencanaan 27. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 28. Pengelolaan lingkungan hidup 29. Pendampingan psikososial korban bencana 30. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 31. Pembentukan tim harmonisasi pembangunan dan tim penanganan konflik	kebencanaa 43. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 44. Pengelolaan lingkungan hidup 45. Pendampingan psikososial korban bencana 46. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 47. Penanganan konflik pertanahan; 48. Penguatan SDM dalam harmonisasi pembangunan 49. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik	kebencanaan 39. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 40. Pengelolaan lingkungan hidup 41. Pendampingan psikososial korban bencana 42. Pendidikan politik sehat bagi masyarakat 43. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 44. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik	kebencanaan 39. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 40. Pengelolaan lingkungan hidup 41. Pendampingan psikososial korban bencana 42. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 43. Penanganan konflik pertanahan 44. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik 45. Pendidikan politik sehat bagi masyarakat	kebencanaan 41. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 11. Pengelolaan lingkungan hidup 42. Pendampingan psikososial korban bencana 43. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 44. Penanganan konflik pertanahan; 45. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik	kebencanaan 39. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan 40. Pengelolaan lingkungan hidup 41. Pendampingan psikososial korban bencana 42. Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi 43. Penanganan konflik pertanahan; 44. Menjalinkan komunikasi dan kerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga masyarakat dalam penanganan konflik



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Strategi 3.3.1: Memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah	Arah Kebijakan:	32. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	50. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	45. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	46. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	46. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	45. Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan
			a) Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan	33. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	51. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	46. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	47. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	47. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	46. Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan
			b) Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan	34. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses;	52. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses	47. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses	48. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses	48. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses	47. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses
			c) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses;		53. Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah	48. Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah	49. Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah	49. Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah	48. Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah
			d) Menyediakan sistem penjemputan bagi siswa yang putus sekolah		54. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin ;	49. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin;	50. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	50. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin	49. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin
			e) Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin		55. Menyusun rencana Sekolah Unggulan	50. Pemenuhan dan pemerataan	51. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus;	51. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus	50. Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus
			f) Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus				52. Pembangunan sekolah unggulan	52. Pemenuhan dan pemerataan	51. Pemenuhan dan pemerataan
		Strategi 3.1.2: Meningkatkan	Arah Kebijakan:	35. Pemenuhan dan pemerataan	56. Pemenuhan dan pemerataan	50. Pemenuhan dan pemerataan	53. Pemenuhan dan pemerataan	52. Pemenuhan dan pemerataan	51. Pemenuhan dan pemerataan
			a) Pemenuhan dan						



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kualitas hasil belajar	pemerataan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; b) Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak; c) Peningkatan kualitas muatan lokal d) Pemanfaatan teknologi informasi	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 36. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak;	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 57. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak;	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 51. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak 52. Peningkatan kualitas muatan lokal 53. Pemanfaatan teknologi informasi	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 54. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak 55. Peningkatan kualitas muatan lokal 56. Pemanfaatan teknologi informasi	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 53. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak 54. Peningkatan kualitas muatan lokal 55. Pemanfaatan teknologi informasi	tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi; 52. Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak 53. Peningkatan kualitas muatan lokal 54. Pemanfaatan teknologi informasi
		<u>Strategi 3.1.3:</u> Peningkatan Minat Baca Masyarakat	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Meningkatkan promosi dan sosialisasi minat membaca b) Meningkatkan penguatan Lembaga dan kapasitas organisasi perpustakaan c) Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat d) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga	37. Meningkatkan promosi dan sosialisasi minat membaca 38. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat	58. Meningkatkan penguatan Lembaga dan kapasitas organisasi perpustakaan 59. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat 60. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga 61. Meningkatkan	54. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat 55. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat 56. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan 57. Meningkatkan diversifikasi	57. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK 59. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat 60. Meningkatkan	56. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK 58. Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat	55. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			perpustakaan e) Meningkatkan pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK		pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK	layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK	kompetensi dan profesionalisme tenaga		
	Sasaran 3.2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Strategi 3.2.1: Memastikan setiap penduduk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	Arah Kebijakan: a) Pemenuhan SPM bidang Kesehatan b) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan d) Pengaturan distribusi tenaga kesehatan e) Memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional	60. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 61. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 62. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 63. Pengaturan distribusi tenaga kesehatan	62. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 63. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 64. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 65. Pengaturan distribusi tenaga kesehatan 66. Memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional	58. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 59. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 60. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 61. Pengaturan distribusi tenaga kesehatan 62. Menjalin kerjasama dengan pihak non-pemerintah dalam perluasan cakupan JKN	61. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 62. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 63. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 64. Menjalin kerjasama dengan pihak non-pemerintah dalam perluasan cakupan JKN	59. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 60. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 61. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan; 62. Menjalin kerjasama dengan pihak non-pemerintah dalam perluasan cakupan JKN	57. Pemenuhan SPM bidang Kesehatan 58. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat 59. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan 60. Pemenuhan Universal Health Coverage
		Strategi 3.2.2: Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan	Arah Kebijakan: a) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; b) Promosi perilaku hidup bersih dan	64. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 65. Promosi perilaku hidup	67. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 68. Promosi perilaku hidup	63. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 64. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat secara	65. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 66. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat secara	63. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 64. Promosi perilaku hidup bersih dan sehat secara	61. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; 62. Promosi perilaku hidup



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			sehat secara berkelanjutan c) Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; d) Penanganan persampahan secara terpadu dan pengurangan volume sampah e) Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat	bersih dan sehat secara berkelanjutan; 66. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 67. Pemenuhan sarana dan prasarana dan SDM pengelolaan persampahan 68. Menambah alokasi anggaran untuk JKN masyarakat	bersih dan sehat secara berkelanjutan; 69. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 70. Pemberdayaan bank-bank sampah; 71. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan; 72. Menjalinkan kerjasama dengan pihak non-pemerintah dalam perluasan cakupan JKN; 73. Memperbaiki sistem data JKN	berkelanjutan; 65. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 66. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat; 67. Penyusunan rencana penyediaan TPA; 68. Pemberdayaan masyarakat di bidang persampahan	berkelanjutan; 67. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 68. Penanganan persampahan secara terpadu 69. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat; 70. Pemberdayaan masyarakat di bidang persampahan; 71. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	berkelanjutan; 65. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 66. Penanganan persampahan secara terpadu 67. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat; 68. Pemberdayaan masyarakat di bidang persampahan; 69. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	bersih dan sehat secara berkelanjutan 63. Penanganan persampahan secara terpadu; 64. Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat; 65. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat; 66. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
		Strategi 3.2.3 Melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di semua tingkatan	Arah Kebijakan: a) Penyusunan Kebijakan tentang Pencegahan Stunting b) Penyusunan strategi untuk melibatkan swasta, masyarakat madani, dan komunitas c) Kampanye	69. Penyusunan Kebijakan tentang Pencegahan Stunting 70. Penyusunan strategi untuk melibatkan swasta, masyarakat madani, dan	74. Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari 75. Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar 76. Menjadikan keluarga 1000	69. Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari 70. Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar 71. Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai	72. Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari 73. Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar 74. Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai	70. Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari 71. Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar 72. Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai	67. Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari 68. Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar 69. Menjadikan keluarga 1000



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Komunikasi Perubahan Perilaku, dengan arah kebijakan: 1) Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan, 2) Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran; 3) Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan; 4) Pengembangan kapasitas pengelola program; d) Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari, dengan strategi: 1) Penilaian Kinerja Kabupaten dalam Konvergensi Intervensi; 2) Mobilisasi Kader Pembangunan	komunitas 71. Kampanye Komunikasi Perubahan Perilaku	HPK sebagai prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan	prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan	prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan	prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan	HPK sebagai prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Manusia (KPM); 3) Penguatan pelayanan gizi spesifik; e) Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar, dilakukan dengan arah kebijakan: 1) Penyediaan pangan yang bergizi; 2) Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga kurang mampu; 3) Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga; 4) Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan; 5) Pengawasan Keamanan Pangan f) Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai prioritas dalam program						



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			penanggulangan kemiskinan						
	Sasaran 3.3: Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	Strategi 3.3.1: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengatur Fertilitas b) Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi c) Revitalisasi Program KB d) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga e) Membangun administrasi kependudukan yang handal f) Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya	72. Mengatur Fertilitas 73. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 74. Revitalisasi Program KB 75. Membangun administrasi kependudukan yang handal	77. Mengatur Fertilitas 78. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 79. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga 80. Membangun administrasi kependudukan yang handal	72. Mengatur Fertilitas 73. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 74. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga 75. Membangun administrasi kependudukan yang handal	75. Mengatur Fertilitas 76. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 77. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; 78. Membangun administrasi kependudukan yang handal 79. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya	73. Mengatur Fertilitas 74. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 75. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga 76. Membangun administrasi kependudukan yang handal 77. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya	70. Mengatur Fertilitas 71. Menurunkan Mortalitas ibu, balita dan bayi 72. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga 73. Membangun administrasi kependudukan yang handal 74. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya
Misi 3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif									
Tujuan 4: Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Sasaran 4.1: Pengentasan kemiskinan	Strategi 4.1.1: Mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Menyediakan sistem perlindungan sosial komprehensif bagi masyarakat miskin; b) Penanganan PPKS c) Membangun sistem data yang handal dalam penanganan kemiskinan; d) Penguatan lembaga koordinasi dalam penanganan kemiskinan; e) Peningkatan peran	76. Menyediakan sistem perlindungan sosial komprehensif bagi masyarakat miskin; 77. Penanganan PPKS 78. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas	81. Membangun sistem data PPKS yang handal dalam penanganan kemiskinan 82. Penguatan SDM kelembagaan di bidang perlindungan sosial 83. Penguatan lembaga koordinasi dalam	76. Peningkatan peran serta masyarakat, wasta, organisasi masyarakat, pemuda, media, dan perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan 77. Peningkatan keberdayaan masyarakat Nagari 78. Menyediakan	31. Pemberdayaan usaha mikro, dan koperasi 80. Peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan dan lansia produktif 81. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak; 82. Memperkuat	78. Pemberdayaan usaha mikro, dan koperasi 79. Peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan dan lansia produktif; 80. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak; 81. Memperkuat	75. Pemberdayaan usaha mikro, dan koperasi 76. Peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan dan lansia produktif 77. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak;



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, pemuda, media, dan perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan; f) Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi g) Peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan dan lansia produktif h) Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak	permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak	penanganan kemiskinan 84. Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak 85. Sosialisasi peran BAZNAS	kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak; 79. Mendorong kerjasama BAZNAS dengan swasta; 80. Penguatan SDM kelembagaan di bidang perlindungan sosial 81. Menyusun rencana penyediaan Sarana Perlindungan Sosial Skala Kabupaten	kemitraan dengan BAZNAS dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan	kemitraan dengan BAZNAS dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan; 82. Mendirikan Sarana Perlindungan Sosial Skala Kabupaten	78. Memperluas kemitraan dengan BAZNAS dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan; 79. Operasionalisasi Sarana Perlindungan Sosial Skala Kabupaten
	Sasaran 4.2: Perluasan kesempatan kerja	Strategi 4.2.1: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Arah Kebijakan: a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi b) Meningkatkan penguatan BLK c) Meningkatkan Lembaga produktifitas	79. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi 80. Memenuhi sarana dan prasarana BLK	86. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi 87. Memenuhi sarana dan prasarana BLK	82. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi 83. Memenuhi Sarpras dan SDM BLK	83. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi 84. Memperkuat fungsi BLK	83. Meningkatkan lembaga produktifitas 84. Mengoptimalkan fungsi pelatihan tenaga kerja di BLK	80. Meningkatkan lembaga produktifitas 81. Mengoptimalkan fungsi pelatihan tenaga kerja di BLK
		Strategi 4.2.2: Menyediakan Sistem Perlindungan bagi tenaga kerja	Arah Kebijakan: a) Menyediakan sistem perlindungan hukum dan sosial universal bagi	81. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja	88. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja;	84. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja 85. Meningkatkan	85. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja 86. Meningkatkan	85. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja 86. Meningkatkan	82. Menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			tenaga kerja b) Meningkatkan penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	82. Meningkatkan penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	89. Meningkatkan penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja	83. Meningkatkan penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja
		<u>Strategi 4.2.3:</u> Memperluas lapangan kerja, dengan cara mendorong penanaman modal dan promosi peluang investasi sesuai komoditi unggulan	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal b) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah c) Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	83. Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal 84. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah	90. Perluasan informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja 91. Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	86. Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi 87. Perluasan informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja online dan/atau offline	87. Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi 88. Perluasan informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja online dan/atau offline	87. Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi 88. Perluasan informasi kesempatan kerja melalui bursa kerja online dan/atau offline	84. Mengoptimalkan perluasan informasi kesempatan kerja disektor formal dan informal 85. Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi
	<u>Sasaran 4.3:</u> Penguatan industri berbasis komoditas unggulan lokal	<u>Strategi 4.3.1:</u> Peningkatan kemandirian pangan	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengatasi daerah rawan pangan b) Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	85. Mengatasi daerah rawan pangan 86. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	92. Mengatasi daerah rawan pangan 93. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	88. Mengatasi daerah rawan pangan 89. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	89. Mengatasi daerah rawan pangan 90. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	89. Mengatasi daerah rawan pangan 90. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	86. Mengatasi daerah rawan pangan 87. Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan
		<u>Strategi 4.3.2:</u> Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas b) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis komoditi unggulan	87. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 88. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	94. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 95. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	90. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 91. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis	91. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 92. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	91. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 92. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian	88. Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas 89. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		perikanan	dan lokasi prioritas c) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian d) Penguatan kelembagaan petani e) Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan f) Membangun sarana dan prasarana perdagangan g) Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan	berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas 89. Penguatan kelembagaan petani 90. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan; 91. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian	berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas 96. Penguatan kelembagaan petani; 97. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian 98. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 99. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan	komoditi unggulan dan lokasi prioritas 92. Penguatan kelembagaan petani; 93. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian 94. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 95. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 96. Merancang kebijakan tentang pengelolaan pasar sentra	berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas 93. Penguatan kelembagaan petani; 94. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian 95. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 96. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 97. Pembangunan pasar sentra	berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas 93. Penguatan kelembagaan petani 94. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 95. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 96. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian 97. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pasar	berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas 90. Penguatan kelembagaan petani; 91. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian 92. Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan 93. Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebuna, peternakan, dan perikanan



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
					100. Menyusun rencana pembangunan pasar sentra di Ibukota			sentra di Ibukota	94. Operasionalisasi pasar sentra di Ibukota
		<u>Strategi 4.3.3.</u> Hilirisasi komoditas unggulan lokal	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Mengidentifikasi dan menetapkan klaster industri kecil dan menengah b) Membangun sarana dan prasarana pengembangan klaster IKM c) Penerapan Teknologi Tepat Guna d) Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lokasi prioritas e) Penguatan sistem pemasaran produk olahan lokal f) Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat	92. Mengidentifikasi dan menetapkan klaster industri kecil dan menengah 93. Memperbaiki sistem data IKM dan Usaha Mikro 94. Fasilitasi Usaha Mikro, koperasi, dan IKM dalam memanfaatkan TTG 95. Pembangunan sarana dan prasarana wisata 96. Peningkatan SDM pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 97. Pembinaan industri mikro, dan kecil	101. Menyusun rencana pembangunan klaster IKM 102. Penerapan Teknologi Tepat Guna secara lebih luas 103. Pembangunan sarana dan prasarana wisata 104. Mendorong promosi usaha wisata 105. Pengembangan industri kreatif di lokasi wisata 106. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat 107. Menyusun rencana	97. Membangun sarana dan prasarana pengembangan klaster IKM 98. Mendorong promosi usaha wisata dan ekonomi kreatif 99. Meningkatkan SDM Pokdarwis, Pelaku Usaha Pariwisata, dan ekraf 100. Pengembangan sistem pemasaran produk industri rumah tangga, usaha mikro, dan IKM 101. Pengembangan industri kreatif di lokasi wisata	98. Penguatan sistem pemasaran produk olahan lokal 99. Mendorong pengembangan usaha industri rumah tangga, usaha mikro, dan koperasi 100. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat 101. Pengembangan industri kreatif di lokasi wisata	98. Penguatan sistem pemasaran produk olahan lokal 99. Mendorong pengembangan usaha industri rumah tangga, usaha mikro, dan koperasi 100. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat 101. Pengembangan industri kreatif di lokasi wisata	95. Penguatan sistem pemasaran produk olahan lokal 96. Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat 97. Pengembangan industri kreatif di lokasi wisata



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Mewujudkan Pasaman Barat yang Bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera									
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan						
			Umum	Tahunan					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
					pembangunan pabrik kelapa sawit dan/atau produk turunan kelapa sawit				
		<u>Strategi 4.3.4.</u> Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar	<u>Arah Kebijakan:</u> a) Pengentasan daerah tertinggal/ terisolir b) Meningkatkan konektivitas Kabupaten c) Membangun infrastruktur perkotaan d) Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana e) Membangun sarana dan prasarana perhubungan f) Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi g) Meningkatkan dukungan pendanaan dari sumber pendanaan yang sah	98. Pengentasan daerah tertinggal/ terisolir 99. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 100. Membangun jalan dan jembatan 101. Membangun infrastruktur perkotaan; 102. Membangun sarana dan prasarana perhubungan; 103. Meningkatkan dukungan pendanaan dari sumber pendanaan yang sah	108. Pengentasan daerah tertinggal/ terisolir 109. Membangun infrastruktur perkotaan 110. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 111. Membangun jalan dan jembatan 112. Meningkatkan dukungan pendanaan dari sumber pendanaan yang sah; 113. Membangun sarana dan prasarana perhubungan	102. Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana 103. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 104. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi perkantoran yang representatif 105. Membangun jalan dan jembatan 106. Membangun sarana dan prasarana perhubungan	102. Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana 103. Membangun sarana dan prasarana perhubungan 104. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi 105. Membangun infrastruktur perkotaan 106. Membangun jalan dan jembatan; 107. Membangun sarana dan prasarana perhubungan	102. Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana 103. Membangun sarana dan prasarana perhubungan 104. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; 105. Membangun jalan dan jembatan; 106. Meningkatkan dukungan pendanaan dari sumber pendanaan yang sah	98. Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; 99. Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana 100. Membangun sarana dan prasarana perhubungan 101. Meningkatkan dukungan pendanaan dari sumber pendanaan yang sah



Berdasarkan geografis, Kabupaten Pasaman Barat berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Agam
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Berdasarkan letak geografis tersebut, Kabupaten Pasaman Barat memiliki beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga dan Provinsi Sumatera Utara, dengan rincian wilayah sebagai berikut:

Tabel 6.3 Wilayah Perbatasan di Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama Kecamatan	KabupatenPerbatasan	ProvinsiPerbatasan	Dasar Hukum
1	Sungai Baremas	Mandailing Natal	Sumatera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
2	Lembah Melintang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
3	Ranah Batahan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
4	Koto Balingka	Mandailing Natal	Sumatera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
5	Gunung Tuleh	Mandailing Natal, Pasaman	Sumatera Utara	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53,54, dan 55 Tahun 2018
6	Gunung Tuleh	Pasaman	Sumatera Barat	Proses Penetapan
7	Kinali	Agam	Sumatera Barat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2017



6.2. Program Unggulan Pasaman Barat

Visi dan misi Kepala Daerah terpilih dituangkan ke dalam empat program unggulan. Program unggulan ini dititikberatkan pada pemenuhan aspek pelayanan dasar dan peningkatan serta pengembangan ekonomi unggulan Kabupaten Pasaman Barat. Berikut rincian program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk periode Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah selama periode 2021 – 2026:

1. PASBAR SEHAT

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama Kabupaten Pasaman Barat selama periode 2021-2026. Program unggulan “Pasbar Sehat” mendukung pencapaian dua misi pembangunan daerah, yakni:

- 1) Peningkatan kualitas sarana kesehatan sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sakit menuju kesembuhan
- 2) Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan pengobatan gratis, yang berkualitas dan mudah mendapatkan obat-obatan.

Realisasi kedua misi tersebut di atas dilaksanakan melalui “Program Pasbar Sehat”. Pelaksanaan Program Pasbar Sehat dilakukan melalui dua strategi yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Strategi pertama adalah peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan hingga ke tingkat kejurongan, strategi kedua adalah peningkatan cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju *Universal Health Coverage (UHC)*.

a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menjadi strategi pertama dalam melaksanakan program unggulan Pasbar Sehat. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga fasilitas kesehatan rujukan. Peningkatan kualitas kesehatan selama tahun 2021-2026 akan dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memastikan keterjangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat kejurongan, dengan cara menambah tenaga bidan desa, terutama di jorong-jorong berpenduduk banyak, dan menempatkan tenaga perawat yang mudah menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan;
2. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan, mulai dari tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan pelayanan hingga ke fasilitas kesehatan rujukan.
3. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai hingga ke tingkat kejurongan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pelayanan kesehatan di nagari, sesuai kewenangan.

Tabel 6.4 Langkah Strategis Peningkatan Kepesertaan JKN
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	Strategi	Penanggung Jawab
1	Peningkatan kepesertaan melalui Jamkesda	Dinkes BPKD
2	Meningkatkan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan JKN	Dinkes Diskominfo
3	Pembersihan data administrasi kependudukan	Disdukcapil
4	Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Dinsos
5	Memastikan bahwa tidak ada lagi ANS, Pensiunan, maupun Aparat Nagari yang terdaftar sebagai peserta PBI	DPMN, BKPSDM, Dinsos, Dinkes
6	Meningkatkan kepesertaan di sektor swasta	Disnaker
7	Menjalin kerja sama dengan swasta dan Lembaga Masyarakat	Setda
8	Memastikan keterjangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat kejurongan	Dinkes, DPMN,
9	Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan	Dinkes
10	Memastikan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai	Dinkes, DPMN,
12	Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk pelayanan kesehatan di nagari, sesuai kewenangan	DPMN

b. Menuju *Universal Health Coverage* (UHC)

Pada Tahun 2020, cakupan kepemilikan JKN Kabupaten Pasaman Barat adalah 74,04% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.5 Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No.	Jenis Kepesertaan	Jumlah
1	Penerima Bantuan Iuran	219.984
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	63.671
3	Bukan Pekerja	38.465
4	JKSS Pasaman Barat	35.384
5	Jamkes Tuah Basamo	688
Total		322.120
Jumlah Penduduk tahun 2020		435.059
% Kepesertaan		74,04

Sumber: BPJS Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan data di atas, penduduk Pasaman Barat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN pada tahun 2020 adalah sebanyak 112.939 jiwa. Sementara JKN adalah fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk mendapat jaminan layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh sebab itu, peningkatan cakupan kepesertaan JKN menjadi langkah awal dalam mewujudkan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Pasaman Barat.



Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan cakupan kepesertaan JKN sebesar 96% *Universal Health Coverage (UHC)*. Namun terdapat beberapa kendala yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, yakni:

1) Tingginya Angka Peserta JKN yang Menunggak

Banyaknya peserta yang menunggak iuran menjadi masalah tersendiri dalam pemberian layanan JKN di Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun 2020, terdapat 44.337 peserta yang belum melaksanakan pembayaran iuran, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kelas I : 2.085 orang
- b) Kelas II : 6.314 orang
- c) Kelas III : 5.938 orang

Penyelesaian tunggakan peserta JKN menjadi salah satu prioritas karena keterlambatan pembayaran oleh peserta JKN dapat menghambat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pertama maupun rujukan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan promosi dan komunikasi informasi dan edukasi tentang pentingnya kepemilikan JKN;
- b. Peserta JKN Kelas III yang menunggak dapat dipertimbangkan untuk ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

2) Rendahnya Akurasi Data Peserta JKN

Akurasi data kepesertaan JKN menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKN. Penyusunan metadata peserta JKN menjadi kunci pokok dalam pelaksanaan Proram Pasbar Sehat, berikut beberapa permasalahan data dalam kepesertaan JKN:

- a) Masih terdapatnya data ganda dan data peserta tanpa NIK;
- b) Masih terdapatnya penduduk miskin peserta DTKS yang belum menjadi peserta JKN dan masih terdaftar di Jamkesda Sumbar Sakato, padahal seharusnya dialokasikan melalui PBI JKN yang bersumber dari APBN;
- c) Masih terdapatkan peserta PBI yang tidak memenuhi syarat, seperti aparat nagari atau bahkan pensiunan;

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi dan validasi data:

- a) Pembersihan data administrasi kependudukan, dengan memastikan seluruh peserta, terutama peserta PBI JKN yang ditanggung melalui APBN, APBD Propinsi, maupun APBD Kabupaten, memiliki NIK yang jelas, dan memastikan bahwa peserta yang sudah meninggal atau pindah tidak lagi terdaftar sebagai peserta JKN.
- b) Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikoordinir oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan sosial. Validasi dan pemutakhiran DTKS juga memerlukan dukungan pemerintah nagari dan



peningkatan peran dan fungsi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) yang ada di Nagari. Mekanisme pemutakhiran DTKS dan program dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- c) Memastikan bahwa tidak ada lagi ASN, Pensiunan, maupun Aparat Nagari yang terdaftar sebagai peserta PBI.

3) Rendahnya Peran Lembaga Non-Pemerintah

Untuk meningkatkan kepeserta JKN, strategi lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah:

- a) Meningkatkan kepesertaan di sektor swasta, dengan mendorong para pemberi kerja/perusahaan untuk memastikan pekerjanya menjadi tanggungan dengan jaminan kesehatan, selain jaminan sosial tenaga kerja oleh perusahaan ataupun unit usaha lainnya.
- b) Menjalin kerja sama dengan swasta, agar mengalokasikan pembayaran premi JKN melalui anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- c) Kerjasama dengan lembaga masyarakat, seperti BAZNAS dan lembaga masyarakat lainnya.

2. PASBAR CERDAS

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan bidang pendidikan. Program Unggulan “Pasbar Cerdas” bertujuan untuk mempercepat tercapainya misi pembangunan daerah, yakni:

- a. Membangun SDM yang mampu, mandiri, dan memiliki daya saing;
- b. Membangun sarana dan prasarana pendidikan hingga mampu meningkatkan sumber daya manusia Pasaman Barat;
- c. Mewujudkan cita-cita masyarakat Pasaman Barat pada biaya pendidikan gratis sampai tingkat SMP dan memberikan beasiswa saat persiapan skripsi dan wisuda.

Pelaksanaan Program Unggulan Pasbar Cerdas akan dilakukan melalui beberapa strategi:

- a. Memastikan bebas pungutan sekolah bagi siswa di tingkat pendidikan dasar;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Memaksimalkan peran pemerintah nagari dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. Memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar Pasaman Barat yang tidak mampu dan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi di dalam maupun luar daerah;
- e. Mendirikan Sekolah Unggulan
- f. Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan;



- g. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga pendidikan berbasis masyarakat, swasta, dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan pemuda sebagai generasi penerus, generasi pengganti dan generasi pembaharu.

3. PASBAR MENGAJI

Program “Pasbar Mengaji” merupakan manifestasi pengamalan filsafat *adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Gerakan Pasbar Mengaji ditujukan untuk meningkatkan nilai-nilai agamais ditengah-tengah masyarakat, sehingga akan terbangun kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama serta pembangunan karakter masyarakat berakhlakul karimah. Berikut upaya pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam mempercepat tercapainya misi pembangunan daerah, yakni:

- a. Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. Membangun sarana peribadatan yang mampu menunjang peningkatan ibadah menuju ketaqwaan kepada Allah SWT;
- c. Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran).

Pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar Mengaji” tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kecintaan terhadap Al-Qur’an, namun menjadikan Al-Qur’an sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa target pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar Mengaji”:

- a. Terbentuknya pondok Al-Quran 1 per nagari;
- b. Terbangunnya 1 (satu) unit Rumah Tahfidz milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Munculnya rumah-rumah Tahfidz di seluruh daerah di Kabupaten Pasaman Barat;
- d. Tersedianya regulasi dan pengaturan program Maghrib Mengaji di Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Tersedianya sarana peribadatan dengan fasilitas yang memadai dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ruang diskusi di berbagai bidang.

Untuk tercapainya target-target tersebut di atas, strategi yang dapat dilakukan adalah:

- a. Tersedianya tenaga da’i yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang jelas hingga tingkat kejurongan;
- b. Penyediaan regulasi tentang Pondok Al-Quran dan Rumah Tahfidz, serta program Maghrib Mengaji di Kabupaten Pasaman Barat;
- c. Peningkatan melek Al-Qur’an bagi siswa sekolah dasar, dengan memberdayakan TPA/TPQ/MDA dan meningkatkan kesejahteraan guru mengaji.
- d. Menyediakan *reward system* untuk lembaga Rumah Tahfidz dan Pondok Al-Quran serta masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi terhadap tercapainya program “Pasbar Mengaji”;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program “Pasbar Mengaji”;



- f. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan PASBAR MENGAJI;
- g. Pembangunan Islamic Center di Ibukota Kabupaten;
- h. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk membayar zakat;
- i. Integrasi program PASBAR MENGAJI pada kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan program “Pasbar Mengaji” adalah daerah tidak memiliki kewenangan dalam urusan keagamaan, sehingga daerah tidak memiliki satu organisasi perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan urusan keagamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Unggulan “Pasbar Mengaji” dilakukan dengan memperkuat peran dan fungsi kecamatan sebagai pelaksana urusan kewilayahan dalam memfasilitasi dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan nagari. Berikut langkah-langkah strategis pelaksanaan Program Pasbar Mengaji:

Tabel 6.6 Langkah Strategis Pelaksanaan Program Pasbar Mengaji
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	Strategi	Penanggung Jawab
1	Pengangkatan da'i di setiap kejurongan	Setda, Kecamatan, Nagari
2	Penyediaan Regulasi	Setda
3	Menyediakan <i>reward system</i>	Setda
4	Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa	DPMN
5	Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat	Setda, Dinas Pendidikan, DPMN
6	Pembangunan Rumah Tahfidz	Dinas PU-PR/ Bagian Kesra
7	Pembangunan Islamic Center	Dinas PU-PR/ Bagian Kesra
8	Integrasi program PASBAR MENGAJI pada kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan	Dinas Pendidikan

4. PASBAR MAJU DAN SEJAHTERA

Mewujudkan masyarakat Pasaman Barat Maju dan Sejahtera merupakan cita-cita sekaligus tujuan akhir pembangunan daerah. Pasaman Barat memiliki kontur wilayah beragam, mulai dari daratan, pegunungan hingga lautan. Keragaman topografi wilayah Pasaman Barat menjadikan kabupaten ini memiliki sektor unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, perikanan dan pariwisata. Oleh sebab, peningkatan taraf ekonomi masyarakat dilakukan dengan menitikberatkan perumusan program yang sesuai dengan karakter geografis dan sosiologis masyarakat Pasaman Barat. Melalui program “Pasbar Maju dan Sejahtera”, Pemerintah Kabupaten Pasaman



Barat memiliki tujuan utama untuk membangun ekonomi berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi positif masyarakat Pasaman Barat. Pertumbuhan ekonomi positif masyarakat akan memacu peningkatan kemajuan teknologi dan kesejahteraan masyarakat. Program “Pasbar Maju dan Sejahtera” merupakan perwujudan dari beberapa misi pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2016-2021:

- a. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat dan membebaskan daerah terisolir hingga masyarakat mempunyai ekonomi yang baik dan berkesinambungan;
- b. Membangun kawasan ibukota kabupaten;
- c. Membangun sarana dan prasarana air bersih sehingga masyarakat mudah mendapatkan air bersih;
- d. Membangun irigasi guna menunjang percetakan sawah;
- e. Membangun jalan ke lokasi pertanian masyarakat;
- f. Membangun jalan yang menghubungkan kejurongan yang berasal di pinggir laut menuju ibu kota kecamatan;
- g. Membangun sarana dan prasarana yang menunjang ekonomi nelayan sehingga nelayan merasa nyaman untuk melaut;
- h. Membangun hubungan yang harmonis antara para pengusaha perkebunan dengan masyarakat;
- i. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni;
- j. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha peternakan (sapi, kambing, ayam, dan lain-lain) dan perhatian khusus kepada kejurongan transmigrasi;
- k. Mewujudkan cita-cita masyarakat untuk meningkatkan ekonomi melalui industri rumah tangga;
- l. Melanjutkan pembangunan pelabuhan Teluk Tapang dan Bandara Pusako Anak Nagari sampai selesai;

Program ‘Pasbar Maju dan Sejahtera’ diwujudkan ke dalam beberapa sub program pendukung, yakni:

1) Jalan untuk Rakyat

“Sub program Jalan untuk Rakyat” bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan bagi semua. Jalan adalah sarana utama untuk membuka akses suatu daerah dari keterisolasian. Ketersediaan infrastruktur jalan diperlukan untuk memperlancar arus barang dan jasa menuju dan dari sebuah daerah. Faktanya, sejumlah daerah (jorong) di Kabupaten Pasaman Barat masih mengalami permasalahan dengan akses jalan.

Oleh sebab itu, selama periode 2021-2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui sub program “Jalan untuk Rakyat” akan mencanangkan penyediaan aksesibilitas untuk nagari dan jorong-jorong tertinggal dengan membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Namun upaya pengentasan nagari dan jorong tertinggal masih mengalami beberapa permasalahan, seperti keterbatasan

kemampuan keuangan daerah khususnya alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD. Untuk mengatasi permasalahan kekurangan anggaran ini, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merumuskan beberapa strategi antara lain:

- a) Mengoptimalkan sumber pembiayaan lainnya, mulai dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN;
- b) Menetapkan lokasi dan fokus prioritas dengan kriteria tingkat kebutuhan daerah terhadap akses jalan dan dampaknya bagi perekonomian daerah.
- c) Termasuk sebagai daerah lokus pembangunan *Food Estate*

2) *Food Estate*

Food Estate merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Program *Food Estate* menjadikan sektor pertanian sebagai ujung tombak perekonomian daerah. Konsep dasar program *Food Estate* adalah keterpaduan sektor dan subsektor dalam sistem agribisnis dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari, dikelola secara profesional didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kokoh. Oleh sebab itu, keterlibatan dan peran aktif para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, swasta, masyarakat petani, akademisi sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pelaksanaan *Food Estate*, sebagai konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, modal, organisasi dan manajemen modern, serta pemberdayaan masyarakat adat/ lokal dalam pengembangan wilayah.

Pengembangan kawasan Lumbung Pangan (*Food Estate*) Kabupaten Pasaman Barat untuk tahun 2021 dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Pertama, penumbuhan kawasan *Food Estate* di Kecamatan Kinali (Klaster I), Luhak Nan Duo, Talamau, Gunung Tuleh dan Sungai Aur (Klaster Pendukung). Kedua adalah tahap pengembangan kawasan *Food Estate* dan ketiga adalah tahap mandiri dan berkelanjutan. Adapun usulan kegiatan *Food Estate* yang akan dilaksanakan Kabupaten Pasaman Barat adalah:

1. Pengembangan Komoditi Padi
2. Pengembangan Komoditi Jagung
3. Pengembangan Komoditi Buah-buahan: Alpukat, Durian, Manggis, Jeruk
4. Pengembangan Komoditi Sayuran: Cabe dan Bawang
5. Pengembangan Komoditas Peternakan: Sapi, Kambing, Unggas

Program *Food Estate* merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan di suatu kawasan. Adapun konsep pengembangan *Food Estate* di Kabupaten Pasaman Barat yang diusulkan adalah integrasi antara padi, jagung dan sapi berlokasi di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Sungai Aur dan Gunung Tuleh dan Ranah Batahan.

Konsep *Food Estate* ini dipilih berdasarkan beberapa permasalahan para petani Pasaman Barat. Berikut permasalahan pertanian di Pasaman Barat, pertama

penguasaan tengkulak terhadap hasil panen padi dan jagung untuk kemudian dibawa keluar daerah Kabupaten Pasaman Barat dan dijual kembali dengan harga tinggi di Pasaman Barat. Kedua, menurunnya tingkat kesuburan tanah sehingga rata-rata produksi tanaman pertanian dan perkebunan belum maksimal. Untuk meningkatkan kesuburan tanah diperlukan pengembalian unsur-unsur hara tanah dengan pemberian pupuk dan bahan organik lainnya yang dapat memacu peningkatan kadar kesuburan tanah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat harus mulai mengonsep penyediaan pupuk organik untuk memenuhi kebutuhan pupuk di dalam daerah. Ketiga, kurangnya ketersediaan benih unggul dan belum tersedianya sarana pengolahan pakan ternak yang menggunakan ampas jagung sebagai bahan dasar. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan akselerasi *Food Estate*, maka perlu dilakukan:

1. Penyediaan alat dan mesin pertanian (pra tanam dan pasca panen);
2. Ketersediaan benih unggul;
3. Peningkatan kapasitas penyuluh di lapangan;
4. Adanya jaminan pasar;
5. Pengembangan ternak sapi;
6. Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pupuk organik;
7. Penanganan pasca panen dan pengemasan hasil;
8. Penyediaan sarana dan prasarana pembuatan pakan ternak (bahan baku jagung).

Dasar Pertimbangan pengusulan kawasan di Kecamatan Kinali, Luhak Nan Duo, Talamau, Sungai Aur dan Gunung Tuleh adalah sebagai berikut;

1. Kecamatan Kinali merupakan sentra Padi di Kabupaten Pasaman Barat dengan luas lahan 1.256 Ha.
2. Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan sentra pengembangan Jagung (Kinali seluas 7.371 Ha dan Kecamatan Luhak Nan Duo seluas 6.533 Ha).
3. Nagari Kinali Kecamatan Kinali merupakan salah satu Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat
4. Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan kawasan sentra Pembibitan sapi potong (sentra pembibitan sapi Rakyat)
5. Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo Merupakan sentra pengembangan ayam broiler, ayam petelur, itik dan ayam kampung.
6. Kecamatan Kinali merupakan lokasi pilot project pengembangan Inklusi jagung kerjasama antara OJK perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan Bank pelaksana KUR
7. Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo merupakan sentra Hortikultura Alpukat.
8. Kecamatan Ranah Batahan yang merupakan sentra pertanian lahan basah atau padi di mana pada wilayah ini terdapat Daerah Irigasi Batang Batahan sebagai kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) II Propinsi Sumatera Utara dengan potensi pertanian seluas ± 6.500 Ha, melingkupi 2 (dua) Kabupaten dan Propinsi yaitu Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera



Barat luasan pengembangan sistem jaringan irigasi D.I Batang Batahan seluas $\pm 4.122,10$ ha dan Kabupaten Mandahiling Natal Propinsi Sumatera Utara seluas $\pm 2.377,9$ ha.

Peran aktif masing-masing sektor sangat dibutuhkan dalam mendukung pengembangan kawasan *Food Estate*. Adapun peran masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

Tabel 6.7 Langkah Strategis Pelaksanaan Sub Program *Food Estate*
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	Strategi	Penanggung Jawab
1	Penetapan dan pembinaan kelompok tani berkompeten sesuai komoditi tanaman pangan yang akan dikembangkan, sarana dan prasarana (bangunan, jalan, irigasi, alat panen, pupuk, bibit, pengolahan hasil, dsb).	DTPHP
2	Penetapan dan pembinaan kelompok tani berkompeten sesuai klaster komoditi yang akan dikembangkan, sarana dan prasarana (bangunan, jalan, alat panen, pupuk, bibit pengolahan hasil dsb).	Disbun
3	Penetapan dan pembinaan kelompok untuk pengembangan peternakan terintegrasi dengan komoditi pangan dan perkebunan sesuai klaster komoditi yang akan dikembangkan, sarana dan prasarana (bangunan, pembibitan).	Diskan
3	Penetapan satuan tugas ketahanan pangan dalam pemantauan ketersediaan pangan, keberagaman hasil, keamanan komoditi/konsumsi, evaluasi, monitoring, inovasi pengolahan pangan, packing hasil, kestabilan harga, dsb.	DPMN
4	Mempersiapkan infrastruktur penghubung untuk kemudahan pemasaran hasil dan komoditi untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah (jalan penghubung dari lokasi pertanian ke pabrik/industri (hilirisasi) dan ke pemasaran hasil	DPUPR
5	mempersiapkan sistem kerjasama keuangan, pemasaran hasil baik ekspor ataupun import komoditi atau tukar menukar komoditi bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan serta mewujudkan hilirisasi produk yang berkualitas bahkan menciptakan suatu sistim industri pertanian berkala lokal dan regional.	DKUKM

d) 10.000 *Milenial Entrepreneur* dan *Women Entrepreneur*

Program ini merupakan dukungan Kabupaten Pasaman Barat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat, serta sebagai bagian upaya untuk membangun perekonomian masyarakat. Program 10.000 *Milenial Entrepreneur* dan *Women Entrepreneur* diharapkan akan mendorong munculnya usaha-usaha ekonomi kreatif yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam mengembangkan usaha.

Selama periode 2021-2026, Kabupaten Pasaman Barat ditargetkan berhasil mencetak 9.532 pengusaha baru dari kalangan wanita dan kelompok usia millennial. Ini tentunya bukan target yang ringan, mengingat pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Pasaman Barat masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti:

- 1) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi masih terbatas pada wilayah-wilayah perkotaan. Sementara itu, wilayah pedesaan memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi yang masih relatif terbatas.
- 2) Belum berkembangnya industri kreatif yang bersumber dari sektor pariwisata, karena industri pariwisata sendiri belum begitu berkembang di Kabupaten Pasaman Barat.
- 3) Tidak tersedianya database yang handal dan akurat terkait jumlah pengusaha berdasarkan usia dan terpilah menurut jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat.

Oleh sebab itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan program 10.000 *Milenial Entrepreneur* dan *Women Entrepreneur*, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan potensi daerah untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru di bidang pertanian, perikanan, peternakan, usaha mikro, dan Koperasi untuk mendorong munculnya para pelaku agribisnis. Pengusaha-pengusaha millennial dan pengusaha wanita idealnya tidak hanya berasal dari sektor pariwisata, namun juga dari sektor unggulan daerah;
- 2) Meningkatkan kelembagaan pemuda di bidang pemberdayaan ekonomi;
- 3) Memperkuat kelembagaan wanita di bidang pemberdayaan ekonomi;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kompetensi pemuda;
- 5) Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- 6) Menciptakan iklim investasi yang mudah dan murah;
- 7) Mendorong perkembangan sektor pariwisata dan jasa;
- 8) Meningkatkan konektivitas wilayah dan membangun prasarana komunikasi dan telekomunikasi;
- 9) Menjalin kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media
- 10) Membangun sarana dan prasarana perdagangan
- 11) Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan sentra industri kecil dan menengah, sebagai pusat pengembangan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah.

Tabel 6.8 Langkah Strategis Program 10.000 Milenial Entrepreneur dan Women Entrepreneur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

No.	Strategi	Penanggung Jawab
1	Mengoptimalkan potensi daerah untuk mendorong munculnya pengusaha-pengusaha baru	DTPHP, Disbun, Disketapan
2	Meningkatkan kelembagaan pemuda di bidang	Dispora

	pemberdayaan ekonomi	
3	Memperkuat kelembagaan wanita di bidang pemberdayaan ekonomi	DPPKBP3A
3	Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk meningkatkan kompetensi pemuda	DPMN
4	Meningkatkan kualitas tenaga kerja;	Disnaker
5	Menciptakan iklim investasi yang mudah dan murah;	DPMPTSP
6	Mendorong perkembangan sektor pariwisata dan jasa;	DK-UKM, Dispar
7	Meningkatkan konektivitas wilayah dan membangun prasarana komunikasi dan telekomunikasi;	Dinas PU-PR
8	Menjalin kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, dan media	Setda
9	Mengidentifikasi dan menetapkan kawasan sentra industri kecil dan menengah, sebagai pusat pengembangan, serta promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	DK-UKM
10	Menyediakan pusat pedagang kaki lima/PKL	DK-UKM, Dispar
11	Membangun sarana dan prasarana perdagangan untuk memperlancar arus barang dan jasa	DK-UKM

e) Geopark Talamau

Kawasan geopark Talamau Kabupaten Pasaman Barat sangat komplek dibandingkan kawasan geopark Kota Sawahlunto. Jika kawasan geopark Kota Sawahlunto unik karena “cekungan tarik-pisah pra-tercier dan batubara bawah tanah dengan kualitas terbaik”, maka kawasan *geopark* Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas kompleks pra terciar dan batuan *karts*, endapan bahan galian logam (emas, kromit, dan lokasi bahan galian pasir besi), endapan vulkanik gunung api, hutan yang masih perawan dan alami serta dihuni satwa liar dengan mata rantai makanan yang masih terjaga baik. Kabupaten Pasaman Barat sebagai daerah equator juga mempunyai keunikan geologi yang membentuk perbukitan dan gunung api bak tumbuh dari area dataran rendah yang berakhir pada garis pantai. Sejarah serta mitos penamaan **Geopark Talamau** berasal dari nama Gunung Ophir atau gunung emas, sehingga sampai saat sekarang diwarisi dengan lingkungan dan masyarakat yang berdomosili dengan nama Desa/Jorong Ophir.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan akan diperkuat dengan SK ESDM terhadap potensi bentang dan taman bumi yang ada di kawasan Geopark Talamau, maka konsep *Geoheritage*, *Biodiversity* dan *Culture Diversity* sebagai tiga pilar dan tolak ukur pengembangan kawasan geopark Talamau mengandung makna:

1. *Geoheritage* (warisan geologi) yang terdapat di kawasan geopark Talamau berdasarkan kajian teridentifikasi/terdapat sebanyak 9 *geosite* (situs warisan geologi) meliputi 3 *geosite* yang berperingkat nasional yaitu Geosite Kompleks Pra Tersier Sipangijo di Kecamatan Gunung Tuleh (kategori nasional sekaligus

- internasional), Geosite Gunung Api tidak aktif di Kecamatan Talamau, dan Geosite Ngalau Balik Alam di Kec. Gunung Tuleh (kategori nasional).
2. *Biodiversity* (keragaman flora dan fauna), relatif banyak tumbuh-tumbuhan dan satwa liar dengan kondisi rantai makanan yang masih terjaga dengan baik seperti bunga langka yaitu bunga pemakan bangkai (*amorphopallus titan*) dan biota air yang unik.
 3. *Culture Diversity* (keragaman budaya), kearifan lokal masyarakat dipengaruhi oleh tiga budaya utama yaitu minangkabau yang datang ke Pasaman Barat sebagai perluasan kerajaan pagaruyung; mandahiling yang datang dari utara dengan misi yang sama untuk perubahan teritorial, dan jawa kebanyakan sebagai pekerja yang dibawa zaman Belanda untuk perkebunan.

Kriteria *geopark* yang ditetapkan untuk menjadi prioritas internasional meliputi:

- 1) Geologi dan bentang alam (35%) kawasan;
- 2) Geokonservasi;
- 3) Warisan biologi dan budaya;
- 4) Struktur kepengurusan (25%);
- 5) Penafsiran dan pendidikan lingkungan (15%);
- 6) Geowisata (15%);
- 7) Pembangunan ekonomi regional yang berkelanjutan (10%).

Berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan tersebut, Kabupaten Pasaman Barat telah memenuhi proporsi penilaian geologi dan bentang alam, potensi geokonservasi, warisan budaya, geowisata dan pembangunan ekonomi regional berkelanjutan. Hal ini terbukti potensi geologi dan bentang alam yang dimiliki cukup luas karena meliputi 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Pasaman; kekayaan seni dan budaya seperti perkampungan tradisional minangkabau di Kajai, kunjungan religi buya lubuk landur, ikan larangan, beberapa rumah gadang lambang kerajaan minangkabau yang berkembang, kesenian ronggeng dan reok sebagai tradisi jawa, gondang sembilan tradisi budaya mandahiling, gondang lasuang dan tambua tansa Mandiangin, geowisata serta potensi wisata yang dimiliki dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2021. Namun, Kabupaten Pasaman Barat belum memiliki struktur kepengurusan, penafsiran dan pendidikan lingkungan sedang proses pembentukan dan pementapan pada level Kabupaten. Oleh karena itu, dukungan dan intervensi pemerintah provinsi dan pusat (nasional) serta investor akan sangat membantu dalam memenuhi kriteria tersebut, sehingga kawasan *geopark Talamau* dapat menjadi prioritas internasional.

Potensi sektor pariwisata *geopark* Talamau sebagai geowisata terdiri atas kekayaan dan keindahan alam meliputi *geoheritage* Gunung api tidak aktif Talamau, *geoheritage* Kaldera Danau Laut Tinggal, *geoheritage* Komplek Pratersier Sipangijo, *geoheritage* gua Ngalau Baliak alam, *geoheritage* Bukit Karang Putih, *geoheritage* Aliran Jawa Pinoklastik Gunung Talamau Lubuk Landur, *geoheritage* Air Terjun dan air Panas



Batang Tin, *geoheritage* Air Terjun Batu Merah Sarasah Kajai, *geoheritage* Batu Lipek Kain Kinali.

Proses dan tahapan *geopark* Talamau untuk dapat menjadi situs nasional bahkan Internasional (UNESCO):

A. Kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk pengusulan Geopark Talamau:

1. Kajian potensi *geopark* Talamau, meliputi kegiatan pengumpulan data dukung, sosialisasi potensi, identifikasi, karakteristik dan deliniasi Kawasan Geopark Talamau Pasaman Barat.
2. Surat dukungan Gubernur Sumatera Barat untuk penetapan Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu *geopark* Sumatera Barat;
3. Koordinasi dan konsultasi dengan *geopark* Ranah Minang untuk langkah pembentukan Tim Pokja *geopark* Talamau serta inisiasi dengan penggiat wisata bersama unsur masyarakat, LSM, media cetak dan *geopark* Ranah Minang Provinsi Sumatera Barat;
4. Inisiasi dengan Kepala Daerah dan OPD Pemda Pasbar terkait;
 - Pembentukan dan penetapan Tim Pokja Percepatan Geopark Talamau;
 - Persiapan Penyusunan Dokuimen Dossier, pengusulan warisan geologi ke Kementerian atas rekomendasi Gubernur Sumbar;
 - Identifikasi, verifikasi data Usulan Geopark Talamau oleh Kementerian ESDM;
 - FGD dan penandatanganan hasil warisan geologi Pasaman Barat untuk diterbitkan Surat Keputusan Warisan Geologi (*Geoheritage*) berperingkat nasional oleh Menteri ESDM RI.

B. Kegiatan lanjutan untuk pemenuhan kelengkapan menuju Penetapan Geopark Talamau secara nasional:

1. SK Penetapan Geopark Talamau sebagai salah satu situs nasional dari Kementerian ESDM (sedang proses);
2. Komitmen Kepala daerah (Bupati Pasaman Barat) untuk kerjasama kemajuan *geopark* Talamau ;
3. Membuat dokumen Dossier (rencana anggaran tahun 2021);
4. Penyusunan Master Plan (rencana anggaran tahun 2021);
5. Penetapan kerjasama para pihak baik institusi pemerintah daerah, provinsi dan nasional, swasta, masyarakat, aliansi, kelompok, organisasi masyarakat tertentu, aktifis lingkungan, pariwisata dan sebagainya.;
6. Sosialisasi dengan masyarakat terkait program dan kegiatan;
7. Pembentukan, Pembekalan dan Pemantapan Tim Penggerak (Pokja) *geopark* Talamau;
8. Penetapan penanganan *geopark* Talamau pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dan kewenangan penanganan *potensi batuan karts*;
9. Pengembangan dan penguatan fungsi kelembagaan dalam Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo telah memiliki Gapoktan, Koperasi Pertanian, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan (KEP);

10. Kecamatan Talamau sebagai sentra padi dan hortikultura untuk mendukung *Agro Tecknopark* Talamau, dengan kawasan padi di Nagari Sinuruik dan Nagari Talu, kawasan palawija (jagung, ubi jalar, kacang tanah) dan Kawasan hortikultura (bawang merah, cabe dan sayuran lainnya);
11. Adanya lahan yang diserahkan oleh Raja Talu untuk dimanfaatkan melalui Peraturan Nagari Talu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanah Ulayat dengan luasan + 8.000 Ha diantaranya merupakan lahan bekas HGU terlantar PT. Agro Sari Merapi seluas + 3.000 Ha, adapun komoditi yang akan dikembangkan adalah Durian, Manggis, Jeruk, Cabe, Bawang dan Kopi;
12. Tersedianya potensi lahan padi gogo dan cabe di Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Gunung Tuleh dimana lokasi lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 100 Ha.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan yang dituangkan ke dalam program-program strategis dan unggulan daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan dan mengimplementasi strateginya, dirumuskan program unggulan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1.1.1: Penyederhanaan Birokrasi Pemerintahan

Penyederhanaan birokrasi merupakan pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Penyederhanaan birokrasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga akan tercipta birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, efektifitas dan efisiensi, optimalisasi kinerja serta profesionalitas ASN. Perspektif penyederhanaan birokrasi pemerintahan dilakukan melalui beberapa cara, yaitu:

- 1) Penyederhanaan organisasi, melibatkan evaluasi terhadap kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang ada saat ini. Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah terpilih, tugas pokok dan fungsi organisasi, serta kemampuan keuangan daerah;
- 2) Penyederhanaan eselonisasi dan perluasan jabatan fungsional, dilakukan untuk memperpendek proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem eselonisasi yang ada saat ini dinilai memperpanjang prosedur administrasi dan sistem pengambilan keputusan;
- 3) Penyediaan *merit system*;
- 4) Menjamin SDM Aparatur yang profesional.

Strategi penyederhanaan birokrasi pemerintahan dilakukan melalui program pembangunan daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.9
Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penyederhanaan Birokrasi
Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
2.	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%
3.	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan administrasi Sekretariat DPRD	100%	100%
4.	Program Administrasi umum	Persentase Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Umum	100%	100%
5.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	-	100%
6.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	-	100%
7.	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai/ASN)	81,25%	87%
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karier (Diklat kepemimpinan/ teknis; tubel; ujian dinas/ kompetensi; pengembangan karier /jabatan)	-	4,2%
9.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	10 OPD	15 OPD

Strategi 1.1.2: Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Secara Efektif dan Efisien

Pembangunan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, hingga proses evaluasi. Namun saat ini proses tahapan pembangunan tersebut masih belum terintegrasi khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Keselarasan sistem perencanaan hingga proses penganggaran mempengaruhi tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Meskipun sistem perencanaan pembangunan secara substantif telah dilakukan dengan proses *top-down*, *bottom-up*, politis, dan teknokratik, namun perencanaan fiskal yang memuat rencana anggaran saat ini dan rencana anggaran masa depan, pendapatan, dan alokasi anggaran belum bersinergi sehingga masih ada

sejumlah tantangan yang harus dijawab untuk menciptakan sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi, antara lain:

- 1) Penerapan sistem *money follow program*;
- 2) Penguatan sistem data dan aksesibilitas data;
- 3) Penguatan peran kelitbangan daerah;
- 4) Reformasi sistem monitoring dan evaluasi pembangunan;
- 5) Memperkuat kemandirian desa secara administratif, keuangan, dan kelembagaan.
- 6) Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Strategi pengelolaan sistem perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.10
Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pengelolaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	93,94%	100%
2.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	72,34%	100%
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	30 hari sebelum tahun anggaran APBD
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP	100%	100%
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	72,13%	100%
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang terintegrasi (Note: data perurusan = 31)	74,19% (23 dari 31 OPD)	100%
7.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	-	90%
8.	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	0	0
9.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rata – rata persentase capaian pendapatan asli nagari (persentase desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa?)	80%	85%
10.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	persentase Desa Swasembada (Persentase Status Desa Mandiri menurut IDM)	0	10,53%

Strategi 1.1.3: Pematangan sistem pengendalian internal pemerintah daerah untuk meminimalisir ketidakpatuhan

Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya keefektifan dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun unsur SPIP:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan Pengendalian Intern

Mekanisme pematangan sistem pengendalian internal dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien.

Strategi Pematangan sistem pengendalian internal pemerintah daerah dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.11

Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Pematangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan BPK	10%	5%

Strategi 1.2.1: Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik dan penguatan pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah pada semua tingkatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi pelayanan publik kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Penyediaan informasi pelayanan publik merupakan upaya mewujudkan *good governance* yang menjamin akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Strategi ini diimplementasikan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan diseminasi informasi publik dengan membuka akses publik terhadap informasi;
- 2) Meningkatkan pelaksanaan tata kelola sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi.

Oleh karena itu, strategi daerah untuk melakukan penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik yang dilakukan melalui program sebagai berikut:

Tabel 6.12 Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja (2026)
1.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID/ Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	50%	100%
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	0	Level 3
3	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	29,23	69,81
4	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten	30	90

Strategi 1.2.2: Penyelenggaraan e-government

Penyelenggaraan *e-government* merupakan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan publik terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai suatu model sistem pemerintah yang berlandaskan pada kekuatan teknologi digital. Implementasi *e-government* akan memberi peluang untuk mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan sistem *e-government* perlu memperhatikan aspek teknis dan non teknis sesuai dengan kebutuhan daerah. Berikut arah kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan *e-government*:

- 1) Meningkatkan kualitas tata kelola penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- 2) Melaksanakan penatalaksanaan dan pengawasan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun strategi penyelenggaraan *e-government* dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.13
Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Penguatan Tata Kelola Informasi Dan Komunikasi Publik di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	100%

Strategi 1.3.1: Mendorong inovasi dalam pelayanan publik

Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor seyogianya didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, termasuk didalamnya pembenahan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informatika.

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sampai saat ini belum memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan dan masyarakat. Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang telah dibangun belum terlaksana secara optimal. Begitu pula dengan rekomendasi kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan yang berasal dari hasil riset dan kajian juga belum banyak dihasilkan. Untuk itu ke depan perlu didorong pelaksanaannya agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif dan efisien serta menjadi daerah yang berdaya saing tinggi. Berikut upaya yang dilaksanakan dalam mendorong inovasi dalam pelayanan publik:

- 1) Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam pemberian pelayanan publik;
- 2) Meningkatkan inovasi dan penguatan digitalisasi pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan pelayanan publik yang nyaman, cepat dan mudah.

Strategi mendorong inovasi dalam pelayanan publik dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.14
Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendorong Inovasi Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase inovasi daerah yang ditindaklanjuti	30%	100%

Strategi 1.3.2: Mengurangi Rata-Rata Waktu Pelayanan Bagi Masyarakat

Salah satu peran pemerintah dalam pembangunan adalah memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Layanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah belum memenuhi dimensi kualitas pelayanan publik sehingga proses layanan publik terhadap masyarakat belum diselenggarakan secara cepat, murah, dan mudah. Oleh karena itu, aspek pelayanan publik dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana;
- 2) Pemanfaatan teknologi untuk pelayanan;
- 3) Menyiapkan SDM pelayanan yang handal;
- 4) Menyiapkan norma, sistem dan prosedur yang mendukung kemudahan pelayanan publik;
- 5) Menyediakan sistem reward dalam pelayanan publik.

Strategi mengurangi rata-rata waktu pelayanan bagi masyarakat (dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.15

Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mengurangi Rata-Rata Waktu Pelayanan Bagi Masyarakat (di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	82,80%	83,34%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85

Strategi 2.1.1: Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berupaya dalam mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat dengan menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan keagamaan;
- 2) Mendorong pendayagunaan mesjid dan rumah ibadah lainnya sebagai wadah komunikasi ummat;
- 3) Peningkatan melek Al-Qur'an bagi siswa sekolah dasar;
- 4) Meningkatkan pendidikan agama dalam keluarga;
- 5) Penyediaan regulasi tentang Pondok Al-Quran dan Rumah Tahfidz, serta program Maghrib Mengaji;
- 6) Membangun sarana tempat belajar membaca Al-Quran (Pondok Al-Quran);



- 7) Penyediaan tenaga da'i yang memiliki tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang jelas hingga tingkat kejurongan;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program "Pasbar Mengaji";
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Agama, lembaga keagamaan, dan lembaga adat dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan Program Unggulan "Pasbar Mengaji";
- 10) Pembangunan Islamic Center
- 11) Menyediakan *reward system* untuk lembaga Rumah Tahfidz dan Pondok Al-Quran serta masyarakat yang berprestasi dan berkontribusi terhadap tercapainya program "Pasbar Mengaji".

Strategi Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.16 Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mendorong peningkatan aktivitas keagamaan di masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	% Capaian program Pasbar Mengaji oleh Kecamatan	100%	100%

Karena keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keagamaan, program keagamaan lebih difokuskan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan oleh kecamatan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, salah satu sub-kegiatan pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan.

Selain itu, pelaksanaan Program Pasbar Mengaji akan didukung oleh perangkat daerah lain, seperti perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam mendorong pemerintah nagari untuk mengalokasikan anggaran di bidang keagamaan. Demikian juga perangkat daerah yang membidangi pendidikan dapat mengarahkan muatan lokal di satuan pendidikan untuk mendukung program pemerintah daerah di bidang keagamaan. Namun, perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan yang membidangi pendidikan tidak memiliki program khusus bidang keagamaan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Strategi 2.1.2: Mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat, dengan cara:

- 1) Meningkatkan pendidikan adat dan budaya;
- 2) Pembinaan lembaga adat;

- 3) Tersedianya sistem reward bagi perorangan atau organisasi yang berkontribusi terhadap pengembangan nilai-nilai budaya lokal;
- 4) Adanya praktik baik (*best practice*) dalam pengamalan adat dan budaya lokal;
- 5) Mendorong partisipasi lembaga adat, tokoh adat, organisasi pemuda, tokoh masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya lokal.

Strategi mengintegrasikan nilai adat dan budaya dalam kehidupan masyarakat, melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.17 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Mengintegrasikan Nilai Adat dan Budaya Dalam Kehidupan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja (2021)
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%)	58	88
2	Program Pengembangan Sejarah	Sejarah lokal yang terdokumentasi	0	10 sejarah
3	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58% (7 dari 12 Benda, situs cagar budaya)	75
4	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase seni dan budaya yang dilestarikan (jumlah seni dan budaya yang dilestarikan/total seni dan budaya yang ada x 100%)	-	60

Strategi 2.2.1: Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengamalkan ajaran agamanya

Menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah. Berikut upaya yang dilaksanakan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mengamalkan ajaran agamanya:

- 1) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
- 2) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam memperkuat jati diri dan kepribadian serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Strategi menjamin keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.18 Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Menjamin Keamanan dan Kenyamanan bagi Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja 2026
1.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	77	100
2.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20 menit	15 menit
3.	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi Note: (koordinasi trantibum yang difasilitasi / jumlah pengaduan*100).	-	100%

Strategi 2.2.2: Mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun

Perlakuan diskriminatif dan kekerasan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas masih menjadi salah satu isu yang dapat memperlambat pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat. Upaya mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun, dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Penyediaan regulasi yang inklusif dan responsif gender
- 2) Penguatan SDM kelembagaan perlindungan anak, lansia, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas;
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi serta memberikan hak sipil anak;
- 4) Advokasi bagi OPD dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
- 5) Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, melalui pendewasaan usia perkawinan anak; dan penguatan kelembagaan dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan keluarga

Strategi Mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.19 Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Mencegah dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas di mana pun di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	% ARG pada belanja langsung APBD	4,63	12
2.	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 jiwa perempuan	0,70	0 (tidak ada kasus)
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	TPAK Perempuan	45,46	45,75
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang menyediakan data terpilah gender	87,94%	100%
5	Program Pemenuhan Hak Anak	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	500	>800
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 jiwa anak	0,02	0

Strategi 2.3.1: Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan masyarakat bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup atau kemakmuran masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat dapat diwujudkan melalui;

- 1) Penyediaan perluasan informasi kebencanaan;
- 2) Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana kebencanaan;
- 3) Pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Pendampingan psikososial korban bencana;
- 5) Pendidikan politik sehat bagi masyarakat;
- 6) Penguatan partisipasi masyarakat, Lembaga swasta, media, dan perguruan tinggi;
- 7) Penanganan konflik pertanahan.

Strategi Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.20 Program Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja 2026
1.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pementapan ideologi	0	20%



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja 2026
2.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	68%	70%
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	-	50%
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Penurunan kasus konflik	5%/ tahun	5%/ tahun
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang ditangani (%)	100	100
6.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,102	6
7.	Program penanggulangan bencana	% warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	77,55	100
8.	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks kualitas air	42,5	42,95
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,86	93,91
9.	Program pengelolaan keanekaragaman hayati	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46,68	46,73
10.	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan LH (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota %)	92,86 (13/14 x 100)	100
11.	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	% penanganan pengaduan	100	100
12.	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	% verifikasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	100	100
13.	Program perencanaan lingkungan hidup	Dokumen yang disusun (RPPLH, KLHS Revisi RPJMD)	2	2
14	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal	0	13



No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja 2026
	Hukum Ada (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi		
15	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1. Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11	34
		2. Penghargaan Kalpataru	2	10
		3. PROPER Daerah	6	10
		4. Sekolah Adiwiyata	3	14
16	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Note: (Realisasi / Rencana * 100) → Musrenbang, PKK Kec	-	100
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Note: (Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan * 100)	-	100
18	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi (%)	0	100
19	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	100	100
20	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	0	15

Strategi 3.1.1: Memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dengan cara:

- 1) Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan;
- 2) Pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, formal, non-formal, dan informal yang mudah diakses;
- 4) Menyediakan sistem 'penjemputan' bagi siswa yang putus sekolah;
- 5) Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin;
- 6) Menyediakan pendidikan dasar gratis bagi masyarakat;
- 7) Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus.

Strategi Memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.21 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Memastikan tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja (2026)
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99,94	100

Strategi 3.1.2: Meningkatkan kualitas hasil belajar, dilakukan melalui:

- 1) Pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi;
- 2) Memastikan ketersediaan sarana belajar yang layak;
- 3) Peningkatan kualitas muatan lokal;
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi Meningkatkan kualitas hasil belajar, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.22 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan kualitas hasil belajar di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SNP 4	SNP
3.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	100	100

Strategi 3.1.3: Peningkatan Minat Baca Masyarakat, dilakukan melalui:

- 1) Meningkatkan promosi dan sosialisasi minat membaca;
- 2) Meningkatkan penguatan Lembaga dan kapasitas organisasi perpustakaan;
- 3) Meningkatkan ketersediaan pelayanan perpustakaan di masyarakat dan pengembangan komunitas literasi/ TBM menjadi media membaca masyarakat;
- 4) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan;
- 5) Meningkatkan pengembangan diversifikasi layanan dan jejaring perpustakaan berbasis TIK.

Strategi meningkatkan minat baca masyarakat, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.23 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Minat Baca Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja (2026)
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	29.100 orang	30.758 Orang
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	0	4 dokumen

Strategi 3.2.1: Memastikan setiap penduduk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dilakukan dengan cara:

- 1) Pemenuhan SPM bidang Kesehatan;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai hingga ke pemberi layanan terdepan di masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional.

Strategi memastikan setiap penduduk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.24 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka memastikan setiap penduduk mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40,36	100% (12/12 indikator SPM x 100) + SPM RSUD
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM yang memiliki kompetensi (jumlah nakes yang memiliki STR/total nakes x 100)	-	75
3.	Program sediaan farmasi, alkes, dan makanan minuman	Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan (Jumlah penyedia yang memenuhi persyaratan/total penyedia x 100)	-	75



Strategi 3.2.2: Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan, dilakukan dengan cara:

- 1) Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
- 2) Promosi perilaku hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan;
- 3) Peningkatan Minat dan Budaya Berolahraga Masyarakat;
- 4) Penanganan persampahan secara terpadu dan pengurangan volume sampah;
- 5) Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Strategi Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.25 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja (2026)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Jorong PHBS	54,5	75
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	3 prestasi	30 prestasi
3.	Program Pengelolaan Persampahan	% Sampah yang tertangani	27,58	29,50
4.	Program Pengembangan dan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	3 kecamatan	5 Kecamatan

Strategi 3.2.3: Melaksanakan konvergensi pencegahan stunting di semua tingkatan, dilakukan dengan cara:

- 1) Penyusunan Kebijakan tentang Pencegahan Stunting;
- 2) Penyusunan strategi untuk melibatkan swasta, masyarakat madani, dan komunitas;
- 3) Kampanye Komunikasi Perubahan Perilaku, dengan arah kebijakan:
- 4) Terlaksananya konvergensi tingkat daerah dan nagari, dengan strategi:
- 5) Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar;
- 6) Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan

Strategi melaksanakan konvergensi pencegahan stunting dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tim kerja Konvergensi Pencegahan Stunting Kabupaten Pasaman Barat yang dikoordinatori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu intervensi dalam pencegahan stunting adalah perbaikan gizi masyarakat melalui:

- 1) Penguatan konvergensi dalam penanganan stunting, mulai dari tingkat nagari hingga tingkat kabupaten;
- 2) Meningkatkan pengetahuan gizi masyarakat;
- 3) Meningkatkan advokasi 1000 Hari Pertama Kehidupan;

- 4) Pemenuhan asupan kalori dan protein per kapita sesuai standar;
- 5) Menjadikan keluarga 1000 HPK sebagai prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan

Strategi Perbaikan status gizi masyarakat, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.26 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Perbaikan status gizi masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan:	40,36%	100%
2.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%Ketersediaan energi dan protein perkapita	90,60%	90,75%

Strategi 3.3.1: Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu staretegi penting dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Semakin tinggi laju pertumbuhan pendudukan maka akan berakibat pada semakin besarnya upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat memicu timbulnya permasalahan lain, seperti rendahnya kualitas hidup dan kualitas penduduk. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk menjadi strategi penting yang dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Mengatur Fertilitas;
- 2) Menurunkan Mortalitas;
- 3) Revitalisasi Program KB;
- 4) Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
- 5) Membangun administrasi kependudukan yang handal;
- 6) Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya.

Strategi Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.27 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3,05	3
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 – 49	65,98	68

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	53,31	75
2.	Program Pencatatan Sipil	1. Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (%)	98,63	100
		2. Persentase penduduk usia ≤ 18 th yang mempunyai akte kelahiran	95,88%	100%
		3. Persentase penerbitan akta kematian	100%	100%
		4. Persentase penerbitan akta perceraian	100%	100%
3.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun
4.	Program pendaftaran penduduk	1. Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	72,38	86,67
		2. Persentase penduduk yang memiliki KK	98,01%	100%
		3. Persentase penduduk usia ≥ 18 th yang memiliki KTP	94,12%	100%
		4. Persentase Kepemilikan KIA	25%	60%
5.	Program pengelolaan informasi kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	3 OPD	30 OPD

Strategi 4.1.1 Mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin, dilakukan dengan cara:

- 1) Menyediakan sistem perlindungan komprehensif bagi masyarakat miskin;
- 2) Penanganan PPKS;
- 3) Membangun sistem data yang handal dalam penanganan kemiskinan;
- 4) Penguatan lembaga koordinasi dalam penanganan kemiskinan;
- 5) Peningkatan peran serta masyarakat, wasta, organisasi masyarakat, pemuda, media, dan perguruan tinggi dalam program pengentasan kemiskinan;
- 6) Peningkatan keberdayaan masyarakat Nagari;
- 7) Pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
- 8) Peningkatan keberdayaan ekonomi perempuan dan lansia produktif;
- 9) Menyediakan kebutuhan dasar masyarakat atas permukiman yang layak, air bersih dan sanitasi layak.

Strategi Mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.28 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Mengurangi persentase dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Pemberdayaan Sosial	1. LKS Anak Binaan	12 LKS	12 LKS
		2. LKS Lanjut Usia Binaan	0	1 skala kab
		3. LKS Penyandang Disabilitas Binaan	0	1 skala kab
		4. Persentase Karang taruna aktif	-	30
2	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94,38%	100%
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	100%
4	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (Indikator SPM)	100%	100%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1. Persentase Lembaga Sosial Aktif di Nagari	100%	100%
		2. Persentase Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari	63,33%	75%
		3. Persentase Lembaga Adat Aktif di Nagari	10,52%	100%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Indikator SPM dalam %)	71,90%	100%
7	Program Kawasan Pemukiman	Persentase areal kawasan kumuh	5,15%	1,48%
8	Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Indikator SPM)	0	100
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (Indikator SPM)	100	100
9	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	86,67	92,34
10	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase luas lahan perumahan bersertifikasi yang dibangun oleh pengembang	0	95%



No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0,15	0,95
12	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan terdaftar	30%	70%
13	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan dalam kondisi baik dan layak	60%	75%
14	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	20%	40%
15	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditi yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	1 komoditi	6 komoditi
16	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pasar tertib ukur	7 pasar	10 pasar
17	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	8 produk	13 produk
18	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Pertumbuhan Perizinan	35%	42%
19	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi berkualitas	35%	55%
20	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang sehat	30 KSP/USP	30 KSP/USP
21	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	3,32%	7%
22	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2%	2,5%
23	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi usaha kecil	3%	3,5%
24	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan	2%	3,5%

Strategi 4.2.1: Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui Pendidikan dan pelatihan. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah dengan membangun Balai Latihan Kerja yang bertempat di Nagari Persiapan Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo sebagai tempat untuk Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja. Berikut upaya yang dilakukan dalam implementasi strategi meningkatkan kompetensi tenaga kerja:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi;
- 2) Meningkatkan penguatan BLK;
- 3) Meningkatkan Lembaga produktifitas.

Strategi meningkatkan kompetensi tenaga kerja, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.29 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana tenaga kerja yang disusun	Tidak Ada (0)	10 Dokumen
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1,72%	3%
3	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah eks jorong transmigrasi yang difasilitasi program SDM	Tidak Ada (0)	23 jorong

Strategi 4.2.2: Menyediakan Sistem Perlindungan bagi tenaga kerja

Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah daerah juga harus memperhatikan sistem perlindungan bagi tenaga kerja. Strategi yang direncanakan dalam rangka perlindungan bagi tenaga kerja adalah dengan menyediakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sistem perlindungan hukum dan sosial universal bagi tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan penerapan sistem perlindungan sosial universal bagi pekerja.

Strategi Menyediakan Sistem Perlindungan bagi tenaga kerja, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.30 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Menyediakan Sistem Perlindungan bagi tenaga kerja di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	85%	90%

Strategi 4.2.3: Memperluas lapangan kerja, dengan cara mendorong penanaman modal dan promosi peluang investasi sesuai komoditi unggulan

Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memperluas lapangan kerja sehingga bisa membua seluas-luasnya kesempatan kerja bagi seluruh tenaga kerja, disamping itu pemerintah harus mampu mempromosikan peluang-peluang investasi sehingga mampu mendorong penanaman modal dan membuka lapangan kerja baru terhadap tenaga kerja Kabupaten Pasaman Barat. Adapun arah kebijakan yang dilakukan dalam mengimplementasikan strategi di atas adalah:

- 1) Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal;
- 2) Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan serta kebijakan antar sektor dan wilayah;
- 3) Meningkatkan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi.

Strategi Memperluas lapangan kerja, dengan cara mendorong penanaman modal dan promosi peluang investasi sesuai komoditi unggulan, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.31 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Memperluas lapangan kerja, dengan cara mendorong penanaman modal dan promosi peluang investasi sesuai komoditi unggulan di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	13,79%	25%
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN/ PMA	47,88 miliar	55 miliar
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	0	3 MoU
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA (%)	-11,16	10
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Tidak Ada (0)	Ada (100)

Strategi 4.3.1. Peningkatan kemandirian pangan, dilakukan dengan cara:

- 1) Mengatasi daerah rawan pangan;
- 2) Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
- 3) Mendorong diversifikasi pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Strategi Peningkatan kemandirian pangan, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.32 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Peningkatan kemandirian pangan di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	-	100%
2.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	40%
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	112%	100%



4.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi per kapita dan protein perkapita (%)	90,60%	90,75%

Strategi 4.3.2. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dilakukan dengan cara:

- 1) Mengembangkan komoditas unggulan berdasarkan lokasi prioritas;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berbasis komoditi unggulan dan lokasi prioritas;
- 3) Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian;
- 4) Penguatan kelembagaan petani;
- 5) Penyediaan sistem irigasi terpadu ke kawasan sentra komoditi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- 6) Membangun akses ke kawasan sentra komoditi unggulan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Strategi Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.33 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Persentase ketersediaan bibit ternak	25%	40%
		2. Persentase ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak	10%	25%
		3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang)	2787.800 ton	137.840 ton
		4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung)	147.471 ton padi, 262.510 ton jagung	126.007 ton padi, 299.752 ton jagung
		5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	10.607 ton cabe, 10.420 ton jeruk, 3.398 ton alpukat
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1	69 km (disbun), 50 km, 35 unit,

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
			unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	100 km, 11 unit 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	50%	85%
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)(Disbun)	15% (disbun)	80%(disbun)
6	Program Penyuluhan Pertanian	1. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. Persentase penyuluh dan petani yang terlatih	1% 1%	7% 7%
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	81	90
8	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106.193 ton	112.276 ton
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.911 ton	6.275 ton
10	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	3 POKMASWAS	5 POKMASWAS
11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	2 jenis	5 jenis
12	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78,85%	89,65%

Strategi 4.3.3. Hilirisasi komoditas unggulan lokal, dengan cara:

- 1) Mengidentifikasi dan menetapkan klaster industri kecil dan menengah;
- 2) Membangun sarana dan prasarana pengembangan klaster IKM;
- 3) Penerapan Teknologi Tepat Guna;
- 4) Mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di lokasi prioritas;
- 5) Penguatan sistem pemasaran produk olahan lokal;
- 6) Menjalinkan kerjasama dengan swasta, lembaga masyarakat, pendidikan, dan media dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat.



Strategi Hilirisasi komoditas unggulan lokal, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.34 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Hilirisasi komoditas unggulan lokal di Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi	0	2 kawasan sentra
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase industri rumah tangga yang dibina	2,5%	4%
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah <i>data base</i> IKM	1 dokumen	1 dokumen
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	5 DTW
5	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah Kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 wisatawan Rp 902.777.242	51.500 wisatawan Rp1.150.000.000
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	13%	28%
7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	13%	20%

Strategi 4.3.4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi berkelanjutan dan pelayanan dasar, dilakukan dengan cara:

- 1) Pengentasan daerah tertinggal/ terisolir dan pembangunan daerah perbatasan;
- 2) Membangun infrastruktur perkotaan;
- 3) Pembangunan wilayah Pantai Barat Pasaman Barat dalam rangka mitigasi bencana;
- 4) Membangun sarana dan prasarana perhubungan;
- 5) Membangun sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi.

Strategi Menjamin keberlangsungan dan kelancaran distribusi barang dan jasa baik melalui darat, laut, dan udara dari, di dalam, dan keluar Pasaman Barat, dilakukan melalui program pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.35 Program Pembangunan Daerah dalam Rangka Pembangunan dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Sektor Strategis

No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Kinerja Awal Perencanaan	Target Kinerja
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	56,66	60
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	56,66%	60%
3	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	12,5	15,51
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya (%)	-	100%
5	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-	50%
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan (%)	78,41%	100%
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	25%	60%
8	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun	550 ton & 792 orang/ tahun	1000 ton & 1500 org/ tahun
9	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang Melalui bandara per tahun	170 kg & 450 orang	170 kg & 750 orang

6.3 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 yang disertai pagu indikatif disajikan pada tabel berikut :



Tabel 6.36
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggun Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TOTAL ANGGARAN						1,200,786,164,498		1,209,104,813,333		1,234,495,265,950		1,263,243,652,830		1,292,449,055,348		1,324,236,414,204		7,509,175,921,196	
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif						730,331,310,195		795,900,202,969		802,463,108,110		808,088,076,110		814,454,176,368		821,686,058,166		4,772,922,931,918	
Tujuan 1 : Penerapan tata kelola pemerintahan profesional, akuntabel dan inovatif		Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB	C (49,19)	CC (53)	730,331,310,195	CC (58)	795,900,202,969	B (62)	802,463,108,110	B (65)	808,088,076,110	B (68)	814,454,176,368	BB (71)	821,686,058,166	BB (72)	4,772,922,931,918	
1.1. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Opini BPK atas laporan keuangan daerah		WTP	WTP	715,068,413,908	WTP	787,094,051,924	WTP	792,461,471,533	WTP	797,993,658,612	WTP	803,614,151,606	WTP	809,861,290,732	WTP	4,706,093,038,314	
		Nilai SAKIP		B (60,82)	B (62)		B (65)		B (68)		BB (71)		BB (73)		BB (75)		BB (78)		
		Level Maturitas SPIP		1.98	2.11		2.35		2.48		2.6		>2,6		>2,6				
		Tingkat Kapabilitas APIP		1.86	2		3		3		3		3		3				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	619,838,343,010	100	635,882,832,207	100	639,888,042,149	100	643,985,655,526	100	648,133,746,433	100	652,333,169,731	100	3,840,061,789,057	Seluruh OPD
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Pemenuhan kebutuhan adm	-	100	4,429,079,943	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,352,504,000	100	15,743,503,943	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti/ jumlah kebijakan yang	-	100	1,237,550,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	427,728,000	100	3,294,718,000	Sekretariat Daerah



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			dihasilkan x 100																
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD/ Tugas dan fungsi yang semestinya x 100	100	100	8,834,694,700	100	7,834,694,700	100	7,834,694,700	100	7,860,900,000	100	7,860,900,000	100	8,253,945,000	100	48,479,829,100	Sekretariat DPRD
4.02.03	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan administrasi Sekretariat DPRD	Layanan adm DPRD terpenuhi / kebutuhan x 100	-	-	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	520,250,000	Sekretariat DPRD
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah program OPD yang sesuai dengan RPJMD dan RKPD / Jumlah Total Program RPJMD dan RKPD x 100	93.94	94,5	663,871,856	96	400,000,000	97	400,000,000	98	400,000,000	99	420,000,000	100	441,000,000	100	2,724,871,856	Bappeda
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah OPD dengan nilai perencanaan minimal BAIK/ Total OPD x 100	72.34	75	934,744,523	80	700,000,000	85	700,000,000	90	700,000,000	95	735,000,000	100	771,750,000	100	4,541,494,523	Bappeda
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Sesuai aturan penetapan APBD	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	76,974,180,452	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	137,305,471,617	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	138,678,526,333	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	140,065,311,597	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	141,465,964,712	100	142,880,624,360	100	777,370,079,071	BPKD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP	Jumlah OPD yang menata BMD sesuai SOP/ Total OPD x 100	100	100	554,054,400	100	581,318,400	100	554,054,400	100	554,054,400	100	554,054,400	100	581,757,120	100	3,379,293,120	BAPD
5.02.0	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	Total realisasi PAD / Target x 100	72.13	75	1,601,895,024	80	1,641,895,000	85	1,658,313,950	90	1,674,897,090	95	1,691,646,060	100	1,708,562,521	100	9,977,209,645	BAPD
1.2. Terwujudnya Birokrasi yang efisien dan efektif		Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB	58	70	12,583,020,263	70	7,018,555,085	75	7,165,630,418	75	7,205,630,418	80	7,870,786,401	80	8,038,796,593	80	49,882,419,176	
		Indeks Maturitas SPBE	Perhitungan Indeks oleh KemenPAN-RB	1.86 (cukup)	1.98		2.11		2.25		2.35		2.48		2.6		>2,6		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	Jumlah nagari tertinggal / jumlah nagari x 100	0 (tidak ada yang tertinggal)	0	5,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	11,692,163,200	DPMN
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rata – rata persentase capaian pendapatan asli nagari	Jumlah capaian Pendapatan Asli Nagari/ Target x 100	80	-	-	81	20,000,000	82	20,000,000	83	20,000,000	84	20,000,000	85	20,000,000	85	100,000,000	DPMN
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Status Desa Mandiri menurut IDM	Jumlah desa mandiri pada IDM/ jumlah desa x 100	-	5	807,447,700	6	507,447,700	7	507,447,700	8	507,447,700	10.53	507,447,700	10.53	507,447,700	10.53	3,344,686,200	DPMN



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	Jumlah OPD dan Nagari yang melakukan publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID/ Jumlah OPD dan Nagari x 100	50	75	1,042,899,145	80	1,042,899,145	85	1,042,899,145	90	1,042,899,145	95	1,542,899,145	100	1,516,223,456	100	7,230,719,181	Dinas Kominfo
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah / Jumlah OPD x 100	71.19	80	200,000,000	85	203,680,000	90	345,448,145	95	345,448,145	95	417,992,254	100	459,791,479	100	1,972,360,023	Diskominfo
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Tingkatan pada KAMI	0	1	106,143,750	1	106,143,750	2	111,450,938	2	111,450,938	2	122,874,659	3	129,018,392	3	687,082,425	Diskominfo
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah OPD dengan nilai Indeks Arsip Minimal CUKUP / total OPD x 100	29.23	40	193,937,650	47.17	193,937,650	52.83	193,937,650	58.49	193,937,650	64.15	224,507,072	69.81	235,732,426	69.81	1,235,990,098	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten	Jumlah arsip P3D yang terselamatkan/ jumlah total arsip P3D yang harusnya diselamatkan x 100	30	40	67,367,050	50	67,367,050	60	67,367,050	70	67,367,050	80	77,985,781	90	81,885,070	90	429,339,052	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti /total hasil kelitbangan x 100	-	70	447,099,590	75	447,099,590	80	447,099,590	85	447,099,590	90	447,099,590	90	469,454,570	90	2,704,952,520	Bappeda
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Hasil perhitungan Indeks	0.8125	83	1,188,145,178	84	800,000,000	85	800,000,000	86	840,000,000	87	840,000,000	87	882,000,000	87	5,350,145,178	BKPSDM
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karier	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat kepemimpinan/ teknis; tubel; ujiandinas/ kompetensi; pengembangan karier / jab /total ASN x 100	-	2.3	1,600,000,000	2.8	800,000,000	3.3	800,000,000	3.8	800,000,000	4	840,000,000	4.2	882,000,000	4.2	5,722,000,000	BKPSDM
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Temuan BPK Tahun n - Jumlah temuan BPK tahun n-1 / Jumlah	10	8	1,142,687,000	7	1,042,687,000	6	1,042,687,000	6	1,042,687,000	5	1,042,687,000	5	1,042,687,000	5	6,356,122,000	Inspektorat



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			temuan BPK Th n-1 x 100																
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD (unit)	10 OPD	10	505,266,000	10	505,266,000	20	505,266,000	20	505,266,000	30	505,266,000	30	530,529,300	30	3,056,859,300	Inspektorat
1.3. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks	82.59	83	2,679,876,024	84.5	1,787,595,960	85	2,836,006,160	85.7	2,888,787,080	85.8	2,969,238,362	86	3,785,970,842	86	16,947,474,428	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100	100	100	1,940,281,960	100	940,281,960	100	1,940,281,960	100	1,940,281,960	100	1,940,281,960	100	2,681,682,805	100	11,383,092,605	Dinas Kominfo
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	Hasil perhitungan survey	85.14	85.14	223,902,000	85.25	223,902,000	85.45	221,991,000	85.6	221,991,000	85.85	244,745,078	86	256,982,331	86	1,393,513,409	DPMPSTP
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	114,570,000	84.5	124,914,000	85	135,225,400	85.7	145,809,340	86	157,371,452	86	170,006,876	86	847,897,068	Kecamatan
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	344,122,064	100	320,498,000	100	346,947,800	100	374,533,580	100	404,693,848	100	437,680,276	100	2,228,475,568	Kecamatan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	17,000,000	100	52,000,000	100	55,440,000	100	59,078,800	100	63,040,076	100	67,355,083	100	313,913,959	Kecamatan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	40,000,000	100	126,000,000	100	136,120,000	100	147,092,400	100	159,105,948	100	172,263,472	100	780,581,820	Kecamatan
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa, Berbudaya, dan Berdaya Saing						296,712,257,450		299,797,584,585		309,086,459,483		317,904,687,879		330,662,220,770		342,045,760,884		1,881,069,526,085	
Tujuan 2: Mewujudkan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya, Aman Tentram, dan Tangguh		Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	Jumlah kejadian kejahatan / jumlah penduduk x 10.000	13.95	13	7,864,513,582	12	7,438,635,020	11	8,452,678,178	69.48	9,575,955,353	69.81	11,685,357,573	70.49	13,427,009,956	70.49	58,444,149,662	
2.1. Masyarakat yang agamais dan berbudaya		% Capaian PASBAR Mengaji	Capaian progam/ target x 100	-	35		50		65		75		85		90		90		
		Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina	Jumlah lembaga adat, seni dan budaya yang dibina / Jumlah semua lembaga adat, seni	58	63	1,396,167,779	68	3,121,031,637	73	3,294,759,880	78	3,515,990,985	83	4,515,564,847	88	4,767,915,580	88	20,611,430,707	



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			dan budaya yang terdaftar x 100																
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) + Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha + pemuda yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota/ jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100	0,102 dan 3,96	1 dan 4	56,810,200	2 dan 8	56,810,200	3 dan 10	56,810,200	4 dan 12	100,000,000	5 dan 15	907,696,078	6 dan 17	953,080,882	6 dan 17	2,131,207,559	Dispora
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%)	Jumlah lembaga adat seni dan budaya yang dibina/ Jumlah Total Lembaga Adat Seni dan Budaya Terdaftar x 100	58	63	139,890,500	68	139,890,500	73	146,885,025	78	154,229,276	83	161,940,740	88	170,037,777	88	912,873,818	Disdikbud
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah seni dan budaya yang dilestrikkan/total seni dan budaya yang terdaftar x 100	-	35	306,630,000	40	210,431,992	45	220,953,592	50	232,001,271	55	243,601,335	60	255,781,401	60	1,469,399,591	Disdikbud
2.22.04	Program pembinaan sejarah	Sejarah lokal yang terdokumentasi	Jumlah sejarah yang terdokumentasi	0	1	-	2	33,600,000	3	35,280,000	5	37,044,000	8	38,896,200	10	40,841,010	10	185,661,210	Disdikbud
2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah mutlak	58	63	100,000,000	68	100,000,000	70	105,000,000	72	110,250,000	75	115,762,500	75	121,550,625	75	652,563,125	Disdikbud
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	792,837,079	100	2,580,298,945	100	2,729,831,063	100	2,882,466,437	100	3,047,667,994	100	3,226,623,885	100	15,259,725,403	Kecamatan
2.2. Masyarakat yang rukun dan berkeadilan		Predikat Kabupaten Peduli HAM	Hasil Penilaian oleh KemenkumHAM	Sangat Peduli (SP)	SP	4,025,286,603	SP	1,961,515,319	SP	2,070,345,401	SP	2,136,578,049	SP	2,160,586,116	SP	2,230,139,848	SP	14,584,451,336	
		Indeks Pembangunan Gender	Perhitungan Indeks oleh BPS	90.06	90.38		90.71		91.03		91.35		91.68		92		92		
		Predikat Kabupaten Layak Anak Indeks Keberdayaan Gender	Nilai oleh Kementerian PP-PA Perhitungan Indeks oleh BPS	Pratama (501)	Madya (620)		Madya (650)		Nindya (720)		Nindya (750)		Nindya (780)		Utama (820)		Utama (850)		
1.05.02	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan/ Total Pelanggaran L3 x 100	77	80	545,691,500	84	352,094,996	87	425,916,875	93	425,916,875	96	425,916,875	100	447,212,719	100	2,622,749,840	Satpol PP dan Damkar



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Total APBD yang melalui GAB dan GBS / Total belanja langsung x 100	4.63	4.63	110,104,899	4.65	81,578,829	4.67	83,079,880	8	84,741,477	9	86,436,307	12	88,165,033	12	534,106,425	DP2KBP3A
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kejadian/ per 100.000 penduduk perempuan	0.7	0.58	212,327,500	0.47	114,394,326	0.35	116,499,182	0.23	118,829,165	0.12	121,205,749	0	123,629,864	0	806,885,785	DP2KBP3A
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	TPAK Perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100	45.46	45.5	19,755,500	45.55	19,755,500	45.6	19,755,500	45.65	20,150,610	45.7	20,553,622	45.75	20,964,695	45.75	120,935,427	DP2KBP3A
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	% OPD yang menyediakan data terpilah gender	Jumlah OPD yang menyediakan data terpilah gender / Total OPD x 100	87.94	91	31,248,000	93	31,248,000	95	31,248,000	97	31,872,960	99	32,510,419	100	33,160,628	100	191,288,007	DP2KBP3A
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Sesuai skor penilaian KLA	500	550	65,033,025	600	65,033,025	650	65,033,025	700	66,333,686	750	67,660,359	> 800	69,013,566	> 800	398,106,686	DP2KBP3A
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun n - kekerasan pada anak pada tahun n-1 / kekerasan pada anak pada tahun n-1 x 100	0.02	0.02	409,560,894	0.02	213,416,814	0.01	217,343,684	0.01	221,690,558	0.01	226,124,369	0	230,646,856	0	1,518,783,174	DP2KBP3A
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi (%)	Jumlah Ijin Lokasi/ Permohonan Ijin Lokasi x 100	-	100	19,416,000	100	20,386,800	100	21,406,140	100	22,476,447	100	23,600,269	100	24,780,283	100	132,065,939	Dinas Perkim
2.10.03	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi/ Jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan x 100	100	100	43,686,000	100	45,870,300	100	48,163,815	100	50,572,006	100	53,100,606	100	55,755,636	100	297,148,363	Dinas Perkim
2.10.04	Program Penyelesaian Ganti Rugi Tanah	Jumlah Fasilitasi Ganti Rugi Tanah	Angka mutlak	0	5	168,924,000	7	172,032,202	9	180,633,812	12	189,665,502	15	199,148,777	15	209,106,216	15	1,119,510,509	Dinas Perkim
8.01.02	Program Penguatan Pancasila dan Karakter Kebangsaan	% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan penguatan ideologi	Jumlah siswa SMP + SMA yang mendapatkan penguatan ideologi / total siswa SMP + SMA x 100	0	3	115,156,902	5	115,156,902	7	117,275,789	10	123,139,578	15	123,139,578	20	129,296,557	20	723,165,307	Badan Kesbangpol
8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika	% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah penduduk yang memberikan suara pada Pemilu/Pilkada/ Jumlah penduduk yang seharusnya	68	68	1,208,499,774	68	408,499,774	68	416,016,170	70	436,816,978	70	436,816,978	70	436,816,978	70	3,343,466,653	Badan Kesbangpol



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

	serta budaya politik		memberikan suara x 100																		
8.01.04	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	Jumlah ormas terdaftar dan berpartisipasi dalam program pemerintah / total jumlah ormas x 100	-	20	122,047,850	25	122,047,850	30	124,293,530	35	130,508,207	40	130,508,207	45	137,033,617	45	766,439,262	Badan Kesbangpo		
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	Jumlah ormas terdaftar dan berpartisipasi dalam program pemerintah / total jumlah ormas x 100	5% per tahun	5% per tahun	440,920,559	5% per tahun	100,000,000	5% per tahun	101,840,000	5% per tahun	106,932,000	5% per tahun	106,932,000	5% per tahun	112,278,600	5% per tahun	968,903,159	Badan Kesbangpo		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang ditangani	Total konflik tahun n - konflik tahun n-1 / Konflik tahun n-1 x 100	100	100	512,914,200	100	100,000,000	100	101,840,000	100	106,932,000	100	106,932,000	100	112,278,600	100	1,040,896,800	Badan Kesbangpo		
2.3. Masyarakat Yang Tangguh Menghadapi Bencana				Indeks Ketahanan Daerah	Hasil penilaian oleh BPBD	1.2	1.4	2,443,059,200	1.5	2,356,088,065	1.6	3,087,572,897	1.7	3,923,386,319	1.8	5,009,206,611	1.8	6,428,954,528	1.8	23,248,267,619	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	Capaian SPM / Target x 100	63.53	100	2,097,762,000	100	2,136,360,821	100	2,777,269,067	100	3,610,449,787	100	4,693,584,723	100	6,101,660,140	100	21,417,086,539	BPBD		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil damkar tiba di tempat kejadian	15 menit	15 menit	216,243,200	15 menit	90,673,244	15 menit	178,668,750	15 menit	178,668,750	15 menit	178,668,750	15 menit	187,602,188	15 menit	1,030,524,882	Satpol PP dan Damkar		
1.05.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota x 100	100	100	129,054,000	100	129,054,000	100	131,635,080	100	134,267,782	100	136,953,137	100	139,692,200	100	800,656,199	Dinas Sosial		
Tujuan 3: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing				Indek Pembangunan Manusia	BPS	68.49	68.95	288,847,743,868	69.41	292,358,949,565	70.07	300,633,781,305	70.73	308,328,732,526	71.41	318,976,863,197	71.97	328,618,750,928	71.97	1,822,625,376,423	



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

3.1. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	8,29	86,700,228,200	8.39	86,365,228,200	8.49	88,086,204,839	8.59	88,631,717,631	8.65	90,805,270,193	8.7	92,646,255,143	8.7	533,234,904,206	
		Rata-rata Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13.82		14.02		14.23		14.38		24.55		14.67		14.67		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 th yang bersekolah / jumlah anak 7-12 th x 100	99	100	85,848,832,000	100	85,848,832,000	100	87,565,808,640	100	88,003,637,683	100	89,763,710,437	100	91,558,984,646	100	528,589,805,406	Disdikbud
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	Jumlah satuan pendidikan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non-formal yang memiliki kurikulum muatan lokal / total satuan pendidikan x 100	100	100	124,999,950	100	124,999,950	100	127,499,949	100	130,049,948	100	132,650,947	100	135,303,966	100	775,504,710	Disdikbud
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Nasional Pendidikan	SNP 4	SNP5	-	SNP5	55,000,000	SNP5	56,100,000	SNP5	57,222,000	SNP5	58,366,440	SNP5	59,533,769	SNP5	286,222,209	Disdikbud
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	Jumlah satuan pendidikan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non-formal yang memiliki kurikulum muatan lokal / total satuan pendidikan x 100	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,400,000	100	20,808,000	100	21,224,160	100	21,648,643	100	124,080,803	Disdikbud
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah (orang)	29100	29900	706,396,250	30731	306,396,250	30737	306,396,250	30746	400,000,000	30752	817,741,959	30758	858,629,057	30758	3,395,559,766	Dinas Kerasipan dan Perpustakaa n
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Jumlah naskah (unit)	0	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	11,576,250	1	12,155,063	4	63,731,313	Dinas Kerasipan dan Perpustakaa n
3.2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup	Tahun	67,82	67.9	196,773,051,644	67.95	203,075,672,855	68	209,612,758,717	68.05	216,605,126,344	68.15	223,934,711,013	68.2	231,626,516,375	68.2	1,266,488,391,982	
		Prevalensi Stunting	%	21	20.6		19		17		14		13.5		13		13		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Nilai pencapaian SPM Kesehatan dan RSUD		100	188,640,958,204	100	192,298,489,675	100	197,971,270,375	100	203,848,847,235	100	209,939,883,204	100	216,253,442,844	100	1,208,952,891,537	Dinas Kesehatan & RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM yang memiliki kompetensi	Jumlah nakes yang memiliki STR/total nakes x 100	-	35	2,159,690,000	45	5,712,205,050	55	6,283,425,555	65	6,911,768,111	75	7,602,944,922	75	8,363,239,414	75	22,479,393,256	Dinas Kesehatan & RSUD



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan	Jumlah penyedia yang memenuhi persyaratan/total penyedia x 100	-	35	228,842,000	45	344,305,540	55	378,736,094	65	416,609,703	70	458,270,674	75	504,097,741	75	2,025,606,752	Dinas Kesehatan & RSUD
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Jumlah RT Menerapkan PHBS/ Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100	55	70	170,901,000	70	948,012,150	75	1,042,813,365	75	1,147,094,702	75	1,261,804,172	75	1,387,984,589	75	5,678,299,805	Dinas Kesehatan & RSUD
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi (unit)	3	5	3,953,396,000	10	2,953,396,000	15	2,953,396,000	20	3,101,065,800	25	3,256,119,090	30	3,418,925,045	30	19,636,297,935	Dispora
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% sampah yang tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani / Total timbunan sampah kab/kota x 100	27.58	28	1,619,264,440	28.25	819,264,440	28.5	983,117,328	29	1,179,740,794	29.25	1,415,688,952	29.5	1,698,826,743	29.5	7,715,902,697	DLH
3.3.	Terwujudnya penduduk yang tumbuh seimbang dan berkualitas	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Pertumbuhan Penduduk	1.25	1.24	5,374,464,024	1.23	2,918,048,510	1.22	2,934,817,749	1.21	3,091,888,551	1.2	4,236,881,991	1.2	4,345,979,410	1.2	22,902,080,235	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Hasil perhitungan Indeks	3.05	3.05	88,522,151	3.05	88,522,151	3.05	88,522,151	3.05	92,948,259	3.05	102,475,455	3	107,599,228	3	568,589,394	DP2KBP3A
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah peserta KB aktif modern/ jumlah PUS usia 15-49 th x 100	65.98	66	4,474,750,373	66.35	1,868,803,379	66.5	1,868,803,379	66.75	2,057,906,650	67	2,057,906,650	68	2,057,906,650	68	14,386,077,081	DP2KBP3A
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah anggota BKB/ jumlah keluarga balita x 100	53.31	60	531,891,500	63	539,291,500	65	539,291,500	70	500,000,000	72	1,087,472,925	75	1,141,846,571	75	4,339,793,996	DP2KBP3A
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA	Jumlah penduduk dan keluarga yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk / jumlah total penduduk dan keluarga x 100	98,01 94,12 25	100 100 30	148,450,000	100 100 35	151,181,480	100 100 40	153,963,219	100 100 45	156,796,142	100 100 50	683,693,325	100 100 60	683,693,325	100 100 60	1,977,777,492	Disdukcapil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian	Jumlah penduduk dan keluarga yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah total penduduk dan keluarga x 100	95,88 100 100	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	82,307,138	100 100 100	82,307,138	100 100 100	449,014,275	Disdukcapil



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

		% penerbitan akta perceraian																	
2.12.04	Program pengelolaan informasi kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Jumlah OPD	3	5	59,750,000	10	59,750,000	15	62,737,500	20	62,737,500	25	72,626,498	30	72,626,498	30	390,227,997	Disdukcapil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	Angka mutlak	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	-	2 buku/ tahun	139,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	200,000,000	2 buku/ tahun	790,600,000	Disdukcapil
Misi 3 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif						173,742,596,853		113,407,025,779		122,945,698,357		137,250,888,841		147,332,658,210		160,504,595,153		855,183,463,193	
Tujuan 4 :Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan		Indeks Gini	BPS	0.258	0.252		0.25		0.24		0.24		0.23		0.23		0.23		
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	BPS	-1.34	2.81	173,742,596,853	2.97	113,407,025,779	4.26	122,945,698,357	4.6	137,250,888,841	4.71	147,332,658,210	4.84	160,504,595,153	4.84	855,183,463,193	
4.1. Pengentasan kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin			7.04	7.0	32,805,687,786	6.93	28,543,508,480	6.87	31,062,148,958	6.82	33,822,058,554	6.76	36,846,971,811	6.70	40,162,980,260	6.7	203,243,355,850	
1.0402	Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni/ Jumlah penduduk korban bencana x 100	-	100	29,508,000	100	2,135,000,000	100	2,241,750,000	100	2,353,837,500	100	2,471,529,375	100	2,595,105,844	100	11,826,730,719	Dinas Perkim
1.0403	Program Kawasan Permukiman	Persentase areal kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh / Luas Wilayah x 100	5.15	4.24	3,911,539,436	3.68	3,911,539,436	2.95	4,302,693,380	2.16	4,732,962,718	1.48	5,206,258,989	1.48	5,726,884,888	1.48	27,791,878,847	Dinas Perkim
1.0404	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni / jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah kab x 100	86.77	87.74	1,828,160,000	87.79	1,828,160,000	90.04	2,010,976,000	91.19	2,212,073,600	92.34	2,433,280,960	92.34	2,676,609,056	92.34	12,989,259,616	Dinas Perkim
1.0405	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU/ Total luasan pemukiman x 100	Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU/ Total luasan pemukiman x 100	0.15	0.15	-	0.41	850,000,000	0.59	935,000,000	0.78	1,028,500,000	0.95	1,131,350,000	0.95	1,244,485,000	0.95	5,189,335,000	Dinas Perkim
1.0406	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Peningkatan Yang Tersertifikasi	Jumlah Pengembangan Yang Tersertifikasi/ total jumlah pengembang x 100	-	-	-	50	50,000,000	60	55,000,000	75	60,500,000	95	66,550,000	95	73,205,000	95	305,255,000	Dinas Perkim



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	Angka mutlak	12 LKS 0 12 KT	12 LKS 0 12 KT	1,101,016,000	0 12 KT	501,016,000	1 LKS 12 KT	511,036,320	1 LKS 12 KT	521,257,046	1 LKS 12 KT	531,682,187	1 LKS 12 KT	542,315,831	1 LKS 12 KT	3,708,323,385	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis x 100	94.38	100	161,121,500	100	1,161,121,500	100	1,184,343,930	100	1,208,030,809	100	1,232,191,425	100	1,256,835,253	100	6,203,644,417	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial /Jumlah total Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial x 100	-	50	352,090,000	65	352,090,000	75	359,131,800	85	366,314,436	95	373,640,725	100	381,113,539	100	2,184,380,500	Dinas Sosial
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum/ jumlah penduduk x 100	78.41	100	13,385,799,400	100	9,385,799,400	100	10,324,379,340	100	11,356,817,274	100	12,492,499,001	100	13,741,748,902	100	70,687,043,317	Dinas PUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	Jumlah kecamatan	3	3	2,870,600,000	4	1,870,600,000	4	2,057,660,000	5	2,263,426,000	5	2,489,768,600	5	2,738,745,460	5	14,290,800,060	Dinas PUPR
1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik/ jumlah	71.9	100	7,529,294,000	100	5,529,294,000	100	6,082,223,400	100	6,690,445,740	100	7,359,490,314	100	8,095,439,345	100	41,286,186,799	Dinas PUPR



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			penduduk x 100																
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	Pangan utama tersedia/jumlah kebutuhan pangan x 100	90.61	90.62	521,372,000	90.65	327,285,245	90.68	337,103,802	90.73	347,216,916	90.73	357,633,424	90.73	368,362,426	90.73	2,258,973,813	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD / 100 Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD / 100+D72	90.6	90.61	930,187,450	90.63	438,102,899	90.66	451,245,986	90.69	464,783,366	90.72	478,726,867	90.75	493,088,673	90.75	3,256,135,240	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan/ total kegiatan penanganan kerawanan x 100%	-	100	145,000,000	100	159,500,000	100	164,285,000	100	169,213,550	100	174,289,957	100	179,518,655	100	991,807,162	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu/Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di satu wilayah sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu X 100	-	100	40,000,000	100	44,000,000	100	45,320,000	100	46,679,600	100	48,079,988	100	49,522,388	100	273,601,976	Dinas Ketahanan Pangan
4.2. Perluasan Peluang Pekerjaan		Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	4.69	4.66	4,126,505,100	4.63	4,412,764,314	4.6	3,988,464,904	4.57	4,059,896,791	4.54	4,358,148,306	4.5	4,523,087,230	4.5	25,468,866,644	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana tenaga kerja yang disusun	Dokumen	-	-	-	2	100,000,000	2	102,000,000	2	104,040,000	2	106,120,800	2	108,243,216	10	520,404,016	Disnaker
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi/ jumlah tenaga kerja	2	2	168,650,400	2	975,000,000	2	994,500,000	3	1,014,390,000	3	1,034,677,800	3	1,055,371,356	3	5,242,589,556	Disnaker



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			terdaftar x 100																
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	% Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan/jumlah tenaga kerja terdaftar x 100	14	16	1,444,884,250	17	410,000,000	20	418,200,000	22	426,564,000	25	435,095,280	25	443,797,186	25	3,578,540,716	Disnaker
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)/ Total kasus terdaftar x 100	85	86	175,549,650	87	178,779,764	88	182,355,359	89	186,002,466	90	189,722,515	90	193,516,966	90	1,105,926,719	Disnaker
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	% Pertumbuhan Perizinan	Jumlah izin usaha simpanpinjam tahun n - jumlah izin usaha simpan pinjam th n-1/ umlah izin usaha simpan pinjam th n-1 x 100	35	35		35	10,000,000	37	10,500,000	39	11,025,000	41	11,576,250	42	12,155,063	42	55,256,313	DKUKM
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas / Total koperasi terdaftar x 100	35	35	33,528,400	40	33,528,400	45	35,204,820	50	36,965,061	55	38,813,314	55	40,753,980	55	218,793,975	DKUKM
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang sehat	Angka mutlak	30 KSP/USP	30 KSP/USP		30 KSP/USP	10,000,000	30 KSP/USP	10,500,000	30 KSP/USP	11,025,000	30 KSP/USP	11,576,250	30 KSP/USP	12,155,063	30 KSP/USP	55,256,313	DKUKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan / Total koperasi x 100	3.32	3.93	246,357,300	4.55	290,248,250	5.16	304,760,663	5.77	319,998,696	6.39	335,998,630	7	352,798,562	7	1,850,162,100	DKUKM
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah koperasi yang ikut dalam kemitraan usaha/ total koperasi x 100	2	2.08	111,577,800	2.17	81,577,800	2.25	85,656,690	2.33	89,939,525	2.42	94,436,501	2.5	99,158,326	2.5	562,346,641	DKUKM
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro tahun n - jumlah Usaha Mikro tahun n-1/ jumlah Usaha Mikro tahun n-1 x 100	3	3.08	231,323,300	3.17	131,323,300	3.25	137,889,465	3.33	144,783,938	3.42	152,023,135	3.5	159,624,292	3.5	956,967,430	DKUKM
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	% Ushaa Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan /Total Usaha Mikro x 100	2	2.25		2.5	57,432,350	2.75	60,303,968	3	63,319,166	3.25	66,485,124	3.5	69,809,380	3.5	317,349,988	DKUKM
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN/ PMA	Angka mutlak	47,88 miliar	Rp. 50 M		Rp. 51 M	191,000,000	Rp. 52 M	200,550,000	Rp. 53 M	200,550,000	Rp. 54 M	221,106,375	55 miliar	232,161,694	362,88 miliar	1,045,368,069	DPMPSTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kesepakatan investasi yang	Angka mutlak	Tidak ada	0	169,342,000	0	169,342,000	0	58,327,500	0	58,327,500	0	64,306,069	3 MoU	67,521,372	3 MoU	587,166,441	DPMPSTSP



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

		dikeluarkan																		
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi PMDN/PMA tahun n- Nilai Realisasi PMDN/PMA tahun n-	-11.16	-8	340,473,500	-4.4	340,473,500	-0.8	34,650,000	2.8	34,650,000	6.4	38,201,625	10	40,111,706	10	828,560,331	DPMPPTSP	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal	Tersedianya sistem data pe	Angka mutlak	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)	81,821,500	Ada (100)	81,821,500	Ada (100)	46,200,000	Ada (100)	46,200,000	Ada (100)	50,935,500	Ada (100)	53,482,275	Ada (100)	360,460,775	DPMPPTSP	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	% Perusahaan terdaftar	Jumlah perusahaan terdaftar / jumlah total perusahaan x 100	30	32	-	34	129,419,950	36	129,419,950	38	129,419,950	40	149,819,770	42	157,310,758	42	695,390,378	DKUKM	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Perdagangan dalam kondisi baik dan layak	Jumlah sarana perdagangan layak/ total sarana perdagangan yang ada x 100	60	62	-	65	10,000,000	68	10,000,000	71	10,000,000	75	11,576,250	75	12,155,063	75	53,731,313	DKUKM	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dilaksanakan / kebutuhan x 100	20	20	715,852,600	20	715,852,600	25	751,645,230	30	751,645,230	35	870,123,309	40	913,629,475	40	4,718,748,444	DKUKM	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komodii yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	Jenis komoditi	1	1	61,847,600	2	61,847,600	3	22,300,000	5	22,300,000	6	25,815,038	6 komoditi	27,105,789	6 komoditi	221,216,027	DKUKM	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar (unit)	7	7	185,116,100	7	185,116,100	8	131,000,000	9	131,000,000	10	151,648,875	11	159,231,319	11	943,112,394	DKUKM	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jenis produk	8 produk	8	150,001,200	9	150,001,200	10	157,501,260	11	157,501,260	12	182,327,396	13	191,443,766	13 produk	988,776,082	DKUKM	
3.32.02	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah eks jorong transmigrasi yang difasilitasi program SDM	Jumlah jorong	Tidak ada (0)	15	10,179,500	17	100,000,000	19	105,000,000	23	110,250,000	23	115,762,500	23	121,550,625	23	562,742,625	Disnaker	
4.3 Penguatan Industri Berbasis Komoditas Unggulan Lokal			PDRB per Kapita ADHB (Rp juta)	BPS	36.17	37.71	136,810,403,967	39.33	80,450,752,986	41.53	87,895,084,495	43.22	99,368,933,496	45.46	106,127,538,092	45.46	115,818,527,663	45.46	626,471,240,699	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik / total panjang jaringan irigasi x 100	78.85	80	19,274,934,278	82	5,274,934,278	84	5,802,427,706	86	6,382,670,476	88	7,020,937,524	90	7,723,031,276	90	51,478,935,539	Dinas PUPR	



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase drainase dalam kondisi baik/ total panjang drainase kewenangan kab x 100	56.66	58.86	8,847,281,052	61.06	6,847,281,052	63.26	7,532,009,157	65.46	8,285,210,073	67.66	9,113,731,080	70	10,025,104,188	70	50,650,616,603	Dinas PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber- IMB / jumlah bangunan x 100	12.5	13	3,249,441,928	14	150,000,000	14.5	165,000,000	15.01	181,500,000	15.51	199,650,000	15.51	219,615,000	15.51	4,165,206,928	Dinas PUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya (%)	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya/ Total Gedung Pemerintah x 100	-	70	-	75	3,249,441,928	85	3,574,386,121	90	3,931,824,733	95	4,325,007,206	100	4,757,507,927	100	19,838,167,915	Dinas PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Total panjang jalan kab yang bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan kecepatan min 40 km/jam / Total panjang jalan yang menjadi kewenangan kab/kota x 100	56.66	57.86	71,504,170,620	61.06	25,973,447,359	63.26	28,570,792,095	65.46	29,427,915,858	67.66	30,310,753,334	70	31,220,075,934	70	217,007,155,201	Dinas PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga operator teknis x 100	-	30	620,548,343	35	428,286,433	40	471,115,076	45	518,226,583	50	570,049,242	50	627,054,166	50	3,235,279,842	Dinas PUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan x 100	81	82.5	1,594,868,800	84	594,868,800	85.5	654,355,680	87	719,791,248	88.5	791,770,373	90	870,947,410	90	5,226,602,311	Dinas PUPR
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	226,353,500	Tidak ada	126,353,500	Tidak ada	138,988,850	1	152,887,735	1	168,176,509	Tidak ada	184,994,159	2	997,754,253	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Hasil perhitungan Indeks	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	98,486,774	42,55 dan 93,87	98,486,774	42,65 dan 93,88	108,335,451	42,75 dan 93,89	119,168,997	42,85 dan 93,90	131,085,896	42,95 dan 93,91	144,194,486	42,95 dan 93,91	699,758,378	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil perhitungan Indeks	46.68	46.68	361,643,040	46.69	261,643,040	46.7	287,807,344	46.71	316,588,078	46.72	348,246,886	46.73	383,071,575	46.73	1,958,999,964	DLH



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

2.11.0 5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Jumlah pengendalian B3 dan LB3 yang tersedia/ total kebutuhan x 100	100	100	2,899,000	100	45,000,000	100	49,500,000	100	54,450,000	100	59,895,000	100	65,884,500	100	277,628,500	DLH
2.11.0 6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota / Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan x 100	92,86 (13/14 x 100)	93	103,241,300	93	104,500,000	93	114,950,000	95	126,445,000	95	139,089,500	100	152,998,450	100	741,224,250	DLH
2.11.0 7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Loka dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	Angka mutlak	0	0	-	3	25,000,000	5	27,500,000	7	30,250,000	9	33,275,000	13	36,602,500	13	152,627,500	DLH
2.11.0 9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	Angka mutlak	11	12	-	15	25,000,000	18	27,500,000	25	30,250,000	28	33,275,000	34	36,602,500	34	152,627,500	DLH
2.11.0 0	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% penanganan pengaduan	Jumlah kasus pengaduan LH yang tertangani /Total pengaduan x 100	100	100	66,657,500	100	66,657,500	100	73,323,250	100	80,655,575	100	88,721,133	100	97,593,246	100	473,608,203	DLH
2.13.0 5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	% Lembaga Sosial Aktif di Nagari % Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari % Lembaga Adat Aktif di Nagari	Jumlah Lembaga sosial, ekonomi, dan lembaga adat aktif / jumlah total lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lembaga adat x 100	100 63,33 10,52	100 63,33 50,52	- 763,805,250	100 65 75	- 563,805,250	100 70 85	- 563,805,250	100 70 90	- 563,805,250	100 73 95	- 563,805,250	100 75 100	- 563,805,250	100 75 100	- 3,582,831,500	DPMN
2.15.0 2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat/ Jumlah penumpang angkutan darat x100%	25	35	5,418,562,823	40	1,795,526,602	45	1,828,564,292	50	3,915,000,000	50	4,532,101,875	60	3,915,000,000	60	21,404,755,592	Dishub
2.15.0 3	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun	ton & orang	550 ton & 792 orang/ tahun	600 ton & 850 orang/ tahun	104,797,200	700 ton & 1000 orang/ tahun	106,725,468	800 ton & 1200 orang/ tahun	108,689,217	900 ton & 1300 orang/ tahun	150,000,000	950 ton & 1400 orang/ tahun	173,643,750	1000 ton & 1500 org/ tahun	150,000,000	1000 ton & 1500 org/ tahun	793,855,636	Dishub
2.15.0 4	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang Melalui bandara per tahun	Angka mutlak	170 kg & 450 orang	170 kg & 500 orang	-	170 kg & 600	106,725,468	170 kg & 650 orang	108,689,217	170 kg & 700 orang	110,689,099	170 kg & 700 orang	173,643,750	170 kg & 750 orang	176,838,795	170 kg & 750 orang	676,586,329	Dishub



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

							orang													
3.25.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	Produksi (ton)	106193	107254	3,118,630,500	108327	1,139,213,301	109411	1,160,174,826	110505	1,181,522,043	111610	1,240,598,145	112276	1,302,628,052	659383	9,142,766,867	Dinas Perikanan	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Produksi (ton)	5.911	5970	1,125,235,650	6030	534,899,986	6090	544,742,146	6151	554,765,401	6213	582,503,671	6275	611,628,855	36729	3,953,775,709	Dinas Perikanan	
3.25.04	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	Jumlah POKWASMAS (unit)	3	3	-	3	38,699,200	4	150,000,000	4	150,000,000	4	157,500,000	5 POKMASWAS	165,375,000	5 POKMASWAS	661,574,200	Dinas Perikanan	
3.25.05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	Jenis Olahan Hasil Perikanan	2 jenis	2 jenis	196,448,250	3 jenis	200,062,898	3 jenis	203,744,055	3 jenis	207,492,946	4 jenis	217,867,593	5 jenis	228,760,973	5 jenis	1,254,376,714	Dinas Perikanan	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	% ketersediaan bibit ternak % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	- Bibit ternak tersedia/ kebutuhan x 100 % Benih hijauan pakan terbak tersedia/ kebutuhan x 100 % Produksi (ton)	25 10 2.787.800 ton 147.471 ton padi, 262.510 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 2.792.539 ton 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	5,476,465,125	27 20 2. 93.097 ton 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	8,493,000,000	28 25 2.804.248 ton 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, dan 2.658 ton alpukat	29 30 2. 14.005 ton 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	13,285,750,610	30 40 2.820.975 ton 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	14,353,962,869	31 45 2.827.944 ton 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	15,561,899,065	31 45 2.827.944 ton 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	66,501,137,668	DTPHP dan Disbun		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jalan Produksi (km), JUT (Km), Dam parit (unit), JITU (km), BPP (unit), Puskesmas (unit), BBTPH (unit), BPTHPT (unit)	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	8,060,794,281	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	18,831,000,000	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	19,796,680,000	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	20,831,405,400	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	21,941,255,062	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	23,132,890,964	69 km (Disbun), 50 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	112,594,025,707	DTPHP dan Disbun
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular th n-1/ jumlah kejadian dan jumlah kasus	50	85	673,950,000	85	148,775,000	85	693,000,000	85	727,650,000	85	727,650,000	85	802,234,125	85	3,773,259,125	DTPHP dan Disbun	



BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

			penyakit hewan menular th n-1 x 100																
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian		10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	160,941,000	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	155,470,500	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	420,000,000	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	441,000,000	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	463,050,000	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	486,202,500	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	2,126,664,000	DTPHP dan Disbun
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO / Total jumlah perusahaan terdaftar x 100	15	-	-	36.67	60,000,000	47.5	63,000,000	58.33	66,150,000	69.17	69,457,500	80	72,930,375	80	331,537,875	DTPHP dan Disbun
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Jumlah penyuluh dan poktan yang dilatih/ total jumlah penyuluh dan poktan x 100	1 dan 1	1 dan 1	3,721,268,920	1 dan 1	3,119,886,150	1 dan 1	3,401,274,765	1 dan 1	4,861,586,437	1 dan 1	5,581,193,466	1 dan 1	10,008,498,736	7 dan 7	30,693,708,474	DTPHP dan Disbun
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah kawasan (unit)	Tidak ada	1	500,981,209	1	306,519,263	1	312,159,218	2	317,902,947	2	299,639,539	2	314,621,516	2 kawasan sentra	2,051,823,693	DKUKM
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri rumah tangga yang dibina	Jumlah IRT yang dibina pada tahun n/ total IRT pada tahun n x 100	2.5	2.75	79,971,501	3	79,419,950	3.25	79,419,950	3.5	79,419,950	3.75	91,938,520	4	96,535,446	4	506,705,316	DKUKM
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah data base IKM	Database (dokumen)	1	1	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	7 dok	50,000,000	DKUKM
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah DTW (unit)	1 DTW	1 DTW	983,129,123	2	1,000,825,447	3	1,018,840,305	4	1,037,179,431	5	1,068,294,814	5 DTW	1,100,343,658	5 DTW	6,208,612,778	Dinas Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	Jumlah wisatawan (orang) dan Nilai PAD (Rp.)	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20,250 org dan Rp.943.981.035	292,000,400	25.500 orang dan Rp.985.184.828	297,256,407	32750 org dan Rp.1.026.388.621	302,607,023	41.600 orang dan Rp.1.067.592.414	308,053,949	45.750 orang dan Rp.1.108.796.207	323,456,646	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000	339,629,479	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000	1,863,003,904	Dinas Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	% Kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n - jumlah unit usaha ekraf tahun n-1 / jumlah unit usaha ekraf th n-1 x 100	13	14	182,896,600	15	192,041,430	16	201,643,502	17	211,725,677	18	222,311,960	20	233,427,558	20	1,244,046,727	Dinas Pariwisata



*BAB 6 Strategi, Arah Kebijakan, dan
Program Pembangunan Daerah*

Total Misi 1 + Misi 2 + Misi 3					1,200,786,164,498		1,209,104,813,333		1,234,495,265,950		1,263,243,652,830		1,292,449,055,348		1,324,236,414,204		7,524,315,366,163	



BAB 7

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan disajikan pada tabel berikut:



**BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan
Program Perangkat Daerah**

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021

No.	URAIAN	PROYEKSI					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	BELANJA OPERASI						
a	Belanja Pegawai	542,125,680,000	555,678,822,000	569,570,792,550	576,177,813,744	582,861,476,383	589,622,669,509
b	Belanja Barang dan Jasa	323,329,961,990	336,842,173,792	340,113,318,503	358,486,874,793	377,197,098,687	398,367,534,844
c	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
d	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
e	Belanja Hibah	10,964,950,000	11,184,249,000	11,407,933,980	11,540,266,014	11,674,133,100	11,809,553,044
f	Belanja Bantuan Sosial	515,900,000	526,218,000	536,742,360	542,968,571	549,267,007	555,638,504
2	BELANJA MODAL	167,607,089,000	174,010,933,042	180,695,436,881	182,791,503,949	184,911,885,395	187,056,863,265
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	13,000,000,000	13,130,000,000	13,261,300,000	13,415,131,080	13,570,746,601	13,728,167,261
4	BELANJA TRANSFER	115,537,120,000	117,732,417,500	118,909,741,675	120,289,094,678	121,684,448,177	123,095,987,776
	JUMLAH BELANJA	1,173,080,700,990	1,209,104,813,333	1,234,495,265,950	1,263,243,652,830	1,292,449,055,348	1,324,236,414,204



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/ <i>Impact/ Outcome</i>)	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					824,896,961,596		775,908,231,690		792,945,431,715		807,730,598,482		824,863,935,072		843,225,644,871		4,869,570,803,427	
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					393,158,014,053		393,147,377,170		395,482,550,899		396,539,885,426		398,920,776,114		401,338,184,802		2,378,586,788,466	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	307,164,182,103	100	307,098,545,220	100	307,712,742,310	100	308,328,167,795	100	308,944,824,131	100	309,562,713,779	100	1,848,811,175,338	Disdikbud
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia 7-12 th yang bersekolah / jumlah anak 7-12 th x 100	99	100	85,848,832,000	100	85,848,832,000	100	87,565,808,640	100	88,003,637,683	100	89,763,710,437	100	91,558,984,646	100	528,589,805,406	Disdikbud
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	Jumlah satuan pendidikan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non-formal yang memiliki kurikulum muatan lokal / total satuan pendidikan x 100	100	100	124,999,950	100	124,999,950	100	127,499,949	100	130,049,948	100	132,650,947	100	135,303,966	100	775,504,710	Disdikbud
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Nasional Pendidikan	SNP 4	SNP5	-	SNP5	55,000,000	SNP5	56,100,000	SNP5	57,222,000	SNP5	58,366,440	SNP5	59,533,769	SNP5	286,222,209	Disdikbud
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	Jumlah satuan pendidikan SD, SMP, PAUD dan Pendidikan Non-formal yang memiliki kurikulum muatan lokal / total satuan pendidikan x 100	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,400,000	100	20,808,000	100	21,224,160	100	21,648,643	100	124,080,803	Disdikbud
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					262,350,307,163		278,638,797,433		285,417,865,086		292,477,529,058		299,833,567,195		307,502,861,609		1,726,220,927,544	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	57,019,542,134	100	65,604,501,193	100	65,735,710,195	100	65,867,181,616	100	65,998,915,979	100	66,130,913,811	100	386,356,764,928	Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Nilai pencapaian SPM Kesehatan dan RSUD	40.36	100	91,482,229,025	100	60,893,696,891	100	63,938,381,736	100	67,135,300,822	100	70,492,065,863	100	74,016,669,157	100	427,958,343,494	Dinas Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM yang memiliki kompetensi	Jumlah nakes yang memiliki STR/total nakes x 100	-	35	276,640,000	45	3,636,755,050	55	4,000,430,555	65	4,400,473,611	75	4,840,520,972	75	5,324,573,069	75	22,479,393,256	Dinas Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan	Jumlah penyedia yang memenuhi persyaratan/total penyedia x 100	-	35	228,842,000	45	294,305,540	55	323,736,094	65	356,109,703	70	391,720,674	75	430,892,741	75	2,025,606,752	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Jumlah RT Menerapkan PHBS/ Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100	54.5	70	170,901,000	70	902,098,050	75	992,307,855	75	1,091,538,641	75	1,200,692,505	75	1,320,761,755	75	5,678,299,805	Dinas Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	14,130,373,825	100	13,731,283,825	100	14,005,909,502	100	14,286,027,692	100	14,571,748,245	100	14,863,183,210	100	85,588,526,299	RSUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	Nilai pencapaian SPM Kesehatan dan RSUD	40.36	100	97,158,729,179	100	131,404,792,784	100	134,032,888,640	100	136,713,546,412	100	139,447,817,341	100	142,236,773,688	100	780,994,548,043	RSUD
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM yang memiliki kompetensi	Jumlah nakes yang memiliki STR/total nakes x 100	-	35	1,883,050,000	45	2,075,450,000	55	2,282,995,000	65	2,511,294,500	75	2,762,423,950	75	3,038,666,345	75	14,553,879,795	RSUD
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan penyedia layanan farmasi, alkes, dan makanan minuman yang memenuhi persyaratan	Jumlah penyedia yang memenuhi persyaratan/total penyedia x 100	-	-	-	45	50,000,000	55	55,000,000	65	60,500,000	70	66,550,000	75	73,205,000	75	305,255,000	RSUD



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Jumlah RT Menerapkan PHBS/ Jumlah Seluruh Rumah Tangga x 100	-	-	-	70	45,914,100	75	50,505,510	75	55,556,061	75	61,111,667	75	67,222,834	75	280,310,172	RSUD
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					140,159,193,681		71,474,734,267		77,526,837,402		82,173,241,701		87,213,224,527		92,684,233,139		551,231,464,717	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	11,282,255,260	100	12,170,781,017	100	12,292,488,827	100	12,415,413,715	100	12,539,567,853	100	12,664,963,531	100	73,365,470,203	Dinas PUPR
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik / total panjang jaringan irigasi x 100	78.85	80	19,274,934,278	82.45	5,274,934,278	84.25	5,802,427,706	86.05	6,382,670,476	87.85	7,020,937,524	89.65	7,723,031,276	89.65	51,478,935,539	Dinas PUPR
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum/ jumlah penduduk x 100	78.41	100	13,385,799,400	100	9,385,799,400	100	10,324,379,340	100	11,356,817,274	100	12,492,499,001	100	13,741,748,902	100	70,687,043,317	Dinas PUPR
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	Jumlah kecamatan	3	3	2,870,600,000	4	1,870,600,000	4	2,057,660,000	5	2,263,426,000	5	2,489,768,600	5	2,738,745,460	5	14,290,800,060	Dinas PUPR
1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik/ jumlah penduduk x 100	71.9	100	7,529,294,000	100	5,529,294,000	100	6,082,223,400	100	6,690,445,740	100	7,359,490,314	100	8,095,439,345	100	41,286,186,799	Dinas PUPR
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase drainase dalam kondisi baik/ total panjang drainase kewenangan kab x 100	56.66	58.86	8,847,281,052	61.06	6,847,281,052	63.26	7,532,009,157	65.46	8,285,210,073	67.66	9,113,731,080	70	10,025,104,188	70	50,650,616,603	Dinas PUPR
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Jumlah bangunan ber- IMB / jumlah bangunan x 100	12.5	13	3,249,441,928	14	150,000,000	14.5	165,000,000	15.01	181,500,000	15.51	199,650,000	15.51	219,615,000	15.51	4,165,206,928	Dinas PUPR
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan Lingkungannya/	-	70	-	75	3,249,441,928	85	3,574,386,121	90	3,931,824,733	95	4,325,007,206	100	4,757,507,927	100	19,838,167,915	Dinas PUPR



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

		Bangunan Lingkungannya (%)	Total Gedung Pemerintah x 100																
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	Total panjang jalan kab yang bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan kecepatan min 40 km/jam / Total panjang jalan yang menjadi kewenangan kab/kota x 100	56.66	57.86	71,504,170,620	61.06	25,973,447,359	63.26	28,570,792,095	65.46	29,427,915,858	67.66	30,310,753,334	70	31,220,075,934	70	217,007,155,201	Dinas PUPR
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga operator teknis x 100	Jumlah tenaga operator/ teknisi/ analis yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga operator teknis x 100	-	30	620,548,343	35	428,286,433	40	471,115,076	45	518,226,583	50	570,049,242	50	627,054,166	50	3,235,279,842	Dinas PUPR
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	Realisasi RTRW/ Rencana Peruntukan x 100	81	82.5	1,594,868,800	84	594,868,800	85.5	654,355,680	87	719,791,248	88.5	791,770,373	90	870,947,410	90	5,226,602,311	Dinas PUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					9,454,559,483		13,136,608,289		13,950,947,321		14,881,512,318		15,892,480,595		16,991,471,284		84,307,579,290	
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,685,352,047	100	4,361,908,853	100	4,405,527,942	100	4,493,638,500	100	4,583,511,270	100	4,675,181,496	100	26,205,120,108	Dinas Perkim
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni/ Jumlah penduduk korban bencana x 100	-	100	29,508,000	100	2,135,000,000	100	2,241,750,000	100	2,353,837,500	100	2,471,529,375	100	2,595,105,844	100	11,826,730,719	Dinas Perkim
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota/ jumlah	100	100		100		100		100		100						



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

			masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota x 100																
1.0403	Program Kawasan Permukiman	Persentase area kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh / Luas Wilayah x 100	5.15	4.24	3,911,539,436	3.68	3,911,539,436	2.95	4,302,693,380	2.16	4,732,962,718	1.48	5,206,258,989	1.48	5,726,884,888	1.48	27,791,878,847	Dinas Perkim
1.0404	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni / jumlah seluruh rumah yang ada di wilayah kab x 100	86.77	87.74	1,828,160,000	87.79	1,828,160,000	90.04	2,010,976,000	91.19	2,212,073,600	92.34	2,433,280,960	92.34	2,676,609,056	92.34	12,989,259,616	Dinas Perkim
1.0405	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Luasan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU/ Total luasan pemukiman x 100	0.15	0.15	-	0.41	850,000,000	0.59	935,000,000	0.78	1,028,500,000	0.95	1,131,350,000	0.95	1,244,485,000	0.95	5,189,335,000	Dinas Perkim
1.0406	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase Peningkatan Yang Tersertifikasi	Jumlah Pengembangan Yang Tersertifikasi/ total jumlah pengembangan x 100	-	-	-	50.00	50,000,000	60	55,000,000	75	60,500,000	95	66,550,000	95	73,205,000	95	305,255,000	Dinas Perkim
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat					14,803,855,834		14,400,134,867		15,354,439,749		16,341,382,897		17,580,498,617		19,177,038,252		97,657,350,216	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	8,484,411,157	100	8,484,086,488	100	8,568,927,353	100	8,654,616,626	100	8,741,162,793	100	8,828,574,421	100	51,761,778,838	Satpol PP dan Damkar
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan/ Total Pelanggaran L3 x 100	77	80	545,691,500	84	352,094,996	87	425,916,875	93	425,916,875	96	425,916,875	100	447,212,719	100	2,622,749,840	Satpol PP dan Damkar
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah	Rata-rata waktu dari laporan diterima hingga mobil damkar tiba di tempat kejadian	15 menit	15 menit	216,243,200	15 menit	90,673,244	15 menit	178,668,750	15 menit	178,668,750	15 menit	178,668,750	15 menit	187,602,188	15 menit	1,030,524,882	Satpol PP dan Damkar



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

	Kebakaran	Manajemen Kebakaran (WMK)																	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,459,747,977	100	3,336,919,318	100	3,403,657,704	100	3,471,730,858	100	3,541,165,476	100	3,611,988,785	100	20,825,210,119	BPBD
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	Capaian SPM / Target x 100	63.53	100	2,097,762,000	100	2,136,360,821	100	2,777,269,067	100	3,610,449,787	100	4,693,584,723	100	6,101,660,140	100	21,417,086,539	BPBD
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					4,971,031,382		5,110,579,664		5,212,791,257		5,317,047,082		5,423,388,024		5,531,855,785		31,566,693,194	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,227,749,882	100	2,967,298,164	100	3,026,644,127	100	3,087,177,010	100	3,148,920,550	100	3,211,898,961	100	18,669,688,694	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	Angka mutlak	12 LKS 0 12 KT	12 LKS 0 12 KT	1,101,016,000	12 LKS 0 12 KT	501,016,000	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	511,036,320	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	521,257,046	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	531,682,187	12 LKS 1 LKS 1 LKS 12 KT	542,315,831	12 LKS 1 LKS 1 LKS 12 KT	3,708,323,385	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti / Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100	94.38	100	161,121,500	100	1,161,121,500	100	1,184,343,930	100	1,208,030,809	100	1,232,191,425	100	1,256,835,253	100	6,203,644,417	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	50	352,090,000	65	352,090,000	75	359,131,800	85	366,314,436	95	373,640,725	100	381,113,539	100	2,184,380,500	Dinas Sosial



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

			/Jumlah total Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial x 100																
1.05.06	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang memerlukan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota x 100	100	100	129,054,000	100	129,054,000	100	131,635,080	100	134,267,782	100	136,953,137	100	139,692,200	100	800,656,199	Dinas Sosial
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					86,430,085,365		69,063,169,545		70,997,360,615		74,821,153,842		80,036,441,669		81,956,772,017		463,304,983,054	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					7,028,787,115		5,050,600,925		5,151,612,943		5,254,645,202		5,359,738,106		5,466,932,868		33,312,317,159	
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	5,239,702,815	100	3,386,821,161	100	3,454,557,584	100	3,523,648,736	100	3,594,121,711	100	3,666,004,145	100	22,864,856,152	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana tenaga kerja yang disusun	Dokumen	-	-	-	2	100,000,000	2	102,000,000	2	104,040,000	2	106,120,800	2	108,243,216	10	520,404,016	Disnaker
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi/ jumlah tenaga kerja terdaftar x 100	1.72	1.92	168,650,400	2.12	975,000,000	2.32	994,500,000	2.52	1,014,390,000	2.75	1,034,677,800	3	1,055,371,356	3	5,242,589,556	Disnaker
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	% Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	Jumlah tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan/jum lah tenaga kerja terdaftar x 100	13.79	15.79	1,444,884,250	17.19	410,000,000	19.79	418,200,000	21.79	426,564,000	25	435,095,280	25	443,797,186	25	3,578,540,716	Disnaker



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.07.05	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) / Total kasus terdaftar x 100	85	86	175,549,650	87	178,779,764	88	182,355,359	89	186,002,466	90	189,722,515	90	193,516,966	90	1,105,926,719	Disnaker
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					6,636,789,759		7,084,813,322		7,223,533,834		7,368,004,510		7,515,364,600		7,665,671,892		43,494,177,917	
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi / target x 100	100	100	5,788,759,941	100	6,559,386,827	100	6,690,574,564	100	6,824,386,055	100	6,960,873,776	100	7,100,091,251	100	39,924,072,414	DP2KBP3A
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Total APBD yang melalui GAB dan GBS / Total belanja langsung x 100	4.63	4.63	110,104,899	4.65	81,578,829	4.67	83,079,880	8	84,741,477	9	86,436,307	12	88,165,033	12	534,106,425	DP2KBP3A
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kejadian / per 100.000 penduduk perempuan	0.7	0.58	212,327,500	0.47	114,394,326	0.35	116,499,182	0.23	118,829,165	0.12	121,205,749	0	123,629,864	0	806,885,785	DP2KBP3A
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	TPAK Perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100	45.46	45.5	19,755,500	45.55	19,755,500	45.6	19,755,500	45.65	20,150,610	45.7	20,553,622	45.75	20,964,695	45.75	120,935,427	DP2KBP3A
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	% OPD yang menyediakan data terpilah gender	Jumlah OPD yang menyediakan data terpilah gender / Total OPD x 100	87.94	91	31,248,000	93	31,248,000	95	31,248,000	97	31,872,960	99	32,510,419	100	33,160,628	100	191,288,007	DP2KBP3A
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	Sesuai skor penilaian KLA anak	500	550	65,033,025	600	65,033,025	650	65,033,025	700	66,333,686	750	67,660,359	> 800	69,013,566	> 800	398,106,686	DP2KBP3A
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun n - kekerasan pada anak pada tahun n-1 / kekerasan pada anak pada tahun n-1 x 100	0.02	0.02	409,560,894	0.02	213,416,814	0.01	217,343,684	0.01	221,690,558	0.01	226,124,369	0-	230,646,856	0-	1,518,783,174	DP2KBP3A
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					5,820,764,775		4,675,070,517		4,815,322,632		4,959,782,311		5,108,575,781		5,261,833,054		30,641,349,070	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,184,205,325	100	3,706,182,373	100	3,817,367,844	100	3,931,888,880	100	4,049,845,546	100	4,171,340,912	100	23,860,830,880	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	Pangan utama tersedia/jumlah kebutuhan pangan x 100	90.61	90.62	521,372,000	90.65	327,285,245	90.68	337,103,802	90.73	347,216,916	90.73	357,633,424	90.73	368,362,426	90.73	2,258,973,813	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Kalori X BDD / 100 Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandungan Protein X BDD/ 100+D72	90.6	90.61	930,187,450	90.63	438,102,899	90.66	451,245,986	90.69	464,783,366	90.72	478,726,867	90.75	493,088,673	90.75	3,256,135,240	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan/ total kegiatan penanganan kerawanan x 100%	-	100	145,000,000	100	159,500,000	100	164,285,000	100	169,213,550	100	174,289,957	100	179,518,655	100	991,807,162	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu/jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di satu wilayah sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu X 100	-	100	40,000,000	100	44,000,000	100	45,320,000	100	46,679,600	100	48,079,988	100	49,522,388	100	273,601,976	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					232,026,000		238,289,302		250,203,767		262,713,955		275,849,653		289,642,135		1,548,724,811	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi (%)	Jumlah Ijin Lokasi/ Permohonan Ijin Lokasi x 100	-	100	19,416,000	100	20,386,800	100	21,406,140	100	22,476,447	100	23,600,269	100	24,780,283	100	132,065,939	Perkim
2.10.03	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Jumlah konflik pertanahan difasilitasi/ Jumlah konflik pertanahan yang dilaporkan x 100	100	100	43,686,000	100	45,870,300	100	48,163,815	100	50,572,006	100	53,100,606	100	55,755,636	100	297,148,363	Perkim
2.10.04	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan	Jumlah Fasilitas Ganti Rugi Tanah	Angka mutlak	0	5	168,924,000	7	172,032,202	9	180,633,812	12	189,665,502	15	199,148,777	15	209,106,216	15	1,119,510,509	Perkim
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					7,280,702,232		6,361,645,011		6,744,454,173		7,171,871,087		7,651,331,831		8,191,662,453		43,401,666,787	
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,802,156,678	100	4,789,739,757	100	4,933,431,950	100	5,081,434,908	100	5,233,877,955	100	5,390,894,294	100	30,231,535,542	DLH
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen RPPLH	Dokumen	Tidak ada	Tidak ada	226,353,500	Tidak ada	126,353,500	Tidak ada	138,988,850	1	152,887,735	1	168,176,509	Tidak ada	184,994,159	2	997,754,253	DLH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	Hasil perhitungan Indeks	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	98,486,774	42,55 dan 93,87	98,486,774	42,65 dan 93,88	108,335,451	42,75 dan 93,89	119,168,997	42,85 dan 93,90	131,085,896	42,95 dan 93,91	144,194,486	42,95 dan 93,91	699,758,378	DLH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Hasil perhitungan Indeks	46.68	46.68	361,643,040	46.69	261,643,040	46.7	287,807,344	46.71	316,588,078	46.72	348,246,886	46.73	383,071,575	46.73	1,958,999,964	DLH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terpenuhinya kebutuhan pengendalian B3 dan LB3	Jumlah pengendalian B3 dan LB3 yang tersedia/ total kebutuhan x 100	100	100	2,899,000	100	45,000,000	100	49,500,000	100	54,450,000	100	59,895,000	100	65,884,500	100	277,628,500	DLH
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota / Usaha dan/atau kegiatan	92,86 (13/14 x 100)	93	103,241,300	93	104,500,000	93	114,950,000	95	126,445,000	95	139,089,500	100	152,998,450	100	741,224,250	DLH



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

		diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	dilakukan pemeriksaan x 100																
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Loka dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	Angka mutlak	0	0	-	3	25,000,000	5	27,500,000	7	30,250,000	9	33,275,000	13	36,602,500	13	152,627,500	DLH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penghargaan bidang LH yang diberikan kepada masyarakat	Angka mutlak	11	12	-	15	25,000,000	18	27,500,000	25	30,250,000	28	33,275,000	34	36,602,500	34	152,627,500	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	% penanganan pengaduan	Jumlah kasus pengaduan LH yang tertangani /Total pengaduan x 100	100	100	66,657,500	100	66,657,500	100	73,323,250	100	80,655,575	100	88,721,133	100	97,593,246	100	473,608,203	DLH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	% sampah yang tertangani	Total volume sampah yang dapat ditangani / Total timbunan sampah kab/kota x 100	27.58	28	1,619,264,440	28.25	819,264,440	28.5	983,117,328	29	1,179,740,794	29.25	1,415,688,952	29.5	1,698,826,743	29.5	7,715,902,697	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					4,088,936,043		4,168,979,651		4,223,224,372		4,263,907,532		4,850,129,589		4,938,340,615		26,533,517,802	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,809,636,043	100	3,747,548,171	100	3,785,023,653	100	3,822,873,889	100	3,861,102,628	100	3,899,713,654	100	22,925,898,038	Disdukcapil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA	Jumlah penduduk dan keluarga yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk / jumlah total penduduk dan keluarga x 100	98,01 94,12 25	100 100 30	148,450,000	100 100 35	151,181,480	100 100 40	153,963,219	100 100 45	156,796,142	100 100 50	683,693,325	100 100 60	683,693,325	100 100 60	1,977,777,492	Disdukcapil



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	Jumlah penduduk dan keluarga yang memiliki dokumen pencatatan sipil / jumlah total penduduk dan keluarga x 100	95,88 100 100	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	71,100,000	100 100 100	82,307,138	100 100 100	82,307,138	100 100 100	449,014,275	Disdukcapil
2.12.04	Program pengelolaan informasi kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Jumlah OPD	3	5	59,750,000	10	59,750,000	15	62,737,500	20	62,737,500	25	72,626,498	30	72,626,498	30	390,227,997	Disdukcapil
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	Angka mutlak	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	-	2 buku/ tahun	139,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	150,400,000	2 buku/ tahun	200,000,000	2 buku/ tahun	790,600,000	Disdukcapil
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					11,082,326,317		6,865,510,417		6,955,355,022		7,046,996,520		7,140,470,847		7,235,814,661		46,326,473,784	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,229,046,167	100	4,492,230,267	100	4,582,074,872	100	4,673,716,370	100	4,767,190,697	100	4,862,534,511	100	27,606,792,884	DPMN
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	Jumlah nagari tertinggal / jumlah nagari x 100	0 (tidak ada yang tertinggal)	0	5,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	1,282,027,200	0	11,692,163,200	DPMN
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rata – rata persentase capaian pendapatan asli nagari	Jumlah capaian Pendapatan Asli Nagari/ Target x 100	80	-	-	81	20,000,000	82	20,000,000	83	20,000,000	84	20,000,000	85	20,000,000	85	100,000,000	DPMN
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Status Desa Mandiri menurut IDM	Jumlah desa mandiri pada IDM/ jumlah desa x 100	-	5	807,447,700	6	507,447,700	7	507,447,700	8	507,447,700	10.53	507,447,700	10.53	507,447,700	10.53	3,344,686,200	DPMN
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. % Lembaga Sosial Aktif di Nagari 2. % Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari 3. % Lembaga Adat Aktif di Nagari	Jumlah Lembaga sosial, ekonomi, dan lembaga adat aktif / jumlah total lembaga sosial, lembaga ekonomi dan lembaga adat x 100	100 63,33 10,52	100 63,33 50,52	763,805,250	100 65 75	563,805,250	100 70 85	563,805,250	100 70 90	563,805,250	100 73 95	563,805,250	1 0 0 7 5 100	563,805,250	10 0 75 100	3,582,831,500	DPMN



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					5,095,164,024		2,496,617,030		2,496,617,030		2,650,854,909		3,247,855,030		3,307,352,449		19,294,460,472	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Hasil perhitungan Indeks	3.05	3.05	88,522,151	3.05	88,522,151	3.05	88,522,151	3.05	92,948,259	3.05	102,475,455	3	107,599,228	3	568,589,394	DP2KBP3A
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	Jumlah peserta KB aktif modern/ jumlah PUS usia 1549 th x 100	65.98	66	4,474,750,373	66.35	1,868,803,379	66.5	1,868,803,379	66.75	2,057,906,650	67	2,057,906,650	68	2,057,906,650	68	14,386,077,081	DP2KBP3A
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Jumlah anggota BKB/ jumlah keluarga balita x 100	53.31	60	531,891,500	63	539,291,500	65	539,291,500	70	500,000,000	72	1,087,472,925	75	1,141,846,571	75	4,339,793,996	DP2KBP3A
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					10,216,262,701		6,497,763,240		6,579,616,284		8,754,699,392		9,504,189,772		8,912,887,195		50,465,418,584	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,692,902,678	100	4,488,785,701	100	4,533,673,558	100	4,579,010,294	100	4,624,800,397	100	4,671,048,400	100	27,590,221,028	Dishub
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Jumlah angkutan darat/ jumlah penumpang angkutan darat x100%	25	35	5,418,562,823	40	1,795,526,602	45	1,828,564,292	50	3,915,000,000	50	4,532,101,875	60	3,915,000,000	60	21,404,755,592	Dishub
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah orang/barang Melalui dermaga per tahun	ton & orang	550 ton & 792 orang/ tahun	600 ton & 850 orang/ tahun	104,797,200	700 ton & 1000 orang/ tahun	106,725,468	800 ton & 1200 orang/ tahun	108,689,217	900 ton & 1300 orang/ tahun	150,000,000	950 ton & 1400 orang/ tahun	173,643,750	1000 ton & 1500 org/ tahun	150,000,000	1000 ton & 1500 org/ tahun	793,855,636	Dishub
2.15.04	Program Pengelolaan Penerbangan	Jumlah orang/barang Melalui bandara per tahun	Angka mutlak	170 kg & 450 orang	170 kg & 500 orang	-	170 kg & 600 orang	106,725,468	170 kg & 650 orang	108,689,217	170 kg & 700 orang	110,689,099	170 kg & 700 orang	173,643,750	170 kg & 750 orang	176,838,795	170 kg & 750 orang	676,586,329	Dishub
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					6,419,642,707		5,193,394,607		6,225,496,742		6,257,919,898		6,790,667,286		7,538,467,304		38,425,588,545	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,436,461,602	100	3,210,213,502	100	3,242,315,637	100	3,274,738,793	100	3,307,486,181	100	3,340,561,043	100	19,811,776,759	Dinas Kominfo



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	Jumlah OPD dan Nagari yang melakukan publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID/ Jumlah OPD dan Nagari x 100	50	75	1,042,899,145	80	1,042,899,145	85	1,042,899,145	90	1,042,899,145	95	1,542,899,145	100	1,516,223,456	100	7,230,719,181	Dinas Kominfo
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo / Jumlah OPD x 100	100	100	1,940,281,960	100	940,281,960	100	1,940,281,960	100	1,940,281,960	100	1,940,281,960	100	2,681,682,805	100	11,383,092,605	Dinas Kominfo
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					4,818,448,122		4,619,321,829		4,690,079,451		4,762,772,870		4,837,482,854		4,914,294,051		28,642,399,177	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,195,661,322	100	4,005,211,729	100	4,045,263,846	100	4,085,716,485	100	4,126,573,650	100	4,167,839,386	100	24,626,266,418	DKUKM
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	% Pertumbuhan Perizinan	Jumlah izin usaha simpanpinjam tahun n - jumlah izin usaha simpanpinjam th n-1/ umlah izin usaha simpan pinjam th n-1 x 100	35	35	-	35	10,000,000	37	10,500,000	39	11,025,000	41	11,576,250	42	12,155,063	42	55,256,313	DKUKM
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	Jumlah koperasi berkualitas / Total koperasi terdaftar x 100	35	35	33,528,400	40	33,528,400	45	35,204,820	50	36,965,061	55	38,813,314	55	40,753,980	55	218,793,975	DKUKM
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang sehat	Angka mutlak	30 KSP/USP	30 KSP/USP	-	30 KSP/USP	10,000,000	30 KSP/USP	10,500,000	30 KSP/USP	11,025,000	30 KSP/USP	11,576,250	30 KSP/USP	12,155,063	30 KSP/USP	55,256,313	DKUKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	% Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan / Total koperasi x 100	3.32	3.93	246,357,300	4.55	290,248,250	5.16	304,760,663	5.77	319,998,696	6.39	335,998,630	7	352,798,562	7	1,850,162,100	DKUKM
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	Jumlah koperasi yang ikut dalam kemitraan usaha/ total koperasi x 100	2	2.08	111,577,800	2.17	81,577,800	2.25	85,656,690	2.33	89,939,525	2.42	94,436,501	2.5	99,158,326	2.5	562,346,641	DKUKM
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% Pertumbuhan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro tahun n - jumlah Usaha Mikro tahun n1/ jumlah Usaha	3	3.08	231,323,300	3.17	131,323,300	3.25	137,889,465	3.33	144,783,938	3.42	152,023,135	3.5	159,624,292	3.5	956,967,430	DKUKM



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

			Mikro tahun n-1 x 100																
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	% Ushaa Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan	Jumlah Usaha Mikro yang mendapat pemberdayaan dan pengembangan /Total Usaha Mikro x 100	2	2.25	-	2.5	57,432,350	2.75	60,303,968	3	63,319,166	3.25	66,485,124	3.5	69,809,380	3.5	317,349,988	DKUKM
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						4,595,338,897		4,333,121,046		3,921,566,366		3,955,164,845		4,046,675,455		4,111,913,995		24,963,780,605
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,779,799,897	100	3,326,582,046	100	3,359,847,866	100	3,393,446,345	100	3,427,380,809	100	3,461,654,617	100	20,748,711,580	DPMPTSP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN/ PMA	Angka mutlak	47,88 miliar	Rp. 50 M	-	Rp. 51 M	191,000,000	Rp. 52 M	200,550,000	Rp. 53 M	200,550,000	Rp. 54 M	221,106,375	55 miliar	232,161,694	362,88 miliar	1,045,368,069	DPMPTSP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	Angka mutlak	Tidak ada		169,342,000		169,342,000		58,327,500		58,327,500		64,306,069	3 MoU	67,521,372	3 MoU	587,166,441	DPMPTSP
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan	Hasil perhitungan survey	85.14	85.14	223,902,000	85.25	223,902,000	85.45	221,991,000	85.6	221,991,000	85.85	244,745,078	86	256,982,331	86	1,393,513,409	DPMPTSP
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi PMDN/PMA tahun n- Nilai Realisasi PMDN/PMA tahun n-1/Nilai Realisasi PMDN/PMA tahun n1 x 100	-11.16	-8	340,473,500	-4.4	340,473,500	-0.8	34,650,000	2.8	34,650,000	6.4	38,201,625	10	40,111,706	10	828,560,331	DPMPTSP
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Angka mutlak	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)	81,821,500	Ada (100)	81,821,500	Ada (100)	46,200,000	Ada (100)	46,200,000	Ada (100)	50,935,500	Ada (100)	53,482,275	Ada (100)	360,460,775	DPMPTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga						7,906,287,406		6,669,100,440		6,705,689,382		6,933,503,814		7,933,577,562		8,179,465,944		44,327,624,549



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi / target x 100	100	100	3,896,081,206	100	3,658,894,240	100	3,695,483,182	100	3,732,438,014	100	3,769,762,394	100	3,807,460,018	100	22,560,119,055	Dispora
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) + Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha + pemuda yang aktif dalam organisasi sosial di kab/kota/ jumlah pemuda (usia 16-30 tahun) di kab/kota x 100	0,102 dan 3,96	1 dan 4	56,810,200	2 dan 8	56,810,200	3 dan 10	56,810,200	4 dan 12	100,000,000	5 dan 15	907,696,078	6 dan 17	953,080,882	6 dan 17	2,131,207,559	Dispora
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah prestasi olahraga	Jumlah prestasi (unit)	3	5	3,953,396,000	10	2,953,396,000	15	2,953,396,000	20	3,101,065,800	25	3,256,119,090	30	3,418,925,045	30	19,636,297,935	Dispora
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					200,000,000		203,680,000		345,448,145		345,448,145		417,992,254		459,791,479		1,972,360,023	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah / Jumlah OPD x 100	71.19	80	200,000,000	85	203,680,000	90	345,448,145	95	345,448,145	95	417,992,254	100	459,791,479	100	1,972,360,023	Diskominfo
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					106,143,750		106,143,750		111,450,938		111,450,938		122,874,659		129,018,392		687,082,425	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks KAMI	Tingkatan pada KAMI	0	1	106,143,750	1	106,143,750	2	111,450,938	2	111,450,938	2	122,874,659	3	129,018,392	3	687,082,425	Diskominfo
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					546,520,500		483,922,492		508,118,617		533,524,547		560,200,775		588,210,814		3,220,497,744	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%)	Jumlah lembaga adat seni dan budaya yang dibina/ Jumlah Total Lembaga Adat Seni dan Budaya Terdaftar x 100	58	63	139,890,500	68	139,890,500	73	146,885,025	78	154,229,276	83	161,940,740	88	170,037,777	88	912,873,818	Disdikbud



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	% seni dan budaya yang dilestarikan	Jumlah seni dan budaya yang dilestrikkan/total seni dan budaya yang terdaftar x 100	-	35	306,630,000	40	210,431,992	45	220,953,592	50	232,001,271	55	243,601,335	60	255,781,401	60	1,469,399,591	Disdikbud
2.22.04	Program pembinaan sejarah	Sejarah lokal yang terdokumentasi	Jumlah sejarah yang terdokumentasi	0	1	-	2	33,600,000	3	35,280,000	5	37,044,000	8	38,896,200	10	40,841,010	10	185,661,210	Disdikbud
2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah mutlak	58	63	100,000,000	68	100,000,000	70	105,000,000	72	110,250,000	75	115,762,500	75	121,550,625	75	652,563,125	Disdikbud
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					706,396,250		316,396,250		316,396,250		420,000,000		829,318,209		870,784,119		3,459,291,078	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah (orang)	29100	29900	706,396,250	30731	306,396,250	30737	306,396,250	30746	400,000,000	30752	817,741,959	30758	858,629,057	30758	3,395,559,766	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dilestarian	Jumlah naskah (unit)	0	0	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	11,576,250	1	12,155,063	4	63,731,313	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					3,649,548,767		3,698,799,717		3,733,174,667		3,767,893,367		3,844,147,407		3,894,688,595		22,588,252,520	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,388,244,067	100	3,437,495,017	100	3,471,869,967	100	3,506,588,667	100	3,541,654,554	100	3,577,071,099	100	20,922,923,371	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	% Instansi Pemerintah dengan Indeks Arsip Minimal CUKUP	Jumlah OPD dengan nilai Indeks Arsip Minimal CUKUP / total OPD x 100	29.23	40	193,937,650	47.17	193,937,650	52.83	193,937,650	58.49	193,937,650	64.15	224,507,072	69.81	235,732,426	69.81	1,235,990,098	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	% Penyelamatan Arsip P3D Kabupaten	Jumlah arsip P3D yang terselamatkan/ jumlah total arsip P3D yang harusnya diselamatkan x 100	30	40	67,367,050	50	67,367,050	60	67,367,050	70	67,367,050	80	77,985,781	90	81,885,070	90	429,339,052	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Urusan Pemerintahan Pilihan					45,475,823,007		55,943,189,943		59,177,934,018		65,969,280,238		69,447,167,520		76,845,341,839		372,858,736,565	
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					7,789,427,565		5,217,227,950		5,396,057,117		5,464,550,441		5,602,947,161		5,746,915,409		35,217,125,644	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,349,113,165	100	3,304,352,565	100	3,337,396,091	100	3,370,770,052	100	3,404,477,752	100	3,438,522,530	100	20,204,632,154	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.02	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	Produksi (ton)	106,193	107,254	3,118,630,500	108,327	1,139,213,301	109,411	1,160,174,826	110,505	1,181,522,043	111,610	1,240,598,145	112,276	1,302,628,052	659,383	9,142,766,867	Dinas Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Produksi (ton)	5,911	5,970	1,125,235,650	6,030	534,899,986	6,090	544,742,146	6,151	554,765,401	6,213	582,503,671	6,275	611,628,855	36,729	3,953,775,709	Dinas Perikanan
3.25.04	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	Jumlah POKWASMAS (unit)	3 POKMASWAS	3	-	3	38,699,200	4	150,000,000	4	150,000,000	4	157,500,000	5 POKMASWAS	165,375,000	5 POKMASWAS	661,574,200	Dinas Perikanan
3.25.05	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keanekaragaman olahan hasil perikanan	Jenis Olahan Hasil Perikanan	2 jenis	2 jenis	196,448,250	3 jenis	200,062,898	3 jenis	203,744,055	3 jenis	207,492,946	4 jenis	217,867,593	5 jenis	228,760,973	5 jenis	1,254,376,714	Dinas Perikanan
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					4,717,516,184		4,616,134,753		4,680,362,413		4,745,803,356		4,834,796,163		4,926,340,765		28,520,953,634	
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	3,259,490,061	100	3,126,011,469	100	3,157,271,584	100	3,188,844,300	100	3,220,732,743	100	3,252,940,070	100	19,205,290,226	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	Jumlah DTW (unit)	1 DTW	1 DTW	983,129,123	2	1,000,825,447	3	1,018,840,305	4	1,037,179,431	5	1,068,294,814	5 DTW	1,100,343,658	5 DTW	6,208,612,778	Dinas Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. AD Sektor Pariwisata	Jumlah wisatawan (orang) dan Nilai PAD (Rp.)	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp. 943.981.035	292,000,400	25.500 orang dan Rp. 985.184.828	297,256,407	32.750 org dan Rp. 1.026.388.621	302,607,023	41.600 orang dan Rp. 1.067.592.414	308,053,949	45.750 orang dan Rp. 1.108.796.207	323,456,646	51.500 wisatawan dan Rp. 1.150.000.000	339,629,479	51.500 wisatawan dan Rp. 1.150.000.000	1,863,003,904	Dinas Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	% Kenaikan unit usaha ekonomi kreatif	Jumlah unit usaha ekonomi kreatif tahun n - jumlah unit usaha ekraf tahun n-1 / jumlah unit usaha ekraf th n-1 x 100	13	14	182,896,600	15	192,041,430	16	201,643,502	17	211,725,677	18	222,311,960	20	233,427,558	20	1,244,046,727	Dinas Pariwisata
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					31,264,929,548		44,361,650,576		47,393,068,880		54,039,487,104		57,100,772,999		64,168,501,908		298,328,411,016	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

[illegible]



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

			menular th n-1 x 100																
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian		10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	80,470,500	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	80,470,500	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	220,500,000	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	231,525,000	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	243,101,250	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	1,066,067,250	DTPHP	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO / Total jumlah perusahaan terdaftar x 100	15	-	-	36.67	30,000,000	47.5	31,500,000	58.33	33,075,000	69.17	34,728,750	80	36,465,188	80	165,768,938	DTPHP
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. Penyuluhan dan petani yang terlatih	% - Jumlah penyuluh dan poktan yang dilatih/ total jumlah penyuluh dan poktan x 100	1 dan 1	1 dan 1	3,382,261,650	1 dan 1	2,744,886,150	1 dan 1	3,019,374,765	1 dan 1	3,321,312,242	1 dan 1	3,653,443,466	1 dan 1	4,018,787,812	7 dan 7	20,140,066,084	DTPHP
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	5,153,627,546	100	5,045,212,470	100	5,095,664,595	100	5,146,621,241	100	5,198,087,453	100	5,250,068,328	100	30,889,281,632	Disbun
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. ketersediaan bibit ternak 2. ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. umlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. umlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung)	% % J % - Bibit ternak tersedia/ kebutuhan x 100 - Benih hijauan pakan ternak tersedia/ kebutuhan x 100 - Produksi (ton)	25 10 2.787.800 ton 147.471 ton padi, 262.510 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 2.792.539 ton 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 ton cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	644,680,925	27 20 2.793.097 ton 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	150,000,000	28 25 2.804.248 ton 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, dan 2.658 ton alpukat	29 30 14.005 ton jagung, 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	3,190,720,610	30 40 2.820.975 ton 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	3,249,429,869	31 45 2.827.944 ton 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	3,346,912,765	31 45 2.827.944 ton 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	10,734,504,168	Disbun	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

		jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)																	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jalan Produksi (km), JUT (Km), Dam parit (unit) JUT (km), BPP (unit), Puskesmas (unit), BBTPH (unit), BPTHPT (unit)	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	6,278,621,000	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	13,106,000,000	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	13,499,180,000	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	13,904,155,400	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	14,321,280,062	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	14,750,918,464	69 km (Disbun), 50 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	75,860,154,926	Disbun
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian		10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	80,470,500	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	75,000,000	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	210,000,000	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	220,500,000	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	231,525,000	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	243,101,250	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	1,060,596,750	Disbun
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Jumlah perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO / Total jumlah perusahaan terdaftar x 100	15	-	-	36.67	30,000,000	47.5	31,500,000	58.33	33,075,000	69.17	34,728,750	80	36,465,188	80	165,768,938	Disbun
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. Penyuluhan dan petani yang terlatih	% - Jumlah penyuluh dan poktan yang dilatih/ total jumlah penyuluh dan poktan x 100	1 dan 1	1 dan 1	339,007,270	1 dan 1	375,000,000	1 dan 1	381,900,000	1 dan 1	1,540,274,196	1 dan 1	1,927,750,000	1 dan 1	5,989,710,923	7 dan 7	10,553,642,389	Disbun
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					1,112,817,500		1,252,237,450		1,201,866,440		1,201,866,440		1,391,310,638		1,460,876,169		7,620,974,637	
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	% Perusahaan terdaftar	Jumlah perusahaan terdaftar / jumlah total perusahaan x 100	30	32	-	34	129,419,950	36	129,419,950	38	129,419,950	40	149,819,770	42	157,310,758	42	695,390,378	DKUKM



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan Sarana Perdagangan dalam kondisi baik dan layak	Jumlah sarana perdagangan layak/ total sarana perdagangan yang ada x 100	60	62	-	65	10,000,000	68	10,000,000	71	10,000,000	75	11,576,250	75	12,155,063	75	53,731,313	DKUKM
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dilaksanakan / kebutuhan x 100	20	20	715,852,600	20	715,852,600	25	751,645,230	30	751,645,230	35	870,123,309	40	913,629,475	40	4,718,748,444	DKUKM
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah komoditi yang difasilitasi pengembangan produk ekspor	Jenis komoditi	1	1	61,847,600	2	61,847,600	3	22,300,000	5	22,300,000	6	25,815,038	6 komoditi	27,105,789	6 komoditi	221,216,027	DKUKM
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pasar Tertib Ukur	Jumlah pasar (unit)	7	7	185,116,100	7	185,116,100	8	131,000,000	9	131,000,000	10	151,648,875	11	159,231,319	11	943,112,394	DKUKM
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk IKM yang mampu bersaing menuju pasar regional	Jenis produk	8 produk	8	150,001,200	9	150,001,200	10	157,501,260	11	157,501,260	12	182,327,396	13	191,443,766	13 produk	988,776,082	DKUKM
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					580,952,710		395,939,213		401,579,168		407,322,897		401,578,059		421,156,962		2,608,529,009	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Jumlah kawasan (unit)	Tidak ada	1	500,981,209	1	306,519,263	1	312,159,218	2	317,902,947	2	299,639,539	2	314,621,516	2 kawasan sentra	2,051,823,693	DKUKM
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase industri rumah tangga yang dibina	Jumlah IRT yang dibina pada tahun n/ total IRT pada tahun n x 100	2.5	2.75	79,971,501	3	79,419,950	3.25	79,419,950	3.5	79,419,950	3.75	91,938,520	4	96,535,446	4	506,705,316	DKUKM
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah data base IKM	Database (dokumen)	1	1	-	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	7 dok	50,000,000	DKUKM
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					10,179,500		100,000,000		105,000,000		110,250,000		115,762,500		121,550,625		562,742,625	
3.32.02	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah eks jorong transmigrasi yang difasilitasi program SDM	Jumlah jorong	Tidak ada (0)	15	10,179,500	17	100,000,000	19	105,000,000	23	110,250,000	23	115,762,500	23	121,550,625	23	562,742,625	Disnaker
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					81,348,642,291		75,477,600,323		76,126,550,979		76,813,196,442		77,475,191,006		78,674,492,517		465,915,673,558	
4.01	Sekretariat Daerah					44,225,789,475		40,367,091,640		40,744,284,156		41,125,248,598		41,510,022,684		42,031,036,511		250,003,473,064	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	38,559,159,532	100	37,719,251,640	100	38,096,444,156	100	38,477,408,598	100	38,862,182,684	100	39,250,804,511	100	230,965,251,121	Sekretariat Daerah
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	Pemenuhan kebutuhan adm	-	100	4,429,079,943	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,240,480,000	100	2,352,504,000	100	15,743,503,943	Sekretariat Daerah
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase bahan kebijakan umum lingkup perekonomian yang ditindaklanjuti	Jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti/ jumlah kebijakan yang dihasilkan x 100	-	100	1,237,550,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	407,360,000	100	427,728,000	100	3,294,718,000	Sekretariat Daerah
4.02	Sekretariat DPRD					37,122,852,816		35,110,508,683		35,382,266,823		35,687,947,844		35,965,168,322		36,643,456,006		215,912,200,494	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	28,288,158,116	100	27,175,813,983	100	27,447,572,123	100	27,722,047,844	100	27,999,268,322	100	28,279,261,006	100	166,912,121,394	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD/ Tugas dan fungsi yang semestinya x 100	100	100	8,834,694,700	100	7,834,694,700	100	7,834,694,700	100	7,860,900,000	100	7,860,900,000	100	8,253,945,000	100	48,479,829,100	Sekretariat DPRD
4.02.03	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan layanan administrasi Sekretariat DPRD	Layanan adm DPRD terpenuhi / kebutuhan x 100	-	-	-	100	100,000,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	110,250,000	100	520,250,000	Sekretariat DPRD
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					135,572,660,505		205,180,585,466		207,167,843,141		209,242,510,032		211,392,523,593		213,659,894,988		1,182,216,017,725	
5.01	Perencanaan					6,133,518,187		5,629,031,624		5,674,321,940		5,720,065,160		5,821,265,811		5,925,678,469		34,903,881,191	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,534,901,808	100	4,529,031,624	100	4,574,321,940	100	4,620,065,160	100	4,666,265,811	100	4,712,928,469	100	27,637,514,812	Bappeda
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPd) dengan	Jumlah program OPD yang sesuai dengan RPJMD dan RKPd / Jumlah Total Program	93.94	94,5	663,871,856	96	400,000,000	97	400,000,000	98	400,000,000	99	420,000,000	100	441,000,000	100	2,724,871,856	Bappeda



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

		dokumen perencanaan Perangkat Daerah	RPJMD dan RKPD x 100																
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	Jumlah OPD dengan nilai perencanaan minimal BAIK/ Total OPD x 100	72.34	75	934,744,523	80	700,000,000	85	700,000,000	90	700,000,000	95	735,000,000	100	771,750,000	100	4,541,494,523	Bappeda
5.02	Keuangan					121,636,713,886		192,438,031,771		194,329,334,905		196,267,087,710		198,224,218,043		200,228,622,399		1,103,124,008,714	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	34,087,213,388	100	41,125,657,586	100	41,536,914,162	100	41,952,283,303	100	42,371,806,137	100	42,795,524,198	100	243,869,398,774	BPKD
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu	Sesuai aturan penetapan APBD	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	76,974,180,452	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	137,305,471,617	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	138,678,526,333	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	140,065,311,597	30 hari sebelum tahun anggaran APBD	141,465,964,712	100	142,880,624,360	100	777,370,079,071	BPKD
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	8,419,370,622	100	11,783,689,168	100	11,901,526,060	100	12,020,541,320	100	12,140,746,733	100	12,262,154,201	100	68,528,028,104	BAPD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP	Jumlah OPD yang menata BMD sesuai SOP/ Total OPD x 100	100	100	554,054,400	100	581,318,400	100	554,054,400	100	554,054,400	100	554,054,400	100	581,757,120	100	3,379,293,120	BAPD
5.02.0	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD / Target x 100	Total realisasi PAD / Target x 100	72.13	75	1,601,895,024	80	1,641,895,000	85	1,658,313,950	90	1,674,897,090	95	1,691,646,060	100	1,708,562,521	100	9,977,209,645	BAPD
5.03	Kepegawaian					5,755,328,842		5,866,422,481		5,917,086,706		6,008,257,573		6,059,940,149		6,154,139,550		35,761,175,300	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	4,567,183,664	100	5,066,422,481	100	5,117,086,706	100	5,168,257,573	100	5,219,940,149	100	5,272,139,550	100	30,411,030,122	BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	Hasil perhitungan Indeks	81.25%	83	1,188,145,178	84	800,000,000	85	800,000,000	86	840,000,000	87	840,000,000	87	882,000,000	87	5,350,145,178	BKPSDM
5.04	Pendidikan dan Pelatihan					1,600,000,000		800,000,000		800,000,000		800,000,000		840,000,000		882,000,000		5,722,000,000	



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan karier	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat kepemimpinan/ teknis; tubel; ujiandinas/ kompetensi; pengembangan karier /jab /total ASN x 100	-	2.3	1,600,000,000	2.8	800,000,000	3.3	800,000,000	3.8	800,000,000	4	840,000,000	4.2	882,000,000	4.2	5,722,000,000	BKPSDM
5.05	Penelitian dan Pengembangan					447,099,590		447,099,590		447,099,590		447,099,590		447,099,590		469,454,570		2,704,952,520	
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	Jumlah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti /total hasil kelitbangan x 100	-	70	447,099,590	75	447,099,590	80	447,099,590	85	447,099,590	90	447,099,590	90	469,454,570	90	2,704,952,520	Bappeda
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					8,797,533,714		9,203,074,932		9,279,626,151		9,356,942,883		9,435,032,782		9,539,166,879		55,611,377,341	
6.01	Inspektorat Daerah					8,797,533,714		9,203,074,932		9,279,626,151		9,356,942,883		9,435,032,782		9,539,166,879		55,611,377,341	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	7,149,580,714	100	7,655,121,932	100	7,731,673,151	100	7,808,989,883	100	7,887,079,782	100	7,965,950,579	100	46,198,396,041	Inspektorat
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penurunan temuan BPK	Jumlah Temuan BPK Tahun n - Jumlah temuan BPK tahun n-1 / Jumlah temuan BPK Th n-1 x 100	10	8	1,142,687,000	7	1,042,687,000	6	1,042,687,000	6	1,042,687,000	5	1,042,687,000	5	1,042,687,000	5	6,356,122,000	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD (unit)	10 OPD	10	505,266,000	10	505,266,000	20	505,266,000	20	505,266,000	30	505,266,000	30	530,529,300	30	3,056,859,300	Inspektorat
7	Unsur Kewilayahan					12,978,626,289		14,538,526,289		14,965,075,914		15,401,722,441		15,860,476,040		16,343,098,247		90,087,525,220	
7.01	Kecamatan					12,978,626,289		14,538,526,289		14,965,075,914		15,401,722,441		15,860,476,040		16,343,098,247		90,087,525,220	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,169,210,350	100	1,170,930,540	100	1,194,349,151	100	1,218,236,134	100	1,242,600,856	100	1,267,452,874	100	7,262,779,905	Kec. Kinali
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	20,000,000	84.5	19,950,000	85	21,945,000	85.7	24,139,500	86	26,553,450	86	29,208,795	86	141,796,745	Kec. Kinali



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	32,339,650	100	34,478,000	100	37,925,800	100	41,718,380	100	45,890,218	100	50,479,240	100	242,831,288	Kec. Kinali
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	7,320,500	100	30,525,500	Kec. Kinali
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	104,000,000	100	155,191,460	100	170,710,606	100	187,781,667	100	206,559,833	100	227,215,817	100	1,051,459,382	Kec. Kinali
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	122,102,000	Kec. Kinali
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	988,850,000	100	1,098,850,000	100	1,120,827,000	100	1,143,243,540	100	1,166,108,411	100	1,189,430,579	100	6,707,309,530	Kec. Sasak
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	10,000,000	84.5	10,000,000	85	11,000,000	85.7	12,100,000	86	13,310,000	86	14,641,000	86	71,051,000	Kec. Sasak
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	30,000,000	100	32,000,000	100	35,200,000	100	38,720,000	100	42,592,000	100	46,851,200	100	225,363,200	Kec. Sasak
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	4,500,000	100	4,950,000	100	5,445,000	100	5,989,500	100	6,588,450	100	27,472,950	Kec. Sasak
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	62,000,000	100	80,000,000	100	88,000,000	100	96,800,000	100	106,480,000	100	117,128,000	100	550,408,000	Kec. Sasak
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	13,000,000	100	14,300,000	100	15,730,000	100	17,303,000	100	19,033,300	100	79,366,300	Kec. Sasak
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,067,585,000	100	1,185,585,000	100	1,209,296,700	100	1,233,482,634	100	1,258,152,287	100	1,283,315,332	100	7,237,416,953	Kec. Talamau
7.01.02	Program Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	23,000,000	84.5	23,000,000	85	25,300,000	85.7	27,830,000	86	30,613,000	86	33,674,300	86	163,417,300	Kec. Talamau



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

	Pemerintahan dan Pelayanan Publik																		
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	33,000,000	100	37,000,000	100	40,700,000	100	44,770,000	100	49,247,000	100	54,171,700	100	258,888,700	Kec. Talamau
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	3,500,000	100	3,850,000	100	4,235,000	100	4,658,500	100	5,124,350	100	21,367,850	Kec. Talamau
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	86,750,000	100	114,750,000	100	126,225,000	100	138,847,500	100	152,732,250	100	168,005,475	100	787,310,225	Kec. Talamau
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	100	100	40,000,000	100	20,000,000	100	22,000,000	100	24,200,000	100	26,620,000	100	29,282,000	100	162,102,000	Kec. Talamau
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,193,364,500	100	1,247,096,914	100	1,272,038,852	100	1,297,479,629	100	1,323,429,222	100	1,349,897,806	100	7,683,306,924	Kec. Pasaman
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	18,070,000	84.5	26,000,000	85	28,600,000	85.7	31,460,000	86	34,606,000	86	38,066,600	86	176,802,600	Kec. Pasaman
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	37,582,414	100	65,000,000	100	71,500,000	100	78,650,000	100	86,515,000	100	95,166,500	100	434,413,914	Kec. Pasaman
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	7,320,500	100	30,525,500	Kec. Pasaman
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	45,200,000	100	86,120,000	100	94,732,000	100	104,205,200	100	114,625,720	100	126,088,292	100	570,971,212	Kec. Pasaman
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	18,000,000	100	19,800,000	100	21,780,000	100	23,958,000	100	26,353,800	100	109,891,800	Kec. Pasaman
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,069,876,375	100	1,094,376,375	100	1,116,263,903	100	1,138,589,181	100	1,161,360,964	100	1,184,588,183	100	6,765,054,981	Kec. Gunung Tuleh



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	3,000,000	84.5	13,000,000	85	14,300,000	85.7	15,015,000	86	15,765,750	86	16,554,038	86	77,634,788	Kec. Gunung Tuleh
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	26,000,000	100	25,400,000	100	27,940,000	100	29,337,000	100	30,803,850	100	32,344,043	100	171,824,893	Kec. Gunung Tuleh
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	2,000,000	100	2,200,000	100	2,310,000	100	2,425,500	100	2,546,775	100	11,482,275	Kec. Gunung Tuleh
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	83,000,000	100	176,000,000	100	193,600,000	100	203,280,000	100	213,444,000	100	224,116,200	100	1,093,440,200	Kec. Gunung Tuleh
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	2,000,000	100	2,200,000	100	2,310,000	100	2,425,500	100	2,546,775	100	11,482,275	Kec. Gunung Tuleh
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,027,850,000	100	1,114,572,000	100	1,136,863,440	100	1,159,600,709	100	1,182,792,723	100	1,206,448,577	100	6,828,127,449	Kec. Lembah Melintang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	5,000,000	84.5	4,914,000	85	5,405,400	85.7	5,945,940	86	6,540,534	86	7,194,587	86	35,000,461	Kec. Lembah Melintang
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	35,000,000	100	49,000,000	100	53,900,000	100	59,290,000	100	65,219,000	100	71,740,900	100	334,149,900	Kec. Lembah Melintang
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	7,320,500	100	35,525,500	Kec. Lembah Melintang
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	95,000,000	100	124,364,000	100	136,800,400	100	150,480,440	100	165,528,484	100	182,081,332	100	854,254,656	Kec. Lembah Melintang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	18,000,000	100	19,800,000	100	21,780,000	100	23,958,000	100	26,353,800	100	109,891,800	Kec. Lembah Melintang
7.01.01	Program Penunjang Urusan	Cakupan pelayanan penunjang urusan	Realisasi/ target x 100	100	100	1,054,368,921	100	823,184,722	100	839,648,416	100	856,441,385	100	873,570,212	100	891,041,617	100	5,338,255,273	Kec. Ranah Batahan



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

	Pemerintahan Kabupaten/Kota	pemerintahan daerah																	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	3,000,000	84.5	800,000	85	880,000	85.7	968,000	86	1,064,800	86	1,171,280	86	7,884,080	Kec. Ranah Batahan
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	35,000,000	100	7,620,000	100	8,382,000	100	9,220,200	100	10,142,220	100	11,156,442	100	81,520,862	Kec. Ranah Batahan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	5,000,000	100	5,500,000	100	6,050,000	100	6,655,000	100	7,320,500	100	30,525,500	Kec. Ranah Batahan
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	96,887,079	100	487,651,278	100	536,416,406	100	590,058,046	100	649,063,851	100	713,970,236	100	3,074,046,896	Kec. Ranah Batahan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	4,000,000	100	4,400,000	100	4,840,000	100	5,324,000	100	5,856,400	100	24,420,400	Kec. Ranah Batahan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,082,450,000	100	783,286,685	100	798,952,419	100	814,931,467	100	831,230,096	100	847,854,698	100	5,158,705,366	Kec. Sungai Beremas
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	6,000,000	84.5	2,000,000	85	2,040,000	85.7	2,080,800	86	2,122,416	86	2,164,864	86	16,408,080	Kec. Sungai Beremas
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	33,200,000	100	3,000,000	100	3,060,000	100	3,121,200	100	3,183,624	100	3,247,296	100	48,812,120	Kec. Sungai Beremas
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	1,000,000	100	1,020,000	100	1,040,400	100	1,061,208	100	1,082,432	100	5,204,040	Kec. Sungai Beremas
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	49,000,000	100	509,363,315	100	519,550,581	100	529,941,593	100	540,540,425	100	551,351,233	100	2,699,747,147	Kec. Sungai Beremas
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	2,000,000	100	2,040,000	100	2,080,800	100	2,122,416	100	2,164,864	100	10,408,080	Kec. Sungai Beremas
										-		-		-		-			



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	929,750,000	100	1,014,250,000	100	1,034,535,000	100	1,055,225,700	100	1,076,330,214	100	1,097,856,818	100	6,207,947,732	Kec. Sungai Aur
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	6,000,000	84.5	12,000,000	85	12,240,000	85.7	12,484,800	86	12,734,496	86	12,989,186	86	68,448,482	Kec. Sungai Aur
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	30,000,000	100	32,500,000	100	33,150,000	100	33,813,000	100	34,489,260	100	35,179,045	100	199,131,305	Kec. Sungai Aur
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	100	12,000,000	100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	12,989,186	100	74,448,482	Kec. Sungai Aur
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	93,000,000	100	130,000,000	100	132,600,000	100	135,252,000	100	137,957,040	100	140,716,181	100	769,525,221	Kec. Sungai Aur
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	7,000,000	100	7,140,000	100	7,282,800	100	7,428,456	100	7,577,025	100	36,428,281	Kec. Sungai Aur
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,083,142,000	100	1,077,106,658	100	1,098,648,791	100	1,120,621,767	100	1,143,034,202	100	1,165,894,886	100	6,688,448,305	Kec. Luhak Nan Duo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	10,500,000	84.5	11,250,000	85	11,475,000	85.7	11,704,500	86	11,938,590	86	12,177,362	86	69,045,452	Kec. Luhak Nan Duo
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	22,500,000	100	32,500,000	100	33,150,000	100	33,813,000	100	34,489,260	100	35,179,045	100	191,631,305	Kec. Luhak Nan Duo
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	4,000,000	100	4,080,000	100	4,161,600	100	4,244,832	100	4,329,729	100	20,816,161	Kec. Luhak Nan Duo
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	28,000,000	100	223,285,342	100	227,751,049	100	232,306,070	100	236,952,191	100	241,691,235	100	1,189,985,887	Kec. Luhak Nan Duo
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	-	-	-	100	12,000,000	100	12,240,000	100	12,484,800	100	12,734,496	100	12,989,186	100	62,448,482	Kec. Luhak Nan Duo



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

	Pemerintahan Desa	Pengawasan Pemerintahan Desa																	
									-		-		-		-				
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	1,003,650,000	100	725,576,450	100	740,087,979	100	754,889,739	100	769,987,533	100	785,387,284	100	4,779,578,985	Kec. Koto Balingka
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil perhitungan survey	-	83	10,000,000	84.5	2,000,000	85	2,040,000	85.7	2,080,800	86	2,122,416	86	2,164,864	86	20,408,080	Kec. Koto Balingka
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Realisasi / Rencana x 100) → Musrenbang, PKK Kec	100	100	29,500,000	100	2,000,000	100	2,040,000	100	2,080,800	100	2,122,416	100	2,164,864	100	39,908,080	Kec. Koto Balingka
7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	Realisasi / Rencana x 100	-	-	-	100	5,000,000	100	5,100,000	100	5,202,000	100	5,306,040	100	5,412,161	100	26,020,201	Kec. Koto Balingka
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	realisasi / rencana *x 100) → Wasbang, MTQ, Forkopimca	100	100	50,000,000	100	493,573,550	100	503,445,021	100	513,513,921	100	523,784,200	100	534,259,884	100	2,618,576,576	Kec. Koto Balingka
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Realisasi / jumlah desa di masing2 kecamatan x 100	100	-	-	100	10,000,000	100	10,200,000	100	10,404,000	100	10,612,080	100	10,824,322	100	52,040,402	Kec. Koto Balingka
8	Unsur Pemerintahan Umum					5,285,831,731		3,790,435,146		3,835,443,415		3,908,248,469		3,938,287,666		3,992,002,845		24,750,249,272	
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik					5,285,831,731		3,790,435,146		3,835,443,415		3,908,248,469		3,938,287,666		3,992,002,845		24,750,249,272	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Realisasi/ target x 100	100	100	2,886,292,446	100	2,944,730,620	100	2,974,177,926	100	3,003,919,705	100	3,033,958,903	100	3,064,298,492	100	17,907,378,092	Badan Kesbangpol
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi	Jumlah siswa SMP + SMA yang mendapatkan pemantapan ideologi / total siswa SMP + SMA x 100	0	3	115,156,902	5	115,156,902	7	117,275,789	10	123,139,578	15	123,139,578	20	129,296,557	20	723,165,307	Badan Kesbangpol
8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui	% partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada	Jumlah penduduk yang memberikan suara pada Pemilu/Pilkada/ Jumlah penduduk yang seharusnya	68	68	1,208,499,774	68	408,499,774	68	416,016,170	70	436,816,978	70	436,816,978	70	436,816,978	70	3,343,466,653	Badan Kesbangpol



BAB 7 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

	pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik		memberikan suara x 100																
8.01.04	Program Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	% Ormas terdaftar dan aktif dalam pembangunan	Jumlah ormas terdaftar dan berpartisipasi dalam program pemerintah / total jumlah ormas x 100	-	20	122,047,850	25	122,047,850	30	124,293,530	35	130,508,207	40	130,508,207	45	137,033,617	45	766,439,262	Badan Kesbangpol
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	Jumlah ormas terdaftar dan berpartisipasi dalam program pemerintah / total jumlah ormas x 100	5% per tahun	5% per tahun	440,920,559	5% per tahun	100,000,000	5% per tahun	101,840,000	5% per tahun	106,932,000	5% per tahun	106,932,000	5% per tahun	112,278,600	5% per tahun	968,903,159	Badan Kesbangpol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang ditangani	Total konflik tahun n - konflik tahun n-1 / Konflik tahun n-1 x 100	100	100	512,914,200	100	100,000,000	100	101,840,000	100	106,932,000	100	106,932,000	100	112,278,600	100	1,040,896,800	Badan Kesbangpol
TOTAL						1,200,786,164,498		1,209,104,813,333		1,234,495,265,950		1,263,243,652,830		1,292,449,055,348		1,324,236,414,204		7,524,315,366,163	



BAB 8

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman kepada:

1. Kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Indikator-indikator pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen *Sustainable Development Goals (SDGs)*;
5. Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
6. Indikator Pembangunan sesuai dengan prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026.

8. 1. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama 6 (enam) tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam Tabel 8.1 berikut:



Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

Tahun 2021-2026							
No	Indikator	Realisasi dan Target Capaian Setiap Tahun					
		Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
Misi Ke-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (53)	CC (58)	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)
2	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)
4	Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6
5	Tingkat Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3
6	Indeks Profesionalitas ASN	70	70	75	75	80	80
7	Indeks Maturitas SPBE	3	3	3	4	4	4
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,00	84,5	85	85,7	85,8	86
Misi Ke-2: Membangun sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berbudaya, dan berdaya saing							
9	Angka Kriminalitas (per 10.000 penduduk)	13	12	11	10	9	8
10	% Capaian PASBAR MENGAJI	35	50	65	75	85	90
11	Adat, seni dan budaya yang dilestarikan	3	5	7	9	10	12
12	Indeks Pembangunan Gender	90,38	90,71	91,03	91,35	91,68	92
13	Predikat Kabupaten Peduli HAM	SP	SP	SP	SP	SP	SP
14	Indeks Pemberdayaan Gender	62,07	63,25	64,44	65,63	66,81	68,00
15	Predikat Kabupaten Layak Anak	Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Nindya (780)	Utama (820)
16	Indeks Ketahanan Daerah	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.80
17	Indeks Pembangunan Manusia	68,95	69,41	70,07	70,73	71,41	71,97
18	Rata-rata lama sekolah	8,27 th	8,38 th	8,48 th	8,58 th	8,68 th	8,79 th
19	Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	13,93 th	14,22 th	14,50 th	14,79 th	15,08 th	15,37 th
20	Usia Harapan Hidup	67,82 th	67,77	67,87	67,97	68,07	68,17
21	Prevalensi Stunting	20,60	19,00	17,00	14,00	13,50	13,00
22	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,24%	1,23%	1,22%	1,21%	1,2%	1,2%
Misi Ke-3: Mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan inklusif							
23	Indeks Gini	0,257	0,256	0,255	0,253	0,252	0,251
24	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,81	2,97	4,26	4,60	4,71	4,84
25	Persentase Penduduk Miskin	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,44	4,35	4,19	4,06	3,89	3,69
27	PDRB per Kapita ADHB (Rp juta)	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46



8. 2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah pada akhir masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Layanan Umum serta Aspek Daya Saing Daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021-2026 tersebut dapat dilihat pada tabel 8.2 berikut:



Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi										
<i>1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</i>										
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,49	68,95	69,41	70,07	70,73	71,41	71,97	71,97
2	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,06	90,38	90,71	91,03	91,35	91,68	92	92
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,34	2,81	2,97	4,26	4,60	4,71	4,84	4,84
4	PDRB Perkapita Konstan (ADHK)	Rp. Juta	26,08	25,79	26,11	26,78	27,56	28,40	29,31	29,31
5	PDRB Perkapita Berlaku	Rp. Juta	35,32	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46	45,46
6	Angka Kemiskinan	Persen	7,04	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58	6,58
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,44	4,35	4,19	4,06	3,89	3,69	3,69	3,69
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	67,47	67,73	67,98	68,24	68,49	68,75	69	69
9	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Persen	52,90	54,92	56,93	58,95	60,97	62,98	65	65
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,88	62,07	63,25	64,44	65,63	66,81	68,00	68,00
11	Indeks Gini	Indeks	0,279	0,279	0,278	0,275	0,271	0,267	0,261	0,261
Kesejahteraan Sosial										
<i>1. Pendidikan</i>										
1.1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,19	8,27	8,38	8,48	8,58	8,68	8,79	8,79
1.2	Rata-rata harapan lama sekolah	Tahun	13,61	13,93	13,93	14,50	14,79	15,08	15,37	15,37
<i>2. Kesehatan</i>										
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	67,82	67,85	67,87	67,97	68,07	68,17	68,27	68,27



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,2	1,2	1,2
2.4	Cakupan kepesertaan JKN	Persen	74,04	77,70	81,36	85,02	88,68	92,34	96	96
II. ASPEK PELAYANAN UMUM										
<i>Layanan Urusan Wajib</i>										
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan										
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									
1.01.1	Pendidikan Dasar									
1.01.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	Persen	99,94	100	100	100	100	100	100	100
1.01.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	Persen	97,76	100	100	100	100	100	100	100
1.01.2	Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan									
1.01.2.1	Angka Melek Huruf	Persen	99,35	99,41	99,47	99,53	99,58	99,64	99,70	99,70
1.01.2.2	Angka Partisipasi PAUD	Persen	48	100	100	100	100	100	100	100
1.01.2.3	Rasio Penduduk Usia Sekolah Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	3	100	100	100	100	100	100	100
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.02.1	Akreditasi RS	Strata Akreditasi	Dasar	Madya	Madya	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5	Paripurna Bintang 5
1.02.2	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Per 1000 penduduk	0,669	0,75	0,85	0,90	0,90	1	1	1
1.02.3	Angka kematian Ibu	Per 10.000 KH	219,4	219	210	190	183	175	170	170
1.02.4	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	11,58	11,58	10,97	10,24	9,75	9,14	7,31	7,31
1.02.5	Angka Kematian Balita	Per 1000 KH	12,56	12,56	10,75	9,07	7,88	6,66	4,85	4,85



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
1.02.6	Prevalensi <i>Stunting</i>	Persen	20,60	20,60	19,00	17,00	14,00	13,50	13,00	13,00
1.02.7	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	Persen	54,5	70	70	75	75	75	75	75
1.02.8	<i>Capaian SPM Kesehatan</i>	<i>Persen</i>	<i>40,36</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
1.02.8.1	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	58,62	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.2	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	72,88	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.3	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	73,82	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	Persen	58,93	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	27,81	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	Persen	12,14	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.7	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan <i>skrining</i> kesehatan sesuai standar	Persen	49,59	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	3,32	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	18,51	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	48,89	100	100	100	100	100	100	100
1.02.8.11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	13,78	100	100	100	100	100	100	100



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
1.02.8.12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	46,06	100	100	100	100	100	100	100
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.03.1	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	Persen	78,41	100	100	100	100	100	100	100
1.03.2	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	71,90	100	100	100	100	100	100	100
1.03.3	Persentase jalan kabupaten kondisi baik	Persen	56,66	58,86	61,06	63,26	65,46	67,66	70,0	70,0
1.03.4	Ketaatan RTRW	Persen	81	82,5	84	85,5	87	88,5	90	90
1.03.5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	74,30	80,00	82,45	84,25	86,05	87,85	89,65	89,65
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1.04.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	86,77	87,74	87,89	90,04	91,19	92,34	92,34	92,34
1.04.2	% Areal Kawasan Kumuh	Persen	5,15	4,24	3,68	2,95	2,16	1,48	1,48	1,48
1.04.3.	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persen	0	100	100	100	100	100	100	100
1.04.4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.1	Pencapaian SPM Trantibum									
1.05.1.1	Rasio penduduk yang memperoleh	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
	layanan akibat dari penegakan hukum (Perda dan Perkada)									
1.05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
1.05.3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	20	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
1.05.4	Pencapaian SPM Kebencanaan		63,53	100	100	100	100	100	100	100
1.05.4.1	Rasio penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	77,55	100	100	100	100	100	100	100
1.05.4.2	Rasio penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	14,06	100	100	100	100	100	100	100
1.05.4.3	Rasio penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	Persen	99	100	100	100	100	100	100	100
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	94,38	100	100	100	100	100	100	100
1.06.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
1.06.3	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	-	100	100	100	100	100	100	100
2.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2.07.1	% pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persen	13,75	15,79	17,19	19,79	21,79	25	25	25
2.07.2	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	1,72	1,92	2,12	2,32	2,52	2,75	3	3
2.07.3	% Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persen	80	86	87	88	89	90	90	90
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak									
2.08.1	Predikat pencapaian KLA	predikat	Pratama (501)	Madya (620)	Madya (650)	Nindya (720)	Nindya (750)	Nindya (780)	Utama (820)	Utama (820)
2.08.2	Predikat APE	predikat	-	Pratama (1)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	Madya (2)	Utama (3)	Utama (3)
2.08.3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	Kejadian/ 10.000 jiwa Anak	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2.08.4	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	Kejadian/ per 100.000 penduduk perempuan	0,70	0,58	0,47	0,35	0,23	0,12	0,00	0
2.08.5	Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif	Persen	7,5	7,5	7,5	7,5	30	30	30	30
2.08.6	Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif	Persen	-	64,79	65	65,2	65,4	65,6	66	66
2.08.7	Persentase besaran anggaran responsive gender terhadap total anggaran Belanja Langsung APBD	Persen	4,63	4,63	4,65	4,67	8	9	12	12



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
2.09.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Skor	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	83,00	83,00
2.09.2	Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita/hari (%)	Persen	90,57	90,60	90,63	90,66	90,69	90,72	90,75	90,75
2.09.3	Persentase ketersediaan pangan utama	Persen	242,2	90,61	90,62	90,65	90,68	90,73	90,73	90,73
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan									
2.10.1	Persentase konflik pertanahan difasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
2.11.1	Cakupan wilayah kecamatan yang dilayani dalam pengangkutan sampah ke TPA	Kec	3	3	4	4	5	5	5	5
2.11.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	27,58	28	28,25	28,50	29	29,25	29,50	29,50
2.11.3	Persentase pengurangan sampah	Persen	2	5	5	5	5	5	7	7
2.11.4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,22	68,20	68,74	69,27	69,81	70,34	70,87	70,87
2.11.5	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Persen	92,86	93	93	95	95	100	100	100
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
2.12.1	Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil									
2.12.1.1	% penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran	Persen	95,88	100	100	100	100	100	100	100
2.12.1.2	% penerbitan akta kematian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.12.1.3	% penerbitan akta perceraian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2	Kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk									
2.12.2.1	% penduduk yang memiliki KK	Persen	98,01	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.2	% penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP	Persen	94,12	100	100	100	100	100	100	100
2.12.2.3	% Kepemilikan KIA	Persen	25	30	35	40	45	50	60	60
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa									
2.13.1	Persentase Desa Tertinggal Menurut IDM	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.13.2	Persentase Status Desa Mandiri Menurut IDM	Persen	0	5,26	5,26	5,26	10,53	10,53	10,53	10,53
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.14.1	Modern contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	Persen	65,98	66,00	66,25	66,5	66,75	67	68	68
2.14.2	TFR (Total Fertility Rate)	Persen	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3	3
2.14.3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	Persen	53,31	60	63	65	70	72	75	75
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
2.15.1	Persentase layanan angkutan darat	Persen	25	35	40	45	50	50	60	60
2.15.2	Rasio Konektivitas Kabupaten	Rasio	5,2	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1
2.15.3	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	Rasio	38	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.16.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.16.2	% Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	5	5	10	10	25	25	35	35
2.16.3	% Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
2.17.1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	35	35	40	45	50	55	55	55
2.17.2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi usaha kecil	Persen	-	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	3,50
2.17.3	Persentase Koperasi aktif	Persen	94,09	95,25	95,50	95,75	100	100	100	100
2.17.4	Persentase Usaha Mikro Aktif	Persen	95,16	95,25	95,50	95,75	100	100	100	100
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									
2.18.1	Kenaikan nilai investasi di kab/kota	(Rp. Milyar	47,88 M	Rp. 50 M	Rp. 51 M	Rp. 52 M	Rp. 53 M	Rp. 54 M	Rp. 55 M	362,88
2.18.1	Nilai IKM Perizinan	Persen	85,14	85,14	85,25	85,45	85,60	85,85	86	86
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga									
2.19.1	Jumlah perolehan Medali pada event olahraga nasional dan internasional	Jumlah	3	5	10	15	20	25	30	30
2.19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,102	1	2	3	4	5	6	6



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.19.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Persen	3,96	4	8	10	12	15	17	17
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
2.20.1	% OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	71,19	80	85	90	95	95	100	100
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
2.20.1	Indeks KAMI	Tingkat	0	1	1	2	2	2	3	3
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
2.22.1	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina	Persen	58	63	68	73	78	83	88	88
2.22.2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	58	63	68	70	72	75	75	75
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
2.23.1	Persentase pertambahan kunjungan pemustaka	Persen	-30.30	2,75	2,78	2,80	2,83	2,85	2,87	2,87
2.23.2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Survey	52,98	53,15	53,66	54,21	54,82	55,46	56,14	56,14
2.23.3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (LPPD)	Indeks	20,05	20,11	20,18	20,23	20,29	20,36	20,41	20,41
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
2.24.1	Nilai Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)	Nilai	68,83	69,02	69,95	71,12	72,4	74,01	75,30	75,30
2.24.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	41,90	44,34	46,70	49,06	52,36	55,66	58,96	58,96
2.24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83	80,83
3. Urusan Pilihan										
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan									
3.25.1	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	106.193	107.254	108.327	109.411	110.505	111.610	112.276	112.276
3.25.2	% Peningkatan produksi Perikanan Tangkap	Persen	0,20	1	1	1	1	1	1	1
3.25.3	Jumlah Produksi perikanan budidaya	Ton	5,911	5.970	6.030	6.090	6.151	6.213	6.275	6.275
3.25.4	% Peningkatan produksi Perikanan Budidaya	Persen	-4,86	1	1	1	1	1	1	1
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
3.26.1	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	5,71	11,9	12,1	12,5	12,8	13,1	13,4	13,4
3.26.2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	0,83	0,87	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	1,8
3.26.3	Persentase Peningkatan pertumbuhan unit usaha Ekonomi Kreatif	Persen	13	14	15	16	17	18	20	20



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
3.27.1	Peningkatan/Penurunan Produksi Tanaman Pangan									
	- Padi	Ton	147.471	114.980	117.343	119.980	121.230	123.654	126.007	126.007
	- Jagung	Ton	262.510	265.551	283.005	287.556	290.081	294.897	199.752	199.752
3.27.2	Produktivitas Padi/ Bahan Pangan Lokal	Ton / ha	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	4,90
3.27.3	Produksi komoditi Tan. Hortikultura utama (ton)									
	- Cabai	Ton	9.558	9.726	9.896	10.069	10.245	10.425	10.607	10.607
	- Jeruk	Ton	9.718	9.718	9.888	9.892	10.065	10.241	10.420	10.420
	- Alpukat	Ton	2.396	2.896	3.396	3.896	4.396	4.896	5.396	5.396
3.27.4	% Peningkatan/Penurunan Populasi ternak	Persen	-1,81	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80	1,80
	- Sapi	Ekor	19.929	20.229	20.529	20.829	21.129	21.429	21.729	21.729
	- Kambing	Ekor	14.056	14.266	14.476	14.686	14.896	15.106	15.316	51.316
	- Unggas	Ekor	720.934	735.334	749.734	764.134	778.534	792.934	807.334	807.3345
3.27.5	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditi perkebunan	Persen	2,06	2,23	2,25	2,65	3	3,25	3,5	3,5
3.28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan									
	-									
3.29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral									
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
3.30.1	Kontribusi Sektor Perdagangan	Persen	11,79	12,00	12,25	12,75	13,00	13,25	13,50	13,50



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
	Terhadap PDRB									
3.30.2	Kenaikan PDRB Sektor Perdagangan	Persen	-1,13	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,25
3.30.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0,027	0,050	0,075	0,10	0,15	1,00	1,25	1,25
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									
3.31.1	Pertambahan jumlah IKM	Persen	1,71	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,25
3.31.2	Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Persen	14,21	14,50	14,75	15,00	15,25	15,75	16,00	16,00
3.31.3	Laju Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian	Persen	-2,32	-2,00	-1,00	1,00	1,25	1,50	1,75	1,75
3.31.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	34,4	34,50	34,75	35,00	35,25	35,50	35,75	35,75
3.32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi									
3.32.1	Jumlah eks jorong transmigrasi yang difasilitasi program SDM	Jorong	0	15	17	19	23	23	23	23
4	Unsur pendukung urusan Pemerintahan									
4.01	Unsur Sekretariat daerah									
4.01.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Indeks	-	3,01 (Sangat Tinggi)	3,03 (Sangat Tinggi)	3,04 (Sangat Tinggi)	3,05 (Sangat Tinggi)	3,07 (Sangat Tinggi)	3,09 (Sangat Tinggi)	3,09 (Sangat Tinggi)



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
4.01.2	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan jasa	Indeks	60,50	60,50	70,00	75,00	80,50	85,00	90,00	90,00
4.02	Unsur Sekretariat DPRD									
4.02.1	Persentase Penetapan Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.2	Persentase Pembahasan Dokumen Penganggaran tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
4.02.3	Persentase Layanan Administrasi Sekretariat DPRD terfasilitasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
Unsur penunjang urusan Pemerintahan										
5.01	Unsur Perencanaan									
5.01.1	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Persen	72	80	85	90	95	100	100	100
5.01.2	Persentase capaian IKU daerah	Persen	88,14	100	100	100	100	100	100	100
5.02	Unsur Keuangan									
5.02.1	Opini atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.02.2	Persentase OPD dengan penataan BMD sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
5.02.3	% Realisasi PAD	Persen	96,46	100	100	100	100	100	100	100
5.02.4	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9,64	10,11	10,31	10,51	10,71	10,91	11,00	11,00
5.03	Unsur Kepegawaian									
5.03.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	81,25	83	84	85	86	87	87



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
5.04	Unsur Pendidikan dan Pelatihan									
5.04.01	% Aparatur yang mendapatkan pengembangan karir melalui pendidikan dan pelatihan	Persen	-	2,3	2,8	3,3	3,8	4	4,2	4,2
5.05	Unsur Penelitian dan Pengembangan									
5.05.1	Persentase Implementasi Kelitbangan	Persen	-	80	85	90	95	100	100	100
5.05.2	Kategori capaian <i>Innovative Government Awards</i> (IGA)	Kategori	Sangat Inovatif (skor 60)	Sangat Inovatif (skor 60)	Sangat Inovatif (skor 65)	Sangat Inovatif (skor 70)	Sangat Inovatif (Skor 75)	Terinovatif (skor 102)	Terinovatif (skor 102)	Terinovatif (skor 105)
6.01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
6.01.1	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas	OPD	0	0	0	0	2	4	6	6
6.01.2	OPD dengan nilai SPIP Minimal 3	Persen	0	0	0	10	10	20	20	20
6.01.3	OPD dengan Nilai SAKIP Minimal B	Persen	0	0	0	4	10	20	20	20
6.01.4	Level Kapabilitas APIP	Level	0	0	0	2	3	3	3	3
7.01	Unsur Kewilayahan									
7.01	Kecamatan									
7.01.1	% Capaian PASBAR Mengaji	Persen	-	35	50	65	75	85	90	90
7.01.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	82,59	83,00	84,5	85	85,7	85,8	86	86
8	Urusan Pemerintahan Umum									
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik									
8.01.1	Penurunan konflik SARA Konflik Sosial Ekonomi	Persen	5	5	5	5	5	5	5	5



BAB 8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	
ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	(RP. 000)	8.634	8.800	9.000	9.200	9.350	9.500	9.650	9.650
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	Nilai	B (60,82)	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (75)
3	Opini BPK atas laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Angka Kriminalitas	Per 10.000 pddk	13,95	13	12	11	10	9	8	8
5	Rasio Ketergantungan	Rasio	47,44	47,24	47	46,85	46,70	46,55	46,40	46.40



BAB 9

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, merupakan dokumen yang strategis sebagai acuan pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Penyusunan RPJMD berpedoman kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Pasaman Barat, dan masukan dari beberapa kali konsultasi publik dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program Organisasi Perangkat Daerah serta lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sehubungan dengan itu akan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan secara operasional oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didukung instansi vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, OPD Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
3. Dinas/badan/unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun



2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja (Renja Perangkat Daerah).

 **BUPATI PASAMAN BARAT,**

H. HAMSUARDI

PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TERHADAP PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan																								
		Memenuhi kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Nasional (Persen)	13.4	14.5	15.7	17.9	19.5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
			Indeks Ketahanan Energi (Indeks)	68	68	68.8	69.2	70.3	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
		Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (US\$/m ³)	4	4.4	4.7	5.1	5.4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (Indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)		1	3	3	3	3	3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	90.4	91.6	92.8	94	95.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90.61	90.62	90.65	90.68	90.73	90.73	90.73
			Angka Kecukupan Energi (AKE) (kcal/hari)	2100	2100	2100	2100	2100	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90.61	90.62	90.65	90.68	90.73	90.73	90.73
			Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	57	57	57	57	57	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90.61	90.62	90.65	90.68	90.73	90.73	90.73
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Under nourishment/PoU)	6.2	5.8	5.5	5.2	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90.61	90.62	90.65	90.68	90.73	90.73	90.73

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecurity Experience Scale/FIES)	5.2	4.8	4.5	4.2	4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)				291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75	
									PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)				82.5	83	84	84.5		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	% ketersediaan pangan utama	90.61	90.62	90.65	90.68	90.73	90.73	90.73	
									PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)				22	24	27	28		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	-	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)				83	83.5	84	84.5		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)				6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)				15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
									PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)				39.27	40	40.5	41.6	42.4	44	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragaman olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Petani dan Petugas Pertanian (%)				45	50	55	60		Program Penyuluhan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	
									PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan (%)				20	20	20	20	20	100	Program Penyuluhan Pertanian	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1	1 dan 1
		Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Konservasi kawasan kelautan (Juta ha)	23.4	24.2	25.1	26	26.9	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)				41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)				7	7	7	7	7	7									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)				20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)				250	250	300	350	350	350									
			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (Persen)	<64	<64	<72	<76	780	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase efektivitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil (%)				41.18	47.06	52.94	58.82	64.71	70.59									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi (kawasan)				7	7	7	7	7	7									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (batang)				20,000	20,000	25,000	25,000	25,000	30,000									
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Meningkatnya rehabilitasi ekosistem pesisir (2) (M2)				250	250	300	350	350	350									
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)				3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5,911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275	
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Pemnfaatan Teknologi tepat guna (unit)		5	20	40	60	80	100	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5,911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275	
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Penerapan Pengendalian hama penyakit ikan (kab/kota)		17	17	17	19	19	19	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5,911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275	
								PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi budidaya laut (ton)		52	67	72	79	85	93	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5,911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275	
								PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)		80	82	84	86	90	92	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang berbadan hukum	3 POKMASWAS	3	3	4	4	4	5	
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)		6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)		15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)		39.27	40	40.5	41.6	42.4	44	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	
		Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi	Rasio kewirausahaan nasional (Persen)	3.6	3.7	3.8	3.9	4	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Penilaian Koperasi berkualitas	35	35	40	45	50	55	55
			Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)	61	62	63	64	65	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang menindaklanjuti rekomendasi pengawasan (%)		60	60	63	65	67	69	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usip Koperasi	Jumlah KSP/ USP yang sehat	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP	30 KSP/USP
			Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen)	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi modern (koperasi)		50	50	60	70	80	90	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Kemitraan Usaha Permodalan	2	2.08	2.17	2.25	2.33	2.42	2.5
								PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi (produk)		45	100	120	125	130	615	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	% Pertumbuhan Usaha Mikro	3	3.08	3.17	3.25	3.33	3.42	3.5	
		Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB pertanian (Persen)	3.7	3.7	3.9	4	4.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83.5	84	84.5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 262.510 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, dan 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, dan 2.658 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton 262.510 ton 267.244 ton 264.877 ton 9.449 ton 12.303 ton 2.398 ton	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.462 ton cabai, 12.453 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.453 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.553 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.653 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton alpukat
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0.63	0.6	0.57	0.54	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)
			Kontribusi PDB kemaritiman (Persen)	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)		0.93	0.99	1.07	1.09	1.11	1.17	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106,193	107,254	108,327	109,411	110,505	111,610	112,276
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarana prasaranan penangkapan ikan (unit)		1,400	1,423	1,590	1,739	1,768	1,800	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106,193	107,254	108,327	109,411	110,505	111,610	112,276
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya sarpras UPTD Pelabuhan Perikanan (unit)		3	3	3	3	3	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106,193	107,254	108,327	109,411	110,505	111,610	112,276
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap (dokumen)		100	100	100	100	100	100	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106,193	107,254	108,327	109,411	110,505	111,610	112,276
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Pro duksi Perikanan Tangkap (ton)		220,615	222,693	225,081	227,546	230,081	232,762	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton)	106,193	107,254	108,327	109,411	110,505	111,610	112,276
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)		3.32	3.33	3.39	3.71	3.78	3.97	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton)		256,747	262,256	274,280	284,467	295,226	306,934	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	5.911	5,970	6,030	6,090	6,151	6,213	6,275

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata yang bersertifikat (Orang)			196	296	396	496	596	696	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	% Naiknail unit usaha ekonomi kreatif	13	14	15	16	17	18	20
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif (%)			2	4	6	8	10	12	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	% Naiknail unit usaha ekonomi kreatif	13	14	15	16	17	18	20
			Pertumbuhan investasi (PMTB) (Persen)	5.6	6.2	6.9	7.8	8.4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Regulasi Penanaman Modal (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai investasi PMDN/ PMA	47,88 miliar	Rp. 50 M	Rp. 51 M	Rp. 52 M	Rp. 53 M	Rp. 54 M	55 miliar
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pernyataan Minat (dokumen pernyataan minat)			4	4	4	5	5	23	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah kesepakatan investasi yang dikeluarkan	Tidak ada						3 Mou
									PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN) (Rp (triliun))			4.8	5.1	5.6	6.1	6.7	7.5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Keaiknail Nilai Realisasi PMDN/PMA	-11.16	-8	-4.4	-0.8	2.8	6.4	10
									PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data Berbasis Teknologi Informasi (%)			15	20	40	60	80	100	Program Pengelolaan Data dan Sistem Penanaman Modal	Tersedianya sistem data penanaman modal yang terintegrasi	Tidak ada (0)	Tidak ada (0)	Ada (100)	Ada (100)	Ada (100)	Ada (100)	Ada (100)
			Penyediaan lapangan kerja per tahun (Juta orang)	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	2,7-3,0	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rencana tenaga kerja makro dan rencana tenaga mikro (dokumen)			0	2	1	1	1	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rencana tenaga kerja yang disusun	-	-	2	2	2	2	2
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.72	1.92	2.12	2.32	2.52	2.75	3
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase serapan tenaga kerja (%)			31.77	35.52	36.01	36.5	36.99	37.97	Program Penempatan Tenaga Kerja	% Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	13.79	15.79	17.19	19.79	21.79	25	25
			Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (Persen)	3,0-3,3	3,1-3,5	3,2-3,7	3,2-4,0	3,5-4,5	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)			28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.72	1.92	2.12	2.32	2.52	2.75	3
			Kontribusi tenaga kerja industri (Persen)	14.2	14.6	15	15.2	15.7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)				20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Tidak ada	1	1	1	2	2	2
			Jumlah tenaga kerja industri (Juta orang)	19.7	20.3	20.9	21.4	22	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan (Sentra)				20	20	25	25		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Industri berbasis Komoditi (Sentra)	Tidak ada	1	1	1	2	2	2
			Jumlah tenaga kerja pariwisata (Juta orang)	13	13.5	14	14.5	15	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)			4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1 DTW	2	3	4	5	5
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)			11	19	19	19	19	19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1 DTW	2	3	4	5	5
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)			1	2.5	4	5.5	7	8.5	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981. 035	25.500 orang dan Rp.985.184. 828	32750 org dan Rp.1.026.38 8.621	41.600 orang dan Rp.1.067.59 2.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.79 6.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.00 0
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)			1.5	3	4.5	6	7.5	9	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981. 035	25.500 orang dan Rp.985.184. 828	32750 org dan Rp.1.026.38 8.621	41.600 orang dan Rp.1.067.59 2.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.79 6.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.00 0
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)			3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981. 035	25.500 orang dan Rp.985.184. 828	32750 org dan Rp.1.026.38 8.621	41.600 orang dan Rp.1.067.59 2.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.79 6.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.00 0

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat)	N.A.	34-39	N.A.	29-34	N.A.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah intervensi pada destinasi internasional kawasan gunung talang (kali)		4	6	10	12	15	17	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1 DTW	2	3	4	5	5 DTW
									PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Peningkatan jumlah DTW Unggulan Provinsi yang diintervensi pengembangannya (DTW)		11	19	19	19	19	19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan kapasitas destinasi wisata (destinasi utama)/ jumlah DTW yang ditingkatkan kualitasnya	1 DTW	1 DTW	2	3	4	5	5 DTW
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		1	2.5	4	5.5	7	8.5	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981.035	25.500 orang dan Rp.985.184.828	32750 org dan Rp.1.026.388.621	41.600 orang dan Rp.1.067.592.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.796.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)		1.5	3	4.5	6	7.5	9	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981.035	25.500 orang dan Rp.985.184.828	32750 org dan Rp.1.026.388.621	41.600 orang dan Rp.1.067.592.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.796.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisman (hari)		3.19	3.21	3.23	3.25	3.27	3.29	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981.035	25.500 orang dan Rp.985.184.828	32750 org dan Rp.1.026.388.621	41.600 orang dan Rp.1.067.592.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.796.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000
									PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisnus (hari)		1.58	1.64	1.7	1.76	1.82	1.88	Program Pemasaran Pariwisata	1. Jumlah kenaikan kunjungan wisatawan 2. PAD Sektor Pariwisata	18.120 orang dan Rp. 902.777.242	20.250 org dan Rp.943.981.035	25.500 orang dan Rp.985.184.828	32750 org dan Rp.1.026.388.621	41.600 orang dan Rp.1.067.592.414	45.750 orang dan+ Rp.1.108.796.207	51.500 wisatawan dan Rp 1.150.000.000
2		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan																								
		Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton 149.315 ton 264.877 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.553 ton jeruk, 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.653 ton jeruk, 2.958 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.753 ton jeruk, 3.358 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.853 ton jeruk, 3.858 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.953 ton jeruk, 3.958 ton alpukat

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijaun Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 262.510 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.658 ton alpukat
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)				5	5	5	5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)		20	20	20	20	20	100	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT
		Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang	0			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Kemantapan Jalan (%)		73.92	75	77	79	81	82	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	56.66	57.86	61.06	63.26	65.46	67.66	70
		Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif	0			0																				
		Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah	0			0			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85	90	90
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85	90	90
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)		2	10	10	10	12	12	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85	90	90
		Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.	0			0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SNP 4	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	78.41	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.9	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	0	100	100	100	100	100	100
																		Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Gangguan Trantibum yang dapat ditindaklanjuti (%)		77	79	81	83	85	87	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	77	80	84	87	93	96	100
								PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)		75	77	79	81	83	85	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	77	80	84	87	93	96	100
								PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	63.53	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM	94.38	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM	94.38	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT											
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target									
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)				100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (%)				100	100	100	100	100	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota (SPM)	100	100	100	100	100			
3		Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saling																										
		Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan	0			0			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) (%)		26.66	40	50	60	70	80	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA	98,01 94.12 25	100 100 30	100 100 35	100 100 40	100 100 45	100 100 50	100 100 60		
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)		97.16	97.75	98	98.25	98.5	99	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA	98,01 94.12 25	100 100 30	100 100 35	100 100 40	100 100 45	100 100 50	100 100 60		
									PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun (%)		91.47	94	95	96	97	98	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	95,88 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100		
									PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	95,88 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100		
									PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	95,88 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100		

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	95,88 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan inovasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyajian data (inovasi)			3	6	9	12	15	18	Program pengelolaan informasi kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	3	5	10	15	20	25	30
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase penurunan data kependudukan yang bermasalah (%)			1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1	Program pengelolaan informasi kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	3	5	10	15	20	25	30
									PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun (dokumen)			3	3	3	3	3	3	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun	2 buku/ tahun
									PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase permasalahan pengendalian penduduk yang dibuatkan kebijakannya (%)			80	80	85	90	90	90	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3.05	3
									PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)			54.44	55.12	55.46	55.89	56.32	56.75	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)	65.98	66	66.35	66.5	66.75	67	68
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	53.31	60	63	65	70	72	75
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	78.7		0		98	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 1 LKS 1 LKS 12 KT
			Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	65.2		0		80	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 1 LKS 1 LKS 12 KT
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial/Pengangkatan Anak (orang)				25	25	25	25	25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	50	65	75	85	95	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Tersedianya Data Fakir Miskin yang valid (%)				100	100	100	100	100	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	50	65	75	85	95	100
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Anggota Forum jejaring filantropi daerah yang aktif (persen)				30	35	40	50		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	50	65	75	85	95	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	230	217	205	194	183	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	20.6	19.5	18.6	17.6	16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT																
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target														
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90		92		94		96		98		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	12.9	12.2	11.6	11	10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
			Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	61.8	62.2	62.5	62.9	63.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)								
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.6	8.3	8	7.7	7.4	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)								
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	25	24	21	20	18	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi KB (%)								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi modern/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (CPR Modern)								
									PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)								
			Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	24.1	21.1	18.4	16	14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan								

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT													
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target											
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100		
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90		92		94		96		98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)					8		11		14		17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat (kabupaten/kota)					8		11		14		17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)					8		11		14		17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	78.41	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)		81	83	85	87	88	90	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.9	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0.15	0.15	0.41	0.59	0.78	0.95	0.95
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)			100	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94.38	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan pangan (beras) (Kg/Kap/Tahun)			291.79	292.98	294.15	295.31		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
								PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat (%)			82.5	83	84	84.5		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	90.6	90.61	90.63	90.66	90.69	90.72	90.75
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan (%)			22	24	27	28		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase program Penanganan Kerawanan Pangan	-	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan pangan masyarakat (%)			83	83.5	84	84.5		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	-	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Dasawisma Mandiri (Dasawisma)		10,800	11,300	11,800	12,300	12,800	13,300	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. % Lembaga Sosial Aktif di Nagari 2. % Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari 3. % Lembaga Adat Aktif di Nagari	100 63.33 10.52	100 63.33 50.52	100 65 75	100 70 85	100 70 90	100 73 95	100 75 100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah KAN yang aktif (lembaga adat)			299	350	400	450	500	544	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) , Kearifan Loka dan Hak MHA yang Terkait PPLH	Penetapan hak MHA, terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	0	0	3	5	7	9	13
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah LPM Mandiri (LPM)			0	7	15	25	37	50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. % Lembaga Sosial Aktif di Nagari 2. % Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari 3. % Lembaga Adat Aktif di Nagari	100 63,33 10,52	100 63,33 50,52	100 65 75	100 70 85	100 70 90	100 73 95	100 75 100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Posyandu Mandiri (Posyandu)			2,319	2,400	2,500	2,600	2,700	2,800	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1. % Lembaga Sosial Aktif di Nagari 2. % Lembaga Ekonomi Aktif di Nagari 3. % Lembaga Adat Aktif di Nagari	100 63,33 10,52	100 63,33 50,52	100 65 75	100 70 85	100 70 90	100 73 95	100 75 100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks pembangunan keluarga (indeks)			51.74	59.3	61.38	63.46	65.54	67.62	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB)	53.31	60	63	65	70	72	75
								PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)			5	10	20	30	40	50	Program Informasi dan Komunikasi Publik	% publikasi informasi pembangunan daerah pada PPID	50	75	80	85	90	95	100
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan (%)			6.3	6.49	7.26	7.95	8.05	11	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi olahan hasil perikanan (ton)			15,633	16,652	17,861	19,280	20,832	22,742	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan (Kg/kap/th)			39.27	40	40.5	41.6	42.4	44	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jenis keaneka ragam olahan hasil perikanan	2 jenis	2 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	5 jenis
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)				5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 264.877 ton jagung 262.510 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.462 ton cabe, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung 9.462 ton cabe, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung 9.477 ton cabe, 12.553 ton jeruk, 2.658 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung 9.502 ton cabe, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung 9.527 ton cabe, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung 9.552 ton cabe, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijaun Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 262.510 ton jagung 9.449 ton 12.353 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung, 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung, 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung, 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung, 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung, 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)				0.63	0.6	0.57	0.54	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	
									PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)				4	8	12	16	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	-	100	100	100	100	100	100	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, RKPD Provinsi dengan Renja SKPD provinsi dan RPJMD provinsi dengan RKPD provinsi (%)				100	100	100	100	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	72.34	75	80	85	90	95	100	
			Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (persen)	8.1	7.8	7.5	7.3	7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT																				
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																		
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026											
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kopeseretan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0.21	0.21	0.19	0.19	0.18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan penokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272	252	231	211	190	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT																
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target														
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026							
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90		92		94		96		98		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	325	345	365	385	405	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90		92		94		96		98		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9		8.9		8.8		8.7		8.6		8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6		100		100		100
			Insidensi hepatitis B (persen)	1.68	1.54	1.39	1.24	1.09	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4		4		6		6		8		8		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17		17		18		18		18		19		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4		35		37		38		39		40		100		100		100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	9.1	9	8.9	8.8	8.7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT								
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
			Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun (persen)	21.8	21.8	21.8	21.8	21.8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan penyakit usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)		78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	
			Persentase tekanan darah tinggi	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)				8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75
			Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi	65	70	80	90	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)		73.8	74.8	76	78	80	82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)		81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)		252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)		91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)		2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)		4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)		17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)		34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)		90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan penyakit usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)		9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT															
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target													
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6		79.6		81		83		85		87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53		86.84		88.16		89.47		90.79		92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100		100		100		100		100		100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1		18.44		15.43		14		12.5		10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
			Persentase rumah sakit terakreditasi	80	85	90	95	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85		86		87		88		89		90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81		82		83		84		85		86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252		231		211		190		190		190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2		2		2		2		2		2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan penokok usia 10- 18 tahun (Kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)			85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)			21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Nilai rata-rata hasil PISA: 1. Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,1; 2. 388,7; 3. 400,4	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 399,7; 2. 392,3; 3. 406,2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
			Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA (Persen): 1.Membaca, 2. Matematika, 3. Sains	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 34,4; 2. 46,6; 3. 49	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. NA; 2. NA; 3. NA	1. 35,6; 2. 47,4; 3. 51	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	8.75	8.85	8.95	9.06	9.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	RPJMD PROVINSI						RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target							Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
			Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas(Tahun)	13.41	13.6	13.79	13.97	14.16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan (dokumen)		27	33	39	45	51	57	Program Pengembangan Kurikulum	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	100	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan (%)		69.07	71.07	74.07	77.07	80	83.02	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SNP 4	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5	SNP5
									PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi (%)		6	21	36	51	66	81	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	% satuan pendidikan yang memiliki kurikulum muatan lokal (SD/SMP dan PAUD dan Pendidikan Nonformal)	100	100	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66.34	68.1	69.87	71.66	73.49	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	500	550	600	650	700	750	≥ 800	
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83.5	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Khusus Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	
			Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7; Perempua n: 62 (Baseline 2018)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten/Kota menuju KLA (minimal predikat Nindya) (Kabupaten/Kota)		2	3	4	5	6	7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Total score pemenuhan hak anak (Klaster 1-5)	500	550	600	650	700	750	≥ 800	
									PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif (%)		83.5	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Khusus Anak	% Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91.21165	91.27794	91.27896	91.3347	91.38627	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4.63	4.63	4.65	4.67	8	9	12	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.24481	73.5005	73.74052	73.96592	74.17748	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4.63	4.63	4.65	4.67	8	9	12	
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.512	53.134	53.756	54.378	55	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perempuan di pengambil kebijakan (%)		11.54	11.54	13.2	13.2	15.09	15.09	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4.63	4.63	4.65	4.67	8	9	12	
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir	Menurun dari 9,4 (Baseline 2016)	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)		84	84	88	92	96	100	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	0,7	0,58	0,47	0,35	0,23	0,12	0	
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga (indeks)		69,5	70	70,5	71	71,5	72	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	TPAK Perempuan	45,46	45,5	45,55	45,6	45,65	45,7	45,75	

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	55.33	56.5	56.5	58.17	57.67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi Pemuda yang memiliki kontribusi aktif dalam pembangunan (%)			14	15	16	17	18	20	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) + Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	0,102 dan 3,96	1 dan 4	2 dan 8	3 dan 10	4 dan 12	5 dan 15	6 dan 17
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah wirasusaha muda baru (orang)			230	268	348	348	348	1890	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%) + Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (%)	0,102 dan 3,96	1 dan 4	2 dan 8	3 dan 10	4 dan 12	5 dan 15	6 dan 17
		Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan)	27.9		0		40	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 1 LKS 12 KT
			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha	25.6		0		50	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Indeks Partisipasi Sosial (IKU) (nilai)				0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	Program Pemberdayaan Sosial	LKS Anak Binaan LKS Lanjut Usia Binaan LKS Penyandang Disabilitas Binaan Karang taruna aktif yang dibina	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 0 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 0 1 LKS 12 KT	12 LKS 1 LKS 12 KT
			Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dan dilepaskan untuk TORA (Ha)	630000	1600000	1850000	1350000	1100000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan (indeks)		61.41	60.98	60.55	60.12	59.69	59.26										
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)		20	20	20	20	20	20										
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (hektar)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000										
		Bidang tanah yang didistribusi		750000		0		7750000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase luas penetapan redistribusi tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee yang dapat ditindaklanjuti (%)		65	70	75	80	85	90	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan	Jumlah Fasilitas Ganti Rugi Tanah	0	5	7	9	12	15	15	
		Bidang tanah yang dilegalisasi		6286087		0		56286087	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Penyelesaian izin lokasi (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)		75	80	85	90	95	95										
									PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas rencana penggunaan tanah yang dapat dijadikan acuan (%)		50	55	60	70	75	80										
		Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	44.8	46.6	48.4	50.2	52.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMA (%)		50.88	52.38	53.88	55.38	56.88	58.38	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SMK (%)		31.27	32.27	34.27	34.27	37.27	37.27	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SLB (%)		52.87	53.8	54.72	54.72	56.57	56.57	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	99	100	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.72	1.92	2.12	2.32	2.52	2.75	3	

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class University : 1. Top 200, 2. Top 300, 3. Top 500	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 0; 2. 1; 3. 2.	1. 1; 2. 2; 3. 3.																		
			Proporsi pekerja berkeahlian menengah dan tinggi (%)	43	45	47	48	50	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten (%)		28.62	31.4	35.72	36.04	36.34	36.68	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	% Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	1.72	1.92	2.12	2.32	2.52	2.75	3
4		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan																								
		Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Idiologi (nilai)		2.7	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	% siswa SMP dan SMA yang mendapatkan pematapan ideologi	0	3	5	7	10	15	20
		Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Karya Budaya yang Dilestarikan (Karya Budaya)			8	8	8	8		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%)	58	63	68	73	78	83	88
									PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan (Kesenian Tradisional)			21	23	23	23		Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan lembaga adat, seni dan budaya yang dibina (%)	58	63	68	73	78	83	88
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan (Cagar Budaya)			11	16	21	26		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	% Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58	63	68	70	72	75	75
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah warisan budaya benda yang ditetapkan (Cagar Budaya)			15	15	15	15		Program pembinaan sejarah	Sejarah lokal yang terdokumentasi	0	1	2	3	5	8	10
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah aktivitas masyarakat di museum (kali)			15	15	15	15										
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum (orang)			30000	35000	40000	45000										
		Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Indeks Kerukunan Umat Beragama			0			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual (dokumen)			4	8	12	16		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	-	100	100	100	100	100	100
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	0			0			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun (dokumen)		N/A	3	6	9	12	15									
									PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah (Orang)		N/A	6	12	18	24	30									
									PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan tingkat Provinsi dan Satuan Pendidikan tk. Provinsi sesuai SNP (%)			1.41	1.52	1.62	1.72		Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	29,100	29,900	30,731	30,737	30,746	30,752	30,758
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dan pengkajian (%)		42.85	50	50	62.5	62.5	62.5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85	90	90
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase SKPD yang terinovatif (%)		20	30	30	40	40	50	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelibangan yang ditindaklanjuti	-	70	75	80	85	90	90

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT																						
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target																				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026													
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Produk rekayasa dan inovasi teknologi yang dihasilkan dan diujicobakan (jumlah)			2		10		10		10		12		12		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitaban yang ditindaklanjuti	-		70		75		80		85		90		90
5		Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar																																					
		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	92.84	93.44	94	94.63	95	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0		3		3		3		3		3		Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-		100		100		100		100		100		100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	82.35	83.5	84.8	86	87	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)			0		3		3		3		3		3			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100		100		100		100		100		100	
			Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	55.46	56.85	58.23	59.62	60	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah (%)			75		80		85		90		95		95																
			Rasio outstanding KPR terhadap PDB (%)	3.05	3.1	3.3	3.6	4																															
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%)	78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman)	79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman)	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)	86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman)	90% akses layak (termasuk 15% akses aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan air limbah regional (%)			81		83		85		87		88		90		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	71.9		100		100		100		100		100		100
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1		20		20		20		20		20		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0.15		0.15		0.41		0.59		0.78		0.95		0.95
			Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (%)	5.95	4.46	2.98	1.49	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)					8		11		14		17		19		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5		70		70		75		75		75		75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat (kabupaten/kota)					8		11		14		17		19		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5		70		70		75		75		75		75
									PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)					8		11		14		17		19		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5		70		70		75		75		75		75
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik (%)	72.92% penangan n; 3.70% pengurang an	73.70% penangan n; 5.51% pengurang an	75.28% penangan n; 9.13% pengurang an	77.64% penangan n; 14.57% pengurang an	80% penangan n; 20% pengurang an	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pemukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)			1		20		20		20		20		20		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0.15		0.15		0.41		0.59		0.78		0.95		0.95
									PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (%)			75		75		75		75		75		75		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	92,86 (13/14 x 100)		93		93		93		95		95		100
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	91.8% (JP: 23.6% BJP: 68.2%)	93.8% (JP: 25.4% BJP: 68.4%)	95.9% (JP: 27.1% BJP: 68.7%)	97.9% (JP: 28.9% BJP: 69.0%)	100% (JP: 30.4% BJP: 69.5%)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4) (%)			73.8		74.8		76		78		80		82		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100		100
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91		92		93		94		95		96		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36		100		100		100		100		100		100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			85	86	87	88	89	90	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Akreditasi Rumah Sakit (%)			81	82	83	84	85	86	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			92	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) (Per 100.000)			252	231	211	190	190	190	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (%)			91	92	93	94	95	96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah daerah terpencil yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) (daerah)			2	2	2	2	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota sehat kategori WISTARA (kabupaten/kota)			4	4	6	6	8	8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)			17	17	18	18	18	19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah (%)			34.4	35	37	38	39	40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial (%)			90	92	94	96	98	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun (kabupaten/kota)			9	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar (%)			78.6	79.6	81	83	85	87	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pencapaian standar sarana pelayanan kesehatan (%)			100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah sakit yang direkomendasikan untuk penilaian akreditasi (%)		85.53	86.84	88.16	89.47	90.79	92.11	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi (%)		100	100	100	100	100	100	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (persen) (%)		21.1	18.44	15.43	14	12.5	10.6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	% Pencapaian SPM Bidang Kesehatan	40.36	100	100	100	100	100	100	100	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	75	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gemas hidup sehat (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	75	
								PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah kabupaten kota yang melaksanakan pembinaan UKBM (kabupaten/kota)			8	11	14	17	19	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	54.5	70	70	75	75	75	75	75	
								PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Permukiman Yag Ditingkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (%)		1	20	20	20	20	20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	0.15	0.15	0.41	0.59	0.78	0.95	0.95	0.95	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	7.3	8.4	10	12.2	15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum (%)		82	82	84	86	88	90	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum (SPM)	78.41	100	100	100	100	100	100	100
								PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program (%)		0	3	3	3	3	3	Program Pengembangan Perumahan	Rasio penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	-	100	100	100	100	100	100	100	
																		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	100	100	100	100	100	
			Volume tampungan air per kapita (m3/kapita)	52.5019	55.18146	57.06	58.10498	58.49863	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65	
			Jumlah Daerah Irigasi yang dimodernisasi	1	2	3	2	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65	
			Luas lahan pertanian padi dan non padi yang beririgasi meningkat (Hektare)	45229.17	115942.7	116142.7	116342.7	116342.7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	89.65

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65	
			Provinsi dengan penurunan risiko bencana di wilayah risiko bencana	20	20	20	20	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	63.53	100	100	100	100	100	100
			Penyediaan air baku untuk kebutuhan air minum, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	4.27	11.4325	11.4325	11.4325	11.4325	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase volume tampungan sumber-sumber air (%)		52.28	53.78	55.28	56.78	58.28	59.78	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi (%)		68.8	70.36	71.92	73.48	75.04	76.6	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)		64.75	66.51	68.27	70.03	71.79	73.5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	78.85	80	82.45	84.25	86.05	87.85	89.65
									PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Fasilitasi kawasan hutan yang dikonservasi (lokasi)		1	10	10	10	10	10									
			Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)	53	55	57	60	65	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	25	35	40	45	50	50	60
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lahulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	25	35	40	45	50	50	60
		Infrastruktur Ekonomi	Panjang jalan tol baru yang beroperasi dalam 5 tahun (2.500 km)			0			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Luas Penetapan Lokasi Pembangunan Yang Dapat Dilanjutkan ke tahap Pelaksanaan (%)		80	85	90	95	95	95									
			Jumlah pelabuhan utama (hub) yang memenuhi standar (7 pelabuhan)			0																				
			Kinerja tepat waktu (on time performance) penerbangan (90%)			0																				
			Panjang jaringan KA yang beroperasi (7.635 km's)			0			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Tersusunnya Kebijakan penetapan Jaringan jalur KA yang merupakan kewenangan provinsi (dokumen)		1	1	1	1	1	5									
		Infrastruktur Perkotaan	Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Kota)			0			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B yang terbangun (%)		20	20	40	60	80	100	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	25	35	40	45	50	50	60
									PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penurunan Rasio Angka Kecelakaan Lahulintas (%)		1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	25	35	40	45	50	50	60
		Energi Dan Ketenagalistrikan	Rasio elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
			Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh)	1142	1203	1268	1336	1408	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)		99.3	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9									
			Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	4.71	4.92	5.36	5.91	6.07	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
		Transformasi Digital	Persentase pertumbuhan sektor TIK (rata-rata)	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE (Skala 1-5) (indeks)		3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	Program Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100	100	100	100	100

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase pengguna internet (Persentase)	72.6	74.2	79.2	80.7	82.3																		
			Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G) Existing Q2 2019 : 97,59%	97.5	98	98.5	99	100																		
			Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (Persentase)	70	72	73	74	75.7																		
6		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim																								
		Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84.1	84.2	84.3	84.4	84.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	42,55 dan 93,87	42,65 dan 93,88	42,75 dan 93,89	42,85 dan 93,90	42,95 dan 93,91
			Indeks Kualitas Air (IKA)	55.1	55.2	55.3	55.4	55.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	42,55 dan 93,87	42,65 dan 93,88	42,75 dan 93,89	42,85 dan 93,90	42,95 dan 93,91
			Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	58.5	59	59.5	60	60.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	42,55 dan 93,87	42,65 dan 93,88	42,75 dan 93,89	42,85 dan 93,90	42,95 dan 93,91
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	61.6	62.5	63.5	64.5	65.5	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase cakupan objek pencemar dan perusak lingkungan yang dikendalikan (%)		60	60	65	70	75	80	Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air dan Udara	42,50 dan 93,86	42,53 dan 93,86	42,55 dan 93,87	42,65 dan 93,88	42,75 dan 93,89	42,85 dan 93,90	42,95 dan 93,91
									PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah kab/kota yang telah terdata potensi dan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya (Kabupaten/Kota)		19	19	19	19	19	19	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	46.68	46.68	46.69	46.7	46.71	46.72	46.73
		Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																		
			Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen)	0.34	0.59	0.81	1	1.15																		
			Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4.5	4	3.5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana (%)		70	71	72	73	74	75	Program Penanggulangan Bencana	Capaian SPM Bidang Kebencanaan	63.53	100	100	100	100	100	100
		Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	11.8	12.5	12.8	12.8	13.2	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi (%)		28	29	33.3	35.7	51.7	51.8									
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	45.8	50.7	53.1	57.2	58.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan sarana TPHP (%)			5	5	5	5		Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 264.877 ton jagung 262.510 ton jagung 9.449 ton cabai, 12.353 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, dan 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, 2.658 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT										
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target								
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Daging (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan temak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)	25 10 2787.800 ton 147.471 ton padi, 264.877 ton jagung 262.510 ton jagung 9.449 ton cabe, 12.303 ton jeruk, 2.398 ton alpukat	26 15 149.315 ton padi, 264.877 ton jagung 9.454 cabai, 12.353 ton jeruk, 2.408 ton alpukat	27 20 151.159 ton padi, 267.244 ton jagung 9.462 ton cabai, 12.453 ton jeruk, 2.458 ton alpukat	28 25 153.003 ton padi, 269.611 ton jagung 9.477 ton cabai, 12.553 ton jeruk, 2.658 ton alpukat	29 30 154.847 ton beras, 271.978 ton jagung 9.502 ton cabai, 12.653 ton jeruk, dan 2.958 ton alpukat	30 40 156.691 ton beras, 274.345 ton jagung 9.527 ton cabai, 12.753 ton jeruk, dan 3.358 ton alpukat	31 45 158.535 ton beras, 276.713 ton jagung 9.552 ton cabai, 12.853 ton jeruk, dan 3.858 ton alpukat	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana TPHP (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	
									PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Prasarana Peternakan (%)								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	69 km (Disbun), 5 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 7 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 8 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	69 km (Disbun), 10 km, 15 unit, 20 km, 11 unit, 7 unit, 1 unit, 1 unit, 1 unit BBTPH, 1 unit BPTHPT	
									PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Memular Strategis (%)								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	% penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan memular	50	85	85	85	85	85	85	
									PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase menurunnya luas serangan hama penyakit tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (%)								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	10% (perkebunan) 10% (pertanian) 8% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	20% (perkebunan) 20% (pertanian) 9% (peternakan)	30% (perkebunan) 30% (pertanian) 10% (peternakan)	
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan klasifikasi kelas kebun usaha pertanian (%)								Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	15	-	36.67	47.5	58.33	69.17	80	
									PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian (%)								Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	15	-	36.67	47.5	58.33	69.17	80	
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Turupan Hutan (indeks)																	
									PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (unit)																	
									PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi (Daerah Aliran Sungai)																	
			Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8.5	9	9.3	9.4	9.4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Terlaksananya pembangunan TPA Regional (lokasi)								Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	3	3	4	4	5	5	5	

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT												
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target										
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
									PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang menciptakan Inovasi Pelayanan Publik (Perangkat Daerah)			5	7	9	11	13	15											
									PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang memperoleh hasil Evaluasi SPI memadai (%)			65	70	75	80	85	90											
			Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas	30	35	45	55	70											Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang dapat dilakukan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	10 OPD	10	10	20	20	30	30		
																			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan RKPD) dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	93.94	94,5	96	97	98	99	100		
																			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase OPD dengan nilai dokumen perencanaan minimal baik	72.34	75	80	85	90	95	100		
																			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama dan Otonomi Daerah	-	100	100	100	100	100	100		
																			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pegawai)	0.8125	83	84	85	86	87	87		
																			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83	84.5	85	85.7	86	86		
		Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0.26	0.25	0.24	0.22	0.2																					
			Global Terrorism Index	4.44	4.39	4.34	4.29	4.24	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun		
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100			
			Proporsi orang yang merasa aman berjalan sendiri	>55%	>55%	>55%	>60%	>60%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun		
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100			
			Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	3.1	3.2	3.2	3.3	3.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya (nilai)		3.09	3.1	3.11	3.12	3.13	3.14	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan, Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penurunan Kasus Konflik	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun	5% per tahun		
																			Program Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi trantibum yang difasilitasi	-	-	100	100	100	100	100		

No	KODE (PN/PP)	PRIORITAS NASIONAL	INDIKATOR	RPJMN TAHUN 2020-2024					RPJMD PROVINSI								RPJMD KABUPATEN PASAMAN BARAT									
				Target					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target						BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Target							
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024	2025			2026	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
																	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100	100	100	
																	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	77	80	84	87	93	96	100	
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (nilai)		3	3.01	3.02	3.03	3.04	3.05	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik	Persentase konflik yang diangani	100	100	100	100	100	100	100



© 2021

BAPPEDA KABUPATEN PASAMAN BARAT